



BerAKHLAK **#** bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RANCANGAN AKHIR

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BANGGAI

TAHUN 2025–2029





BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Daerah adalah Kabupaten Banggai
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Banggai.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta Program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada:

- a. RPJPD;
- b. RTRW; dan
- c. RPJMN.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD; dan
- b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

BAB II

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

- (1) Dokumen RPJMD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Daerah;
 - c. Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. Penutup.
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD sesuai tahapan lima tahun kedua yaitu tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 143) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal ...
BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MOH. RAMLI TONGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: ...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025-2029

I. PENJELASAN UMUM

Perencanaan pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan Pembangunan nasional. Sistem ini mencakup arah, tujuan, kebijakan, sasaran, dan prioritas sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam RPJPN kemudian dituangkan ke dalam RPJMN. RPJMN bertujuan memberikan Gambaran tentang wujud masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Selanjutnya, RPJMN diterjemahkan menjadi rencana operasional tahunan yang konkret, spesifik, dan terukur.

Selain mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh masyarakat, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberikan arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada tata cara evaluasi dan mekanisme perubahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah untuk kurun waktu lima tahun. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat:

- a. Arah kebijakan keuangan daerah;
- b. Strategi pembangunan daerah;
- c. Kebijakan umum Pembangunan;
- d. Program pembangunan daerah;

- e. Program kewilayahan; serta
- f. Rencana kerja yang dilengkapi dengan kerangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam Penyusunan Renstra perangkat daerah, penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran, serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Melalui RPJMD, pemerintah daerah memiliki arah yang jelas untuk merealisasikan tujuan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR ...

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Periode 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen ini akan menjadi pedoman strategis dalam pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Visi pembangunan daerah yang menjadi dasar penyusunan RPJMD ini adalah: “Bergerak Bersama Berkelanjutan Menuju Gerbang Timur Sulawesi Tengah (GERBANG: GERakan BANGgai Terdepan, Inovatif, MajU dan sejahteRa)”. Visi ini mencerminkan semangat kolaborasi, keberlanjutan, inovasi, serta komitmen kuat untuk menjadikan Kabupaten Banggai sebagai wilayah yang strategis, unggul, dan berdaya saing di kawasan timur Sulawesi Tengah. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMD ini tidak hanya menetapkan arah pembangunan, tetapi juga menyajikan strategi, kebijakan, sasaran, indikator kinerja, serta proyeksi pembiayaan pembangunan secara menyeluruh dan terukur. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif melalui berbagai forum konsultasi publik, koordinasi antarperangkat daerah, dan penyelarasan lintas sektor agar dapat menjawab tantangan pembangunan masa kini dan masa depan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari unsur legislatif, jajaran perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Banggai.

Harapan kami, dokumen RPJMD ini dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Banggai secara merata. Semoga sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dapat mengantarkan Kabupaten Banggai menjadi daerah yang lebih maju, inovatif, dan sejahtera. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban tugas membangun Kabupaten Banggai tercinta.

Luwuk, ... November 2025

BUPATI BANGGAI

Ir. H. AMIRUDIN, M.M

Daftar Isi

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-8
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.4.1. Maksud.....	I-9
1.4.2. Tujuan.....	I-9
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-10
BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH.....	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-56
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-81
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum.....	II-92
2.1.5. Standar Pelayanan Minimal.....	II-133
2.2. Gambaran Keuangan Daerah.....	II-126
2.2.1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020- 2024.....	II-127
2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030.....	II-153
2.2.3. Analisis Kerangka Pendanaan.....	II-162

	Hal.
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis.....	II-168
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-169
2.3.2. Isu Strategis Daerah.....	II-204
BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS	
PEMBANGUNAN DAERAH.....	III-1
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029.....	III-4
3.1.1. Visi dan Misi.....	III-4
3.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	III-22
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-41
3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....	III-52
3.2.2. Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....	III-100
BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah.....	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	IV-59
4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	IV-60
4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	IV-65
BAB V : PENUTUP.....	V-1

Daftar Tabel

			Hal.
Tabel	2.1	Kondisi Topografi Kemiringan Lereng di Kabupaten Banggai.....	II-4
Tabel	2.2	Nama dan Tinggi Gunung di Kabupaten Banggai.....	II-5
Tabel	2.3	Luas Lahan Menurut Jenis Tanah di Kabupaten Banggai....	II-7
Tabel	2.4	Nama, Panjang Sungai, Wilayah dilalui dan Luas Daerah Aliran Kabupaten Banggai.....	II-8
Tabel	2.5	Keadaan Curah Hujan, Kelembaban Udara, Suhu dan Kecepatan Angin pada Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Luwuk Menurut Bulan Tahun 2024.....	II-10
Tabel	2.6	Produksi Tanaman Pertanian (Ton) di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-14
Tabel	2.7	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-15
Tabel	2.8	Potensi Ketersediaan Pangan Kabupaten Banggai.....	II-23
Tabel	2.9	Rekapitulasi Dinamika Lingkungan di Kabupaten Banggai Terkait Perbandingan Status Daya Dukung Lingkungan Penyedia Pangan Pada Tahun 2025 dan Tahun 2029.....	II-32
Tabel	2.10	Potensi Ketersediaan Air di Kabupaten Banggai yang Bersumber Dari 71 DAS di Kabupaten Banggai.....	II-33
Tabel	2.11	Rekapitulasi Dinamika Lingkungan di Kabupaten Banggai Terkait Perbandingan Status Daya Dukung Lingkungan Penyedia Air Pada Tahun 2025 dan Tahun 2029.....	II-42
Tabel	2.12	Data Pembangkit EBT Eksisting Kabupaten Banggai.....	II-44
Tabel	2.13	Komponen Pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021-2024.....	II-47
Tabel	2.14	Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024.....	II-57
Tabel	2.15	PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024.....	II-59
Tabel	2.16	PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024.....	II-60
Tabel	2.17	PDRB Perkapita Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-61

			Hal.
Tabel	2.18	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Banggai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024.....	II-63
Tabel	2.19	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-71
Tabel	2.20	Peta Universal Coverage Jamsostek Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sampai Tahun 2025.....	II-78
Tabel	2.21	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-85
Tabel	2.22	Status Perkembangan Desa di Kabupaten Banggai Tahun 2024.....	II-90
Tabel	2.23	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-92
Tabel	2.24	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-93
Tabel	2.25	Indeks SPBE Kabupaten Banggai Tahun 2022-2024.....	II-93
Tabel	2.26	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-97
Tabel	2.27	Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024.....	II-121
Tabel	2.28	Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024.....	II-122
Tabel	2.29	Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.....	II-123
Tabel	2.30	Realisasi SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024.....	II-124
Tabel	2.31	Realisasi SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 Kategori Indeks Pencapaian SPM Trantibumlinmas.....	II-124
Tabel	2.32	Realisasi SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024.....	II-125
Tabel	2.33	Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....	II-125
Tabel	2.34	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	II-130
Tabel	2.35	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024.....	II-132
Tabel	2.36	Pertumbuhan Realisasi Masing-Masing Unsur Pendapatan (%) Tahun 2021-2024.....	II-134
Tabel	2.37	Pertumbuhan Masing-Masing Unsur PAD Tahun 2020-2024.....	II-136

			Hal.
Tabel	2.38	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-138
Tabel	2.39	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024 (Rupiah).....	II-144
Tabel	2.40	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Banggai.....	II-146
Tabel	2.41	Proyeksi APBD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	II-155
Tabel	2.42	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2026-2030.....	II-159
Tabel	2.43	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2026-2030.....	II-163
Tabel	2.44	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2026-2030.....	II-167
Tabel	2.45	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-171
Tabel	2.46	Isu Strategis Wilayah Sulawesi.....	II-225
Tabel	2.47	Isu Strategis Regional Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara Berbasis Sumber Daya Alam.....	II-226
Tabel	2.48	Isu Strategis Regional Pengembang Ekonomi Lokal dan Perlindungan Lingkungan.....	II-227
Tabel	2.49	Keselarasan Antara Program Prioritas dengan Implementasi Program dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.....	II-232
Tabel	2.50	Rekapitulasi Capaian Indikator TPB di Kabupaten Banggai Tahun 2024.....	II-268
Tabel	2.51	Rekapitulasi Capaian Indikator TPB pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.....	II-269
Tabel	2.52	Isu Strategis TPB Berbasis Indikator-Indikator yang Belum Mencapai Target Nasional, Belum di Laksanakan dan TPB yang Memiliki Data.....	II-271
Tabel	2.53	Misi, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045.....	II-285
Tabel	2.54	Kesimpulan Isu Strategis Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	II-293
Tabel	2.55	Kriteria dan Bobot Kriteria dalam Prioritisasi Isu Strategis..	II-295

			Hal.
Tabel	2.56	Rata-Rata Skor dan Prioritas Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	II-296
Tabel	2.57	Keselarasan Isu Strategis Nasional, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai.....	II-311
Tabel	2.58	Keterkaitan Isu Strategis Jangka Panjang dengan Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029.....	II-313
Tabel	3.1	Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-7
Tabel	3.2	Keterkaitan Visi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Banggai.....	III-8
Tabel	3.3	Keselarasan Misi RPJPD 2025-2045 dengan Misi RPJMD 2025-2029	III-17
Tabel	3.4	Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029 dengan Misi RPJMD Sulawesi Tengah 2025-2029.....	III-19
Tabel	3.5	Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029 dengan Misi RPJM Nasional 2025-2029.....	III-20
Tabel	3.6	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	III-23
Tabel	3.7	Keselarasan Tujuan RPJMD Kabupaten Banggai dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.....	III-26
Tabel	3.8	Keselarasan Sasaran RPJMD Kabupaten Banggai dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.....	III-27
Tabel	3.9	Keselarasan Sasaran Pembangunan Nasional dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-29
Tabel	3.10	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 1 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-32
Tabel	3.11	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 2 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-35
Tabel	3.12	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 3 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-38
Tabel	3.13	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 4 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-40
Tabel	3.14	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 5 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-42
Tabel	3.15	Keterkaitan Visi Misi Tujuan Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2045.....	III-44
Tabel	3.16	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-53

			Hal.
Tabel	3.17	Keselarasan Strategi Utama Pembangunan Nasional (Trisula RPJMN 2025-2029 dengan Strategi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029	III-75
Tabel	3.18	Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2026-2030.....	III-82
Tabel	3.19	Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045.....	III-121
Tabel	3.20	Jabaran Program Unggulan Kreatif dan Inovatif (Nawaitu 2025-2029) kedalam kegiatan Prioritas, Program Nomenklatur dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab....	III-127
Tabel	3.21	Dukungan NAWAITU terhadap 17 Program Prioritas Prabowo Gibran.....	III-147
Tabel	3.22	Dukungan NAWAITU terhadap 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo Gibran.....	III-154
Tabel	3.23	Dukungan NAWAITU RPJMD Kabupaten Banggai terhadap Proyek Strategis Nasional RPJMN Tahun 2025-2029.....	III-160
Tabel	3.24	Dukungan NAWAITU RPJMD Kabupaten Banggai terhadap Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sesuai RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.....	III-162
Tabel	3.25	Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-168
Tabel	4.1	Program Perangkat Daerah.....	IV-3
Tabel	4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030.....	IV-61
Tabel	4.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030.....	IV-66

Daftar Gambar

		Hal.
Gambar 1.1	Penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai.....	I-3
Gambar 1.2	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lain.....	I-8
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Banggai.....	II-2
Gambar 2.2	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-12
Gambar 2.3	Luas Lahan Kering (Ha) di Kabupaten Banggai Tahun 2024.....	II-13
Gambar 2.4	Kunjungan Wisatawan (Orang) di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-16
Gambar 2.5	Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2025.....	II-25
Gambar 2.6	Grafik Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Status Daya Dukung Penyedia Pangan di Kabupaten Banggai Tahun 2025.....	II-26
Gambar 2.7	Grafik Sebaran Luas Daya Dukung Penyedia Pangan Perwilayah Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2025.....	II-27
Gambar 2.8	Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2029.....	II-28
Gambar 2.9	Grafik Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Status Daya Dukung Penyedia di Kabupaten Banggai Tahun 2029.....	II-29
Gambar 2.10	Grafik Sebaran Luasan Daya Dukung Penyedia Pangan Perwilayah Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2029.....	II-30
Gambar 2.11	Peta Daya Dukung Lingkungan Untuk Penyediaan Air di Kabupaten Banggai Tahun 2025.....	II-36
Gambar 2.12	Grafik Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Status Daya Dukung Penyedia Air di Kabupaten Banggai Tahun 2025.....	II-37
Gambar 2.13	Grafik Status Daya Dukung Daya Tampung Penyediaan Air di Kabupaten Banggai Tahun 2025.....	II-38

			Hal.
Gambar	2.14	Peta Daya Dukung Lingkungan Untuk Penyediaan Air di Kabupaten Banggai Tahun 2029.....	II-39
Gambar	2.15	Grafik Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Daya Dukung Penyedia Air di Kabupaten Banggai Tahun 2029.....	II-40
Gambar	2.16	Perkembangan Capaian Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-44
Gambar	2.17	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-45
Gambar	2.18	Perkembangan PoU (Prevalence of Undernourishment) Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-46
Gambar	2.19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-47
Gambar	2.20	Perkembangan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-48
Gambar	2.21	Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-49
Gambar	2.22	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-50
Gambar	2.23	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-50
Gambar	2.24	Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-51
Gambar	2.25	Kepadatan Penduduk Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-51
Gambar	2.26	Perkembangan Bonus Demografi Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-52
Gambar	2.27	Proyeksi Jumlah Penduduk Penduduk (Jiwa) Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030.....	II-53
Gambar	2.28	Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030.....	II-53
Gambar	2.29	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-54
Gambar	2.30	Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030.....	II-55
Gambar	2.31	Proyeksi Bonus Demografi Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030.....	II-56

			Hal.
Gambar	2.32	PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banggai (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024.....	II-57
Gambar	2.33	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-62
Gambar	2.34	Angka Kemiskinan Kabupaten Banggai Tahun 2020-2025.....	II-64
Gambar	2.35	Angka Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-65
Gambar	2.36	Gini Rasio Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-66
Gambar	2.37	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Tahun 2020-2025.....	II-67
Gambar	2.38	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai Tahun 2020-2025.....	II-67
Gambar	2.39	Usia Harapan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2020-2025	II-68
Gambar	2.40	Perkembangan Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-69
Gambar	2.41	Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-70
Gambar	2.42	Angka Kematian Bayi Per 1.000 KH Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-72
Gambar	2.43	Angka Kematian Balita Per 1.000 KH Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023.....	II-72
Gambar	2.44	Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2020-2024.....	II-73
Gambar	2.45	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-74
Gambar	2.46	Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-74
Gambar	2.47	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-75
Gambar	2.48	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-76
Gambar	2.49	Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Banggai Tahun 2024.....	II-77
Gambar	2.50	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-59
Gambar	2.51	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-80

			Hal.
Gambar	2.52	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-81
Gambar	2.53	Angka Ketergantungan Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-82
Gambar	2.54	Rasio PDRB ADHB Industri Pengolahan Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-82
Gambar	2.55	Rasio PDRB ADHB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-83
Gambar	2.56	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-84
Gambar	2.57	Nilai PDRB ADHB Komponen PMTB Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-86
Gambar	2.58	Proporsi Komponen PMTB Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-86
Gambar	2.59	Nilai PDRB ADHB Komponen Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-87
Gambar	2.60	Proporsi Komponen Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-87
Gambar	2.61	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-88
Gambar	2.62	Indeks Desa Kabupaten Banggai Tahun 2021-2024.....	II-89
Gambar	2.63	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-90
Gambar	2.64	Inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-91
Gambar	2.65	Capaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Banggai Tahun 2023-2024.....	II-94
Gambar	2.66	Persentase Penegakkan Perda di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-95
Gambar	2.67	Perkembangan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.	II-128
Gambar	2.68	Perbandingan Realisasi Pendapatan Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah).....	II-133
Gambar	2.69	Proporsi Masing-masing Unsur PAD Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah).....	II-135
Gambar	2.70	Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer Tahun 2020-2024 (%).....	II-140
Gambar	2.71	Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja Operasi Tahun 2020-2024.....	II-141
Gambar	2.72	Kerangka Logis Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-170

			Hal.
Gambar	2.73	Megatrend Global 2045.....	II-205
Gambar	2.74	Visi Misi Presiden Republik Indonesia 2025-2029.....	II-213
Gambar	2.75	17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat.....	II-214
Gambar	2.76	Asta Cita Sebagai Prioritas Pembangunan.....	II-215
Gambar	2.77	Rata-rata Pertumbuhan Total Factor Productivity Index	II-217
Gambar	2.78	Gambaran Umum Capaian TPN di Kabupaten Banggai Tahun 2024.....	II-267
Gambar	2.79	Pokok-pokok Visi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045	II-268
Gambar	3.1	Kerangka Perumusan Visi Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045.....	III-2
Gambar	3.2	Rumusan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045.....	III-3
Gambar	3.3	Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025- 2029.....	III-9
Gambar	3.4	Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 1 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-34
Gambar	3.5	Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 2 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-36
Gambar	3.6	Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 3 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-39
Gambar	3.7	Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 4 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-41
Gambar	3.8	Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 5 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-43
Gambar	3.9	Tahapan Implementasi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-81
Gambar	3.10	Wilayah Pengembangan dan Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Banggai.....	III-114
Gambar	3.11	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Banggai.....	III-119
Gambar	3.12	Upaya Transformatif Super Prioritas (<i>Game Changers</i>) Banggai Emas 2045.....	III-144
Gambar	3.13	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029 yang Perlu di Dukung Program Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	II-158



BerAKHLAK **#** bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB-I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta pasal 65 dan pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJM Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai Misi Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat Otonomi Daerah, potensi daerah, kearifan lokal serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya dalam Pasal 264 ayat (4) disebutkan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.



Sehubungan dengan telah dilantik dan ditetapkan Ir. H. Amirudin Tamoreka, MM. sebagai Bupati Banggai dan Drs. H. Furqanudin Masulili, MM sebagai Wakil Bupati Banggai pada tanggal 2 Juni 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3-2303 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Banggai berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.

Periodesasi RPJMD Kabupaten Banggai adalah mengacu kepada Periodesasi RPJM Nasional 2025-2029, sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 50 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, bahwa periode RPJM Daerah mengikuti periode RPJM Nasional. Dengan demikian periodesasi RPJMD Kabupaten Banggai adalah 2025-2029, walaupun periodesasi jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banggai 2025-2030.

RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

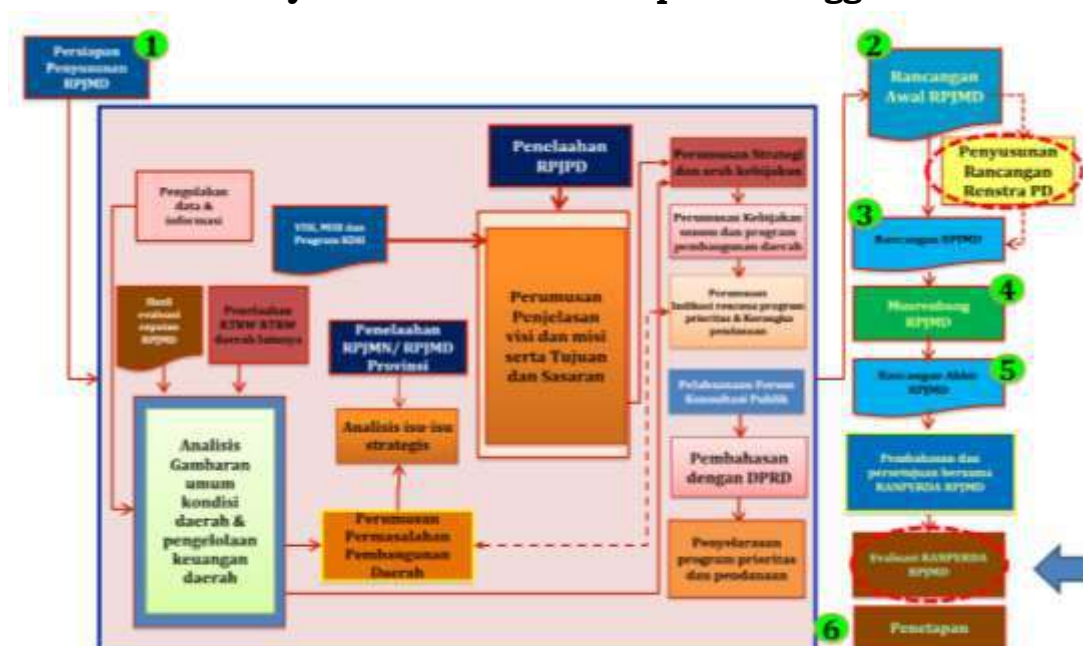




3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2025–2029 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai



Berdasarkan tahapan penyusunan RPJMD tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD



Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu :

1. Merupakan RPJMD pertama dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045.
2. Merupakan media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
3. Merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk merumuskan dan menyusun Rencana Strategisnya masing-masing, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
4. Merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hal di atas, RPJMD akan menjadi kerangka acuan untuk mengetahui arah pembangunan daerah yang ingin diwujudkan kepala daerah terpilih bersama seluruh komponen masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya daerah. Selain itu, sebagai bagian dari elemen pemerintah yang bertautan dalam fungsi pemerintahan dan koneksitasnya, dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada level pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah serta akselerasi pemerintahan dari Pemerintah Pusat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang di gunakan dala penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang



- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 21 Nomor 1419);
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

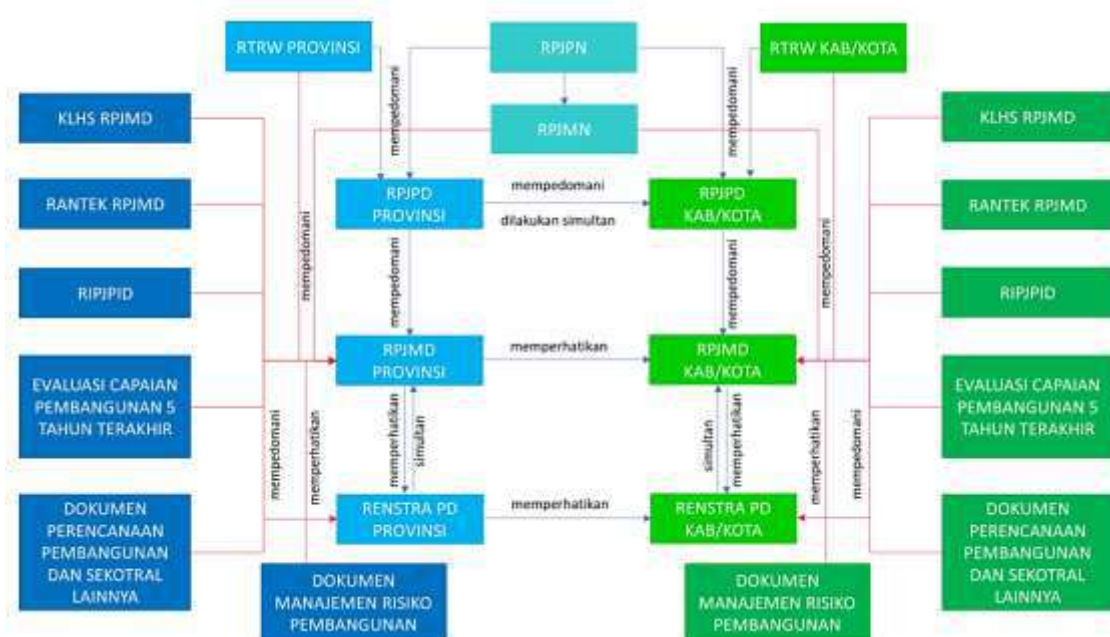
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 164);

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 di susun dengan mempedomanai RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 dan RPJMN Tahun 2025-2029 yang di dalamnya telah memuat prioritas Pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, serta memperhatikan RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, Dimana proses penyusunannya di lakukan secara simultan dan terkoordinasi.

Gambar 1.2
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Sektorial Lainnya





Selain itu penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yaitu antara lain KLHS RPJMD, Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029, Evaluasi capaian Pembangunan 5 tahun terakhir sebagai dasar proyeksi target capaian Pembangunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta memperhatikan dokumen perencanaan sektoral lainnya.

RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, yang di susun secara terkoordinir dan simultan. RPJMD selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Manajemen Resiko Level Kabupaten, sedangkan Renstra akan menjadi acuan dalam penyusunan manajemen resiko level Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1.4.1 Maksud

RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah (pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Banggai sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati Banggai periode 2025-2030, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :





1. Menerjemahkan secara teknokratik Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai periode 2025-2030 ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, yang disertai dengan rancangan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah.
2. Menjamin keterkaitan dan keselarasan prioritas Pembangunan Daerah dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 (delapan) proyek hasil terbaik cepat (Quick Wins) Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai perwujudan bagian integral dari Pembangunan nasional.
3. Menetapkan indikator kinerja Utama (IKU) Kabupaten dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.
4. Merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 di susun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antar dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : Gambaran Umum Daerah, yang memuat data, informasi dan analisis kondisi daerah terhadap Aspek geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Juga menggambarkan tentang Keuangan Daerah serta Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.





- BAB III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, yang menyajikan gambaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 serta Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.
- BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat bahasan tentang Program, Target Kinerja dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui IKU dan target penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) Tahun 2025-2029.
- BAB V : Penutup, yang berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.



BerAKHLAK **#** bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB-II

GAMBARAN UMUM DAERAH



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum daerah menjelaskan tentang data-data dan informasi terkait kondisi dan karakteristik wilayah dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai analisis deskriptif dan analisis diagnostik, yaitu meliputi aspek Geografis dan Demografi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu Bab ini juga menyajikan gambaran keuangan daerah serta permasalahan dan isu strategis.

Gambaran Umum Daerah akan mendeskripsikan apa, bagaimana dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, serta mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah ini akan menjadi pijakan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah melalui pemetaan secara objektif dan analisis data yang valid.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai merupakan salah satu daerah otonom dan masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah beribukota di Luwuk, terletak pada titik koordinat antara 122⁰23' dan 124⁰20' Bujur Timur, serta 0030' dan 2020' Lintang Selatan, memiliki Luas wilayah daratan ± 8.232,47 Km² atau sekitar 13,36 % dari luas Provinsi Sulawesi Tengah, dan luas laut ± 20.309,68 Km² dengan garis pantai sepanjang 809,24,25 Km. Wilayah Kabupaten Banggai berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini



- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Peling dan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Morowali Utara

Secara administrasi Kabupaten Banggai terdiri dari 24 kecamatan. Kecamatan Nuhon adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 1.107,00 Km² atau 11,45 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Banggai. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah yang paling sempit adalah Kecamatan Luwuk dengan luas 72,82 Km² atau hanya 0,75 persen dari luas Kabupaten Banggai.

Selain itu, wilayah Kabupaten Banggai juga terbagi atas 291 desa dan 46 kelurahan, Kecamatan dengan jumlah desa, paling banyak adalah Kecamatan Pagimana. Kecamatan dengan desa paling sedikit adalah Kecamatan Luwuk Selatan.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Banggai



Sumber : RTRW Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032



Dengan posisi geografis sebagaimana di atas, secara kewilayahan Kabupaten Banggai yang berada di semenanjung timur pulau Sulawesi dan di apit oleh 2(dua) teluk, yaitu Teluk Tomini dan Teluk Tolo, memiliki peran strategis dan penting baik dalam perspektif geografis, ekonomi, maupun pembangunan sosial budaya.

Kabupaten Banggai memiliki posisi strategis dalam jaringan transportasi darat, penerbangan dan pelayaran di Kawasan timur pulau Sulawesi. Letak geografisnya dapat menghubungkan antara Manado, Gorontalo, Kawasan teluk tomini, Taliabu (Ternate), Buton, Kendari dan Makassar serta kabupaten sekitarnya yaitu Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una dan Morowali Utara, baik melalui darat, laut dan udara, baik untuk distribusi orang, barang dan cargo. Posisi strategis ini memungkinkan kota Luwuk menjadi pusat perdagangan karena memiliki kawasan industri besar atau ditopang oleh infrastruktur transportasi seperti bandar udara dan pelabuhan.

Hal ini diperkuat oleh posisi Kabupaten Banggai sebagai lumbung pangan kedua di Sulawesi Tengah, sentra terbesar komoditas perkebunan kelapa dalam, dan populasi ternak terbesar di Sulawesi Tengah, pariwisata, serta potensi industri perikanan dan maritim yang menjanjikan karena di apit oleh Teluk Tolo dan Teluk Tomini.

Dalam perspektif Sosial Budaya, Kabupaten Banggai memiliki 3 (tiga) Perguruan Tinggi swasta yang telah eksis selama kurang lebih 24 Tahun, dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar dan berasal dari wilayah di Kawasan Timur Sulawesi Tengah dan Kepulauan Sula Maluku Utara. Berpotensi dikembangkan untuk menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan terbaik. Kabupaten Banggai juga merupakan pusat pelayanan Kesehatan di wilayah sekitarnya. RSUD Luwuk merupakan Rumah Sakit Rujukan di Bagian timur Sulawesi Tengah, yang dapat ditingkatkan kelasnya menjadi tipe A serta membangun





dan meningkatkan fasilitas Kesehatan lainnya menjadi Rumah Sakit tipe D dan C.

a. Topografi

Dilihat dari kondisi topografi, Kabupaten Banggai didominasi oleh kawasan perbukitan dengan kategori kemiringan lereng curam–sangat curam ($>40\%$) sebesar 442.664 Ha atau sekitar 47.82% dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan datar dengan kemiringan antara 0–15% di Kabupaten Banggai sangat terbatas, yaitu hanya sekitar 21,06% atau 195.067 Ha, sehingga lahan yang dapat dijadikan kawasan budidaya juga menjadi sangat terbatas. Keadaan topografi Kabupaten Banggai berdasarkan kemiringan lereng, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Topografi Kemiringan Lereng di Kabupaten Banggai

No.	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Datar (0–2%)	142.253	15,36%
2.	Datar–Landai (2–15%)	52.814	5,70%
3.	Landai–Agak Curam–Curam (15–40%)	288.111	31,12%
4.	Curam–Sangat Curam ($>40\%$)	442.664	47,81%

Sumber: BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025 (data diolah)

Desa-desanya di Kabupaten Banggai pada umumnya terletak pada ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut dengan bentuk permukaan tanah didominasi oleh daratan dan perbukitan. Pada desa tersebut terdapat juga pegunungan, namun dengan persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan daratan dan perbukitan. Desa yang terletak pada ketinggian 500–700 m di atas permukaan laut, pada umumnya didominasi oleh bentuk permukaan tanah yang terdiri dari perbukitan atau pegunungan. Sedangkan untuk desa yang terletak pada ketinggian lebih dari 700 m di atas permukaan laut, pada umumnya memiliki bentuk permukaan tanah yang didominasi oleh pegunungan.



Sedangkan jika dilihat dari kondisi morfologinya, Kabupaten Banggai memiliki keanekaragaman kondisi alam, antara lain terdapat pegunungan, sungai-sungai serta pulau-pulau kecil yang tersebar dalam wilayah kabupaten Banggai. Di Kabupaten Banggai terdapat sebuah gunung yang memiliki ketinggian lebih dari 2.000 m di atas permukaan laut (DPL) yaitu Julutumpu yang berada di Kecamatan Pagimana. Sedangkan gunung yang terendah adalah Gunung Lontio di Kecamatan Bunta, dengan ketinggian 1.071 m. Secara rinci data mengenai nama dan tinggi gunung dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Nama dan Tinggi Gunung di Kabupaten Banggai

No.	Nama Gunung	Tinggi (m)	Lokasi
1	Tumpusung	1.164	Bunta
2	Lontio	1.071	Bunta
3	Bungku Uliton	1.221	Lamala
4	Balantak	1.512	Balantak
5	Tompotika	1.590	Balantak
6	Bulurumpu	2.401	Pagimana
7	Bohotan	1.680	Pagimana
8	Balean	1.468	Pagimana

Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

b. Geologi

Kabupaten Banggai memiliki batuan yang terdiri atas batuan-batuan berumur sangat tua, yaitu kompleks ofiolit berumur Mesozoikum, batuan sedimen berumur Tersier, batuan terumbu koral yang terangkat, dan endapan alluvial yang paling muda. Jenis tanah pada umumnya dipengaruhi oleh batuan dasarnya, sehingga kondisi geologi kawasan setempat sangat berpengaruh terhadap terbentuknya tanah. Kondisi jenis tanah di Kabupaten Banggai didominasi oleh jenis litolit, yaitu mencapai 35,03% dan jenis podsolik sekitar 32,25%.



Tanah Podsolik terbentuk dari batuan pasir kuarsa dan tersebar pada daerah yang beriklim basah tanpa bulan kering, curah hujan lebih dari 2.500 mm/tahun. Jenis tanah ini memiliki tekstur lempung hingga berpasir, kesuburan rendah hingga sedang dengan ciri warna merah dan kering.

Jenis tanah Latosol adalah jenis tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf, dengan ciri-ciri berwarna merah hingga kuning. Memiliki tekstur lempung dan memiliki solum horizon. Persebaran jenis tanah ini berada di daerah yang memiliki curah hujan dan kelembaban tinggi serta pada ketinggian berkisar antara 300–1000 meter dari permukaan laut. Di Kabupaten Banggai jenis tanah Latosol mencapai sekitar 12,71%, dan jenis tanah tersebut, kurang subur karena mengandung zat besi dan aluminium.

Luas jenis tanah Mediteran sekitar 11,21%, jenis tanah ini berasal dari batuan kapur keras (limestone), dengan ciri berwarna coklat hingga merah. Penyebaran jenis tanah mediteran terdapat pada daerah beriklim subhumid, topografi karst dan lereng vulkan dengan ketinggian kurang dari 400 M dari permukaan air laut.

Tanah Grumusol hanya sekitar 3,42%, tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tuffa vulkanik. Pada tanah jenis ini, kandungan organik didalamnya rendah, sehingga tanah jenis ini kurang subur dan tidak cocok untuk ditanami tumbuhan. Karakteristik jenis tanah Grumusol, tekstur tanahnya kering dan mudah pecah terutama pada musim kemarau dan memiliki warna hitam, serta tanah jenis ini memiliki Ph netral hingga alkalis. Tanah ini biasanya terdapat pada permukaan yang kurang dari 300 meter dari permukaan laut dengan bentuk topografi datar hingga bergelombang. Perubahan suhu yang sangat nyata antara pada saat panas dan hujan. Tanah jenis ini juga tersebar pada daerah dengan iklim subhumid atau subarid dan curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun.



Selanjutnya, tanah aluvial adalah tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. Aluvial ialah tanah muda yang berasal dari hasil pengendapan. Sifatnya tergantung dari asalnya yang dibawa oleh sungai. Tanah aluvial yang berasal dari gunung api umumnya subur karena banyak mengandung mineral. Tanah Aluvial di Kabupaten Banggai hanya sekitar 3,46%, sangat cocok untuk persawahan. Penyebarannya di lembah-lembah sungai dan dataran pantai.

Tabel 2.3
Luas Lahan Menurut Jenis Tanah di Kabupaten Banggai

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Litolit	311.985,00	32,25
2	Litosol	5.244,50	0,54
3	Latosol	122.946,10	12,71
4	Podsolik	338.834,10	35,03
5	Grumusol	33.098,40	3,42
6	Aluvial	33.456,80	3,46
7	Mediterran	108.484,40	11,21
8	Tidak ada data	13.220,70	1,36

Sumber: BPS Kabupaten Banggai, 2025

Sedangkan jenis tanah terendah adalah Latosol yaitu hanya sekitar 0,54% dari keseluruhan luas Kabupaten Banggai. Tanah Litosol merupakan tanah yang baru mengalami perkembangan dan merupakan tanah yang masih muda. Jenis tanah ini terbentuk dari adanya perubahan iklim, topografi dan adanya vulkanisme. Untuk mengembangkan tanah ini harus dilakukan dengan cara menanam pohon supaya mendapatkan mineral dan unsur hara yang cukup. Tekstur tanah litosol bermacam-macam ada yang lembut, bebatuan bahkan berpasir. Persebaran tanah ini, biasanya terdapat pada daerah yang memiliki tingkat kecuraman tinggi.

Keadaan jenis tanah di beberapa tempat didominasi oleh tanah



kapur dan pada daerah-daerah tertentu didominasi oleh tanah podsolik merah kuning. Satuan tanah yang mendominasi terdiri dari rendzina tua yang tertutup oleh lapisan podsolik merah kuning dan podsolik kuning. Di pantai-pantai yang landai terdapat endapan alluvial yang berasal dari laut yang terdiri dari pasir dan tanah pasir. Luas lahan menurut jenis tanah di Kabupaten Banggai.

c. Hidrologi

Kabupaten Banggai dialiri sembilan buah sungai besar, yang merupakan sumber air baku yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat di wilayah perdesaan dan juga merupakan sumber air PDAM yang sudah diolah untuk dikonsumsi oleh masyarakat di kawasan perkotaan terutama di Luwuk, Ibukota Kabupaten Banggai. Oleh karena itu, keberadaan sungai-sungai ini harus dilindungi melalui penerapan kawasan perlindungan setempat sempadan sungai.

Sungai Minahaki merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Banggai dengan panjang 382,50 km. Sementara itu, Sungai Kalumbangan merupakan sungai terluas di Kabupaten Banggai dengan luas 167.175 ha. Kesembilan sungai tersebut mengairi 28.243,18 ha daerah irigasi, dan melintasi/berada di wilayah 6 kecamatan, 35 desa dan 2 kelurahan, sedangkan wilayah kecamatan Bunta dilalui oleh tiga sungai, yaitu Sungai Bunta, Toima dan Kalumbangan.

Tabel 2.4
Nama, Panjang Sungai, Wilayah Dilalui dan Luas Daerah Aliran
Kabupaten Banggai

No.	Nama Sungai	Wilayah yang dilalui	Panjang (Km)
1	Balingara	Kec. Nuhon (Desa Longe Atas, Desa Obo Balingara)	142,50
2	Bunta	Kec. Bunta (Desa Doda, Desa Gonohop, Desa Koninis, Desa Hion, Desa Dalimu,	121,50



No.	Nama Sungai	Wilayah yang dilalui	Panjang (Km)
		Desa Dewangan Jaya, Kel. Salabenda, Kel. Bunta I)	
3	Toima	Kec. Bunta (Desa Toima, Desa Huhak)	107,25
4	Lobu	Kec. Pagimana (Desa Dolom, Desa Bomban, Desa Uha-Uhangon, Desa Kadodi, Desa Niu Bulan, Desa Lobu)	160,50
5	Mentawa	Kec. Toili Barat (Desa Bumi Harapan, Desa Mentawa, Desa Mekar Jaya, Desa Rata)	142,50
6	Minahaki	-	382,50
7	Sinorang	Kec. Batui (Desa SPC Kayoa, Desa Sukamaju, Desa Sukamaju I, Desa Gori-gori, Desa Bonebalantak, Desa Sinorang, Desa Paisubololi)	142,00
8	Kalumbangan	Kec. Bunta (Desa Dwipa Karya, Desa Lokait, Desa. Simpang I, Desa Mantan A, Desa Laonggo, Desa Bella)	55,25
9	Kintom	Kec. Kintom (Desa Uling, Desa Kintom)	21,50

Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

d. Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Banggai dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada bulan Mei sampai dengan September, arus angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Oktober sampai dengan April, arus angin yang banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan.

Curah hujan di Kabupaten Banggai antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran atau pertemuan arus udara, oleh karena itu, jumlah hari hujan dan jumlah curah hujan beragam menurut setiap bulan. Pada tahun 2024, rata-rata curah hujan yang terjadi selama setahun sebesar 226,95 mm. Curah hujan tertinggi



terjadi pada bulan September dan terendah terjadi pada bulan Oktober, begitu juga dengan jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus, Oktober, Desember, dan terendah terjadi pada bulan Januari.

Kabupaten Banggai mempunyai kelembaban udara cukup tinggi yang pada tahun 2024 dengan rata-rata 78,33 persen, kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu mencapai 84,40 persen dan terendah pada bulan Januari yaitu mencapai 72,40 persen. Suhu udara rata-rata sebesar 23,810C yang bervariasi pada setiap bulan antara 21,100C –24,900C dengan suhu udara minimum 21,100C terjadi pada bulan Juli dan maksimum 24,900C terjadi pada bulan Desember. Sementara untuk kecepatan angin bervariasi pada setiap bulannya antara 1,91-3,54 knot atau kecepatan rata-rata sepanjang tahun berkisar 2,59 knot. Kecepatan angin tertinggi terjadi bulan Agustus dan terendah bulan April.

Tabel 2.5

Keadaan Curah Hujan, Kelembaban Udara, Suhu dan Kecepatan Angin pada Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Luwuk Menurut Bulan Tahun 2024

Bulan	Jumlah Hari Hujan (hari)	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Suhu Udara (oC)			Kelembaban Udara Rata-rata (%)	Kecepatan Angin Rata-rata (knot)
			Maks	Min	Rerata		
Januari	7	77,50	35,40	24,70	30,12	72,46	2,22
Pebruari	11	85,90	35,20	24,50	29,58	74,78	2,35
Maret	15	72,50	35,00	24,40	29,22	77,89	1,97
April	16	308,20	33,60	24,30	29,00	80,83	1,91
Mei	23	486,70	32,50	24,20	28,10	82,25	2,50
Juni	19	240,20	31,40	23,60	26,95	83,10	2,87
Juli	29	96,10	30,70	22,10	26,36	84,40	3,08
Agustus	31	218,60	30,90	22,50	26,43	81,27	3,54
September	30	901,10	33,10	22,90	28,40	74,48	3,21
Oktober	31	17,20	33,40	23,70	29,26	73,05	3,16



Bulan	Jumlah Hari Hujan (hari)	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Suhu Udara (oC)			Kelembaban Udara Rata-rata (%)	Kecepatan Angin Rata-rata (knot)
			Maks	Min	Rerata		
November	30	159,20	33,70	23,90	29,61	75,67	2,14
Desember	31	60,20	33,70	24,90	29,22	79,77	2,10
Rata-rata	22,75	226,95	33,22	23,81	28,52	78,33	2,59

Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

a. Potensi Perikanan

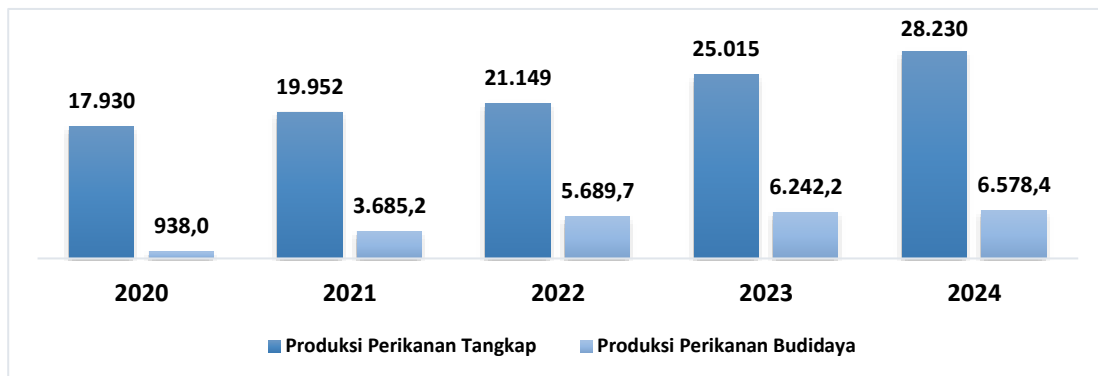
Subsektor Kelautan dan perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya yang akan memberikan dampak signifikan pada perekonomian Kabupaten Banggai. Potensi tersebut harus dioptimalkan secara baik dengan tetap mengindahkan aspek berkelanjutan bagi generasi mendatang. Sebagai wilayah kabupaten yang memiliki perairan yang sangat luas, Kabupaten Banggai banyak menghasilkan produk perikanan yang melimpah, seperti ikan, udang dan kepiting, sehingga memiliki nilai jual di pasar internasional.

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Banggai meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, budidaya perikanan, dan pengolahan hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar di seluruh wilayah perairan laut yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Kawasan peruntukan budidaya perikanan yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut: Usaha Budidaya Air Payau 8.435,0 Ha; Usaha Budidaya Air Tawar 260,0 Ha dan Usaha Budidaya Laut 6.396,0 Ha. Pengolahan hasil perikanan dialokasikan berupa sentra pengolahan ikan, seperti pengasinan ikan, pengemasan ikan, dan lain-lain yang tersebar di Kecamatan Luwuk, Nuhon, Bunta dan Pagimana.

Berikut adalah perkembangan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.



Gambar 2.2
Perkembangan Produksi
Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, 2025

b. Potensi Pertanian

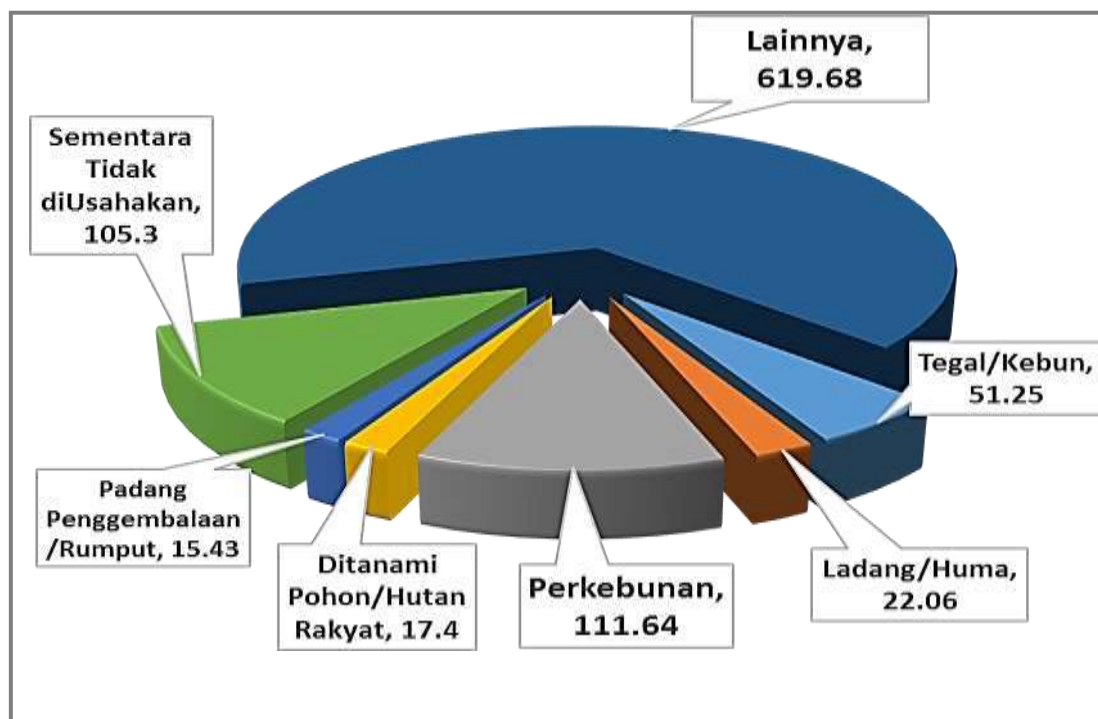
Kawasan pertanian lahan pangan terdiri atas kawasan pertanian lahan kering dan lahan basah. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Pertanian lahan basah di Kabupaten Banggai pada tahun 2024 seluas 24.513 Ha. Adapun persebaran pertanian lahan basah ini terdapat di Kecamatan Batui, Batui Selatan, Bualemo, Bunta, Simpang Raya, Lamala, Luwuk Timur, Masama, Nuhon, Pagimana, Toili, Moilong dan Toili Barat. Sedangkan untuk pertanian lahan kering di Kabupaten Banggai pada tahun 2024 seluas 942.760,00 Ha. Adapun persebaran pertanian lahan kering dan komoditi utamanya sebagai berikut.

- Padi ladang terdapat di Kecamatan Batui Selatan, Batui, Kintom, Luwuk Utara, Luwuk Timur, Luwuk Selatan, Nambo, Masama, Lamala, Mantoh, Balantak, Balantak Selatan, Bualemo, Pagimana, Lobu dan Bunta;
- Jagung tersebar hampir merata di seluruh kecamatan dan dominan terdapat di Kecamatan Luwuk Utara, Luwuk Selatan, Nambo, Bunta dan Bualemo;
- Kedelai terdapat di Kecamatan Batui Selatan, Luwuk Timur, dan Pagimana;



- Kacang tanah terdapat di Kecamatan Balantak, Bualemo, Batui Selatan, Lamala, Pagimana, Lobu dan Nuhon;
- Kacang hijau terdapat di Kecamatan Lamala, Luwuk Timur, Bualemo dan Simpang Raya;
- Ubi kayu tersebar hampir merata di seluruh kecamatan dan dominan terdapat di Kecamatan Luwuk Utara dan Luwuk Selatan;
- Ubi jalar terdapat di Kecamatan Toili, Luwuk Timur, Luwuk Utara, Masama dan Balantak.

Gambar 2.3
Luas Lahan Kering (Ha)
Di Kabupaten Banggai Tahun 2024



Sumber : BPS Sulawesi Tengah, 2024

Hasil produksi tanaman pertanian di Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada 2.6 berikut.



Tabel 2.6
Produksi Tanaman Pertanian (Ton)
Di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tanaman Pangan						
1.	Padi (Ton)	253.368,6	163,827,0	143.013,2	235.581,7	259.753,4
2.	Jagung (Ton)	98.583,2	28.880,2	87.114,3	58.976,5	42.350,2
3.	Ubi Kayu (Ton)	9.685,9	2.482,9	2.917,4	1.382,5	765,0
4.	Kedelai (Ton)	2.958,6	1.029,5	3.557,6	6.076,6	2.200,8
5.	Kacang Tanah (Ton)	331,9	390,6	235,3	315,8	101,6
6.	Kacang Hijau (Ton)	108,9	105,0	43,0	203,9	156,1
Hortikultura						
1.	Sayur-sayuran (Kw)	1.255,2	10.517,7	5.642,7	6.660,8	6.568,8
2.	Buah-Buahan (Kw)	13.997,5	90.702,9	6.698,7	83.186,7	4.895,3
3.	Bawang Merah (Kw)	281,0	4.246,6	837,5	814,0	2.559,8
4.	Cabai Rawit (Kw)	978,2	6.271,1	4.805,2	6.180,8	4.520,6

Sumber : BPS, Dinas TPHP Kabupaten Banggai, 2025

c. Potensi Perkebunan

Di Kabupaten Banggai, kawasan yang sesuai untuk dikembangkan kegiatan perkebunan 111.640 Ha yang tersebar di Kecamatan Balantak, Batui, Bualemo, Bunta, Kintom, Lamala, Luwuk Timur, Masama, Nuhon, Pagimana, Toili dan Toili Barat, Balantak Selatan, Lobu, Simpang Raya, Luwuk, Batui Selatan, dan Moilong. Rencana kegiatan perkebunan difokuskan pada pengembangan perkebunan rakyat, dengan komoditas sebagai berikut:

- a. Kelapa yang paling luas area tanamnya di Kecamatan Batui, Bunta, Nuhon, Kintom, Luwuk, Luwuk Timur, Pagimana, Bualemo, Lamala, Masama, Balantak.
- b. Kelapa Sawit yang paling luas area tanamnya di Kecamatan Toili, Toili Barat, dan Luwuk Timur.
- c. Kopi yang paling luas area tanamnya di Kecamatan Toili, Bunta, Lamala dan Balantak.



- d. Cengkeh yang paling luas area tanamnya di Kecamatan Bunta, Pagimana, Lamala, dan Balantak.
- e. Jambu Mente yang paling luas area tanamnya di Kecamatan Toili, Toili Barat, Kintom, Bualemo, dan Lamala.
- f. Kakao yang paling luas area tanamnya di Kecamatan Toili, Batui, Nuhon, Luwuk Timur, Pagimana, Bualemo, Lamala, Masama, dan Balantak.
- g. Panili yang paling luas area tanamnya di Kecamatan Pagimana dan Balantak.
- h. Kemiri yang paling luas area tanamnya di Kecamatan Kintom, Luwuk, Lamala dan Balantak.

Hasil produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7
Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)
Di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kelapa (Ton)	49.116,3	49.192,8	550.760,0	51.940,0	53.421,7
2.	Kakao (Ton)	15.534,0	15.551,9	15.877,6	17.083,1	16.300,2
3.	Cengkeh (Ton)	986,3	1.252,4	1.252,3	1.330,5	1.451,9
4.	Kopi (Ton)	361,4	361,4	361,4	372,5	396,0
5.	Pala (Ton)	81,7	136,5	111,3	189,8	239,3
6.	Lada (Ton)	3,1	3,1	4,0	9,2	11,8

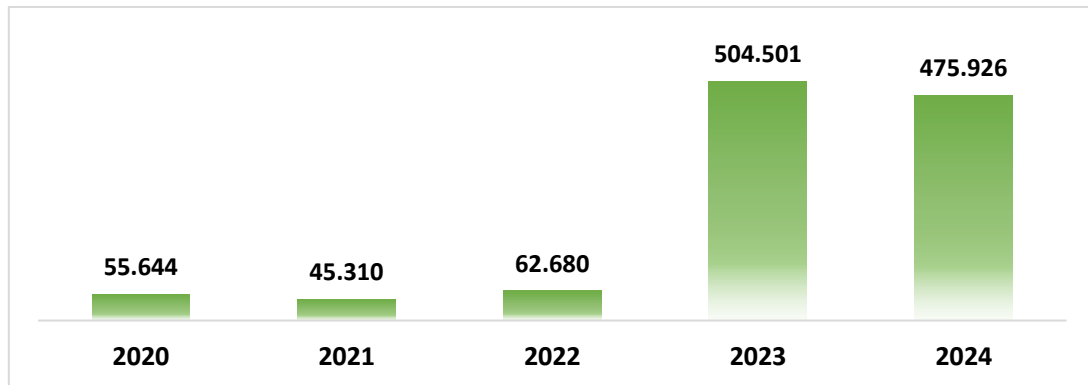
Sumber : BPS, Dinas TPHP Kabupaten Banggai, 2025

d. Potensi Pariwisata

Kabupaten Banggai memiliki potensi pariwisata alam dan pariwisata budaya beragam yang dapat dikembangkan untuk memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat dan memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah Kabupaten Banggai.



Gambar 2.4
Kunjungan Wisatawan (Orang)
di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Banggai dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dapat dilihat pada gambar 2.4 diatas.

1) Pariwisata Alam

Kawasan Pariwisata Alam di Kabupaten Banggai adalah: Pantai Kilo Lima, air terjun Salodik, gua Salodik, gua Wira, Pantai Pandan Wangi, Bangkiriang, Pantai Taima, permandian Sandakan, air terjun Hanga-hanga, air terjun Nambo, Danau Makapa, permandian Dondo, permandian Ampata, permandian Tontouan, permandian Mantawa, Pantai Towu, Pantai Uwedikan, Pantai Hek, Pantai Tangeban, Pulau Dua, air panas Pulau Dalagan, air panas Uwedaka dan Pantai Boli'i. Pengembangan ini berintegrasi dengan kabupaten sekitarnya untuk menghasilkan kegiatan wisata yang lebih banyak.

2) Pariwisata Budaya

Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi:

- Obyek wisata Suku Saluan berupa: Tumpe, Monsawe, Pandanga;
- Obyek wisata Suku Ta' berupa: Mera';



- Obyek wisata Suku Saluan dan Balantak berupa : Mombuat; dan
- Obyek wisata Suku Balantak berupa : Saleian.

e. Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Banggai memiliki potensi pertambangan yang cukup melimpah terdiri dari bahan tambang Minyak dan Gas Bumi, Bahan Tambang Mineral Logam, seperti Nikel dan emas dan bahan tambang mineral non logam atau bahan galian non logam (galian C). Uraianya adalah sebagai berikut:

1) Minyak dan Gas Bumi

Kabupaten Banggai memiliki Potensi minyak dan gas bumi yang terdapat di Blok Senoro seluas ± 6.100 Ha, dengan cadangan gas alam terbukti 1,532 TCF (Triliun Kaki Kubik), cadangan Kemungkinan 1.051 TCF, cadangan harapan 1.083 TCF, dan Blok Matindok yang memiliki 6 lapangan Gas yaitu Maleo Raja, Sukamaju, Donggi, Mentawa dan lapangan Gas Minahaki. Blok senoro di kelola oleh JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi (PMTS) dan Blok Matindok yang di kelola oleh Pertamina Pengembangan Gas Matindok (PPGM). Saat ini sedang di bangun Kilang Gas Alam Cair DS-LNG di Desa Uso Kecamatan Batui, yang di rancang berkapasitas 2 juta ton pertahun dan mulai berproduksi 2014, dan akan merupakan kilang LNG Keempat di Indonesia.

2) Bahan Galian

Kandungan mineral diperut bumi Kabupaten Banggai, menyimpan potensi untuk bisa dimanfaatkan secara optimal. Kekayaan alam yang terserak dibeberapa titik itu terdiri dari potensi kekayaan alam yang strategis dan vital, termasuk juga yang mengandung potensi energi. Beberapa bentuk potensi kekayaan mineral yang terkandung diperut bumi Kabupaten Banggai, antara lain adalah :



- a) Emas; terdapat di Kecamatan Toili, Bunta, Pagimana dan Nuhon
- b) Nikel; Tersebar di Kecamatan Luwuk Timur, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Bunta, Kecamatan Bualemo dan Kecamatan Toili, dengan potensi :
 - Blok Siuna Kecamatan pagimana luas areal prospek ± 3.400 Ha
 - Blok Pagimana Bunta luas areal prospek ± 2.000 Ha
 - Blok Balingara luas areal prospek ± 2000 Ha
 - Blok Toili luas areal prospek ± 2.800 Ha.
- c) Besi; lokasi Kecamatan Kintom, namun sementara keberadaan galian ini belum di inventarisasi baik penyebaran wilayah, lokasi cebakan maupun jumlah cadangan.
- d) Granit; Terdapat di kecamatan Pagimana
- e) Pasir dan Batu; terdapat di hamper semua sungai di wilayah Kabupaten Banggai yang tersebar di beberapa Kecamatan.
- f) Batu Gamping; Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Banggai didominasi oleh jenis bebatuan ini. Pada beberapa wilayah telah diolah secara tradisional untuk keperluan lokal.
- g) Marmer; terdapat di Desa Salodik, Desa Lauwon, Desa Bantayan dan Desa Minangandala.
- h) Gabro; Desa Siuna Kecamatan Pagimana, Desa Bantayan Kecamatan Luwuk Timur, dan Desa Nanganangaon Kecamatan Bunta. s
- i) Tanah urug; tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banggai.

3) Energi

Beberapa sumber daya energi yang tersedia di Kabupaten Banggai yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi salah satu sumber daya energi yang berdaya guna tinggi adalah sebagai berikut :



- a) Energi Surya. Berdasarkan data yang diperoleh dari stasiun meteorologi Bubung Luwuk, penyinaran matahari di Kabupaten Banggai memiliki intensitas rata-rata sebesar 53-96%. Dengan demikian potensi energi surya di Kabupaten Banggai memiliki prospek untuk dikembangkan.
- b) Energi Air. Di daerah Kabupaten Banggai terdapat jenis pasang surut prevailing diurnal, yaitu terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dengan tinggi permukaan yang berbeda. Kecepatan arus rata-rata 2,0 knot ke arah utara pada bulan Januari, Maret, Juli dan Oktober. Sementara angin yang berhembus kearah Selatan terjadi di bulan April, Juni, November dan Desember. Dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,1-1,2 M (Dishidros, 1997).
- c) Energi Angin. Kekuatan angin yang cukup stabil dengan arah yang tetap memungkinkan untuk dikembangkannya Pembangkit Listrik Tenaga Angin. Angin bertiup dari Philipina dengan kecepatan angin rata-rata di Kabupaten Banggai yang berkisar 3-6 knot dengan arah angin terbanyak beradius 2700, memungkinkan digunakannya kincir angin sebagai alat pendukung Energi Listrik Tenaga Angin. Dengan didukung perbedaan suhu maksimum antara siang dan malam sehingga terjadi tiupan angin yang silih berganti dari daratan dan lautan memungkinkan daerah Kabupaten Banggai berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah perkembangan listrik dengan tenaga angin.

f. Potensi Perindustrian

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah. Sesuai arahan RTRW Kabupaten Banggai 2012-2032, Kawasan peruntukan industri meliputi :





1) Industri Besar dan Sedang

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Banggai diutamakan bagi industri pengolahan gas alam (LNG plant). Kawasan peruntukan industri ini dikembangkan di Kecamatan Batui. Untuk mendukung pengembangan kawasan industri ini, akan dikembangkan pengembangan kawasan industri sedang di sekitarnya, seperti: Kecamatan Bunta, Nuhon, Luwuk, Kintom dan Batui berupa pengolahan minyak sawit (CPO), kopra, kayu dan hasil hutan, pertanian, perkebunan dan perikanan.

2) Industri Rumah Tangga

Industri Rumah Tangga tidak diatur dalam kawasan dan zona industri, namun pengembangannya diarahkan pada kawasan-kawasan permukiman yang ada, seperti industri hasil-hasil pertanian dan perikanan. Untuk industri polutif berupa industri pengolahan hasil perikanan, dibuatkan sentra industri hasil perikanan di wilayah yang dekat dengan bahan baku dan tidak mengganggu permukiman disekitarnya. Sentra industri ini direncanakan di dekat Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Luwuk. Sentra industri pada skala kecil direncanakan berlokasi di Kecamatan Luwuk, Pagimana, Toili dan Bunta yaitu di pusat-pusat produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Kajian tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan jasa ekosistem atau jasa lingkungan hidup, menggunakan asumsi dasar bahwa semakin tinggi jasa lingkungan hidup suatu wilayah, maka semakin tinggi keberlanjutan dari proses dan fungsi dari lingkungan hidup itu sendiri dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas lingkungan yang akan berdampak pada keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan manusia. Sebagaimana





didefinisikan dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang PPLH, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Jika dilihat dari definisinya, daya dukung maupun daya tampung dapat diartikan sebagai kemampuan dari suatu lingkungan dalam menyediakan jasa atau layanan untuk menopang kehidupan manusia. Dengan kata lain, definisi tersebut melihat daya dukung dan daya tampung dari aspek ketersediaan (supply) atau dari sisi ekosistem atau lingkungan hidup secara alami.

Identifikasi terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan antara lain didasarkan pada pemahaman bahwa kemampuan ekosistem menyediakan jasa lingkungan hidup (supply side) adalah terbatas, sementara kebutuhan jasa lingkungan hidup (demand side) bisa tidak terbatas. Agar tidak mengganggu struktur, proses maupun fungsi ekosistem, maka pemanfaatan jasa lingkungan hidup seharusnya tidak melebihi kemampuan tersebut. Jika aspek ketersediaan (supply) dipertemukan/diperbandingkan dengan aspek kebutuhan (demand) akan dihasilkan apa yang disebut status daya dukung daya tampung lingkungan hidup (Direktorat PDLKWS-KLHK, 2019). Untuk itu status daya dukung daya tampung lingkungan hidup sebagai informasi tentang status atau kondisi daya dukung daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Banggai, dikaji dengan mempertemukan data dan informasi daya dukung daya tampung lingkungan hidup dari aspek ketersediaan dan kebutuhan. Sehingga dari hasil kajian status tersebut dapat diketahui apakah daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Banggai telah terlampaui atau belum terlampaui. Status daya dukung daya tampung





dikatakan terlampaui apabila supply lebih kecil dari demand. Demikian pula sebaliknya.

Kajian terhadap status daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Banggai terdiri dari status daya dukung penyediaan pangan dan daya dukung penyediaan air dengan menggunakan data yang bersumber dari dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung (D3TLH) Kabupaten Banggai. Analisis status daya dukung lingkungan hidup pada Daya Dukung dan Daya Tampung (D3TLH) Kabupaten Banggai didasarkan pada data dan informasi terkait dengan jasa ekosistem penyedia air dan jasa ekosistem pangan yang data dan informasi spasialnya telah paparkan pada bagian sebelumnya. Dimana Dalam kajian tersebut menggunakan asumsi bahwa status daya dukung lingkungan hidup hanya didasarkan pada potensi sumber daya yang ada diwilayah Kabupaten Banggai tanpa memperhatikan adanya aliran materi.

Secara operasional, penentuan status daya dukung daya tamping penyediaan pangan dan air, didasarkan pada data sebaran kepadatan penduduk dalam system grid, serta berdasarkan pada variabel penutupan lahan dan jaringan jalan yang telah diboboti. Kemudian data input jumlah penduduk Kabupaten Banggai adalah sesuai data BPS untuk kecamatan dalam angka di kabupaten Banggai Tahun 2019 sebagai data dasar untuk proyeksi data penduduk untuk tahun 2023 dan 2029. Adapun perbandingan sebaran dan jumlah penduduk dari data input analisis dengan hasil sistem grid memiliki nilai rata-rata tingkat akurasi mencapai 99,98% yang berarti sangat representatif untuk menggambarkan distribusi penduduk secara spasial di Kabupaten Banggai.

a. Daya Dukung Pangan

Perhitungan ketersediaan pangan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi pangan di Kabupaten Banggai dari berbagai sektor penyedia pangan. Nilai potensi pangan dalam satuan produksi



komoditi pangan utama dari tiap kecamatan dan juga didasarkan pada nilai rata-rata konsumsi kalori perkapita penduduk Kabupaten Banggai Tahun 2022, yang mencapai nilai rata-rata sebesar 2.057,8 Kkal per Kapita, sehingga dengan mengacu pada data tersebut maka dapat dihitung potensi pangan di Kabupaten Banggai adalah sebesar 2.057,8 Kkal dikalikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Banggai pada tahun 2019 sebagai tahun dasar analisis, sehingga didapatkan total potensi pangan sebesar 283,061,419,808 Kkal. Dan untuk mendapat data sebaran nilai potensi pangan tiap kecamatan, maka total potensi pangan tersebut disebar secara proposional berdasarkan kapasitas produksi pangan dalam satuan Kkal pada tiap kecamatan sesuai data produksi komoditi pangan per kecamatan, seperti yang disajikan pada tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8
Potensi Ketersediaan Pangan Kabupaten Banggai

No.	Kecamatan	Potensi Ketersediaan Pangan Berdasarkan Data Produksi Per Kecamatan		Konsumsi Kalori Per Kapita (Kkal/tahun)*
		(Kkal/tahun)	(%)	
1.	Toili dan Toili Jaya	210.957.913	9,65	27.318.647.238
2.	Toili Barat	212.027.789	6,41	18.134.938.379
3.	Moilong	131.139.298	5,50	15.582.315.226
4.	Batui	79.568.667	4,55	12.885.554.882
5.	Batui Selatan	145.036.141	3,97	11.238.051.293
6.	Bunta	68.372.554	5,65	16.003.877.762
7.	Nuhon	133.783.891	5,53	15.661.358.201
8.	Simpang Raya	103.831.139	4,20	11.889.768.376
9.	Kintom	8.246.735	2,92	8.263.090.673
10.	Luwuk	9.258.850	10,49	29.689.161.574
11.	Luwuk Timur	54.624.559	3,26	9.227.879.934
12.	Luwuk Utara	8.546.541	4,76	13.475.277.475
13.	Luwuk Selatan	12.019.293	6,37	18.032.647.469
14.	Nambo	4.372.256	2,35	6.650.458.985



No.	Kecamatan	Potensi Ketersediaan Pangan Berdasarkan Data Produksi Per Kecamatan		Konsumsi Kalori Per Kapita (Kkal/tahun)*
		(Kkal/tahun)	(%)	
15.	Pagimana	46.272.462	6,70	18.971.089.071
16.	Bualemo	194.603.101	5,33	15.083.259.576
17.	Lobu	18.752.214	1,02	2.880.419.022
18.	Lamala	39.451.105	1,85	5.247.058.703
19.	Masama	139.023.934	3,25	9.194.557.895
20.	Mantoh	40.183.547	2,00	5.663.971.652
21.	Balantak	27.375.112	1,64	4.630.988.452
22.	Balantak Selatan	43.892.516	1,37	3.873.880.735
23.	Balantak Utara	17.691.431	1,22	3.463.167.234
Total				283.061.419.808

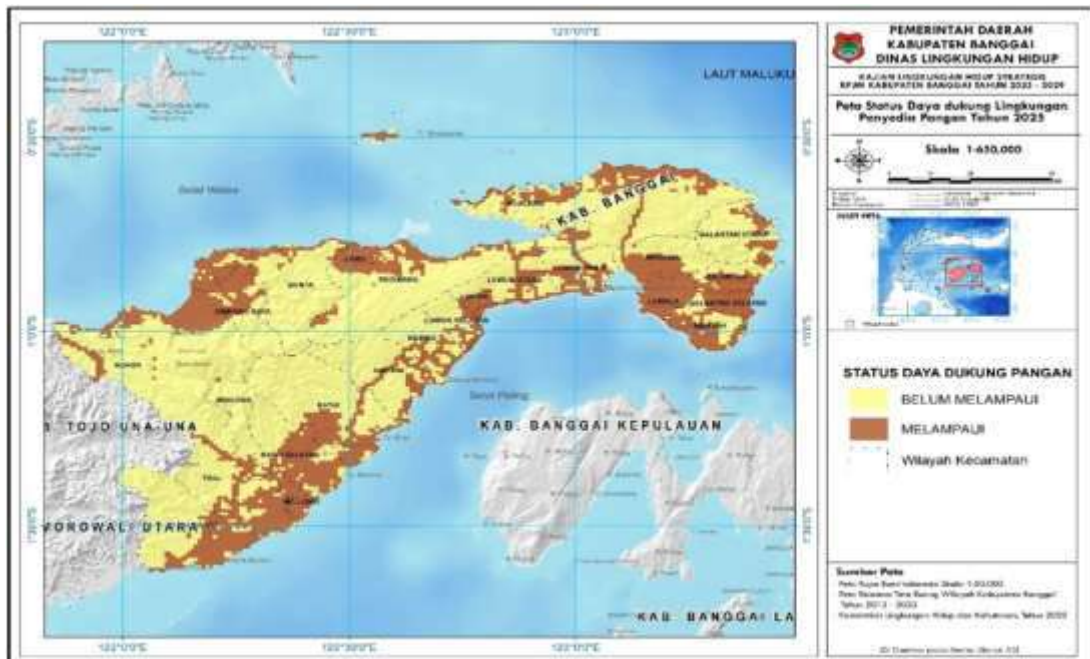
Sumber : Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Kabupaten Banggai

Nilai kebutuhan pangan di Kabupaten Banggai dikaji berdasarkan hasil distribusi penduduk di Kabupaten Banggai pada setiap grid, yang kemudian digunakan untuk menghitung kebutuhan penduduk terhadap pangan menggunakan standar angka kecukupan energi (AKE) yaitu 2.150/hari/kapita. Dalam dokumen KLHS ini, nilai kebutuhan pangan pada kajian daya dukung untuk penyedia pangan, didasarkan pada populasi penduduk di awal dan akhir periode waktu implementasi RPJMD, yaitu dengan berdasarkan hasil analisis laju pertumbuhan populasi penduduk tahun 2019-2021 sebagai tahun dasar analisis, maka didapatkan data proyeksi populasi penduduk tahun 2025 sebagai tahun awal implementasi RPJMD kabupaten Banggai, kemudian populasi penduduk tahun 2029 sebagai hasil proyeksi populasi pada akhir periode implementasi RPJMD kabupaten Banggai 2025-2029. Dengan mempertimbangkan dinamika dan tekanan jumlah penduduk, ketersediaan pangan serta kebutuhan pangan, estimasi status indikatif daya dukung penyedia pangan dilakukan dengan asumsi bahwa dalam pendekatan ini, komponen ketersediaan pangan berdasarkan kondisi bentang alam, penutupan



lahan dan sebaran vegetasi asli, yang mana telah direpresentasikan dalam bentuk indeks jasa ekosistem penyedia pangan, tidak mengalami perubahan.

Gambar 2.5
Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Banggai
Tahun 2025

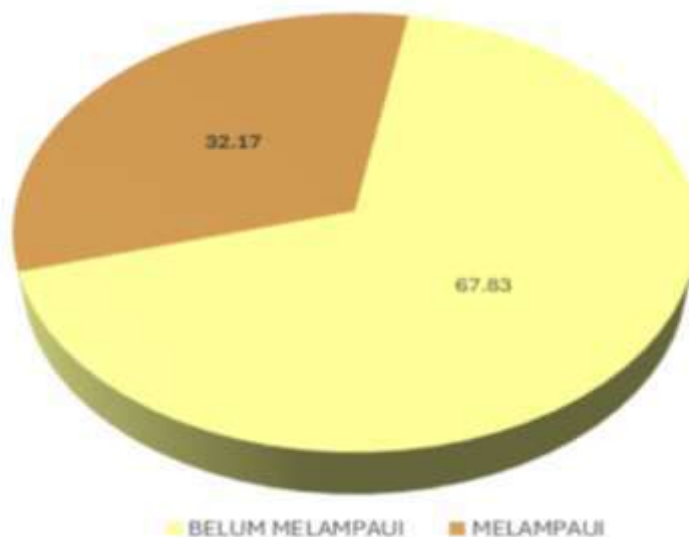


Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Hasil perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Banggai, kemudian digunakan untuk menghitung status daya dukung daya tampung penyediaan pangan dalam rangka mengetahui apakah tingkat penyediaan bahan pangan di Kabupaten Banggai sudah terlampaui atau belum terlampaui. Hasil perhitungan status daya dukung penyedia pangan di Kabupaten Banggai pada tahun 2025 disajikan pada gambar 2.6 di atas dan gambar 2.7 berikut.



Gambar 2.6
Grafik Persentase
Luas Wilayah Berdasarkan Status Daya Dukung
Penyedia Pangan Di Kabupaten Banggai Tahun 2025



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

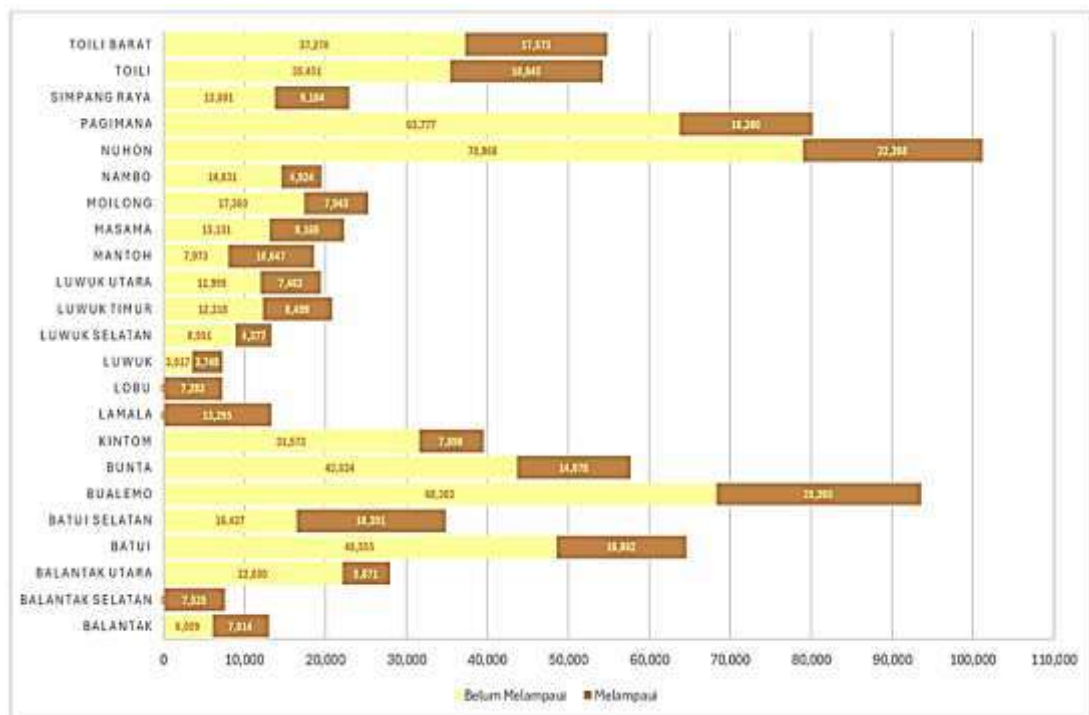
Dari tampilan peta dan diperjelas dengan grafik di atas, pada kondisi lingkungan tahun 2025, terlihat bahwa luas wilayah Kabupaten Banggai dengan status daya dukung penyedia pangan yang telah melampaui adalah sebesar 32,17% dari total luas wilayah Kabupaten Banggai, yang berarti lebih kecil dibanding dengan luas wilayah yang memiliki status daya dukung penyedia pangan belum terlampaui, yaitu 67,83% dari total wilayah Kabupaten Banggai. Dan jika dicermati bahwa daerah atau wilayah kabupaten Banggai yang memiliki daya dukung penyedia pangan telah terlampaui, umumnya berada pada wilayah yang memiliki tekanan penduduk yang relatif tinggi akibat pertambahan populasi, dan juga dipicu oleh pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang mengalami perkembangan di tingkat kecamatan, khususnya terkait dengan pengembangan wilayah pertanian dan permukiman. Gambaran mengenai status daya dukung penyedia pangan pada tahun 2025 di setiap wilayah



kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai, dapat dilihat pada gambar 2.7 di bawah ini.

Gambar 2.7

Grafik Sebaran Luasan Daya Dukung Penyedia Pangan Perwilayah Kecamatan Di Kabupaten Banggai Tahun 2025



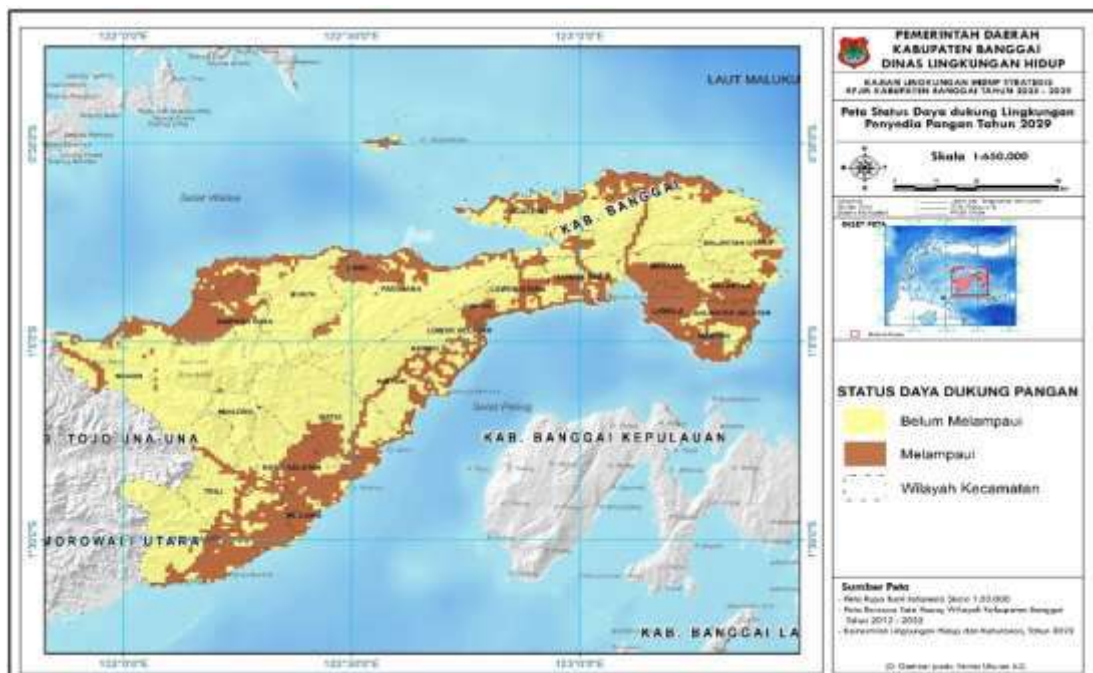
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Berdasarkan gambar grafik diatas status daya dukung penyedia pangan pada tahun 2025 di setiap wilayah kecamatan di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan Nuhoan, kecamatan Bualemo dan kecamatan Pagimana merupakan wilayah kecamatan yang relatif lebih luas dibanding wilayah kecamatan yang lain, dan juga pada tiga kecamatan tersebut, memiliki potensi wilayah yang masih relatif luas dengan status daya dukung lingkungan belum terlampaui dalam hal penyediaan pangan. Sementara kecamatan Lobu, kecamatan Balantak Selatan dan Kecamatan Lamala, adalah tiga wilayah kecamatan yang luas wilayahnya relatif lebih kecil, dan terlihat kondisi lingkungannya tidak lagi memiliki wilayah yang dapat mendukung penyediaan pangan secara mandiri, atau ketiga wilayah kecamatan ini memiliki



status daya dukung lingkungan untuk penyedia pangan telah melampaui ambang batas. Sementara kecamatan Luwuk, kecamatan Mantoh dan kecamatan Balantak, terlihat daya dukung lingkungan di wilayahnya, hampir sebagian atau sekitar 50% wilayahnya telah berstatus melampaui ambang batas untuk daya dukung penyediaan pangan. Dan untuk kecamatan lainnya terlihat bahwa luasan lingkungan dengan daya dukung yang telah melampaui ambang batas dalam penyediaan pangan, adalah kurang dari 40% persen luas wilayahnya. Dan berikut untuk hasil analisis prediksi kondisi daya dukung penyedia pangan Kabupaten Banggai pada tahun 2029 dapat dilihat pada gambar 2.8 dan gambar 2.9 di bawah ini.

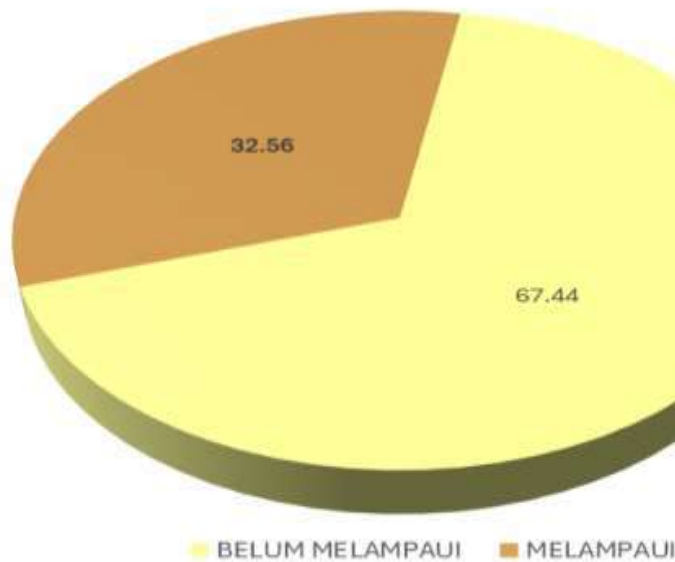
Gambar 2.8
Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Banggai
Tahun 2029



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029



Gambar 2.9
Grafik Persentase Luas Wilayah
Berdasarkan Status Daya Dukung Penyedia Pangan
Di Kabupaten Banggai Tahun 2029



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

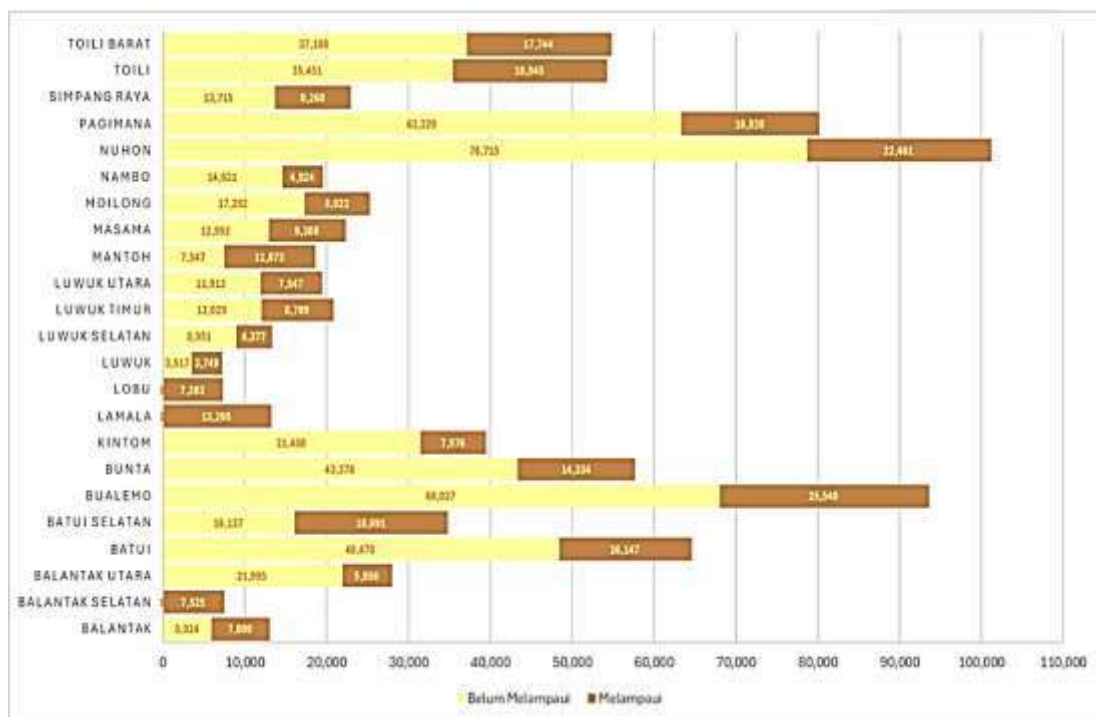
Dari tampilan peta dan grafik di atas, kondisi lingkungan tahun 2029 terlihat bahwa luas wilayah Kabupaten Banggai dengan status daya dukung penyedia pangan yang telah melampaui adalah sebesar 32,56 % dari total luas wilayah Kabupaten Banggai, yang berarti telah terjadi peningkatan sebesar 0.39% dibanding kondisi daya dukung lingkungan pada tahun 2025. Dan sebaliknya bahwa luas wilayah dengan daya dukung lingkungan yang belum melampaui ambang batas pada tahun 2025, dalam tahun 2029 luasan wilayah yang terindikasi belum melampaui ambang batas daya dukung lingkungan untuk penyediaan pangan, luasannya berkurang sebesar 0,39% sehingga sehingga berubah menjadi 67,44% dari total luas wilayah kabupaten Banggai. Dari data tersebut juga terlihat bahwa luasan wilayah kabupaten Banggai berdasarkan sebaran status daya dukung lingkungan untuk penyediaan pangan, pada tahun 2029 masih didominasi Kawasan dengan status daya dukung lingkungan yang



belum melampaui ambang batas. Demikian pula pola sebarannya, masih serupa dengan pola penyebaran yang dipicu dan didorong oleh tekanan penduduk dan perkembangan wilayah yang ada.

Selanjutnya untuk gambaran mengenai prediksi status daya dukung penyedia pangan pada tahun 2029 di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai, dapat dilihat pada gambar 2.10 di bawah ini.

Gambar 2.10
Grafik Sebaran Luasan Daya Dukung Penyedia Pangan Perwilayah Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2029



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Berdasarkan grafik status daya dukung penyedia pangan pada tahun 2029 di setiap wilayah kecamatan di atas, pola distribusi yang hampir serupa dengan tahun 2025. Akan tetapi juga diketahui bahwa umumnya pada wilayah kecamatan yang masih terdapat kawasan dengan daya dukung lingkungan penyedia pangan yang belum terlampaui, maka luasannya cenderung mengalami penurunan, dan ini berarti kawasan dengan daya dukung lingkungan yang telah



melampaui ambang batas untuk penyediaan pangan di kecamatan-kecamatan tersebut, luasannya cenderung mengalami peningkatan, kecuali untuk wilayah kecamatan Lobu, kecamatan Balantak Selatan dan Kecamatan Lamala, adalah tiga wilayah kecamatan yang teridentifikasi memiliki luas wilayahnya relatif kecil dan pada tahun 2029 kondisi atau status daya dukung lingkungannya tidak berubah, karena seluruh wilayahnya pada tahun 2025 terindikasi telah melampaui ambang batas daya dukung untuk penyediaan pangan, sehingga kondisinya pada tahun 2029, wilayah masih tetap didominasi kawasan dengan status daya dukung lingkungan yang telah melampaui ambang batas. Dan jika memperhatikan data ketersediaan bahan pangan secara alami di kabupaten Banggai pada tahun 2022, adalah sebesar 241.489.049.974,19 Kkal, sehingga ambang batas atau jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung ketersediaan pangan dalam jumlah tersebut adalah 307.359 jiwa. Sehingga dengan mengacu standar kelayakan konsumsi energi pangan sebesar 2.150 Kkal/kapita/tahun maka status daya dukung lingkungan untuk penyediaan pangan di kabupaten Banggai sejak tahun 2025, secara umum telah berstatus melampaui ambang batas daya dukung, karena jumlah penduduk pada tahun 2025 telah mencapai 409.392 jiwa, yang mana jumlah tersebut lebih besar dari pada ambang batas yang telah disebutkan sebelumnya, yakni dengan selisih mencapai 102.033 jiwa.

Untuk melihat dinamika status daya dukung lingkungan di Kabupaten Banggai untuk penyediaan pangan selama periode implementasi RPJMD tahun 2025-2029, maka berikut disusun suatu ringkasan atau rekapitulasi gambaran perbandingan kondisi lingkungan pada tahun 2025 dan tahun 2029 terkait dengan status daya dukung penyediaan pangan di kabupaten Banggai, yang disajikan dalam tabel 2.9 berikut ini.





Tabel 2.9

Rekapitulasi Dinamika Lingkungan di Kabupaten Banggai Terkait Perbandingan Status Daya Dukung Lingkungan Penyedia Pangan Pada Tahun 2025 dan Tahun 2029

Kecamatan	Proyeksi Populasi Penduduk (Jiwa)		Ketersediaan Pangan (Kkal)	Proyeksi Kebutuhan Pangan (Kkal)		Ambang batas (Jiwa)	Persentase Luas wilayah berdasarkan status daya dukung air (% Luas)			
	2025	2029		2025	2029		2025		2029	
							BELUM MELAMPAUI	MELAMPAUI	BELUM MELAMPAUI	MELAMPAUI
BALANTAK	6.624	6.988	4.630.988.453,2	5.198.214.916,1	5.483.833.000,0	5873	46,14	53,86	45,49	54,51
BALANTAK SELATAN	5.551	5.860	13.545.037,5	4.355.839.204,3	4.588.635.000,0	0	0,00	100,00	0,00	100,00
BALANTAK UTARA	4.991	5.273	3.463.167.235,4	3.916.437.523,2	4.137.986.750,0	4380	79,00	21,00	78,69	21,31
BATUI	19.215	20.368	12.865.554.881,9	15.078.831.229,2	15.983.788.000,0	16424	75,14	24,86	75,01	24,99
BATUI SELATAN	16.438	17.441	11.238.051.296,4	12.899.885.783,8	13.686.824.750,0	14421	47,19	52,81	46,33	53,67
BUALEMO	20.582	21.421	15.083.259.577,2	16.159.833.818,7	16.810.129.750,0	19151	73,00	27,00	72,70	27,30
BUNTA	22.896	24.344	16.003.877.764,3	17.998.706.299,9	19.103.954.000,0	20169	75,61	24,39	75,16	24,84
KINTOMI	12.056	12.786	8.263.090.675,2	9.461.180.322,9	10.033.813.500,0	10392	80,81	19,99	79,79	20,21
LAMALA	7.627	8.062	9.771.069,0	5.985.156.408,7	6.326.654.500,0	0	0,00	100,00	0,00	100,00
LOBU	4.104	4.320	7.255.463,5	3.220.501.995,5	3.380.120.000,0	0	0,00	100,00	0,00	100,00
LUNUK	42.150	44.763	67.578.647,6	33.077.362.967,5	35.127.764.250,0	113	48,40	51,60	48,40	51,60
LUNUK SELATAN	26.485	28.083	18.032.647.459,1	20.768.561.674,2	22.038.134.250,0	22981	67,16	32,84	67,16	32,84
LUNUK TIMUR	13.326	14.117	9.227.879.931,3	10.467.962.344,8	11.078.315.750,0	11742	59,17	40,83	57,78	42,22
LUNUK UTARA	20.035	21.243	13.475.277.466,9	15.722.444.644,3	16.670.444.250,0	17125	61,66	38,34	61,22	38,78
MANTOH	7.976	8.430	5.663.971.654,9	6.259.421.854,7	6.615.442.500,0	7182	42,82	57,18	40,53	59,47
MASAWA	13.172	13.955	9.194.557.892,8	10.337.047.462,7	10.951.186.250,0	11707	58,88	41,12	58,26	41,74
MOLONG	22.181	23.538	15.582.315.223,1	17.406.760.483,7	18.471.445.500,0	19783	68,60	31,40	68,30	31,70
NAMBO	9.562	10.119	6.650.458.906,1	7.503.548.543,4	7.940.885.250,0	8514	74,82	25,18	74,82	25,18
NUHON	22.368	23.740	15.661.358.199,7	17.553.474.357,8	18.629.965.000,0	19835	78,05	21,95	77,80	22,20
PAGIMANA	29.251	32.612	18.971.089.073,7	22.954.981.597,2	25.582.267.000,0	24303	79,57	20,43	79,01	20,99
SIMPANG RAYA	16.912	17.926	11.889.768.374,9	13.271.880.539,8	14.067.428.500,0	15159	60,04	39,96	59,67	40,33
TOILI	39.790	42.573	27.318.647.241,9	31.225.095.117,0	33.408.161.750,0	34886	65,29	34,71	65,29	34,71
TOILI BARAT	26.068	27.886	18.134.938.378,3	20.496.880.420,0	21.710.893.500,0	23219	67,96	32,04	67,65	32,35
Jumlah	409.392	435.628	241.489.049.974,2	321.270.829.499,4	341.859.073.000,0	387359	67,83	32,17	67,44	32,56

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Dari data tabel 2.9 tersebut, diketahui bahwa berdasarkan nilai ambang batas jumlah penduduk yang dapat didukung oleh ketersediaan pangan di masing-masing wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai, terlihat adalah nilai ambang batas lebih kecil dibanding jumlah penduduk pada tahun 2025, dan demikian pula halnya pada tahun 2029, karena berdasarkan hasil estimiasi proyeksi penduduk tahun 2029 diketahui penduduk Kabupaten Banggai mengalami pertambahan populasi yang tersebar merata disemua wilayah kecamatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa status daya dukung pangan di kabupaten Banggai tidak mengalami perubahan



atau perbaikan, karena statusnya masih sama dengan kondisi pada tahun 2025, yaitu telah melampaui ambang batas daya dukung penyediaan pangan. Sementara dari pola dinamika spasialnya, terlihat ada perubahan secara merata, yaitu terjadi kecenderungan peningkatan luas kawasan lingkungan yang telah melampaui ambang batas terkait daya dukung lingkungan dalam penyediaan pangan. Tentunya kondisi ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak, dan perlu ada upaya dan intervensi dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengendalikannya.

b. Daya Dukung Air

Data ketersediaan air di Kabupaten Banggai mengacu pada hasil identifikasi nilai potensi air di Kabupaten Banggai pada setiap sumber-sumber air yang dilaporkan dalam dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung (D3TLH) Kabupaten Banggai. Dari laporan tersebut diketahui bahwa perhitungan ketersediaan air di Kabupaten Banggai merupakan hasil identifikasi potensi debit air berdasarkan perhitungan limpasan tertimbang dari 71 daerah aliran sungai (DAS). Nilai potensi pada setiap sumber-sumber air tersebut kemudian digabung dengan sistem grid dan indeks jasa lingkungan penyediaan air sehingga terdistribusikan sebagai potensi air pada setiap grid. Adapun ketersediaan air yang bersumber dari debit air limpasan permukaan pada lokasi 71 DAS Kabupaten Banggai disajikan pada tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10
Potensi Ketersediaan Air di Kabupaten Banggai
yang Bersumber Dari 71 DAS di Kabupaten Banggai

No	Nama Das	Luas (Ha)	Koefisien Limpasan Tertimbang	Curah Hujan (mm/tahun)*	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)
1	DAS TOKU	19,424.28	0.12	1,246.41	29,555,914.92
2	DAS AUK/HEK	11,942.62	0.08	1,865.37	17,732,733.82
3	DAS BAKUNG	15,647.17	0.07	2,081.16	22,446,939.45
4	DAS BALANTAK	6,886.63	0.09	1,444.74	8,496,865.64
5	DAS BALINGARA	67,868.86	0.05	2,374.07	87,927,369.08



No	Nama Das	Luas (Ha)	Koefisien Limpasan Tertimbang	Curah Hujan (mm/tahun)*	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)
6	DAS BANGKETA	41,963.30	0.06	1,865.37	46,608,230.64
7	DAS BANTAYAN	15,851.42	0.18	1,556.60	44,197,895.59
8	DAS BATUI	51,486.32	0.06	1,871.19	59,382,024.81
9	DAS BELA	9,850.66	0.08	1,811.29	14,150,271.29
10	DAS BIAK	9,100.61	0.11	1,170.35	11,721,368.09
11	DAS BOALEMO	15,751.22	0.05	1,479.35	11,212,328.83
12	DAS BOLAANG	8,951.21	0.08	1,865.37	13,236,686.34
13	DAS BONGKA	332,733.76	0.10	2,169.75	700,095,368.55
14	DAS BUNTA	26,206.69	0.07	1,672.69	30,014,034.57
15	DAS DOLIAN	8,759.08	0.10	1,700.06	14,299,570.19
16	DAS DONGIN	10,661.06	0.11	2,733.20	33,421,599.45
17	DAS HUNDUHON	12,876.18	0.15	1,556.60	30,266,305.41
18	DAS KALAKA	2,172.50	0.28	1,672.69	10,017,060.58
19	DAS KALUMBANGAN	8,385.03	0.21	1,672.69	30,007,850.71
20	DAS KAUHUNGKANG	9,929.08	0.04	2,374.07	9,119,814.06
21	DAS KAUNYO SIUNA	12,688.74	0.13	1,507.62	24,992,450.44
22	DAS KAYOWA	14,899.60	0.08	2,081.16	25,740,682.24
23	DAS KINTOM DAS	12,385.52	0.11	1,411.20	19,278,615.09
24	LAMBANGAN	16,100.92	0.04	1,227.10	7,758,021.34
25	DAS LIALIATONGO	650.51	0.13	1,811.29	1,522,127.74
26	DAS LOBU	35,218.33	0.04	1,502.18	22,944,567.43
27	DAS LOMBA	16,572.74	0.09	1,580.38	22,679,184.98
28	DAS LONGKONGA	3,945.21	0.12	1,479.35	7,182,009.09
29	DAS LUK	2,084.93	0.20	2,081.16	8,557,499.39
30	DAS LUOK	968.34	0.14	1,246.41	1,714,050.58
31	DAS MAAHAS	8,565.38	0.04	1,334.73	4,088,779.20
32	DAS MALIK	31,620.91	0.07	1,508.39	32,440,498.56
33	DAS MANSANDAK	3,329.86	0.30	1,556.60	15,538,889.02
34	DAS MANTAWA	17,092.08	0.11	2,755.14	52,049,331.33
35	DAS MATINDUK	5,747.25	0.16	2,324.66	21,656,376.28
36	DAS MAYAYAP	7,203.82	0.08	1,506.22	9,128,085.35
37	DAS MENDONO	16,258.36	0.06	1,411.20	13,801,570.73
38	DAS MONTU	7,701.26	0.15	1,490.47	17,682,022.39
39	DAS NAMBO	14,646.71	0.24	1,377.15	48,724,841.02
40	DAS NIPA	6,293.54	0.21	1,551.11	20,544,849.91
41	DAS ODOLIA	531.08	0.23	2,906.03	3,495,738.15
42	DAS OMA	3,637.96	0.14	1,479.35	7,338,869.48
43	DAS OMOLU	3,227.78	0.16	1,871.19	9,931,159.18
44	DAS OWAN	15,742.42	0.11	1,700.06	29,842,064.82
45	DAS P. BUAYO	17.85	0.15	1,506.22	40,869.77
46	DAS P. POAT	2,189.50	0.08	1,813.23	3,002,595.14
47	DAS PAGIMANA	3,687.28	0.10	1,506.22	5,530,694.47



No	Nama Das	Luas (Ha)	Koefisien Limpasan Tertimbang	Curah Hujan (mm/tahun)*	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)
48	DAS PAKOWA	12,443.11	0.09	1,227.10	13,984,151.46
49	DAS PAREOTI	7,963.98	0.07	2,872.65	16,981,632.23
50	DAS PATIPATI	6,261.47	0.10	1,506.22	9,327,723.75
51	DAS PETAK	1,355.58	0.16	1,811.29	4,000,503.82
52	DAS POH	11,997.40	0.17	1,170.35	23,666,107.43
53	DAS RATA	4,571.76	0.20	2,912.60	26,662,385.31
54	DAS SABO	16,485.71	0.04	2,188.22	14,301,126.61
55	DAS SALIPI	1,908.80	0.10	1,506.22	2,878,897.84
56	DAS SAMAKU	6,157.09	0.15	999.12	9,238,642.34
57	DAS SAMBUANG	6,428.75	0.11	1,506.22	10,634,654.01
58	DAS SANDIMAK	3,295.51	0.29	1,556.60	15,021,300.44
59	DAS SIMPONG	3,816.65	0.19	1,334.73	9,646,946.07
60	DAS SINORANG	29,261.29	0.10	2,324.66	65,513,846.04
61	DAS SOHO	5,872.08	0.21	1,334.73	16,374,564.37
62	DAS SUKON	4,698.53	0.11	1,580.38	8,462,363.04
63	DAS TANASUMPU	8,290.69	0.09	2,871.96	20,465,587.81
64	DAS TANGKIANG	4,573.28	0.09	1,871.19	7,719,337.54
65	DAS TOIBA	3,062.78	0.10	1,506.22	4,397,063.88
66	DAS TOILI	69,531.71	0.14	2,364.66	227,503,726.67
67	DAS TOIMA	28,175.51	0.04	1,492.71	16,774,191.86
68	DAS TOMEANG	1,658.06	0.17	1,811.29	5,113,029.55
69	DAS TOPO	11,237.61	0.25	2,755.33	78,657,398.81
70	DAS USO	1,965.36	0.16	2,081.16	6,389,633.38
71	DAS WARU	9,382.58	0.10	1,580.38	14,145,813.06

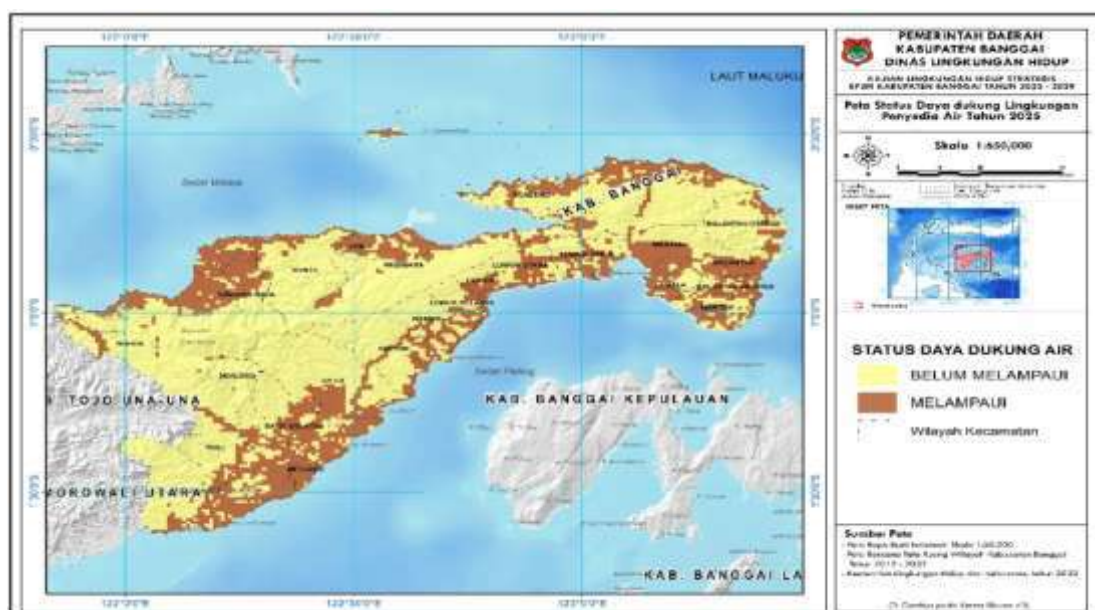
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Sementara nilai kebutuhan air di Kabupaten Banggai juga dinilai pada setiap grid berdasarkan hasil distribusi penduduk di Kabupaten Banggai pada setiap grid, yang kemudian digunakan untuk menghitung kebutuhan penduduk terhadap air menggunakan standar kebutuhan air domestic sebesar 1.600 m³/tahun/kapita. Dalam kajian daya dukung penyedia air, nilai kebutuhan pangan juga didasarkan pada 2 waktu yang berbeda, yaitu berdasarkan populasi penduduk tahun 2023 sebagai tahun dasar analisis, dan populasi penduduk tahun 2029 sebagai hasil proyeksi populasi pada akhir periode implementasi RPJMD kabupaten Banggai 2024-2029. Juga mempertimbangkan dinamika dan tekanan jumlah penduduk,

ketersediaan air serta kebutuhan air domestik, estimasi status indikatif daya dukung penyedia pangan dilakukan dengan asumsi bahwa dalam pendekatan ini, komponen ketersediaan air berdasarkan kondisi bentang alam, penutupan lahan dan sebaran vegetasi asli, yang mana telah direpresentasikan dalam bentuk indeks jasa ekosistem penyedia air, tidak mengalami perubahan.

Hasil perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Banggai, selanjutnya digunakan untuk menghitung status daya dukung daya tampung penyediaan air untuk mengidentifikasi apakah tingkat penyediaan bahan air di Kabupaten Banggai sudah terlampaui atau belum terlampaui. Perhitungan status daya dukung daya tampung juga dilakukan untuk mengetahui jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung kebutuhan airnya secara alamiah oleh karakteristik wilayah Kabupaten Banggai (Ambang Batas Populasi). Hasil perhitungan status daya dukung daya tampung air di Kabupaten Banggai Pada tahun 2025 disajikan pada gambar 2.11 dan gambar 2.12 berikut.

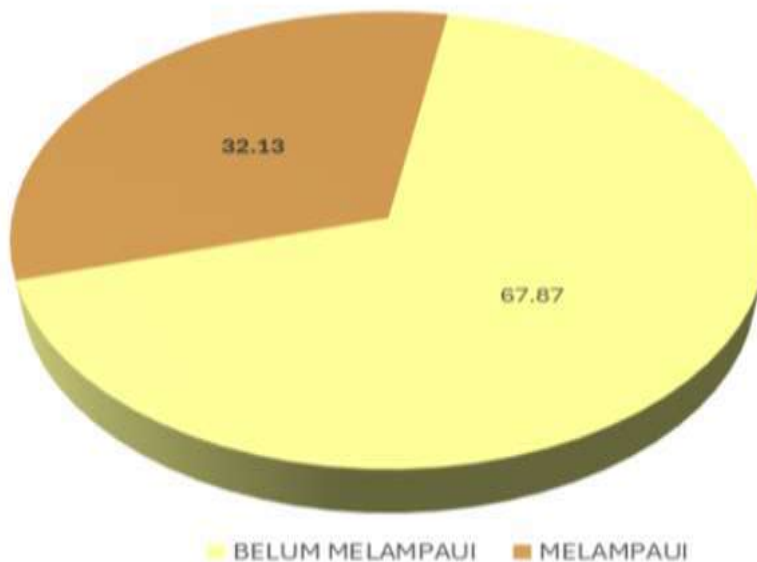
Gambar 2.11
Peta Daya Dukung Lingkungan Untuk Penyediaan Air
Di Kabupaten Banggai Tahun 2025



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029



Gambar 2.12
Grafik Persentase Luas Wilayah
Berdasarkan Status Daya Dukung Penyedia Air
Di Kabupaten Banggai Tahun 2025



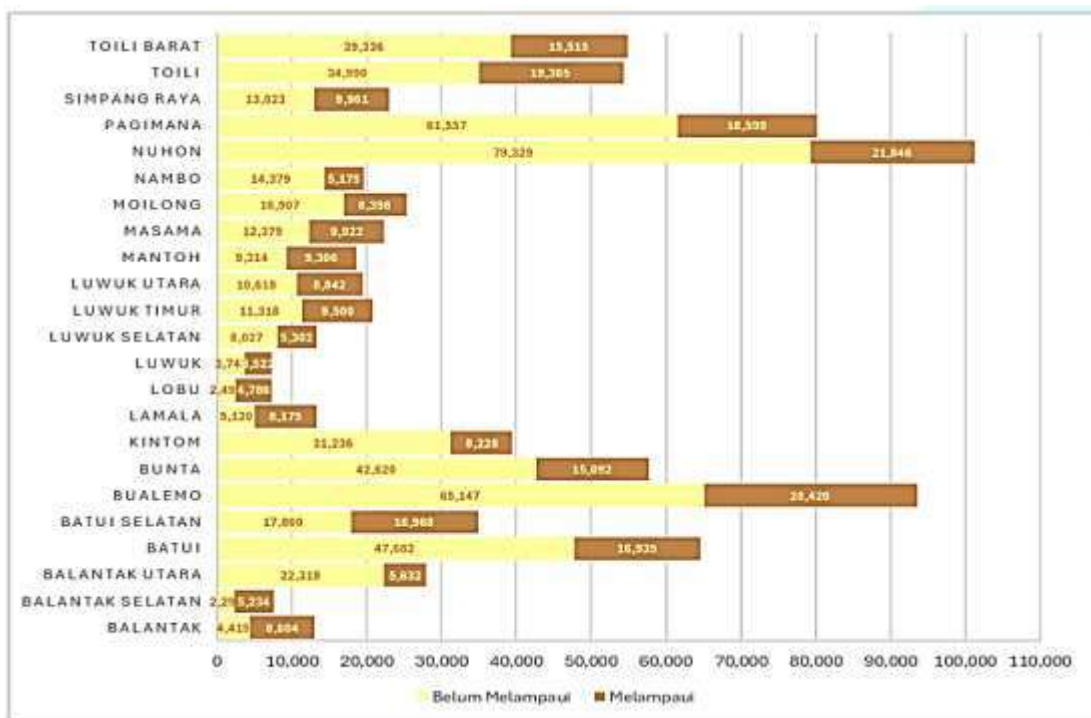
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Dari tampilan peta dan grafik di atas, kondisi lingkungan tahun pada 2025 terlihat bahwa luas wilayah Kabupaten Banggai dengan status daya dukung penyedia air yang telah melampaui adalah sebesar 32,13 % dari total luas wilayah Kabupaten Banggai, yang berarti lebih kecil dibanding dengan luas wilayah yang memiliki status daya dukung penyedia air belum terlmapaui, yaitu 67,87% dari total wilayah Kabupaten Banggai. Pola spasial ini hampir sama dengan pola spasial daya daya dukung pangan yang telah dibahas sebelumnya, karena jika dicermati bahwa daerah atau wilayah kabupaten Banggai yang memiliki daya dukung penyedia air telah terlampaui, umumnya berada pada wilayah yang memiliki tekanan penduduk yang relatif tinggi akibat pertambahan populasi, dan juga dipicu oleh pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang mengalami perkembangan ditingkat kecamatan, khususnya terkait dengan pengembangan wilayah pertanian dan permukiman. Gambaran mengenai status daya



dukung penyedia air pada tahun 2025 di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai, dapat dilihat pada Gambar 2.13 di bawah ini.

Gambar 2.13
Grafik Status Daya Dukung Daya Tampung
Penyediaan Air Di Kabupaten Banggai Tahun 2025



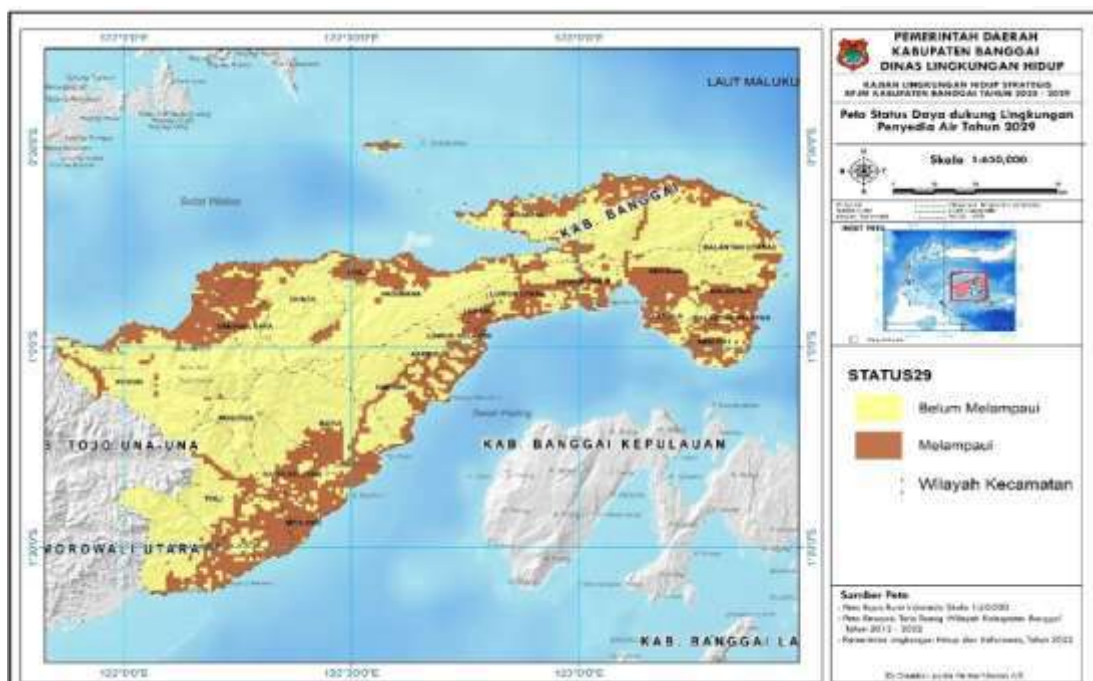
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Berdasarkan grafik status daya dukung penyedia air pada tahun 2025 di setiap wilayah kecamatan di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan Nuhoan, kecamatan Bualemo dan kecamatan Pagimana merupakan wilayah kecamatan yang relatif lebih luas dibanding wilayah kecamatan yang lain, dan juga pada tiga kecamatan tersebut, memiliki potensi wilayah yang masih relatif luas untuk kawasan dengan status daya dukung lingkungan belum terlampaui dalam hal penyediaan air. Sementara kecamatan Lobu, kecamatan Balantak Selatan, kecamatan Balantak dan Kecamatan Lamala, adalah empat wilayah kecamatan yang luas wilayahnya relatif lebih kecil, dan terlihat kondisi lingkungannya, hampir sebagian atau lebih dari 50%



luasan wilayahnya telah berstatus melampaui ambang batas untuk daya dukung penyediaan air. Dan untuk kecamatan lainnya, terlihat bahwa luasan lingkungan dengan daya dukung yang telah melampaui ambang batas dalam penyediaan air, yakni rata-rata kurang dari 40% persen luas wilayahnya. Dan berikut untuk hasil analisis prediksi kondisi daya dukung penyedia air Kabupaten Banggai pada tahun 2029 dapat dilihat pada Gambar 2.14 dan Gambar 2.15 di bawah ini.

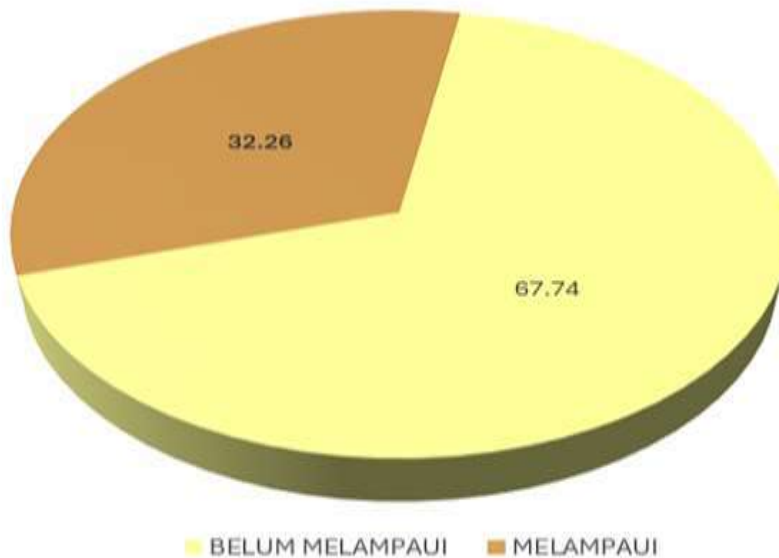
Gambar 2.14
Peta Daya Dukung Lingkungan Untuk Penyediaan Air
Di Kabupaten Banggai Tahun 2029



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029



Gambar 2.15
Grafik Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Daya Dukung
Penyedia Air Di Kabupaten Banggai Tahun 2029



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Berdasarkan grafik pada gambar 2.15 daya dukung penyedia air pada tahun 2029 di setiap wilayah kecamatan di atas, pola distribusi spasial yang hampir serupa dengan tahun 2025. Juga diketahui bahwa selain kecamatan Balantak Selatan, Batui Selatan, Bualemo, Lobu, Luwuk Timur, Mantoh dan Kecamatan Masama luasan kawasan berdasarkan status daya dukung air itu tidak berubah, sementara kecamatan lain umumnya pada kawasan dengan daya dukung lingkungan penyedia air yang belum terlampaui, luasannya cenderung mengalami penurunan, dan ini berarti kawasan dengan daya dukung lingkungan yang telah melampaui ambang batas untuk penyediaan air di kecamatan-kecamatan tersebut, luasannya cenderung mengalami peningkatan, kecuali untuk tujuh wilayah kecamatan yang disebutkan sebelumnya. Dan jika memperhatikan ketersediaan air secara alami di Kabupaten Banggai adalah sebesar 879.079.213,38 m, dimana ambang batas populasi atau jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung ketersediaan airnya secara alamiah



oleh Kabupaten Banggai adalah 549.277 jiwa. Sehingga berdasarkan jumlah penduduk pada Tahun 2025 sebesar 409.392 jiwa (versi data grid), daya dukung daya tampung penyediaan air Kabupaten Banggai pada tahun 2025, statusnya belum melampaui ambang batas atau jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung oleh ketersediaan air. Demikian pula pada tahun 2029, dapat disimpulkan secara umum wilayah kabupaten Banggai berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2029, yakni sebesar statusnya belum melampaui daya dukung penyediaan air 435.628 jiwa karena belum melampaui ambang batas populasi atau melampaui jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung oleh ketersediaan air di Kabupaten Banggai.

Untuk melihat dinamika status daya dukung lingkungan di Kabupaten Banggai untuk penyediaan air selama periode implementasi RPJMD tahun 2025 -2029, maka berikut disusun suatu ringkasan atau rekapitulasi gambaran perbandingan kondisi lingkungan pada tahun 2025 dan tahun 2029 terkait dengan status daya dukung penyediaan air di kabupaten Banggai, yang disajikan dalam tabel 2.11 berikut ini.





Tabel 2.11
Rekapitulasi Dinamika Lingkungan Di Kabupaten Banggai Terkait
Perbandingan Status Daya Dukung Lingkungan Penyedia Air Pada
Tahun 2025 dan Tahun 2029

Kecamatan	Proyeksi Populasi Penduduk (Jiwa)		Ketersediaan Air (m ³)	Proyeksi Kebutuhan Air Domestik (m ³)		Ambang batas (Jiwa)	Persentase Luas wilayah berdasarkan status daya dukung air (% Luas)			
							2025		2029	
	2025	2029			2025		2029	BELUM MELAMPAUI	MELAMPAUI	BELUM MELAMPAUI
BALANTAK	6.624	6.988	6,810,887.5	10,598,463.0	11,180,800.0	4267	33.93	66.07	33.90	66.10
BALANTAK SELATAN	5.551	5.860	4,503,444.0	8,880,971.9	9,376,000.0	2815	30.44	69.56	30.44	69.56
BALANTAK UTARA	4.991	5.273	15,125,290.7	7,985,090.8	8,436,800.0	9443	79.85	20.15	79.55	20.45
BATUI	19.215	20.368	38,609,960.9	30,743,714.5	32,588,800.0	24102	73.79	26.21	73.80	26.20
BATUI SELATAN	16.438	17.441	25,790,043.8	26,301,157.3	27,905,600.0	16110	51.28	48.72	51.16	48.84
BUALEMO	20.592	21.421	43,016,373.6	32,947,733.8	34,273,600.0	26832	69.63	30.37	69.63	30.37
BUNTA	22.936	24.344	20,659,246.1	36,696,948.2	38,950,400.0	12918	73.85	26.15	73.86	26.14
KINTOM	12.056	12.786	27,353,120.8	19,290,077.8	20,457,600.0	17110	79.15	20.85	78.94	21.06
LAMALA	7.627	8.062	6,553,289.5	12,202,931.2	12,899,200.0	4091	38.51	61.49	38.87	61.13
LOBU	4.104	4.320	1,468,898.5	6,566,171.6	6,912,000.0	919	34.29	65.71	31.95	68.05
LUWUK	42.150	44.763	4,811,178.2	67,440,306.8	71,620,800.0	3004	51.52	48.48	51.52	48.48
LUWUK SELATAN	26.465	28.083	7,199,047.5	42,344,311.8	44,932,800.0	4494	60.22	39.78	60.81	39.19
LUWUK TIMUR	13.326	14.117	15,335,124.4	21,322,382.6	22,587,200.0	9583	54.37	45.63	54.77	45.23
LUWUK UTARA	20.035	21.243	14,003,914.1	32,055,955.9	33,988,800.0	8742	54.56	45.44	54.56	45.44
MANTOH	7.976	8.430	13,174,734.9	12,762,121.7	13,488,000.0	8231	50.02	49.98	48.19	51.81
MASAMA	13.172	13.955	10,949,294.0	21,075,853.4	22,328,000.0	6836	55.51	44.49	55.51	44.49
MOILONG	22.181	23.538	26,279,734.6	35,490,050.0	37,660,800.0	16409	66.81	33.19	66.81	33.19
NAMBO	9.562	10.119	13,567,099.8	15,298,729.1	16,190,400.0	8492	73.53	26.47	73.10	26.90
NUHON	22.368	23.740	62,577,103.8	35,789,180.0	37,984,000.0	39095	78.41	21.59	78.15	21.85
PAGIMANA	29.251	32.612	33,357,933.1	46,802,128.8	52,179,200.0	20829	76.80	23.20	76.54	23.46
SIMPANG RAYA	16.912	17.926	12,578,021.9	27,059,604.8	28,681,600.0	7858	56.66	43.34	56.53	43.47
TOILI	39.790	42.573	77,564,276.9	63,663,781.1	68,116,800.0	48485	64.44	35.56	64.51	35.49
TOILI BARAT	26.068	27.666	397,791,194.8	41,708,835.5	44,265,600.0	248612	71.71	28.29	71.67	28.33
Jumlah	409,392	435,628	879,079,213.4	655,026,501.7	697,004,800.0	549277	67.87	32.13	67.74	32.26

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Dari data tabel 2.11 tersebut, diketahui bahwa berdasarkan nilai ambang batas jumlah penduduk yang dapat didukung oleh ketersediaan air dimasing-masing wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai, terlihat bahwa dari 23 wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai, 15 kecamatan diantaranya, yaitu terdiri dari kecamatan Balantak, Balantak Selatan, Batui Selatan, Bunta, Lamala, Lobu, Luwuk, Luwuk Selatan, Luwuk Timur, Luwuk Utara, Masam, Moiling, Nambo, Pagimana dan Kecamatan Simpang Raya, jumlah penduduknya pada tahun 2025 itu telah melampaui jumlah ambang



batas populasi yang dapat didukung oleh ketersediaan air atau telah melampaui jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung oleh ketersediaan air pada masing-masing wilayah kecamatan tersebut. Dan yang perlu mendapat perhatian, bahwa pada tahun 2029 terlihat bahwa wilayah kecamatan yang telah melampaui ambang batas populasi, bertambah satu kecamatan, yaitu kecamatan Mantoh, sehingga total wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai yang statusnya telah melampaui daya dukung penyedia air berjumlah 16 kecamatan pada tahun 2029. Ini memberi indikasi bahwa daya dukung penyediaan air di Kabupaten Banggai, cenderung menurun seiring dengan pertambahan waktu. Sekalipun jika memperhatikan total ambang batas populasi mencakup seluruh wilayah kabupaten Banggai, terlihat bahwa total jumlah penduduk pada tahun 2025 dan jumlah penduduk tahun 2029, belum melampaui total jumlah ambang batas di Kabupaten Banggai, yakni dapat mendukung penyediaan air untuk populasi sebesar 549.277 Jiwa. Tentunya kondisi ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak, dan perlu ada upaya dan intervensi dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengendalikan penurunan daya dukung lingkungan untuk penyediaan air di Kabupaten Banggai.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Ketahanan Energi

Ketahanan energi ini meliputi peningkatan akses dan ketersediaan energi bersih yang terus didorong untuk optimalisasi sumber energi terbarukan (EBT) untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Data pembangkit EBT eksisting Kabupaten Banggai tercantum pada tabel 2.12 berikut.





Tabel 2.12
Data Pembangkit EBT Eksisting Kabupaten Banggai (On Grid)

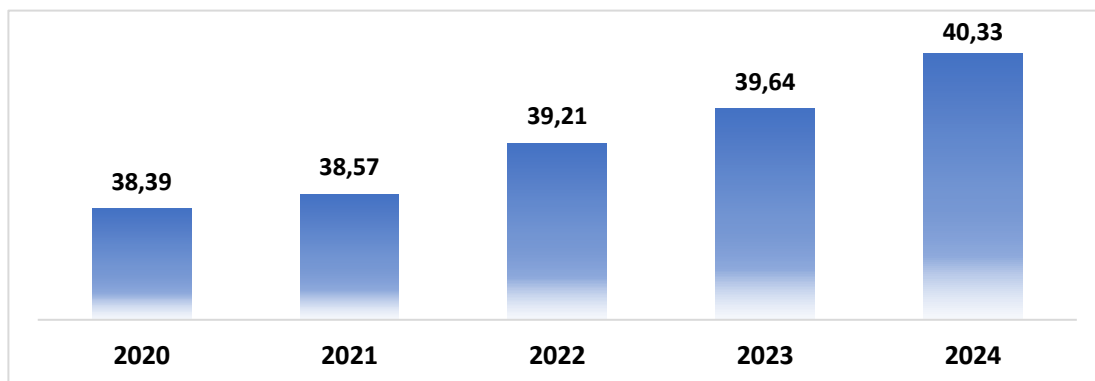
No.	Pemilik	Jenis	Nama Pembangkit	Bahan Bakar	Jumlah Unit	Kapasitas Terpasang	DMN	DMP Tertinggi	Tahun COD
1.	PLN	PLTM	PLTM Hanga-hanga	Air	1	1600 KW	1040 KW	1040 KW	1935
2.	PT. Buminata Cita Banggai Energi	PLTM	PLTM Kalumpang	Air	1	1200 KW	1000 KW	1000 KW	2025
3.	PT. Buminata Cita Banggai Energi	PLTM	PLTM Hanga-hanga II	Air	1	2552 KW	2200 KW	1840 KW	2005
4.	PT. Lambangan Energi Utama	PLTM	PLTM Lambangan	Air	2	3000 KW	2000 KW	2000 KW	2016
5.	PT. Adis Putra Pratama	PLTM	PLTM IPP HEK	Air	1	2500 KW	2350 KW	2000 KW	2010
6.	PLN	PLTMG	PLTMG Luwuk	Gas	1	40 MW	40 MW	40 MW	2018

Sumber : Buku Data dan Statistik DESDM, 2024

b. Ketahanan Air

Ketahanan air merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya air bagi kebutuhan domestik, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi ini adalah akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum. Di Kabupaten Banggai, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.16 berikut.

Gambar 2.16
Perkembangan Capaian Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



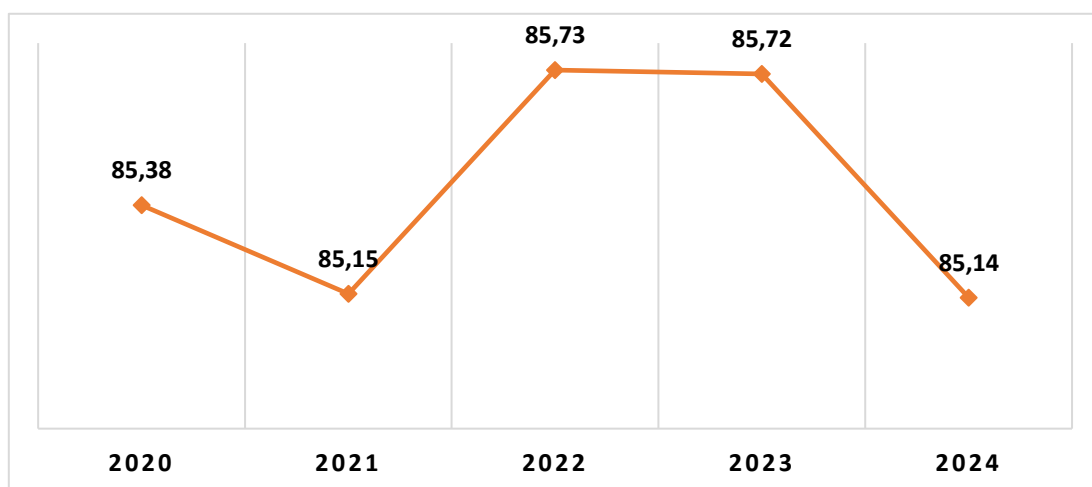
Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Banggai, 2025



c. Kemandirian Pangan

Kemandirian pangan merujuk pada kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan, baik melalui produksi lokal maupun distribusi yang stabil. Indikator utama kemandirian pangan adalah indeks ketahanan pangan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Indeks ketahanan pangan berbagai kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Tengah tercantum pada gambar 2.17 berikut.

Gambar 2.17
Indeks Ketahanan Pangan (%)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024

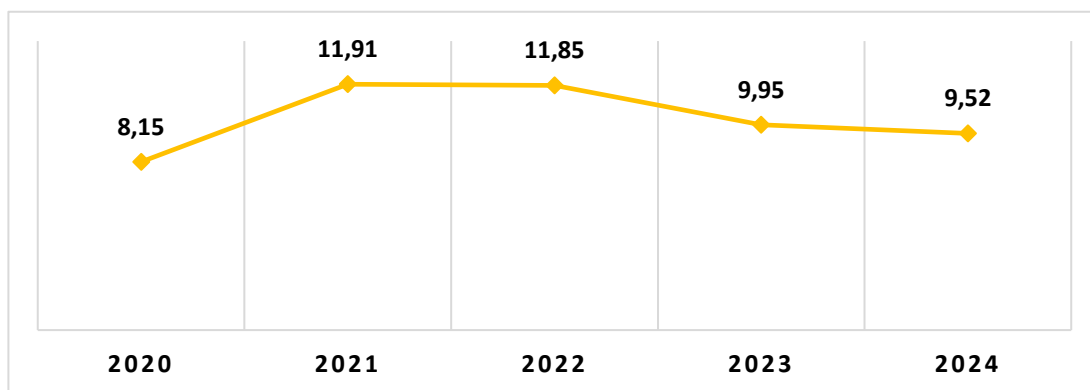


Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025



Indikator lainnya adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Angka PoU Kabupaten Banggai selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.18 berikut.

Gambar 2.18
Perkembangan PoU (Prevalence of Undernourishment)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025

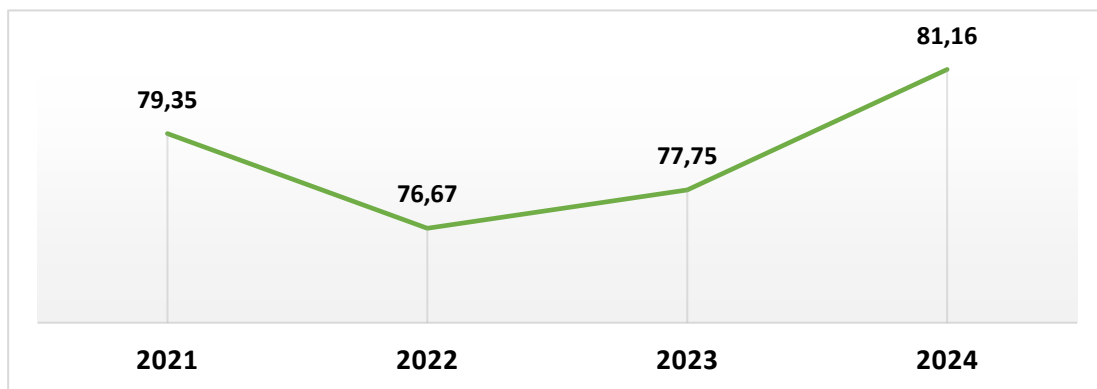
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas meliputi kondisi pengendalian pencemaran dan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktifitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi pengendalian pencemaran lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan adanya berbagai tantangan, khususnya terkait pengelolaan sampah dan pertambangan yang dapat berdampak negative terhadap lingkungan. Berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dan instansi terkait telah dilakukan dalam rangka pengendalian pencemaran tersebut, namun demikian implementasi kebijakan dan regulasi masih perlu ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting. Kualitas lingkungan hidup merupakan kondisi lingkungan yang memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Kondisi Ini mencakup kualitas udara, air, tanah, dan juga aspek sosial seperti kebersihan lingkungan dan keberlanjutan sumber



daya alam. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) salah satu indikator refresentatif yang dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas lingkungan suatu wilayah, membantu pengambilan keputusan, dan menjadi dasar bagi perencanaan kebijakan lingkungan yang efektif. Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banggai dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada gambar 2.19 berikut.

Gambar 2.19
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Banggai Tahun 2021-2024



Sumber: Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

Adapun komponen pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13
Komponen Pembentuk
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	70	68,33	66,57	65,56
Indeks Kualitas Udara	84,87	87,56	86,14	95,60
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	82,46	82,4	81,42	81,26

Sumber: Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

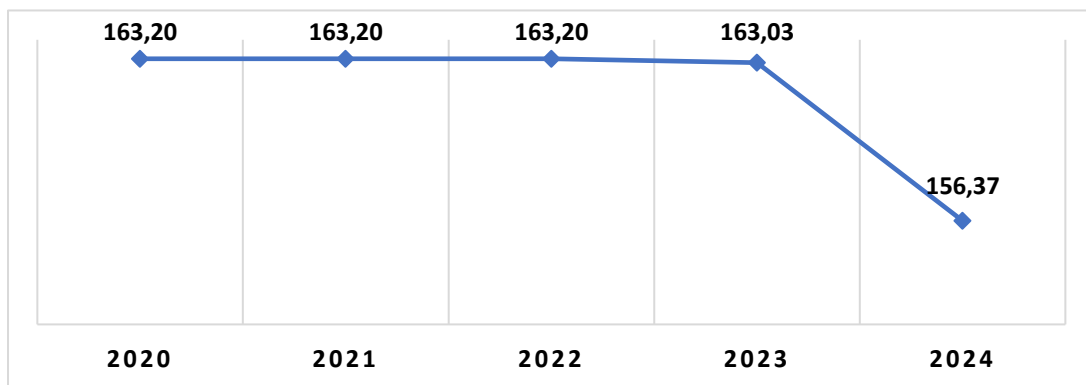


2.1.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana adalah indikator yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan akan terjadi jika suatu ancaman menjadi bencana disuatu wilayah. Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.20 berikut.

Gambar 2.20
Perkembangan Indeks Risiko Bencana (IRB)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



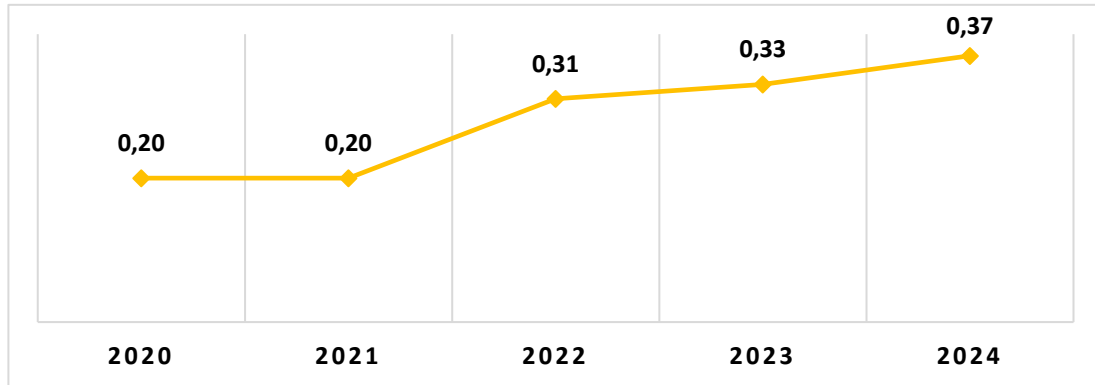
Sumber : BPBD Kabupaten Banggai, 2025

b. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana disuatu wilayah. IKD mengukur kemampuan wilayah untuk memitigasi risiko, beradaptasi terhadap perubahan, meminimalkan kerusakan, serta memulihkan diri secara sosial, ekonomi, dan lingkungan setelah bencana. Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.21 berikut.



Gambar 2.21
Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



Sumber : BPBD Kabupaten Banggai, 2025

2.1.1.7 Demografi

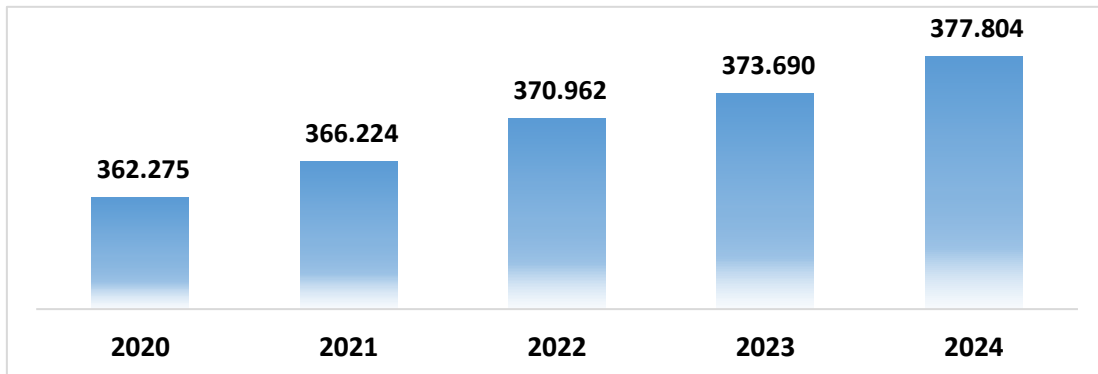
Penduduk merupakan faktor penting dalam proses Pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta pengerahan mobilitas sehinggamempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan.

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Banggai pada tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai sebesar 377.804 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 191.889 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 185.915 jiwa dengan rasio jenis kelamin 103,21 persen. Perkembangan Jumlah penduduk Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.22 berikut.



Gambar 2.22
Perkembangan Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024

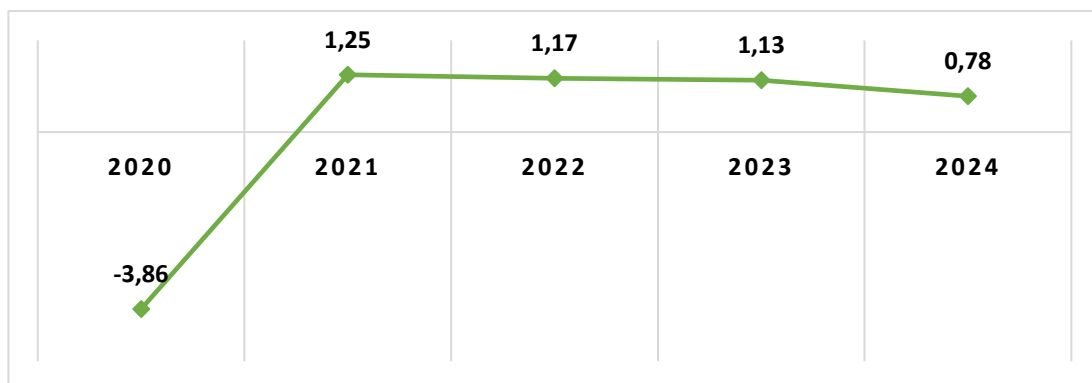


Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata Tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.23 berikut.

Gambar 2.23
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

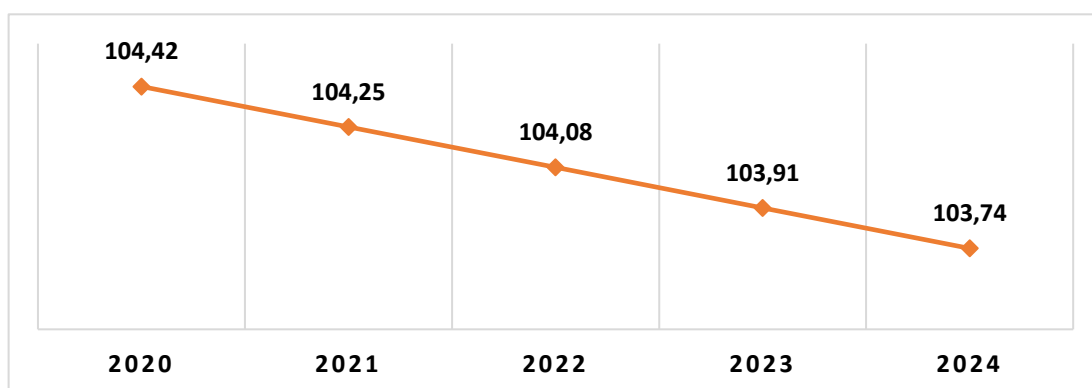
c. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam



banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.24 berikut.

Gambar 2.24
Rasio Jenis Kelamin (%)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024

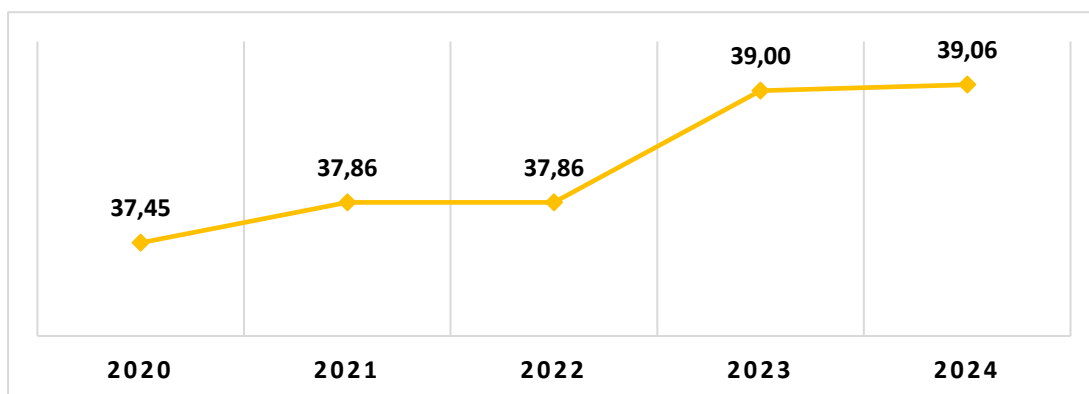


Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

d. **Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Kepadatan penduduk Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.25 berikut.

Gambar 2.25
Kepadatan Penduduk (per km²)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



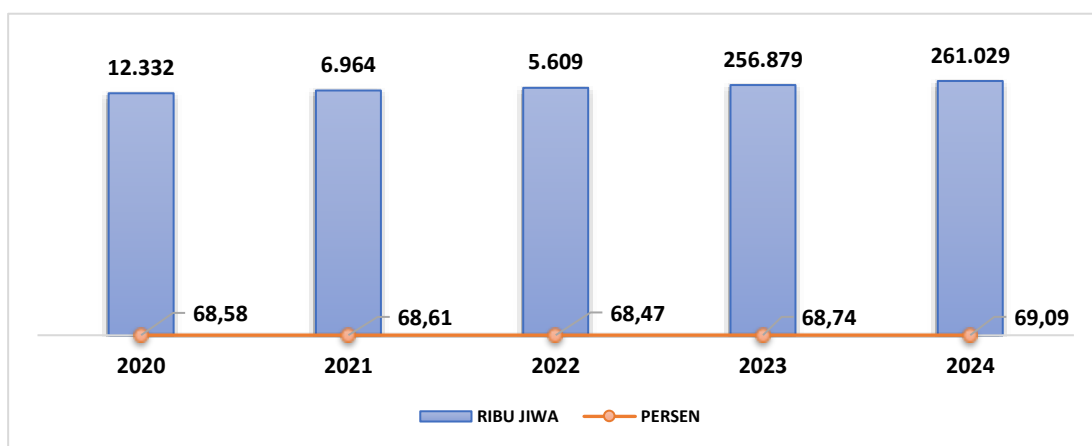
Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025



e. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah kondisi dimana proporsi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Fenomena ini menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang besar karena banyaknya angkatan kerja yang dapat mendorong produktivitas dan kesejahteraan. Bonus demografi Kabupaten Banggai pada tahun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.26 berikut.

Gambar 2.26
Perkembangan Bonus Demografi
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



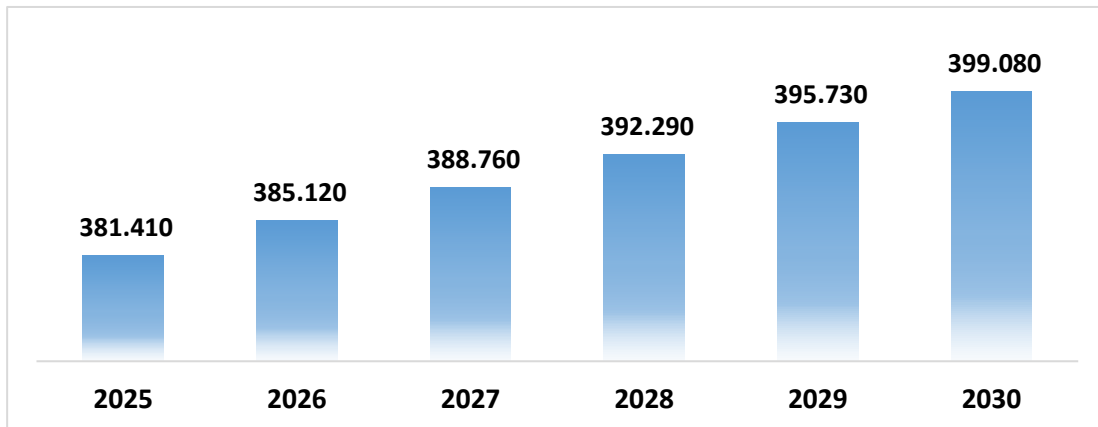
Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

f. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk adalah perhitungan ilmiah yang memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang, berdasarkan asumsi tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Perhitungan ini penting untuk merencanakan penyediaan kebutuhan dasar (pangan, air, perumahan), sarana dan prasarana (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi), serta kesempatan kerja secara lebih efisien dan akurat. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Banggai pada tahun tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 dapat dilihat pada gambar 2.27 berikut.



Gambar 2.27
Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030

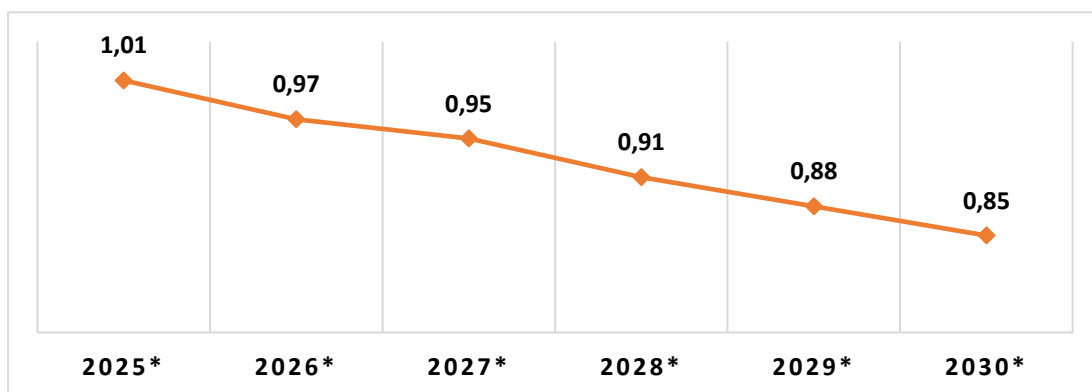


Sumber : BPS Sulawesi Tengah, 2025

g. Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk

Proyeksi laju pertumbuhan penduduk adalah perkiraan laju peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah pada masa mendatang, yang didasarkan pada asumsi-asumsi ilmiah mengenai tiga komponen utama: tingkat kelahiran (fertilitas), tingkat kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi). Jumlah penduduk Kabupaten Banggai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 diproyeksikan sebagaimana pada gambar 2.28 berikut.

Gambar 2.28
Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk (Jiwa)
Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030



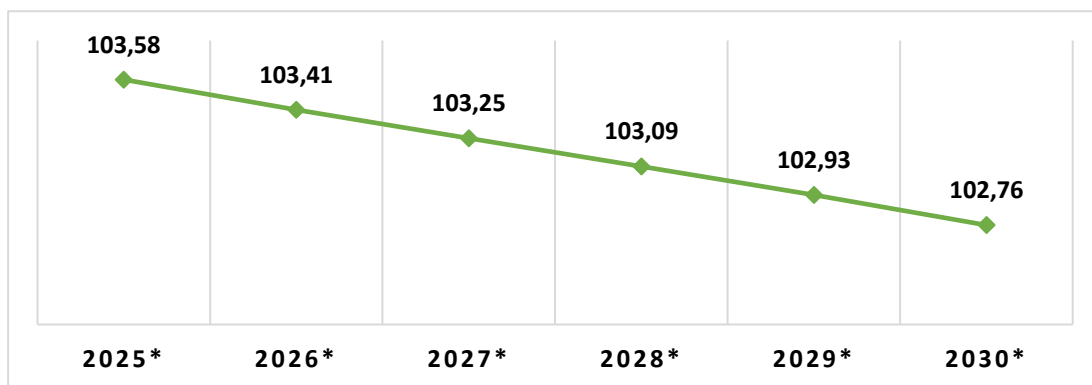
Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025



h. **Proyeksi Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)**

Proyeksi rasio jenis kelamin adalah perkiraan jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah atau negara pada periode waktu mendatang, dihitung dengan membagi jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan lalu dikalikan 100 (Rumus: $SR = (\text{Jumlah Laki-laki} / \text{Jumlah Perempuan}) \times 100$). Angka ini penting untuk memahami keseimbangan gender dan kebutuhan pembangunan di masa depan. Berikut adalah proyeksi rasio jenis kelamin di Kabupaten Banggai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 yang disajikan dalam bentuk grafik pada gambar 2.29.

Gambar 2.29
Proyeksi Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

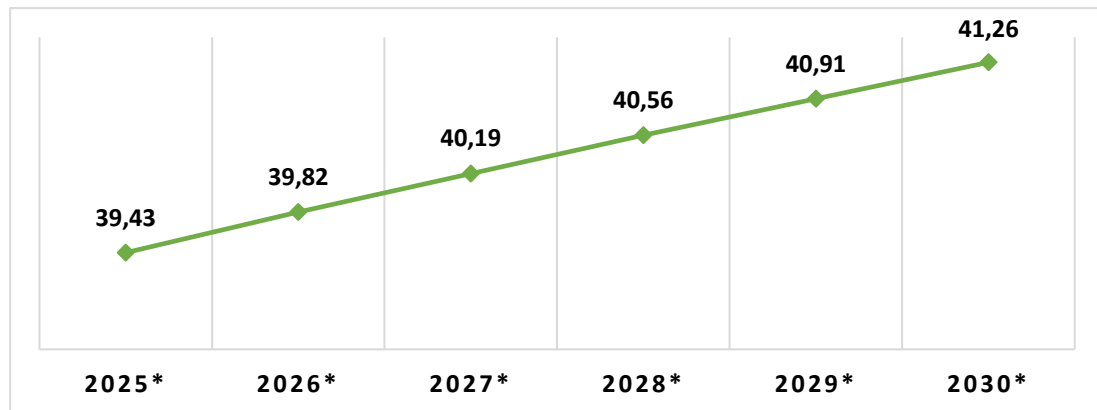
i. **Proyeksi Kepadatan Penduduk**

Proyeksi Kepadatan Penduduk Adalah perkiraan jumlah penduduk per satuan luas wilayah di masa depan, yang dihitung berdasarkan data pertumbuhan penduduk (kelahiran, kematian, dan migrasi) dari sensus dan survei penduduk. Proyeksi ini sangat penting untuk perencanaan pembangunan, seperti penyediaan pangan, sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, dan perumahan, serta digunakan untuk mengevaluasi kegiatan Pembangunan. Berikut adalah proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Banggai tahun 2025



sampai dengan tahun 2030 yang disajikan dalam bentuk grafik pada gambar 2.30.

Gambar 2.30
Proyeksi Kepadatan Penduduk (orang/km²)
Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030



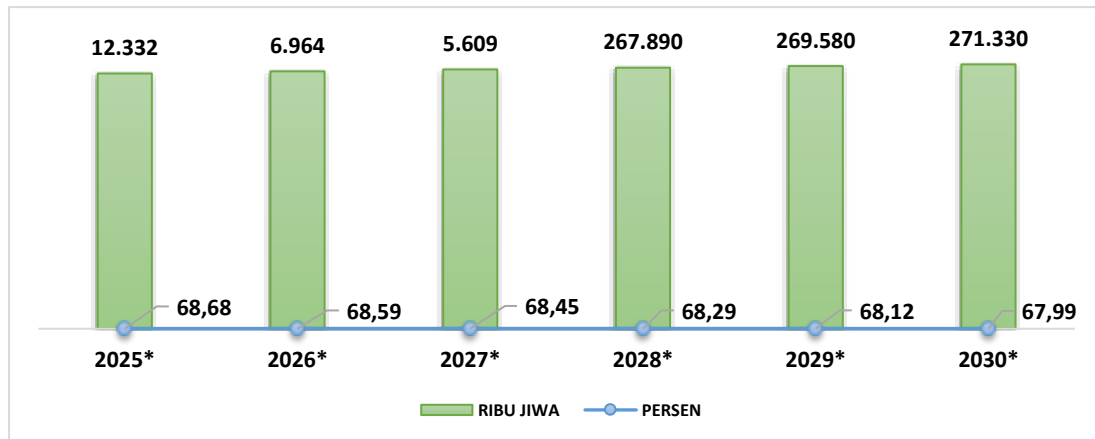
Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

j. Proyeksi Bonus Demografi

Proyeksi bonus demografi adalah perkiraan ilmiah tentang masa ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lansia). Kondisi ini diprediksi akan terjadi di Indonesia pada periode 2020-2035, sehingga pemerintah daerah dihimbau agar memanfaatkan bonus demografi ini dengan sebaik mungkin salah satunya melalui perluasan kesempatan kerja kepada penduduk usia produktif. Berikut adalah proyeksi bonus demografi Kabupaten Banggai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 yang disajikan dalam bentuk grafik pada gambar 2.31.



Gambar 2.31
Proyeksi Bonus Demografi
Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

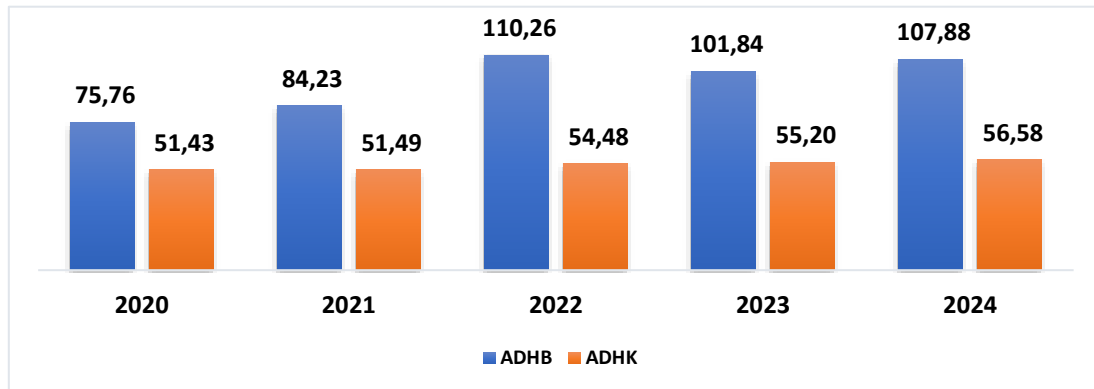
a. PDRB dan Struktur Ekonomi

Nilai PDRB Kabupaten Banggai Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2024 mencapai 40,74 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang sebesar 38,06 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB pada kurun waktu 5 tahun terakhir juga mengalami peningkatan, dari 18,52 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 21,38 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Banggai mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,63 persen. Peningkatan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.



Gambar 2.32
PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banggai
(Juta Rupiah) Tahun 2020–2024



Sumber: Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Banggai didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banggai. peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Banggai pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 32,17 persen (angka ini meningkat dari 24,29 persen di tahun 2020). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,72 persen (menurun dari 23,38 persen di tahun 2020), disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 18,47 persen (menurun dari 22,92 persen di tahun 2020). Adapun lapangan usaha lain memiliki peran masing-masing kurang dari 10 persen.

Tabel 2.14
Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ADHB
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024

No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,38	22,53	18,52	21,61	21,72
2.	Pertambangan dan Penggalian	22,92	22,12	21,61	19,01	18,47



No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
3.	Industri Pengolahan	24,29	26,87	36,42	32,17	32,17
4.	Pengadaan Listrik, Gas	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
5.	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05
6.	Konstruksi	7,87	7,38	5,96	6,92	7,15
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5,16	5,07	4,37	5,20	5,19
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,19	2,22	2,14	2,54	2,50
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,30	0,32	0,27	0,33	0,34
10.	Informasi dan Komunikasi	2,58	2,60	2,09	2,36	2,36
11.	Jasa Keuangan	1,90	1,96	1,56	1,70	1,75
12.	Real Estate	1,56	1,42	1,18	1,43	1,49
13.	Jasa Perusahaan	0,10	0,09	0,07	0,08	0,08
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,83	3,68	2,88	3,27	3,36
15.	Jasa Pendidikan	2,58	2,43	1,87	2,13	2,17
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,78	0,63	0,74	0,73
17.	Jasa Lainnya	0,50	0,47	0,38	0,44	0,45

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

Besarnya kontribusi Industri Pengolahan di sektor PDRB Kabupaten Banggai ini sebagian besar disokong oleh pengilangan minyak dan gas yang berupa LNG (59,48%) dan industri kimia berupa Amonia (15,39%). Selain itu terdapat industri makanan yang mempunyai kontribusi 10,58 persen terhadap Industri Pengolahan yang sebagian besar berupa industri kopra dan minyak sawit.

Kontributor terbesar ketiga pada PDRB Kabupaten Banggai yaitu Pertambangan dan Penggalan. Sektor ini sebagian besar disokong oleh pertambangan migas yang dilakukan oleh Pertamina Job Tomori. Selain itu subsektor pertambangan bijih logam menjadi penyokong terbesar kedua pada sektor ini. Sub sektor pertambangan bijih logam menyumbang 20,73 persen pada sektor Penggalan dan pertambangan.



Diantara ketiga lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah kategori mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Industri Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan peranannya menurun. Salah meningkatnya satu peranan penyebab Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah meningkatnya jumlah produksi pada lapangan usaha tersebut. Penurunan harga sampai 50% pada komoditas Industri Migas dan Industri Kimia juga menjadi pendorong penurunan kontribusi dari kedua sektor tersebut.

PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Banggai pada periode 2020–2024 dapat dilihat dari tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15
PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran
Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Konsumsi Rumah Tangga	10.867,97	11.480,67	12.471,47	13.372,50	14.173,44
Konsumsi LNPRT	462,53	491,56	567,34	649,68	741,60
Konsumsi Pemerintah	2.877,06	3.111,22	3.212,15	3.337,94	3.691,60
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.356,92	7.924,07	8.408,11	9.179,13	10.221,83
Perubahan Inventori	199,67	217,57	238,07	231,95	381,32



Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Net Ekspor Barang dan Jasa	35.525,77	32.063,33	52.181,39	46.798,92	51.877,35
PDRB	27.360,88	30.825,09	40.776,13	38.057,96	40.737,03

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Banggai pada periode 2020–2024 dapat dilihat dari tabel 2.16 berikut ini.

Tabel 2.16
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran
Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Konsumsi Rumah Tangga	6.460,07	6.632,83	6.903,15	7.186,67	7.487,25
Konsumsi LNPR	274,57	277,88	304,12	328,04	367,96
Konsumsi Pemerintah	1.442,46	1.503,06	1.515,17	1.525,02	1.676,36
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.323,07	4.507,51	4.646,07	4.699,26	4.876,03
Perubahan Inventori	137,50	145,25	151,13	134,22	220,52
Net Ekspor Barang dan Jasa	30.755,82	24.910,23	33.984,02	32.168,53	39.244,99
PDRB	18.517,22	18.840,59	20.139,75	20.627,67	21.376,37

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

b. PDRB Perkapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 cukup fluktuatif. Pada



tahun 2020 yang mengalami penurunan karena pengaruh COVID-19 dan pada tahun 2023 disebabkan terjadinya penurunan produksi.

Migas dan Amonia yang menjadi kontributor terbesar dalam PDRB Kabupaten Banggai. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 75.679 ribu rupiah kemudian naik di tahun 2021 menjadi 84.300 ribu rupiah, dan kembali naik pada tahun 2022 menjadi 110.262 ribu rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan pengaruh faktor inflasi. Kemudian Pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 101.841 ribu rupiah dikarenakan turunnya harga Migas dan Amonia yang menjadi komoditas utama. PDRB per kapita Kabupaten Banggai pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 107.884 ribu rupiah.

Jika dilihat berdasarkan harga konstan, kenaikan PDRB per kapita Kabupaten Banggai tahun 2024 mengalami peningkatan sekitar 2,56 persen dari tahun 2023. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Banggai berdasarkan harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2020-2024, dapat di lihat pada tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17
PDRB Perkapita Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024

Tahun/Year	2020	2021	2022	2023*	2024**
Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah/Billion rupiahs)					
- ADHB/ at current price	27,361	30,825	40,766	38,057	40,737
- ADHK/ at 2010 Constant Price	18,517	18,841	20,140	20,627	21,376
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
- ADHB/ at current price	75,679	84,300	110,262	101,841	107,884
- ADHK/ at 2010 Constant Price	51,218	51,525	54,744	55,198	56,610
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	-0.78	0.60	5.72	1.31	2.56
Jumlah Penduduk (Ribu Orang) / Population (Thousand People)	361.54	365.66	369.72	373.69	377.60
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	-4.05	1.14	1.11	1.07	1.05

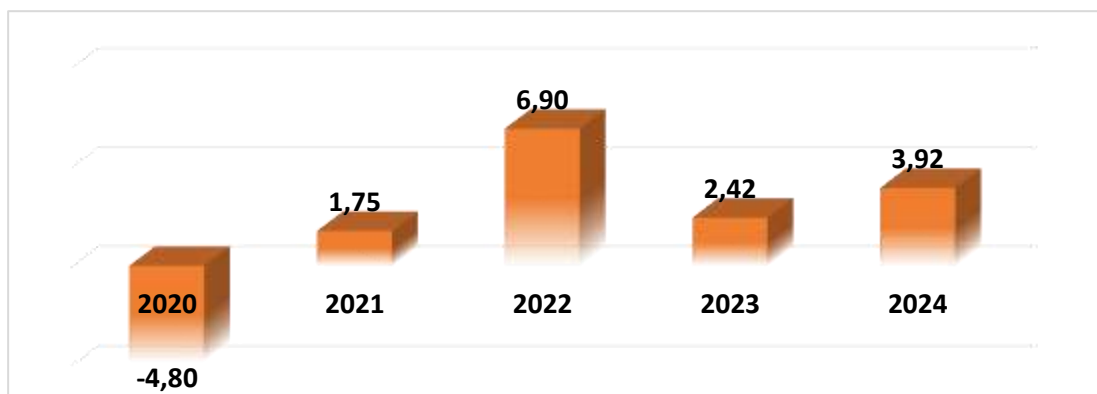
Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025



c. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Gambar 2.33
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai (%)
Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

Nilai PDRB Kabupaten Banggai tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 21,38 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari tahun 2023 yang sebesar 20,63 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,92 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mencapai 2,42 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai mengalami penurunan menjadi -4,80 persen, yang utamanya diakibatkan karena dampak pandemi COVID-19. Berlanjut pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali



meningkat menjadi 1,75 persen. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat drastis menjadi 6,90 persen, kemudian di tahun 2023 melambat menjadi 2,42 persen dan meningkat menjadi 3,92 pada tahun 2024. Struktur laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Banggai menurut lapangan Usaha tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.18
Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Banggai Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2020-2024

No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,66	3,58	1,55	3,47	0,18
2	Pertambangan dan Penggalian	1,36	-0,44	9,99	1,14	6,00
3	Industri Pengolahan	-10,77	-2,35	11,83	0,72	2,52
4	Pengadaan Listrik, Gas	5,09	3,68	10,00	6,69	5,25
5	Pengadaan Air	4,21	6,01	3,30	3,04	4,00
6	Konstruksi	-13,16	3,80	1,83	2,99	2,84
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-6,23	9,10	8,18	7,16	3,44
8	Transportasi dan Pergudangan	-33,90	10,92	14,54	5,59	3,37
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-14,53	15,13	10,01	8,25	6,18
10	Informasi dan Komunikasi	7,73	11,83	6,08	5,72	6,06
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,10	9,83	-3,68	0,37	9,72
12	Real Estate	0,03	1,33	7,24	5,72	5,71
13	Jasa Perusahaan	-1,82	3,60	5,42	4,95	2,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,77	5,96	0,02	2,58	6,51
15	Jasa Pendidikan	-2,77	5,61	0,22	4,88	6,67
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,64	3,01	2,90	6,66	4,38
17	Jasa Lainnya	-0,01	6,05	4,39	5,27	6,02
P D R B		-4,80	1,75	6,90	2,42	3,92

Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

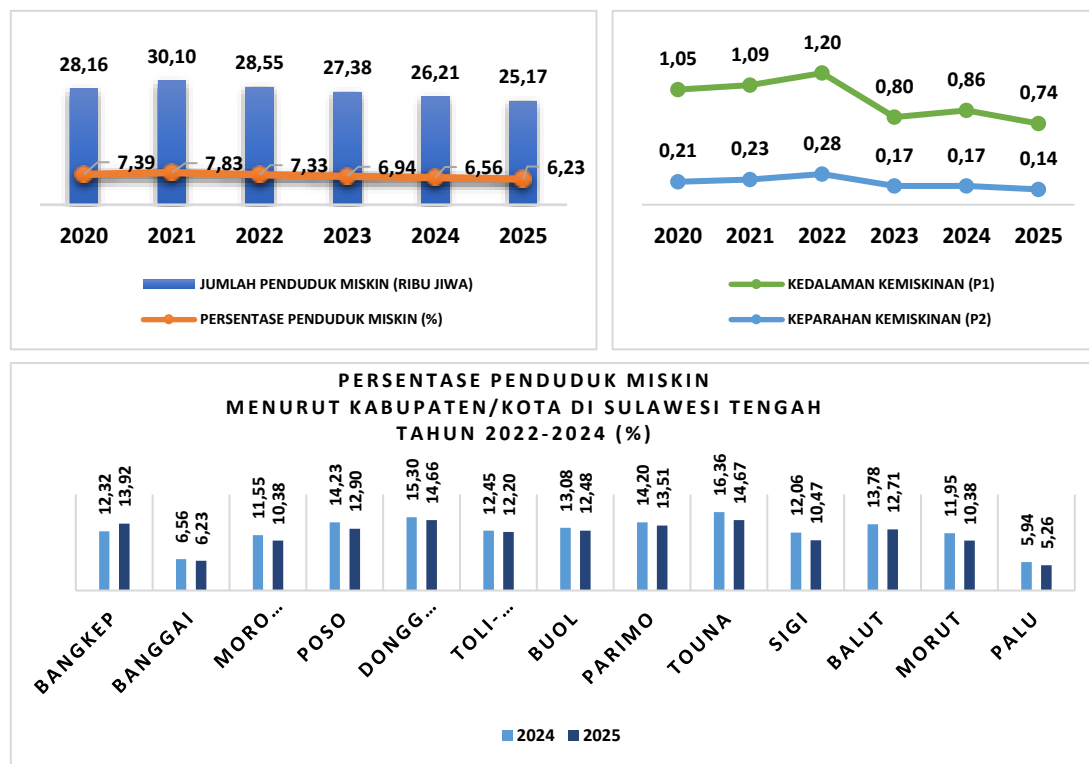
d. Tingkat Kemiskinan

Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan disuatu daerah.



Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Banggai.

Gambar 2.34
Angka Kemiskinan Kabupaten Banggai Tahun 2020–2025



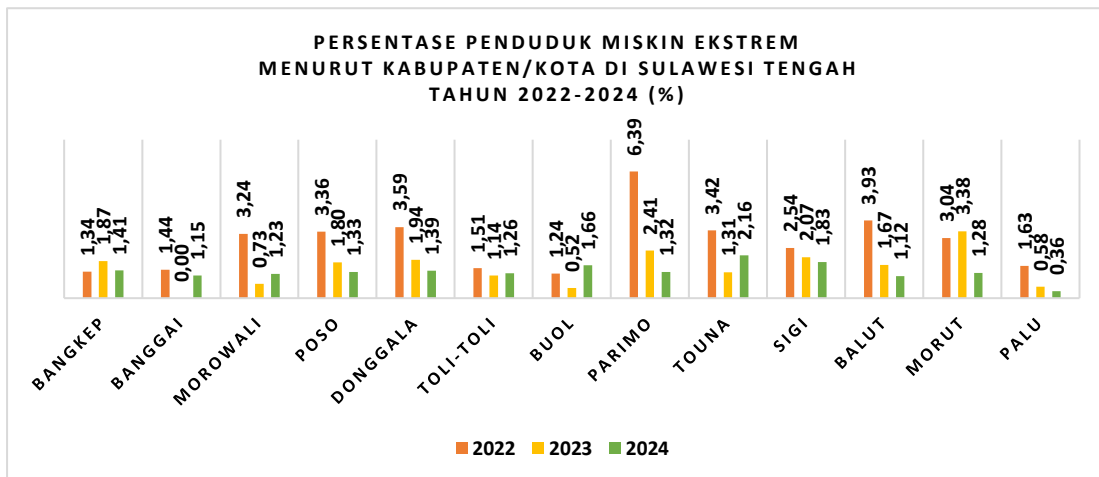
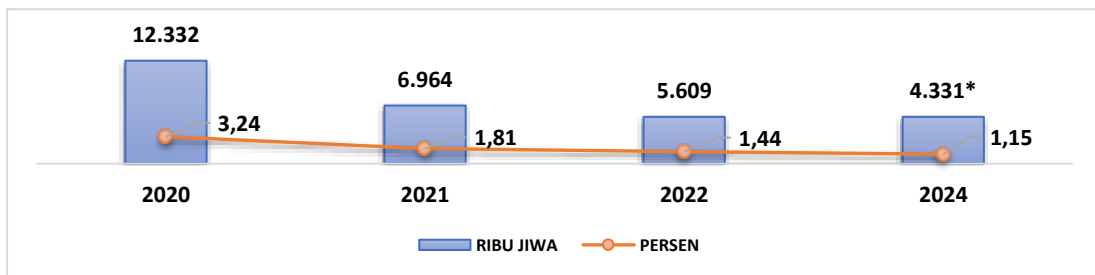
Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

Angka Kemiskinan di Kabupaten Banggai pada enam tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2020, angka kemiskinan Kabupaten Banggai sebesar 7,39 persen (28,16 ribu jiwa), kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 7,83 persen (30,10 ribu jiwa). Namun pada tahun 2022-2025 angka kemiskinan Kabupaten Banggai terus menurun menjadi 6,23 persen (25,17 ribu jiwa) pada tahun 2025. Kabupaten Banggai merupakan satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Tengah yang mampu menurunkan angka kemiskinan di bawah 10 persen.

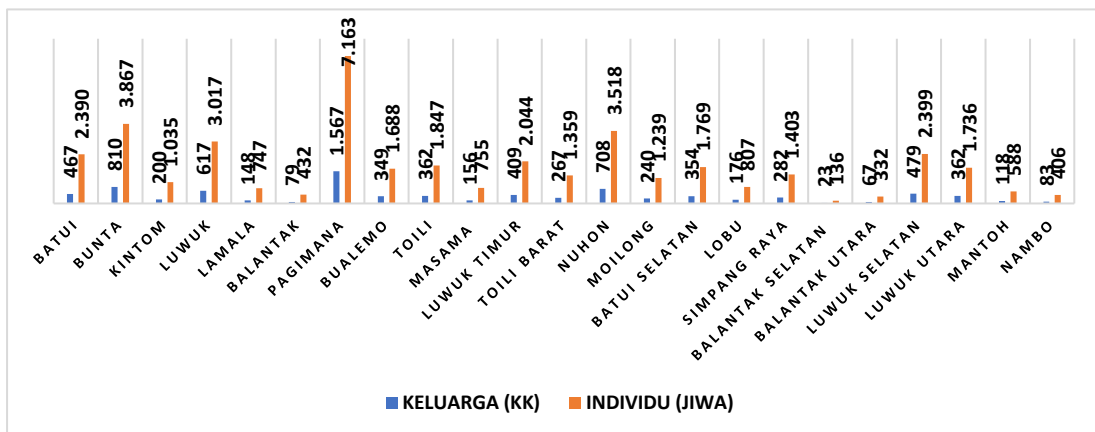


Selanjutnya jumlah penduduk miskin ekstrem dari 6.964 Jiwa pada tahun 2021 menjadi 5.609 Jiwa tahun 2022, kemudian turun menjadi 4.331 Jiwa pada tahun 2024. Berdasarkan data P3KE 2021, Keluarga dan Individu Miskin Desil 1 tertinggi berada di Kecamatan Pagimana sejumlah 1.374 KK atau 6.474 jiwa.

Gambar 2.35
Angka Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Banggai
Tahun 2020-2024



Data Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) keluarga Dan Individu Desil 1 Kabupaten Banggai Tahun 2024

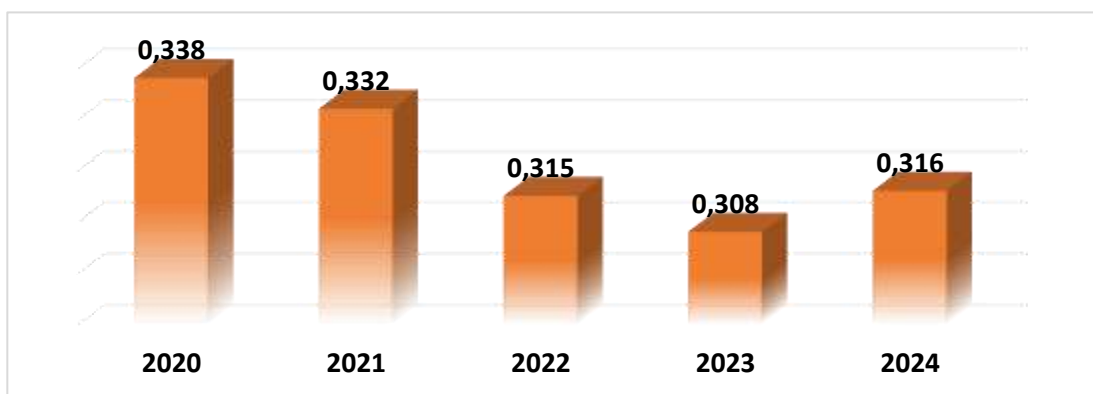


Sumber: Kemenko PMK, P3KE, diolah Bappeda Kabupaten Banggai, 2024

**e. Gini Rasio**

Rasio Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah atau populasi. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna (pendapatan semua orang sama), sedangkan nilai 1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna (satu orang memiliki semua pendapatan). Semakin tinggi nilai Rasio Gini, semakin tinggi tingkat ketidakmerataan pendapatan dalam suatu wilayah. Angka Gini Rasio Kabupaten Banggai tahun 2024 adalah sebesar 0,316 point.

Gambar 2.36
Gini Rasio Kabupaten Banggai Tahun 2020–2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

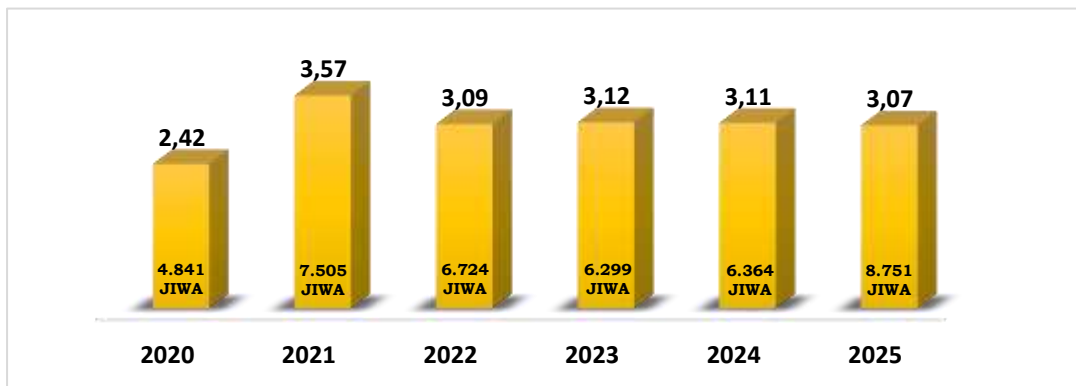
f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Kabupaten Banggai Tahun 2025 menurun sebesar 0,04 persen yaitu 3,07 persen di bandingkan tahun 2024 yang sebesar 3,11 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2025 sebesar 74,74 persen, dengan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025 sebanyak 285.065 orang.



Gambar 2.37
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Banggai Tahun 2020–2024

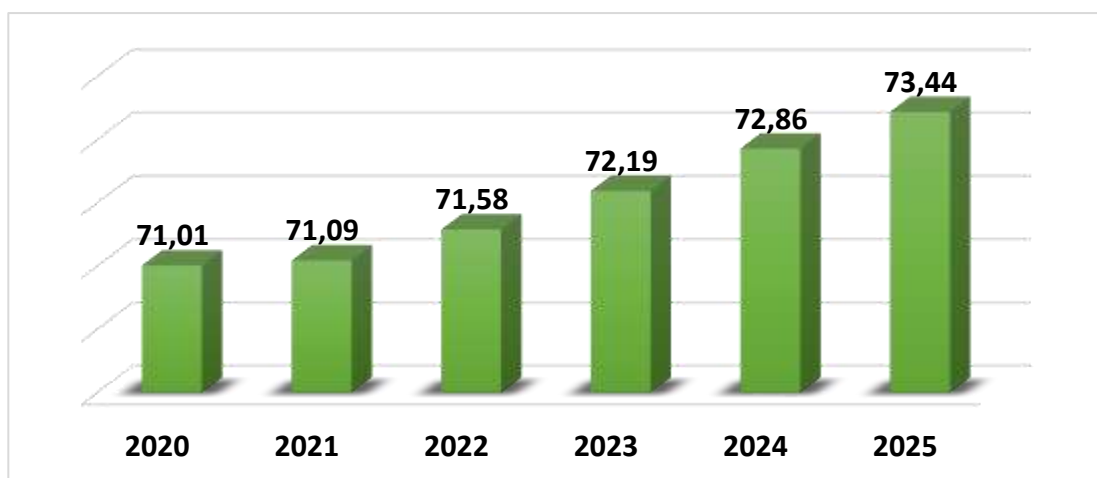


Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Tahun 2020–2025 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, di mana angka IPM Kabupaten Banggai Tahun 2025 yaitu 73,44 Poin dengan Kategori “Tinggi”.

Gambar 2.38
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Banggai Tahun 2020–2025



Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

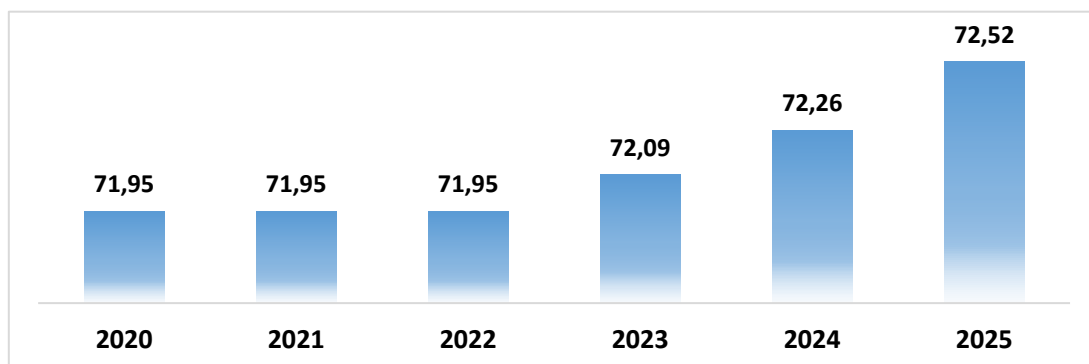


2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Indeks Pembangunan Manusia Usia Harapan Hidup adalah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu daerah. Usia Harapan Hidup dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Banggai tahun 2020 sampai dengan tahun 205 dapat dilihat pada gambar 2.39 berikut.

Gambar 2.39
Usia Harapan Hidup (Tahun)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2025



Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

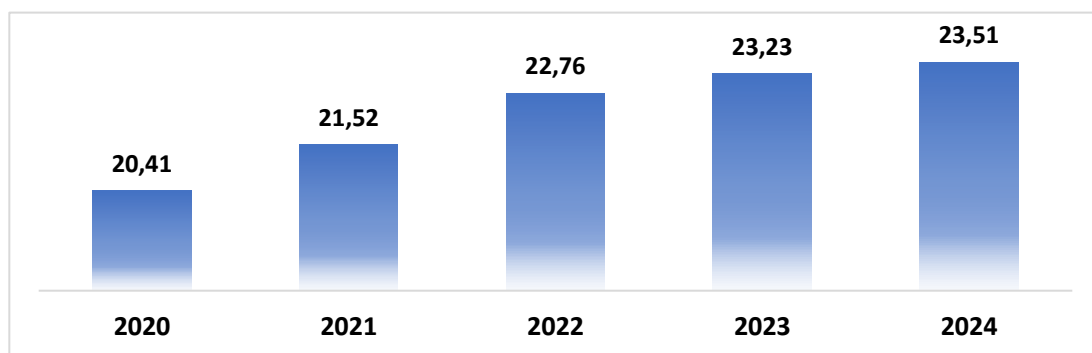
b. Indeks Keluarga Sehat

Keluarga sehat merupakan pondasi masa depan bangsa yang gemilang. Menurut WHO, keluarga sehat berarti keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial dan spiritual yang optimal. Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan 12 indikator keluarga sehat sebagai indeks komposit pembentuk yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan



akses hidup sehat yang memadai, serta diharapkan banyak dari keluarga yang ada di Indonesia memiliki standar kesehatan yang optimal. Adapun 12 indikator tersebut yaitu: (1) Keluarga mengikuti program KB; (2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; (3) Bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap; (4) Bayi mendapat ASI eksklusif; (5) Balita mendapat pemantauan pertumbuhan; (6) Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar; (7) Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan; (8) Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan; (9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok; (10) Keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (11) Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih; dan (12) Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih. Berdasarkan potret capaian Indeks Keluarga Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami perbaikan dan cenderung meningkat, yakni dari 15,76 persen pada Tahun 2020 meningkat menjadi 23,38 persen pada Tahun 2024. Secara detail mengenai perkembangan Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Banggai dapat dilihat pada gambar 2.40 berikut.

Gambar 2.40
Perkembangan Capaian Indeks Keluarga Sehat
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



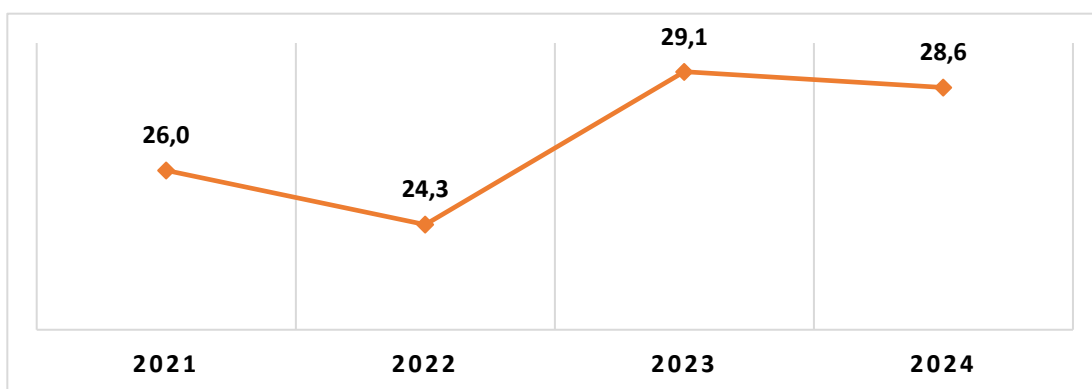
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

c. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting adalah persentase anak usia di bawah lima tahun (balita) yang mengalami stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh

pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting di Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.41 berikut:

Gambar 2.41
Angka Prevalensi Stunting (%)
Kabupaten Banggai Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, 2025

d. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)

Angka Kematian Balita adalah (AKABA) jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) dengan



Angka Kematian Bayi (AKB) senantiasa menjadi indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Untuk mengantisipasi masalah ini maka diperlukan terobosan-terobosan dengan mengurangi peran dukun dan meningkatkan peran Bidan. Harapan kita agar Bidan di Desa benar-benar sebagai ujung tombak dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

Tabel 2.19
Angka Kematian Ibu (AKI)
di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kematian Ibu (Ibu)	16	9	6	6	9
Jumlah Lahir Hidup (orang)	6.081	5.755	6.991	6.654	6.654
AKI per 100.000 Kelahiran Hidup	263,1	156,4	85,82	90,17	135,26

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, 2025

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat melaporkan di tahun 2024 jumlah kematian Ibu Maternal (jumlah kematian ibu hamil, jumlah kematian ibu bersalin, dan jumlah kematian ibu nifas) adalah 9 kematian dari 6.654 kelahiran hidup.

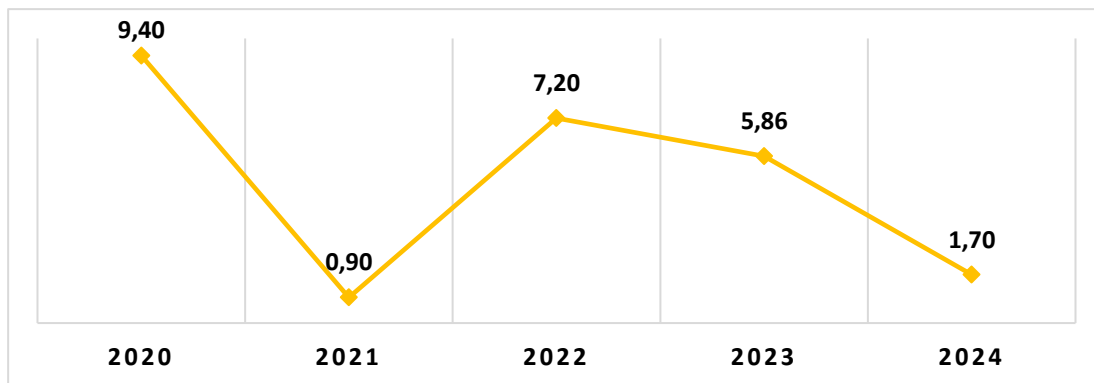
e. Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH)

Infant Mortality Rate (IMR) atau Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat AKB tetapi tidak mudah untuk menentukan faktor yang paling dominan dan faktor yang kurang dominan. Data kematian yang terdapat pada suatu komunitas dapat diperoleh melalui survei, karena sebagian besar kematian terjadi dirumah, sedangkan data kematian pada fasilitas pelayanan kesehatan hanya memperlihatkan kasus rujukan.



Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Banggai 5 (lima) tahun terakhir dapat di lihat pada gambar 2.42 berikut ini.

Gambar 2.42
Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024

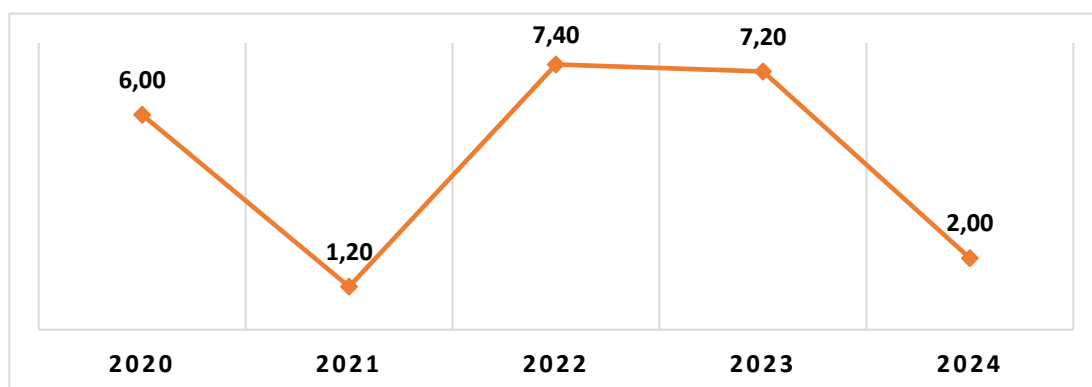


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, 2025

f. Angka Kematian Balita (Per 1.000 KH)

Angka Kematian Balita adalah (AKABA) jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Gambar 2.43 dibawah memperlihatkan Angka Kematian Balita selama lima tahun terakhir. Dalam upaya untuk mempertajam penurunan diperlukan peningkatan akses balita terhadap sanitasi, air bersih dan penanganan segera terhadap gejala penyakit.

Gambar 2.43
Angka Kematian Balita (per 1.000 KH)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



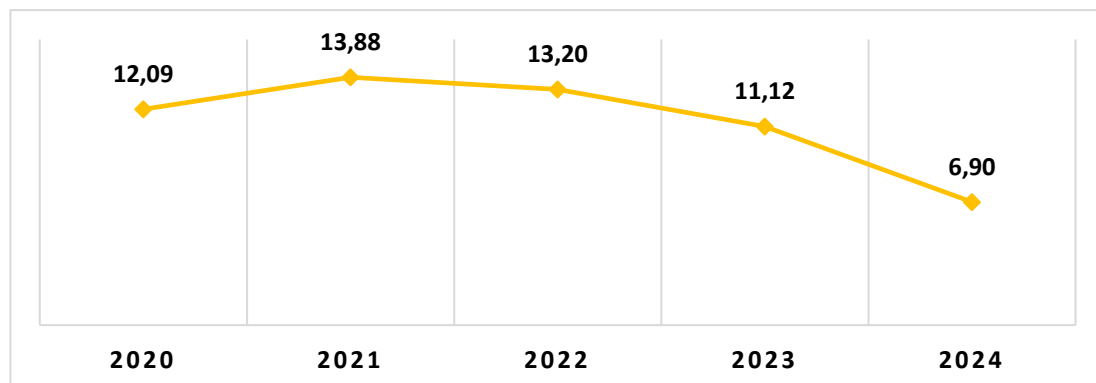
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, 2025



g. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Masa balita merupakan usia penting untuk tumbuh kembang secara fisik. Pertumbuhan anak pada usia balita sangat pesat sehingga memerlukan asupan zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan balita. Asupan zat gizi tidak dapat memenuhi kebutuhan balita maka dapat berakibat kurang gizi (Proverawati dan Kusumawati, 2010). Anak yang mengalami gizi kurang dapat mengalami pertumbuhan fisik dan kecerdasan yang tidak optimal. Gizi buruk, kurus, dan stunting merupakan bentuk manifestasi dari adanya gangguan pada proses pertumbuhan. Menurut Sulistyoningsih (2011), gizi juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak dan perilaku, kemampuan bekerja dan produktivitas serta daya tahan terhadap penyakit infeksi.

Gambar 2.44
Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, 2025

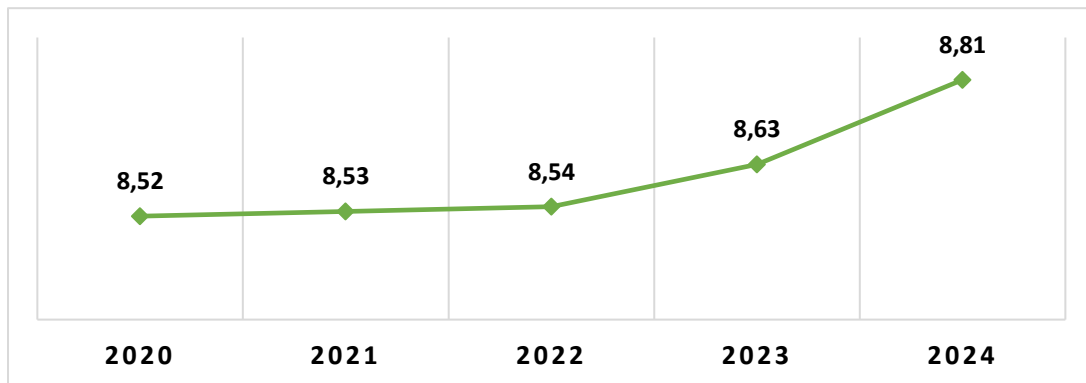
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas Yang Merata

a. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun belajar pada pendidikan formal yang telah diselesaikan penduduk berusia 25 tahun ke atas. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banggai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.45 berikut.



Gambar 2.45
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024

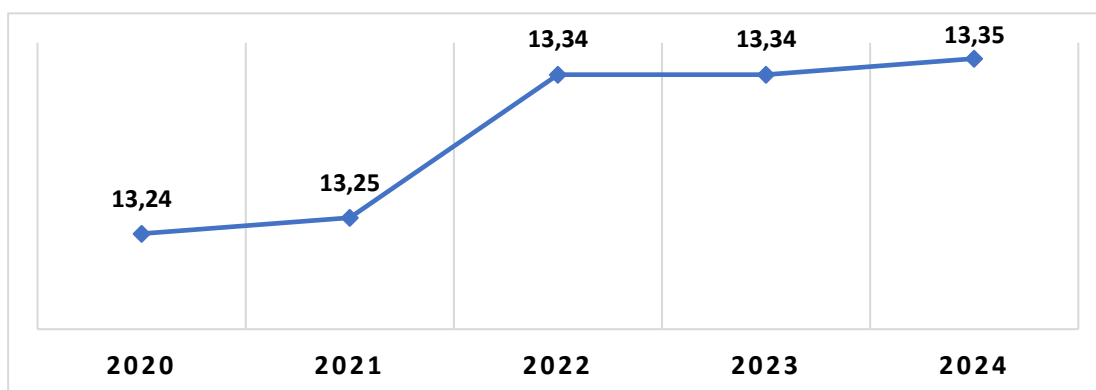


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, 2025

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Berdasarkan angka HLS, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan tentang pendidikan dan perubahannya yang terjadi di masa mendatang. Perkembangan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Banggai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.46 berikut.

Gambar 2.46
Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024

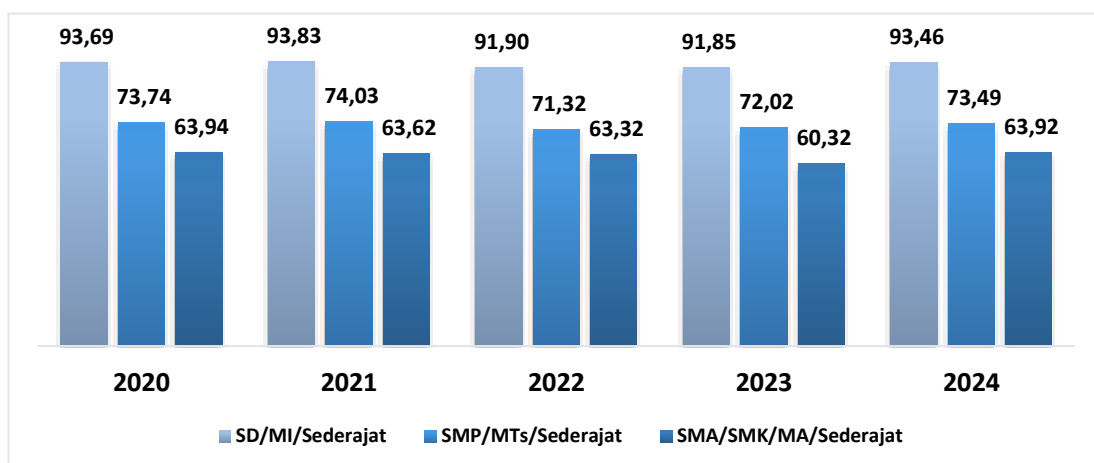


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, 2025

**c. Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya. APM dihitung dengan membandingkan jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut, kemudian dinyatakan dalam persen. Perkembangan Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Banggai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.47 berikut.

Gambar 2.47
Angka Partisipasi Murni (%)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



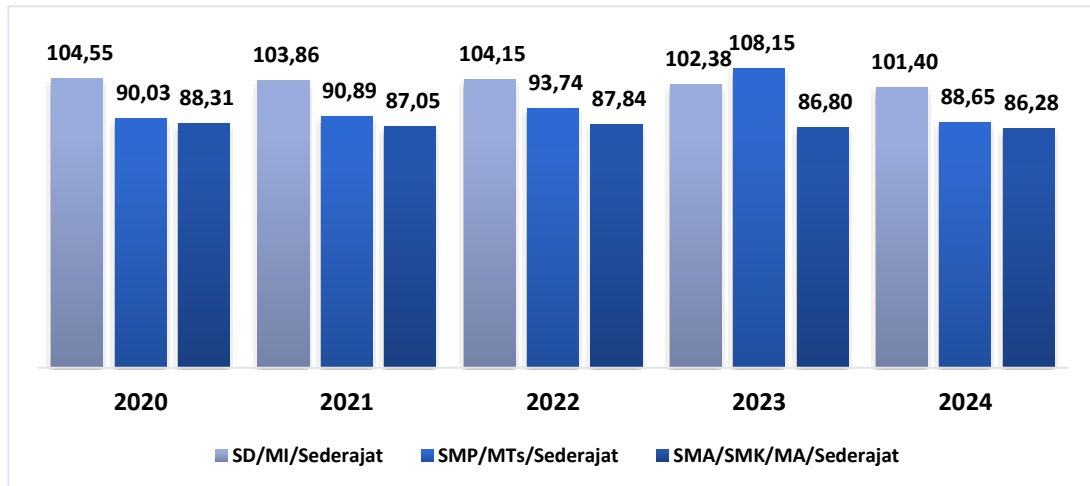
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, 2025

d. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio antara jumlah siswa di suatu jenjang pendidikan (tanpa memandang usia) dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan yang sama, yang dinyatakan dalam persen. APK memberikan gambaran umum mengenai partisipasi penduduk dalam suatu tingkat pendidikan, termasuk mereka yang mungkin berusia diluar kelompok usia sekolah.



Gambar 2.48
Angka Partisipasi Kasar (%)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, 2025

e. Angka Literasi/Numerasi

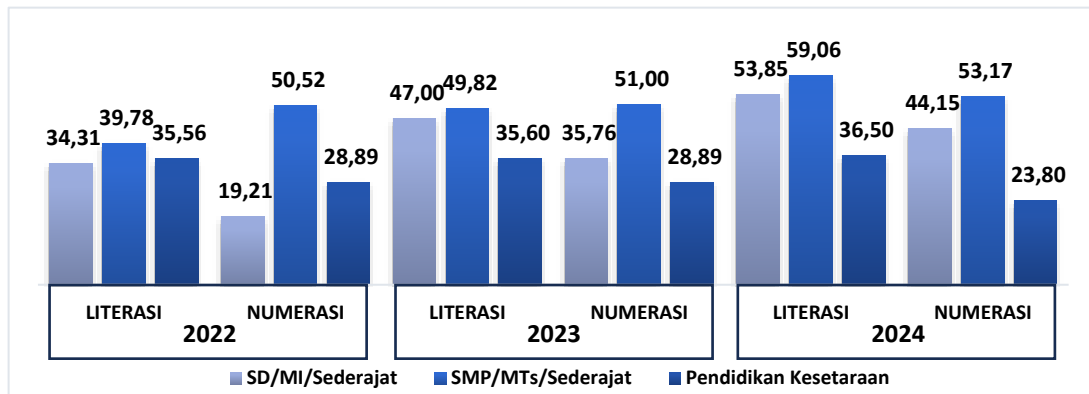
Literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Literasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.

Kemampuan Numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Kemampuan numerasi juga digunakan untuk menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan dan pemanfaatan interpretasi hasil analisis sebagai bahan prediksi dan pengambilan keputusan.

Capaian angka literasi dan numerasi kabupaten banggai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.49 berikut.



Gambar 2.49
Angka Literasi dan Numerasi (%)
Kabupaten Banggai Tahun 2022-2024



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, 2025

f. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat literasi masyarakat di suatu wilayah, dengan fokus pada upaya pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat. IPLM mencakup berbagai aspek literasi, seperti kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Berdasarkan data dari Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka, capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Banggai tahun 2024 adalah 43,37.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial Yang Adaptif

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perlindungan terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah yang ada pada sektor informal membutuhkan perlindungan yang dimaksudkan untuk menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi



guna mewujudkan kesejahteraan Pekerja Bukan Penerima Upah dan keluarganya.

Pekerja Bukan Penerima Upah dan keluarganya sebagai kelompok masyarakat di Sulawesi Tengah yang rentan terhadap hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan dan meninggal dunia membutuhkan perhatian Pemerintah Daerah melalui pengembangan Sistem Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Program JKK merupakan program yang memberi manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Program JKM merupakan program yang memberi manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja. Peta Universal Coverage Jamsostek Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sampai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20
Peta Universal Coverage Jamsostek Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Sampai Tahun 2025

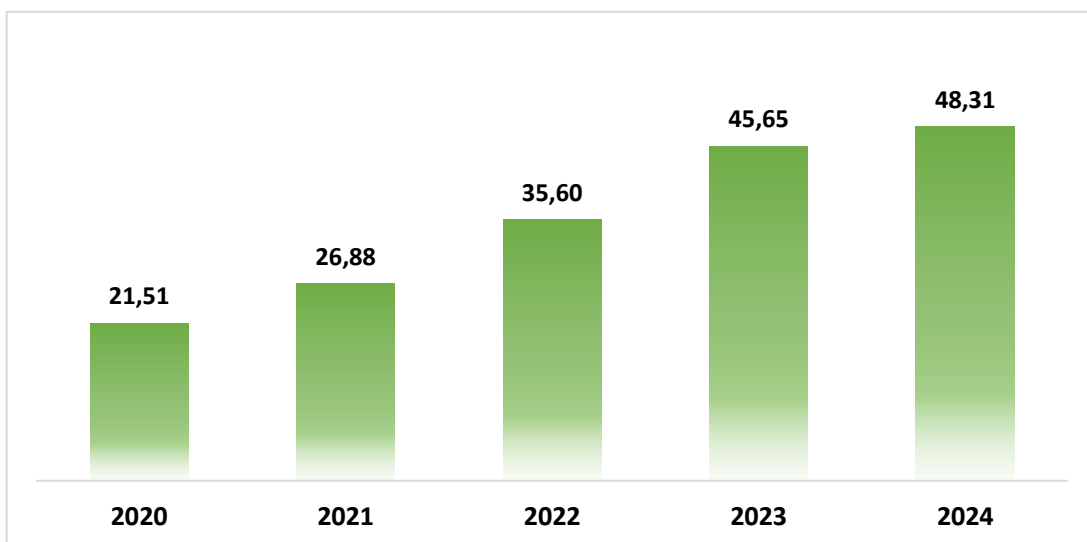
NO	Kabupaten/Kota	Formal				Informal				Total			
		Semesta	Realisasi	%	Selisih	Semesta	Realisasi	%	Selisih	Semesta	Realisasi	%	Selisih
1	Banggai	50.487	27.909	55%	-22.578	102.598	15.125	15%	-87.473	153.085	43.034	28%	-110.051
2	Banggai Kepulauan	13.285	9.634	73%	-3.651	35.585	1.004	3%	-34.581	48.870	10.638	22%	-38.232
3	Banggai Laut	8.041	113	1%	-7.928	23.149	23	0%	-23.126	31.190	136	0%	-31.054
4	Buol	15.974	11.308	71%	-4.666	44.711	6.884	15%	-37.827	60.685	18.192	30%	-42.493
5	Donggala	30.704	20.786	68%	-9.918	84.784	11.214	13%	-73.570	115.488	32.000	28%	-83.488
6	Morowali	88.906	50.054	56%	-38.852	64.150	28.112	44%	-36.038	153.056	78.166	51%	-74.900
7	Morowali Utara	34.372	23.369	68%	-11.003	26.197	14.413	55%	-11.784	60.569	37.782	62%	-22.787
8	Palu	18.844	28.319	150%	9.475	34.108	2.467	7%	-31.641	52.952	30.786	58%	-22.166
9	Parigi Moutong	36.851	25.663	70%	-11.188	169.271	11.187	7%	-158.084	206.122	36.850	18%	-169.272
10	Poso	28.365	22.243	78%	-6.122	82.509	5.897	7%	-76.612	110.874	28.340	25%	-82.534
11	Sigi	21.098	19.634	93%	-1.464	72.717	3.389	4%	-69.328	93.815	22.823	24%	-70.992
12	Tojo Una-una	17.439	14.922	86%	-2.517	45.015	7.622	17%	-37.393	62.454	22.544	36%	-39.910
13	Toli-toli	27.636	15.346	56%	-12.290	68.247	3.156	5%	-65.091	95.877	18.500	19%	-77.375
SULAWESI TENGAH		392.002	269.300	69%	-122.702	853.045	110.293	13%	-742.752	1.245.047	379.593	30%	-865.454

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025



Adapun Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Banggai dapat dilihat pada gambar 2.50 berikut.

Gambar 2.50
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai, 2025

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Indeks Pembangunan Kebudayaan

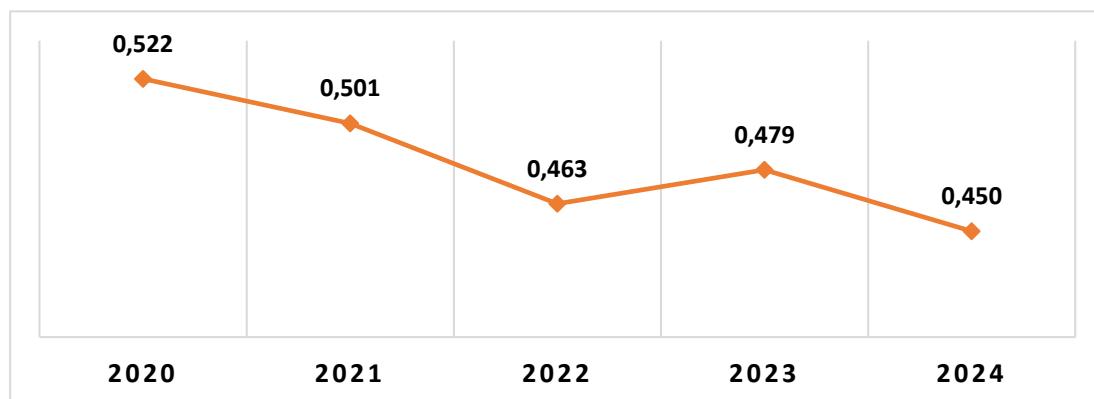
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan Pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai kebijakan bidang kebudayaan serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Banggai tahun 2024 adalah 27,17 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 24,38 persen.



2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kestaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Ketimpangan Gender

Gambar 2.51
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kesenjangan gender mempengaruhi pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Nilai IKG berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin tinggi nilainya, semakin besar ketimpangan gender dalam pencapaian pembangunan. IKG bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, serta untuk mengukur dampak program-program pengarusutamaan gender di suatu wilayah. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Banggai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.51 di atas.

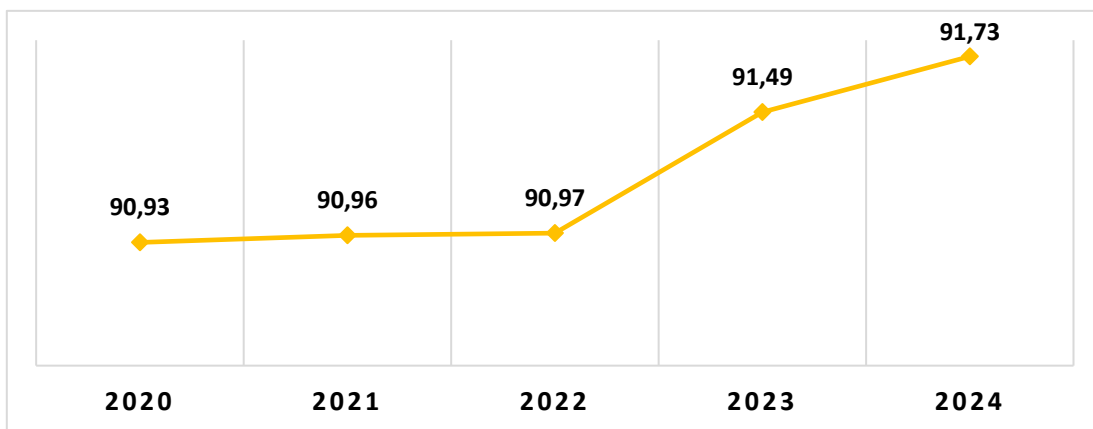
b. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah. IPG mengukur kesenjangan ini dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia:



kesehatan, pendidikan, dan penguasaan sumber daya ekonomi. IPG membantu mengidentifikasi area di mana perempuan mungkin tertinggal dalam hal pembangunan dan dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai kesetaraan gender. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IKG) Kabupaten Banggai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.52 berikut.

Gambar 2.52
Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

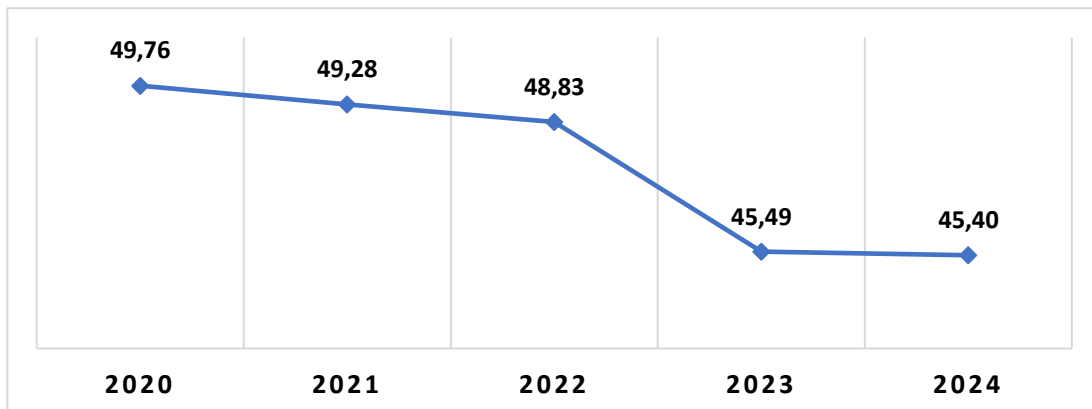
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (Dependency Ratio) adalah indikator yang mengukur beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lanjut usia). Semakin tinggi angka ini, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia non-produktif. Angka Ketergantungan Kabupaten Banggai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.53 berikut.



Gambar 2.53
Angka Ketergantungan
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



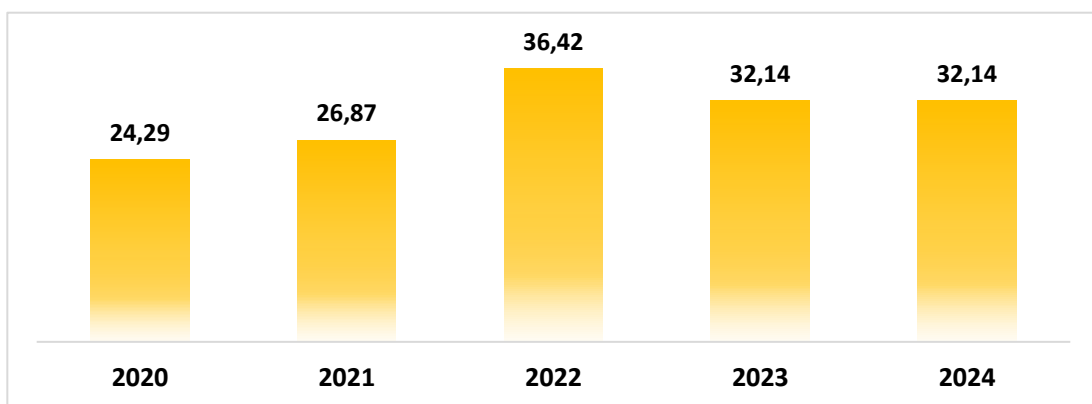
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan memiliki peran penting dalam perekonomian daerah Kabupaten Banggai dengan memberikan kontribusi utama terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi. Sektor ini juga mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya, seperti sektor jasa dan pertanian.

Gambar 2.54
Rasio PDRB ADHB Industri Pengolahan
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024

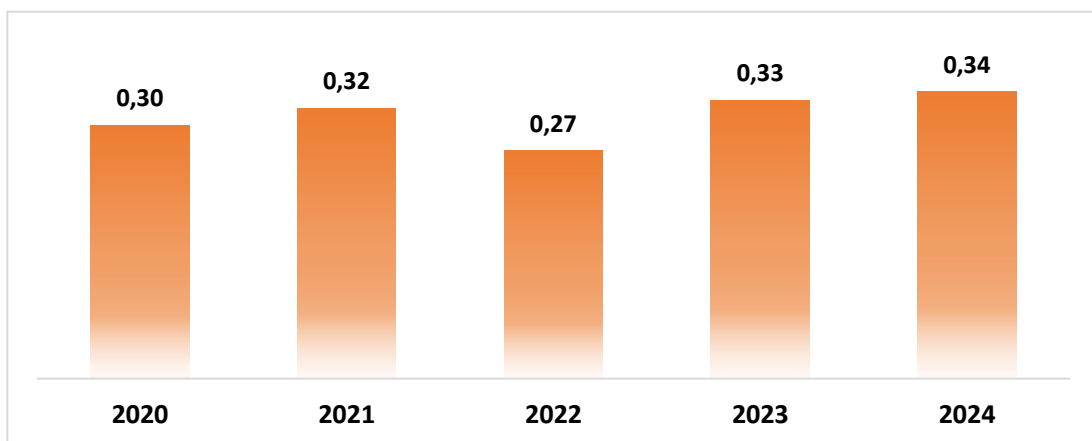


Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

**b. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum**

Sektor akomodasi dan makan minum memainkan peran penting dalam perekonomian daerah, terutama dalam sektor pariwisata. Sektor ini diharapkan mampu menyediakan kebutuhan dasar wisatawan, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pendapatan daerah. Selain itu, akomodasi dan makan minum juga mendukung sektor-sektor lain seperti transportasi dan perdagangan.

Gambar 2.55
Rasio PDRB ADHB Akomodasi Makan dan Minum
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024

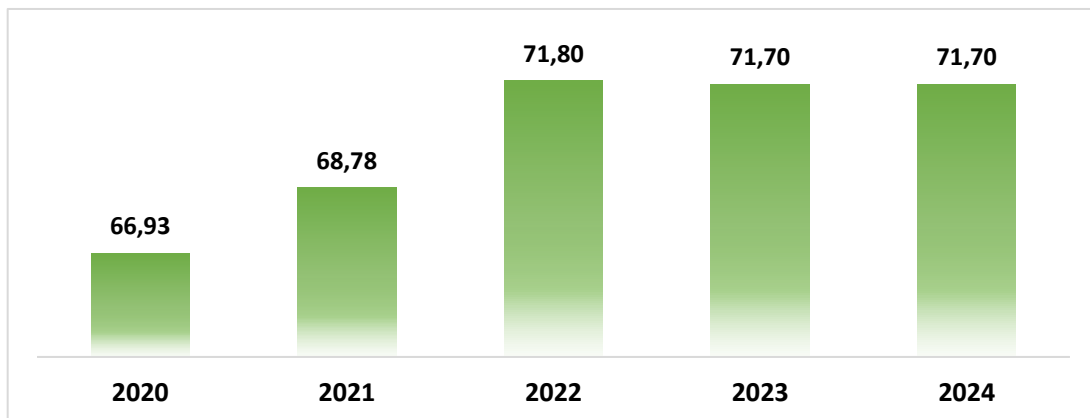


Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah penduduk angkatan kerja (jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15-64 tahun). Dalam upaya menurunkan angka pengangguran salah satu yang ditingkatkan adalah kesempatan kerja bagi masyarakat. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.56 berikut.

Gambar 2.56
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

Semakin tinggi tingkat kesempatan kerja berarti semakin berkurang tingkat pengangguran. Meningkatnya jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun, belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.

d. Indeks Inovasi Daerah

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan Inovasi Daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Hasil capaian Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut.



Tabel 2.21
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2020-2024

Tahun	Skor	Predikat	Peringkat
2020	4.133	Sangat Inovatif	24
2021	52,62	Inovatif	72
2022	49,45	Inovatif	158
2023	50,56	Inovatif	116
2024	59,81	Inovatif	72

Sumber : Kemendagri RI

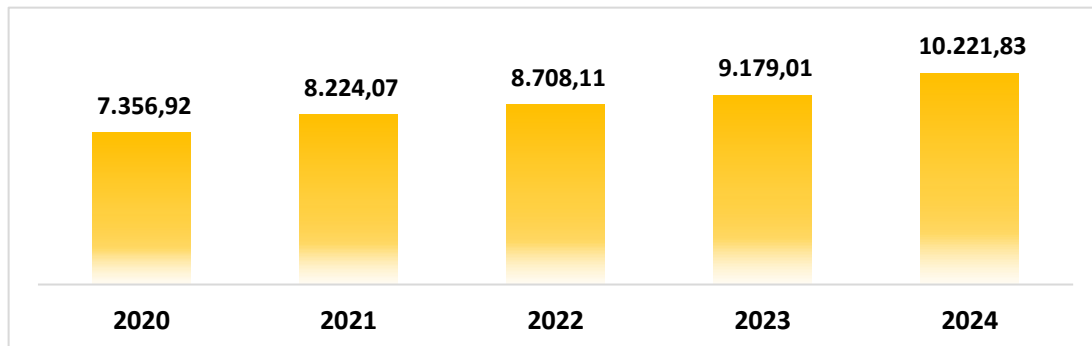
2.1.3.3 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki peran penting dalam perekonomian suatu wilayah karena merupakan indikator investasi dalam bentuk aset tetap dan merupakan salah satu pendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pembentukan modal atau investasi memiliki efek pengganda yang besar terhadap perekonomian. Selain mampu meningkatkan produksi atau pertumbuhan ekonomi, investasi juga akan menciptakan kesempatan kerja serta perluasan pasar. Kegiatan investasi memungkinkan Masyarakat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa investasi adalah motor suatu perekonomian yang akan menggerakkan sektor-sektor produktif seperti industri manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja.



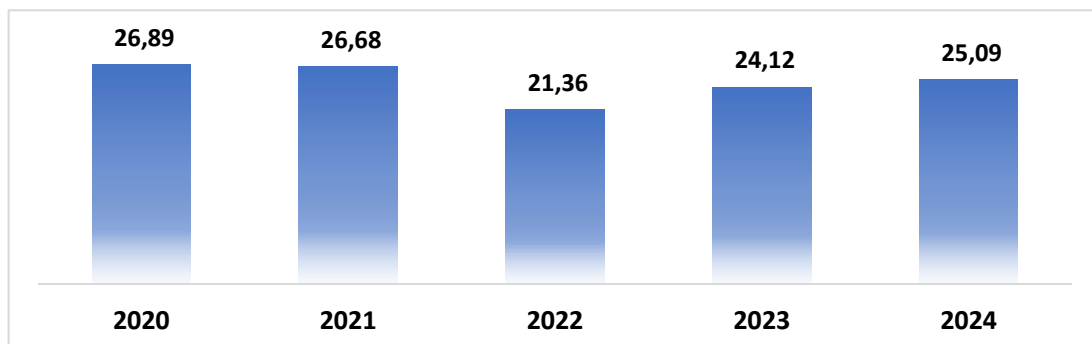
Gambar 2.57
Nilai PDRB ADHB Komponen PMTB (Milyar Rupiah)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

Selanjutnya proporsi komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Banggai selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.58
Proporsi Komponen PMTB Terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



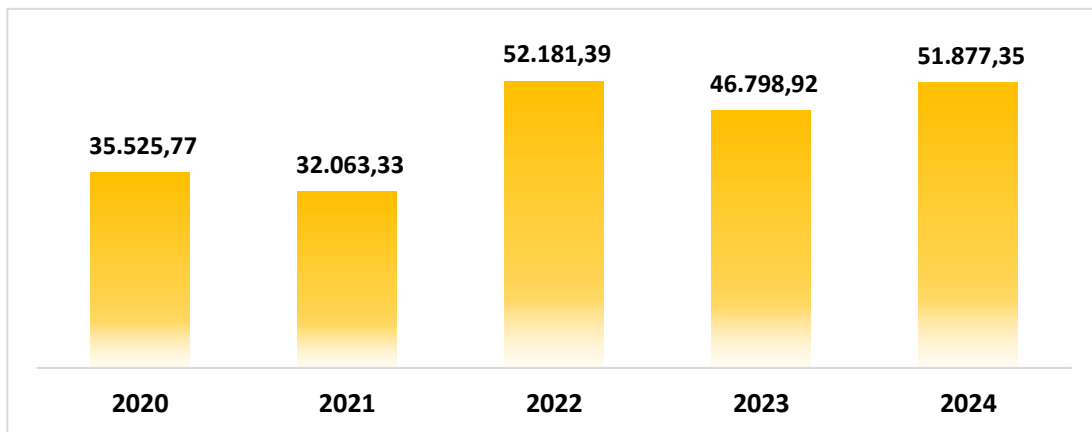
Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

b. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa memiliki peran penting dalam perekonomian daerah dengan meningkatkan pendapatan, lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nilai dan proporsi komponen Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Banggai selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.59 dan gambar 2.60 berikut.

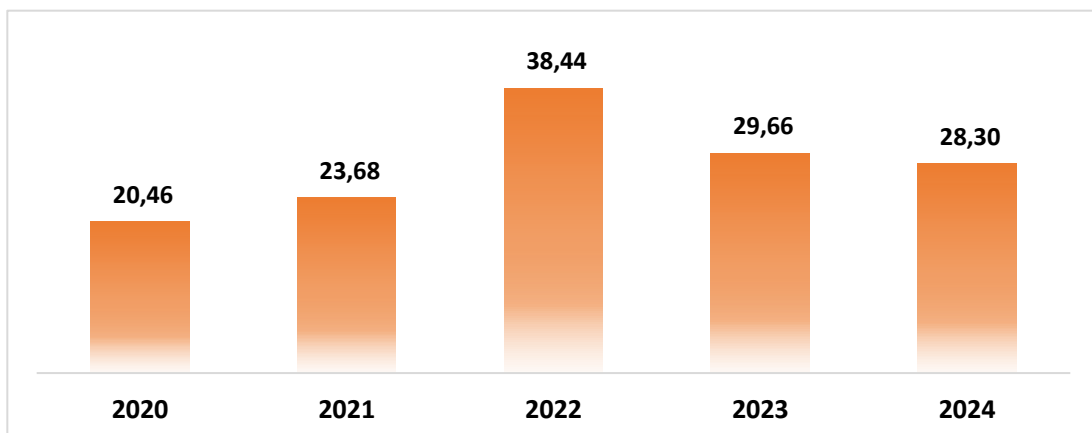


Gambar 2.59
Nilai PDRB ADHB Komponen Ekspor Barang dan Jasa
(Milyar Rupiah)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

Gambar 2.60
Proporsi Komponen Ekspor Barang dan Jasa (%)
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

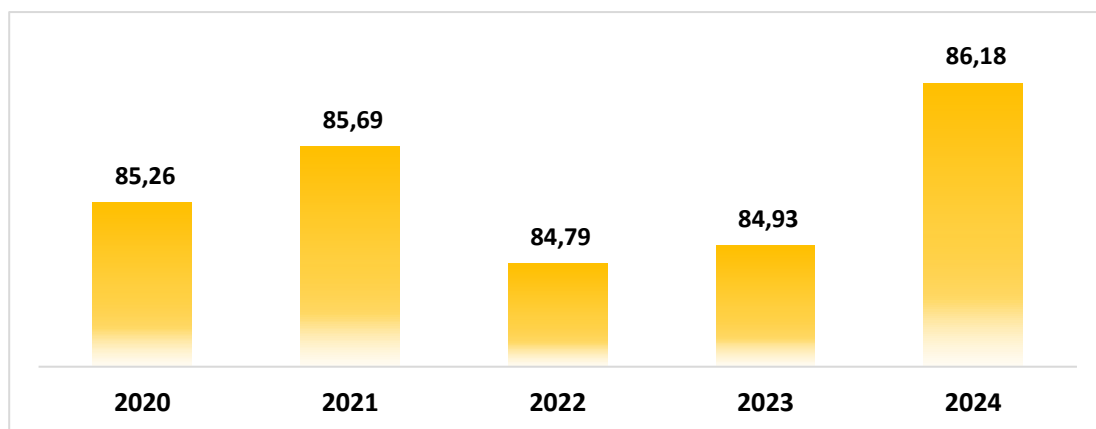
2.1.3.4 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak

Rumah tangga dengan hunian layak adalah keluarga yang menempati rumah yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, serta memiliki akses terhadap fasilitas dasar seperti

air bersih dan sanitasi. Ini mencakup bangunan yang kokoh, luas tempat tinggal yang memadai, serta akses terhadap fasilitas sanitasi dan air bersih yang layak. Rumah yang layak huni dan terjangkau dalam konteks pemukiman dalam kerangka kerja monitoring SDGs, menggunakan lima kriteria yaitu (1) Ketahanan bangunan; (2) Kecukupan luas tempat tinggal; (3) Akses air minum layak; (4) Akses sanitasi layak; dan (5) Keamanan bermukim.

Gambar 2.61
Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



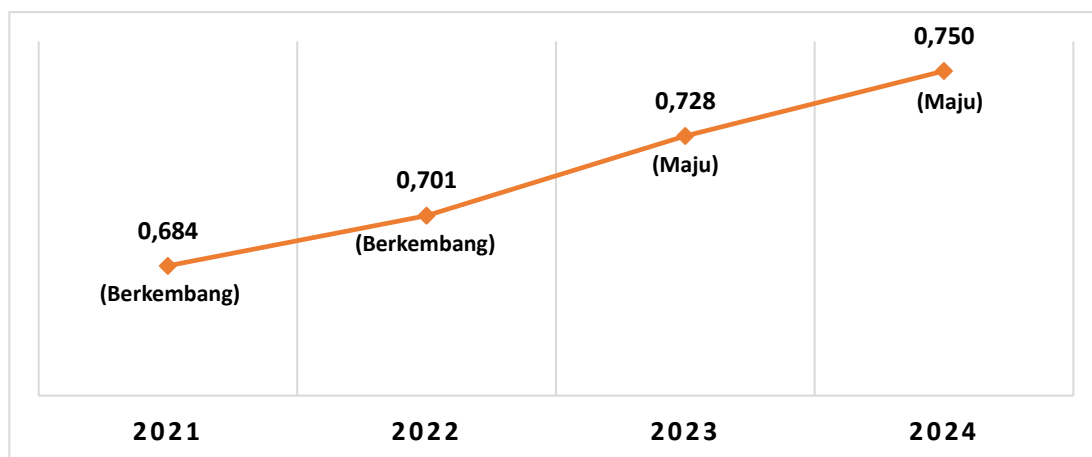
Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

b. Indeks Desa

Indeks Desa adalah alat ukur untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia berdasarkan berbagai data pembangunan desa seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sejak tahun 2025, pemerintah secara resmi menggunakan Indeks Desa sebagai indikator tunggal pembangunan, yang merupakan pengembangan dari Indeks Desa Membangun (IDM) sebelumnya. Tujuannya adalah menyediakan data yang akurat untuk dasar penyusunan kebijakan pembangunan desa agar lebih efektif dan terintegrasi. Perkembangan Indeks Desa Kabupaten Banggai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.62
Indeks Desa Kabupaten Banggai Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas PMD Kabupaten Banggai, 2025

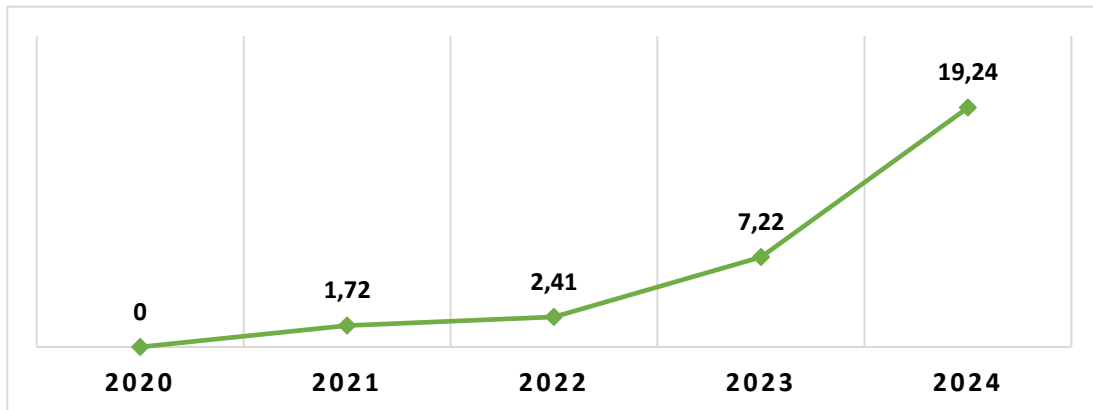
Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa mandiri sangat penting keberadaannya karena akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, mendorong kemajuan ekonomi lokal, dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Dengan menjadi desa mandiri, desa dapat mengelola sumber daya lokal secara optimal, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, dan berkontribusi pada pembangunan daerah dan nasional.

Manfaat adanya Desa Mandiri yaitu masyarakat akan menikmati kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, lingkungan yang bersih dan sehat, serta kualitas hidup yang lebih tinggi. Kemajuan desa akan berdampak baik bagi masa depan generasi muda kita, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang dan sukses.

Gambar 2.63 dibawah menunjukkan peningkatan drastis persentase desa mandiri dari tahun 2023 sebesar 7,22 persen menjadi 19,24 persen pada tahun 2024.



Gambar 2.63
Persentase Desa Mandiri
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Selanjutnya status perkembangan desa di Kabupaten Banggai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22
Status Perkembangan Desa
di Kabupaten Banggai Tahun 2024

Status	Jumlah Desa
Desa Mandiri	56
Desa Maju	151
Desa Berkembang	84
Desa Tertinggal	-
Desa Sangat Tertinggal	-

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Banggai, 2025

2.1.3.5 Stabilitas Ekonomi Makro

a. Tingkat Inflasi

Angka inflasi merupakan tolak ukur kestabilan perekonomian daerah. Pada bulan Oktober 2025 inflasi year on year (y-on-y) Luwuk sebesar 4,59 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,74.



Inflasi y-on-y pada Oktober 2025 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga beberapa kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 8,88 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,02 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,60 persen; kelompok Kesehatan sebesar 7,57 persen; kelompok transportasi sebesar 0,12 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,12 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 4,56 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,17 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,53 persen. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks harga, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,37 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,06 persen.

Gambar 2.64
Inflasi Kabupaten Banggai



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025



Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Luwuk bulan Oktober 2025 masing-masing sebesar -0,11 persen, dan 4,48 persen.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah sistem penilaian dan pemantauan yang digunakan pemerintah untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.23
Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	64,72 (B)	66,69 (B)	67,85 (B)	66,41 (B)	76,03 (BB)

Sumber : Kemenpan RB RI

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis yang terdiri dari prosedur, alat, dan aktivitas untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah.

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut.



Tabel 2.24
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81,74 (A)	80,54 (A)	80,02 (A)	75,02 (BB)	75,74 (BB)

Sumber : Kemenpan RB RI

c. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada tahun 2024 capaian Indeks SPBE Kabupaten Banggai mendapatkan nilai tertinggi se-Sulawesi Tengah dengan capaian 3,59 (Sangat Baik).

Tabel 2.25
Indeks SPBE Kabupaten Banggai Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun		
	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,07 (Cukup)	3,23 (Baik)	3,59 (Sangat Baik)

Sumber : Kemenpan RB RI

d. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek



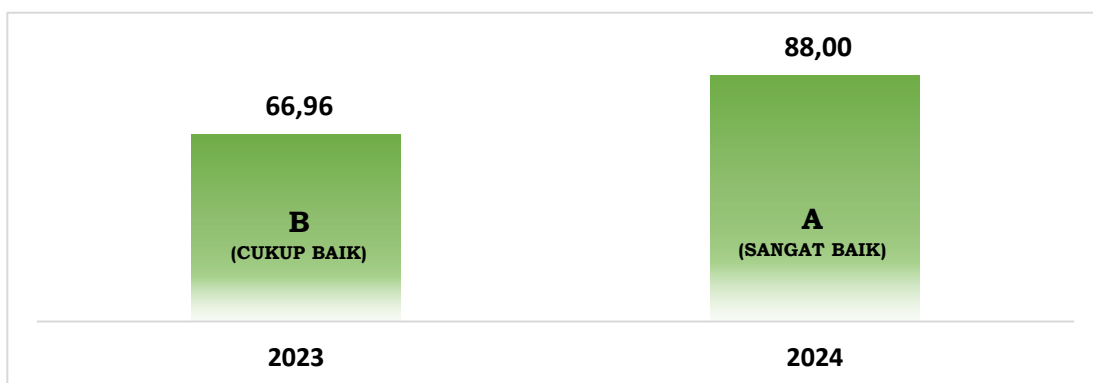
Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Berdasarkan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dari OMBUDSMAN Republik Indonesia, Kabupaten Banggai meraih nilai 95,83 dan berkategori B dengan Predikat Opini Kualitas Tinggi. Nilai ini meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 82,79.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

a. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan reformasi hukum di suatu daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum, termasuk aspek regulasi, tata kelola, dan pelayanan publik berbasis hukum. IRH ini mengukur berbagai aspek terkait regulasi, termasuk identifikasi dan pemetaan regulasi, proses reregulasi dan deregulasi, serta penguatan sistem regulasi nasional dan daerah.

Gambar 2.65
Capaian Indeks Reformasi Hukum
Kabupaten Banggai Tahun 2023-2024



Sumber : Kementerian Hukum RI, 2024

b. Persentase Penegakkan Perda

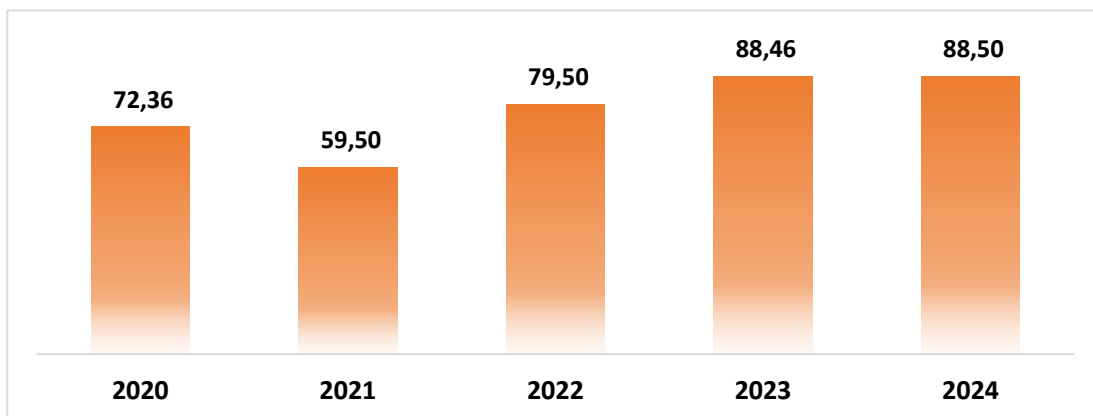
Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana Perda yang telah ditetapkan ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan



yang berlaku. Ini adalah indikator penting untuk mengukur efektivitas peraturan daerah dalam mencapai tujuannya.

Perda yang ditegakkan dengan baik dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum dimasyarakat. Selain itu, penegakan Perda juga dapat mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan publik. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) adalah proses untuk memastikan bahwa Perda, yang merupakan peraturan perundang-undangan Tingkat daerah, ditegakkan dan ditaati oleh semua pihak. Ini termasuk pengawasan, penindakan, dan upaya yustisi untuk pelanggaran Perda. Penegakan Perda dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak hukum di tingkat daerah, serta instansi terkait lainnya.

Gambar 2.66
Persentase Penegakkan Perda
Di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



Sumber : SATPOL PP Kabupaten Banggai, 2025

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. IDSD mencerminkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing daerah baik di tingkat



domestik maupun internasional, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Capaian skor Indeks Daya Saing (IDSD) Kabupaten Banggai tahun 2024 adalah 3,40, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,90.

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Banggai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel 2.26 berikut.



Tabel 2.26
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Dasar						
	Urusan Pendidikan						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	-	-	99,24	99,28	98,88
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	-	-	93,64	94,79	94,16
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	-	-	4,56	44,66	5,67
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	-	-	90,03	89,76	90,03
5	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%					
6	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%					
7	Indeks pemerataan guru	Angka					
8	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	%					
9	Persentase usulan izin satuan pendidikan	%					



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	yang diterbitkan/diperbarui						
10	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	%	100	100	100	100	100
Urusan Kesehatan							
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	263	165	104	90	150
2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita)	%	0	26	24,3	29,1	28,6
3	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	%	80	83	88	84	85
4	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	%	75	70	80	88	85
5	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	85	85	88	90	90
6	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100
7	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	%	N/A	0,10	0,10	0,95	1,67
8	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	N/A	66,66	66,66	66,66	100
9	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	N/A	94,84	96,93	98,51	99,51
10	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	N/A	95,10	98,71	98,20	99,38
11	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	N/A	96,81	99,35	95,57	98,90
12	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	N/A	88,76	91,19	95,91	98,21
13	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	%	N/A	58,09	98,86	98,90	61,98



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	standar						
14	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	N/A	75,50	79,86	82,99	82,81
15	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	N/A	76,21	94,17	94,75	91,74
16	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	N/A	81,48	80,17	82	93,86
17	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	N/A	80,25	81,13	90,70	90,87
18	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar;	%	N/A	97,21	100	100	98,77
19	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	N/A	93,28	93,58	94,99	94,76
20	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar;	%	N/A	91,58	92,06	94	97,47
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan Permukiman rawan banjir	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase layanan irigasi multikomoditas	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	%	N/A	N/A	N/A	N/A	16,11



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	N/A	81,35	88,62	90,99	100
6	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	%	N/A	N/A	82,42	N/A	N/A
7	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	N/A	91,67	86,00	71,52	68,13
8	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	N/A	41,75	35,00	40,00	87,48
9	Tingkat kemantapan jalan	%	69,60	73,25	63,69	63,69	34,29
10	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	84,86	117,9	80,00	80,00	80,00
13	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	%	N/A		63,67	63,67	64,31
15	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	N/A	68,99	65,75	65,75	100
16	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	N/A	88,20	88,86	89,21	89,85
17	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	%	N/A	86,40	88,45	90,76	92,67



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	domestik						
18	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	N/A	19,46	100	100	100
19	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	N/A	100	100	100	100
Urusan Perumahan dan Kawaasan Permukiman							
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak Huni	%	N/A	N/A	N/A	100	100
2	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	0	0	13,70	35,16	55,27
4	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	74,81	75,07	75,15	76,09	76,25
5	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%		0	0	100	100
7	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%		14,30	15,21	15,06	12,14
8	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%		4,26	0,50	1,18	21,59
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	0	0	0	0	0
2	Persentase penyelenggaraan tibumtranmas	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Cakupan Perlindungan masyarakat	%	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67
4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	100	100	100	100
5	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	%	N/A	N/A	N/A	N/A	76,07



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	N/A	N/A	N/A	N/A	87,93
7	Persentase penanganan pasca bencana	%	N/A	N/A	N/A	N/A	22,18
8	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	%	N/A	N/A	N/A	N/A	32
9	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	N/A	100	100	100	100
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	N/A	0	100	36,09	133,29
11	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	N/A	0	52,92	0,95	0,05
12	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	N/A	0	100	100	100
13	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	N/A	100	100	94,44	100
14	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	N/A	13	6,1	7,33	8,03
Urusan Sosial							
1	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100
2	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	100	100	100	100	100



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase tarnan makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100
5	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100
6	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	N/A	13,29	7,40	66,66	38,55
7	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	N/A	100	100	100	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
Urusan Tenaga Kerja							
1	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	554	664	634	798	135
2	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	0	0	0	0	3441
3	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	orang	4.594	7.267	11.121	11.115	11.115
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	N/A	0	0	0	100
5	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	N/A	0,61	0,61	0,48	0
6	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	N/A	178,972	75,44	185,47	288,13



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	N/A	71,05	100	1,81	0
8	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	N/A	74,4	64,81	37,14	100
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	1.3	N/	N/A	0.96	0.60
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	54.42	55.95	58.39	57.17	56.41
3	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	N/A	N/A	N/A	N/A	10.5
4	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	58.15	52.85	53.17	55.71	55.71
5	Persentase anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.04
6	Indeks Perlindungan Khusus Anak IPKA	Angka	55.13	53.85	68.63	67.88	67.88
7	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
8	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	7.3	13.9	23.62	8.91	11.49
Urusan Pangan							
1	Persentase jumlah cadangan pangan	%					



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Skor pola pangan harapan	Angka	82,4	77,9	83,8	82,8	90,8
3	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	78,94	83,33	34,91	45,59	53,2
Urusan Pertanahan							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%		0	0	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%		99,41	100	95,92	25
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%		100	0	0	0
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%		100	0	89,31	69,30
5	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%		100	100	100	100
Urusan Lingkungan Hidup							
1	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	5	10
2	Indeks Kualitas Air	Angka	70,00	70,00	68,33	66,57	65,65
3	Indeks Kualitas Udara	Angka	81,49	84,87	87,56	86,14	95,60
4	Persentase RTH	%	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
5	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	100	100	100	100	100
6	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	%	-	-	-	3,3	6,6



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	hidup						
7	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100
8	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Angka	-	-	-	-	-
9	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	-	57,80	72,99	84,31	94,71
10	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%		100	100	6,10	77,27
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	N/A	N/A	N/A	1,84	4,45
2	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	%	6,91	8,63	10,54	12,94	17,69
3	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	82,60	84,51	86,70	87,20	89,53
4	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	81,26	82,29	85,28	86,27	87,29
5	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	85,20	86,50	87,14	89,28	90,48
6	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	85,14	87,68	89,75	90,14	90,73
7	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	99,42	99,47	99,58	99,61	99,60
8	Cakupan pengelolaan profil Kependudukan	%	99,48	99,51	99,54	99,57	99,60
9	Perekaman KTP elektronik	%	90,25	91,55	92,85	94,83	96,72



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
10	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	10,32	10,61	10,58	12,98	17,82
11	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	N/A	N/A	N/A	33,33	33,33
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase fasilitasi penataan desa	%	0,69	4,81	5,50	8,93	12,03
2	Persentase fasilitasi kerjasama desa	%	0,69	1,72	3,09	4,47	5,84
3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	6,53	13,6	19,59	26,12	32,64
4	Persentase fasilitasi tata desa	%	29,89	45,42	60,95	78,50	100
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa (LKD)	%	8,59	17,18	25,77	34,36	42,96
6	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat	%	8,59	17,18	25,77	34,36	42,96
7	Persentase pengentasan desa tertinggal	%		4,81	2,06	1,03	0,69
8	Persentase peningkatan status desa mandiri	%		1,72	0,69	4,81	12,03
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	Rata-rata anak per WUS	2,29	2,26	2,29	2,22	2,22
2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age specific fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	N/A	36.1	37.6	35,29	33,90
3	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modem contraceptive (mCPR)	%	58.72	59.20	59.43	65	63.40
4	Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak	%	16.20	16.56	17.67	11.4	9.6



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terpenuhi (Unmet Need)						
5	Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	N/A	N/A	3.8	5.4	11.5
6	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut akat/cara KB modern (Proportion of Demand Satisfied by modern)	%	58.72	59.20	59.43	65	63.40
7	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	N/A	N/A	59.8	62.5	66.2
8	Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	%	17.5	10.5	11.7	11.9	12.8
Urusan Perhubungan							
1	Rasio Konektivitas	%	N/A	N/A	63	64	64
2	Konektivitas darat	%	59.67	60.89	62.13	63.406	64.70
4	Konektivitas laut	Unit	4	4	4	4	4
Urusan Komunikasi dan Informatika							
1	Indeks SPBE	Angka	1,72	1,45	2,07	3,23	3,58
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%		0	0	62,71	63,79
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%		54,54	86,36	75,60	67,69
4	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%		0	73,70	70,77	69,93
Urusan Koperasi, Usaha dan Menengah							
1	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	25	78	70	32	33



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	45,00	45,50	46,56	47,62	50,00
3	Persentase koperasi aktif	%	76,87	78,83	79,36	79,79	80,96
4	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	10,58	13,22	13,22	13,22	15,84
5	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	76,87	78,83	79,36	79,79	80,96
6	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	%	0,30	0,85	1,77	2,84	4,26
7	Pertumbuhan wirausaha	%	1,28	1,28	1,28	1,28	1,62
8	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	10	10	10	10	10
9	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	20	20	20	20	20
Urusan Penanaman Modal							
1	Realisasi total terhadap target investasi	%	10,98	158,73	253,29	268,07	303,47
2	Persentase peningkatan investasi	%		7,51	214,299	89,69	-16,45
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
4	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%	100	100	100	100	100
5	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	100	100	100	100	100
6	Persentase kerja sama penanaman modal yang ditindaklanjuti	%	0	0	0	0	0
Urusan Kepemudaan dan Olahraga							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan	%		0,15	0,05	0,75	0,67



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	ekonomi mandiri						
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%		0	0	0,10	1,42
3	Peningkatan prestasi olahraga	%		28	13	6	19
4	Rasio wirausaha pemuda	%	0,45	0,48	0,54	0,61	0,68
5	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	%	10	13	15	20	23
Urusan Statistik							
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka				1,32	2,62
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%		100	100	75	75,86
3	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%		100	100	75	77,58
Urusan Persandian							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%		0	11,78	251,2	20,93
2	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%				12,56	20,93
Urusan Kebudayaan							
1	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%					
2	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	%					
3	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	%					
4	Terlestarikannya Cagar Budaya	%		48,57	50	100	96,77



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Urusan Perpustakaan						
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	0	0	0	42,62	56,41
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	0	0	0	0	77,26
3	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	%	0	0	0	0	25%
4	Persentase pustakawan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang peustakaan	%	0	0	27%	27%	12%
	Urusan Kearsipan						
1	Tingkat ketersediaan arsip	%	3	3	3,5	3,7	7,8
2	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	%	7	7	7	8,5	9,3
3	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	0	0	0	0	0
4	Persentase SDM bidang kearsipan yang didngkatkan kompetensinya	%	8	10	12	15	17
	Layanan Urusan Pilihan						
	Urusan Kelautan dan Perikanan						
1	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	-2,79	3,58	1,58	3,35	3,41
2	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	17.930	19.952	21.149	25.015	27.864
3	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	938	3.685,24	5.689,76	6.242,22	6.578,44
4	Angka konsumsi ikan	Kg/Perkapita / Tahun	57,51	58,69	62,36	71,68	81,61
	Urusan Pariwisata						
1	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	51	98,9	25,41	28	32,08
2	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang	%	-	-	-	1,8	4,5



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	memiliki kekayaan intelektual						
3	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	-	-	-	48,8	50,6
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%		0	7,21	1,76	0,46
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%		0	0,08	6,69	6,77
Urusan Pertanian							
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	(21,74)	17,19	16,63	19,46	(13,59)
2	Peningkatan produksi hortikultura	%	3,40	10,77	5,52	86,26	(683,73)
3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	%	1,57	1,555	2,87	2,15	5,63
4	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	%	100	100	100	100	100
5	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	-	-	-	-	5,56
7	Persentase penanganan bencana pertanian	%	-	95,90	93,75	95,34	84,69
8	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	-	-	-	-	97,62
9	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100
10	Persentase sdm penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	-	78,13	12,50	6,25	10,00
Urusan Perdagangan							
1	Persentase izin usaha Perdagangan yang difasilitasi	%	30	38	45	48	50



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	0	6	3	0	1
3	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	95	90	90	75	80
4	Nilai ekspor barang		35,04	38,44	38,44	36,80	37,20
5	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	1	1	2	3	4
6	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	%	0	0	0	0	1
Urusan Perindustrian							
1	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	%	0	0	0	1	1
2	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	%	0	0	1	1	0
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini		3	0	28	19	13
4	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%		-41,50	5,67	10,29	6,66
5	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%		0	1	10,29	1
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%		100	100	0	0
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah	%		0	0	0	0



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	yang dikeluarkan oleh instansi terkait						
8	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%		0	0	0	0
9	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%		62	1	0	0
Urusan Transmigrasi							
1	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	%	99,80	81,66	74,01	1,19	1,19
2	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	%	40	33	0	16,84	77,80
3	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	%	8	10	12	15	20
Penunjang Urusan							
Unsur Perencanaan							
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja	%	100	100	100	100	100



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	PD pada Bidang Perekonomian dan SDA						
Unsur Keuangan							
1	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan TKD	%				31,76	27,54
2	Persentase alokasi belanja Infrastruktur pelayanan publik	%				33,86	35,04
3	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	%	89,99	95,08	86,76	92,39	92,52
4	Persentase Penurunan SILPA	%	10,63	-738,25	-71,35	0,12	21,55
5	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100
6	Persentase penambahan nilai aset tetap	%	5	6	13	11	8
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	8,06	9,00	9,80	9,63	7,10
8	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	%					
9	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%		100	100	100	100
Unsur Kepegawaian							
1	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	-	74,24	-	87	83
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	-	40	60	50	60
3	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	-	-	-	22,22	100
4	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	%	85	87	88	92	73
5	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%		249,909	69,81	28,52	72,15



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%		6,63	18,14	10,51	16,44
7	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%		7,10	10,58	82,31	46,09
Urusan Pendidikan dan Pelatihan							
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	80	-	100	100	100
2	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%	-	-	40	20	40
3	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	100	100	92.2	62.6	65
4	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	%	-	-	60	50	60
Unsur Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase Kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	%	-	60	60	100	100
2	Persentase kajian berbasis Bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	100	-	-	100	100
3	Persentase kajian berbasis Bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	100	-	-	100	100
4	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan	%	100	-	-	100	100



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	teknis dan supervisi terkait Penelitian, pengembangan, Pengkajian dan penerapan di daerah						
5	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	%	100	-	-	100	100
6	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah	%	100	-	-	100	100
7	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	%	100	-	-	100	100
8	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	%	100	-	-	100	100
Unsur Sekretariat Daerah							
1	Indeks kematangan organisasi	Angka	0	0	0	26,25	26,26
2	Efektivitas kerja sama daerah	Dokumen	N/A	N/A	57	96	84
3	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan		N/A	N/A	N/A	Sedang	-
4	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan	%	77,3	78	78,6	79	80,3
5	Persentase produk hukum yang dihasilkan	%	80	83	85	87	90
6	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	%	89,22	93,82	88,59	92,67	91,39
7	Tingkat Kematangan UKPBJ	Indeks	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
8	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		89,22	93,82	88,59	92,67	91,93
Unsur Sekretariat DPRD							
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	85,71	94,44	90	92,86	98,57



NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	83,33	91,67	91,67	93,33	94,17
Unsur Pengawasan							
1	Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-I	%	75,72	78,25	75,23	80,11	78,58
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Incern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3
Unsur Pemerintahan Umum							
1	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	0	0	0	0	0
2	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	0	0	0	0	0
3	Persentase organisasi kemasyarakatan an aktif	%	48,19	48,19	48,19	48,19	48,19
4	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, Fasilitasi kerukunan umat Beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	0	0	0	0	0
5	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100



2.1.5 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sangat esensial karena merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Standar Pelayanan Minimal berperan penting dalam menjamin kualitas dan pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat. SPM menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang minimal dan berkualitas.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemerintah daerah agar benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 2 Tahun 2018 bahwa Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Adapun jenis SPM terdiri atas 6 (enam) bidang yang menjadi urusan wajib yaitu :



1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Bidang Kawasan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Banggai dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah.

Realisasi capaian SPM untuk masing-masing bidang urusan sebagai berikut:

a. Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Banggai Tahun 2024

Tabel 2.27
Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH	JUMLAH SISWA BERSEKOLAH/ TAMAT	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Anak Usia Dini	11895	11564	97,22	1.422	1.422	100%	96,21%	Baik
2	Pendidikan Dasar	56.790	49262	86,74	3.644	3.644	100%	96,69%	Baik
3	Pendidikan Kesetaraan		889		64	64	100%	93,63%	Baik

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai



b. Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun 2024

Tabel 2.28
Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET DAERAH (%)	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100	99,46%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar	100	99,29%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	100	98,91%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100	98,21%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar	100	88,98%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar	100	87,54%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai standar	100	93,79%
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar	100	93,25%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100	90,53%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100	97,20%
11	Pelayanan kesehatan penderita Tuberkulosis	Pelayanan kesehatan penderita Tuberkulosis sesuai standar	100	94,76%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi HIV	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi HIV Sesuai standar	100	94,84%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai



c. Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2024

Tabel 2.29

Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024
1	2	3	4	5
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	92,18 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Meningkatnya kualitas sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	92,22 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai

d. Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banggai Tahun 2024

Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang urusan Perumahan sesuai Program dan Kegiatan Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk Tahun Anggaran 2024 belum dapat ditargetkan dan dilaksanakan sesuai dengan Sub Kegiatan antara lain :

- Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota
- Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota
- Rembuk warga menentukan calon penerima bantuan rumah layak huni bagi korban bencana
- Pembangunan rumah bagi korban bencana.



e. Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai Tahun 2024

Realisasi capaian bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai terdiri dari 3 (tiga) jenis yakni:

1) Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 2.30

Realisasi SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH WARGA NEGARA BERHAK MENDAPAT PELAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA TERLAYANI
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	50	45

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai

2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel 2.31

Realisasi SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 Kategori Indeks Pencapaian SPM Trantibumlinmas

NO	CAPAIAN SPM	TOTAL CAPAIAN
1	2	3
1	DAMKAR	81%

Sumber : Dinas Damkar Kabupaten Banggai



3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 2.32

Realisasi SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH WARGA NEGARA BERHAK MENDAPAT PELAYANAN (JIWA)	JUMLAH WARGA NEGARA TERLAYANI (JIWA)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	246.877	187.538	75,96
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	246.877	140.697	56,99

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai

f. Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2024

Tabel 2.33

Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KERJA	TAHUN PENCAPAIAN	CAPAIAN KOTA		
				TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga Persentase (%) penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2024	100%	98,46%	98,46%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2024	100%	95,00%	95,00%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2024	100%	98,46%	98,46%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	Persentase (%) gelandangan	2024	100%	98,33%	98,33%



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KERJA	TAHUN PENCAPAIAN	CAPAIAN KOTA		
				TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
	khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti				
5	Perlindungan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	2024	100%	96,00%	96,00%
Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Banggai (%)						97,25%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Banggai

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan ruang lingkup meliputi kebijakan keuangan daerah pada pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah sehingga dapat membiayai strategi pembangunan melalui program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Gambaran Keuangan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Penyelenggaraan



fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya serta proyeksi keuangan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2026-2030.

2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

2.2.1.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banggai selang tahun 2020-2024 dapat di gambarkan melalui kinerja APBD yang meliputi pengelolaan pendapatan daerah, kinerja pengelolaan belanja daerah dan kinerja pengelolaan pembiayaan daerah serta gambaran neraca daerah Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

a. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD mencerminkan kinerja pemerintah dalam kemampuannya untuk mengelola keuangan dan pendanaan pada periode tertentu. Kinerja pelaksanaan APBD ini dalam melihat seberapa besar pemerintah memiliki kemandirian, kemampuan mengoptimalkan pendapatan, serta kemampuan dalam menekan pengeluaran, serta kemampuan dalam menyerap anggaran.

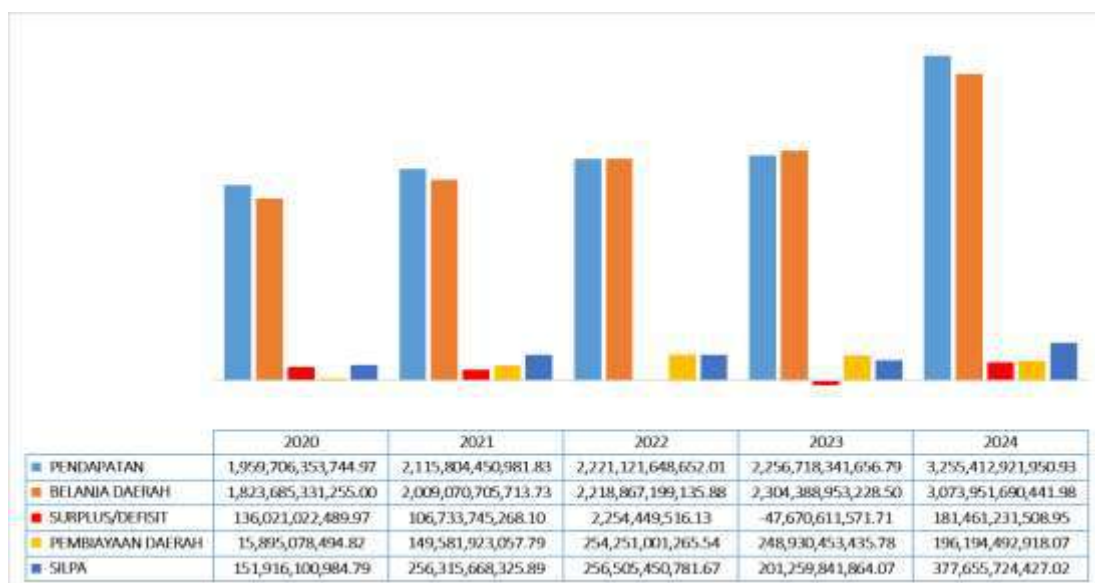
Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banggai menunjukan besaran yang fluktuatif selama tahun 2020 sampai dengan 2024 dengan kecenderungan/trend meningkat dari tahun ke tahun dengan rata -rata pertumbuhan sebesar 14,70%. Di tahun 2020 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banggai tercatat Rp1.959.706.353.744,97 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2024 total pendapatan daerah mencapai Rp3.255.412.921.950,93. Sama halnya dengan pendptatan daerah, belanja daerah Kabupaten



Banggai selang Tahun 2020-2024 juga mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat dengan rata-rata Tingkat pertumbuhan sebesar 20,99%. Di Tahun 2020 belanja daerah tercatat sebesar Rp1.823.685.331.255,00 kemudian meningkat menjadi Rp3.073.951.690.441,98,- di tahun 2024.

Gambar 2.67

Perkembangan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



Sumber : LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024

Kondisi fluktuatif pada pendapatan dan belanja daerah berpengaruh pada kondisi surplus atau defisitnya APBD Kabupaten Banggai. Selama Tahun 2020-2024 mengalami defisit anggaran yang di tutupi melalui pembiayaan daerah. Defisit anggaran terbesar pada tahun 2024 sebesar Rp181.461.231.508,95,-. Kondisi serupa juga terjadi pada pos pembiayaan daerah. Pembiayaan Neto berfluktuasi dan terbesar tahun 2023 yaitu Rp254.251.001.265,54,- sedangkan SILPA cenderung meningkat di tahun 2024 sebesar Rp377.655.724.427,02. Kondisi Silpa demikian terjadi karena dana DBH Kurang bayar ataupun lebih bayar ditransfer di akhir tahun anggaran, sehingga tidak terencanakan belanjanya di penetapan bahkan perubahan anggaran tahun berjalan.



Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai yang meliputi kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat di lihat pada tabel 2.34 berikut :



Tabel 2.34

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

No	URAIAN	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	PENDAPATAN					
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	157,994,144,272.97	190,462,129,225.83	217,602,321,680.01	216,386,288,464.79	226,257,171,064.96
	Pendapatan Transfer-LRA	1,715,437,686,819.00	1,867,053,767,116.00	1,947,559,446,372.00	2,014,310,234,952.00	3,005,607,896,323.00
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA	86,274,522,653.00	58,288,554,640.00	55,959,880,600.00	26,021,818,240.00	23,547,854,562.97
	JUMLAH PENDAPATAN	1,959,706,353,744.97	2,115,804,450,981.83	2,221,121,648,652.01	2,256,718,341,656.79	3,255,412,921,950.93
2.	BELANJA DAERAH					
	Belanja Operasi	1,280,622,999,749.00	1,412,083,627,951.22	1,569,021,843,285.88	1,562,700,563,060.50	1,985,681,216,435.54
	Belanja Modal	169,016,197,643.00	216,631,648,676.51	296,231,328,646.00	358,702,391,758.00	671,072,054,401.44
	Belanja Tak Terduga	20,975,044,282.00	19,164,519,356.00	1,690,350,700.00	1,228,330,539.00	158,933,800.00
	Belanja Transfer	353,071,089,581.00	361,190,909,730.00	351,923,676,504.00	381,757,667,871.00	417,039,485,805.00
	JUMLAH BELANJA	1,823,685,331,255.00	2,009,070,705,713.73	2,218,867,199,135.88	2,304,388,953,228.50	3,073,951,690,441.98
	SURPLUS/DEFISIT	136,021,022,489.97	106,733,745,268.10	2,254,449,516.13	(47,670,611,571.71)	181,461,231,508.95
3.	PEMBIAYAAN DAERAH					
	Penerimaan Pembiayaan	31,854,786,494.82	149,581,923,057.79	256,251,001,265.54	256,556,561,655.78	201,294,492,918.07
	Pengeluaran Pembiayaan	15,959,708,000.00	0.00	2,000,000,000.00	7,626,108,220.00	5,100,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETO	15,895,078,494.82	149,581,923,057.79	254,251,001,265.54	248,930,453,435.78	196,194,492,918.07
	SILPA	151,916,100,984.79	256,315,668,325.89	256,505,450,781.67	201,259,841,864.07	377,655,724,427.02

Sumber : LRA Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



1) **Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b) Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata realisasi pertumbuhan seperti terlihat pada tabel 2.35 berikut ini:



Tabel 2.35
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

No	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
A.	PENDAPATAN	1,959,706,353,744.97	2,115,804,450,981.83	2,221,121,648,652.01	2,256,718,341,656.79	3,255,412,921,950.93	14,70
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	157.994.144.272,97	190.462.129.225,83	217.602.321.680,01	216.386.288.464,79	226.257.171.064,96	9,70
	Pendapatan Pajak Daerah	50.713.072.147,76	65.390.332.182,44	61.950.375.592,44	68.015.598.651,15	75.416.662.828,67	11,09
	Pendapatan Retribusi Daerah	11.509.556.305,44	9.887.216.809,39	14.325.178.092,00	20.645.658.613,33	20.091.632.837,18	18,06
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	2.989.217.754,00	3.813.505.652,75	3.962.201.302,68	5.714.244.284,00	6.234.376.221,00	21,20
	Lain-lain PAD Yang Sah	92.782.298.065,77	111.371.074.581,25	137.364.566.692,89	122.010.786.916,31	124.514.499.178,11	8,56
2.	Pendapatan Transfer	1.715.437.686.819,00	1.867.053.767.116,00	1.947.559.446.372,00	2.014.310.234.952,00	3.005.607.896.323,00	16,45
	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.429.584.691.213,00	1.500.743.051.838,00	1.619.287.389.501,00	1.696.369.090.390,00	2.695.439.568.183,00	19,13
	Transfer Pemerintah Pusat-lainnya	234.192.435.000,00	311.186.169.000,00	250.001.275.000,00	247.311.422.000,00	228.920.237.000,00	1,18
	Dana Insentif Daerah	0,00	76.993.734.000,00	29.076.464.000,00	20.281.195.000,00	0,00	-48,12
	Dana Desa	234.192.435.000,00	234.192.435.000,00	220.924.811.000,00	227.030.227.000,00	228.920.237.000,00	-0,52
	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	51.660.560.606,00	55.124.546.278,00	67.450.781.871,00	68.209.722.562,00	81.248.091.140,00	13,49
	Pendapatan Bagi Hasil	46.927.920.606,00	55.124.546.278,00	67.450.781.871,00	68.209.722.562,00	81.048.091.140,00	14,94
	Bantuan Keuangan			10.820.000.000,00	2.420.000.000,00	200.000.000,00	-67,34
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	86.274.522.653,00	58.288.554.640,00	55.959.880.600,00	26.021.818.240,00	23.547.854.562,97	-24,86
	Pendapatan Hibah	31,854,786,494.82	149,581,923,057.79	256,251,001,265.54	256,556,561,655.78	201,294,492,918.07	-45,30
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15,959,708,000.00	0.00	2,000,000,000.00	7,626,108,220.00	5,100,000,000.00	60,16



Berdasarkan tabel 2.35 diatas, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai selang 2020–2024 sebesar 14,70%. Sementara rata-rata laju pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 9,70% diikuti dengan pendapatan transfer tumbuh sebesar 92,33% sedangkan pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata tumbuh sebesar 0,72%.

Berdasarkan tabel 2.35 dapat digambarkan bahwa pada tahun 2020 unsur paling menonjol yang memberikan kontribusi terbesar pada Pendapatan Asli Daerah adalah lain-lain PAD yang sah dimana kontribusinya adalah sebesar 58,72% dan sampai dengan tahun 2024 tetap memberikan kontribusi terbesar dengan capaian sebesar 55,03%. Dana Transfer pada tahun 2020 yang memberikan kontribusi terbesar masih didominasi oleh Dana Perimbangan yaitu sebesar 83,34% pada tahun 2024 dan 89,68%. Sedangkan untuk kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2020 yang memberikan peranan cukup besar adalah pada Pendapatan Hibah sebesar 85,67% sedangkan tahun 2024 kontribusi terbesar Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada kelompok belanja Lain_lain Pendapatan sesuai peaturan perundang-undangan sebesar 88,71%. Perbandingan Realisasi unsur-unsur pendapatan terlihat dalam gambar 2.68 berikut ini :

Gambar 2.68
Perbandingan Realisasi Pendapatan Kabupaten Banggai
Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)





Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah tahun 2020 hanya mencapai 8,06% sementara untuk dana transfer adalah sebesar 87,54% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah adalah sebesar 4,40%. Seiring dengan bertambahnya waktu, pada tahun 2024 proporsi realisasi PAD terhadap Pendapatan tidak mengalami kenaikan bahkan cenderung menurun dengan proporsi sebesar 6,95% dan untuk dana transfer mengalami kenaikan sebesar 92,33% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 0,72%. Proporsi tersebut mencerminkan bahwa Kabupaten Banggai masih sangat tergantung dari bantuan pusat untuk membiayai segala kebutuhan terkait dengan pembangunan dan pemerintahan. Untuk laju pertumbuhan realisasi masing-masing unsur pendapatan dengan asumsi bahwa besarnya realisasi pada tahun 2020 menggunakan angka penetapan 2020, adalah sebagai berikut.

Tabel 2.36
Pertumbuhan Realisasi Masing-Masing Unsur
Pendapatan Tahun 2021-2024 (%)

Uraian	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Pendapatan-LRA	7,97	4,98	1,60	44,25	14,70
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20,55	14,25	-0,56	4,56	9,70
Pendapatan Transfer-LRA	8,84	4,31	3,43	49,21	16,45
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA	-32,44	-4,00	-53,50	-9,51	-24,86

Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai, 2024

Kondisi pertumbuhan masing-masing unsur pendapatan di Kabupaten Banggai selang 2021-2024 menunjukkan fluktuasi. Dari tabel 2.36 diatas terlihat proporsi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2021-2024 sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah menunjukkan penurunan. Rata-rata proporsi terbesar adalah



Dana Transfer yaitu sebesar 14,93%. Diikuti oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah dengan capaian proporsi rata-rata sebesar 13,71% serta proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah proporsi rata-rata sebesar (36,58%). Selanjutnya proporsi PAD dijabarkan sebagai berikut.

Gambar 2.69
Proporsi Masing-masing Unsur PAD
Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)



Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai 2025

Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), selama kurun waktu 2020-2024 menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sebesar Rp157.994.144.272,97 menjadi Rp226.257.171.064,96 pada tahun 2024. Selanjutnya bila dilihat dari unsur-unsur PAD, pada tahun 2020 hasil pajak daerah proporsinya adalah sebesar 32,09% meningkat menjadi 35,33% pada tahun 2024, selanjutnya untuk hasil retribusi daerah pada tahun 2020 sebesar 7,28% terjadi kenaikan pada tahun 2024 menjadi sebesar 8,88%. Untuk komponen Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 sebesar 1,89% dan 2,76% pada tahun 2024, sedangkan pada komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2020 sebesar 58,73% menurun menjadi sebesar 55,03% pada tahun 2024. Pertumbuhan masing-masing unsur PAD dijelaskan sebagai berikut.



Tabel 2.37
Pertumbuhan Masing-Masing Unsur PAD
Tahun 2020-2024 (%)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
Pajak Daerah	-8,75	28,94	-5,26	9,79	10,88	11,09
Retribusi Daerah	-6,107	-14,10	44,89	44,12	-2,68	18,06
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	5,602	27,58	3,90	44,22	9,10	21,20
Lain-lain PAD yang Sah	-25,39	20,03	23,34	-11,18	2,05	8,56

Pada tabel 2.37 diatas memperlihatkan perkembangan laju pertumbuhan realisasi unsur PAD, pada tahun 2020 laju pertumbuhan Hasil Pajak Daerah pada posisi -8,75% namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 28,94%, sementara untuk tahun 2022 kembali terjadi penurunan sebesar -5,26%. Tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu dari 9,79% menjadi 10,88%. Untuk komponen retribusi daerah semula tahun 2021 berada pada posisi -6,107% kemudian di tahun 2022 laju pertumbuhannya sebesar -14,10% sementara untuk tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 terjadi penurunan laju pertumbuhan realisasi yaitu 44,89%, 44.12% dan -2,68%, Adapun pertumbuhan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari deviden atau konpensasi yang dibayarkan oleh pihak ketiga atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 berada pada posisi 5,602, kemudian pada tahun 2021 sebesar 27,58% terjadi penurunan sebesar 3,90% pada tahun 2022 dan kenaikan tahun 2023 sebesar 44,22% dan pada tahun 2024 turun menjadi 9,10%. Berikutnya adalah lain-lain PAD yang sah memiliki nilai pertumbuhan yang cenderung menurun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.



2) Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran yang nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas. Gambaran tentang perkembangan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai selama Tahun 2020-2024 dan persebaran proporsinya dapat dilihat dalam tabel 2.38 berikut:



**Tabel 2.38****Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
BELANJA DAERAH	1.823.685.331.255,00	2.009.070.705.713,73	2.218.867.199.135,88	2.304.388.953.228,50	3.073.951.690.441,98	20,99
BELANJA OPERASI	1.280.622.999.749,00	1.412.083.627.951,22	1.569.021.843.285,88	1.562.700.563.060,50	1.985.681.216.435,54	12,01
Belanja Pegawai	748.722.942.274,00	758.945.563.959,00	773.187.852.134,00	792.226.768.174,50	932.050.261.203,84	9,53
Belanja Barang dan Jasa	439.833.945.362,00	627.186.944.290,72	745.594.249.688,88	683.840.464.468,00	936.602.728.230,54	22,54
Belanja Bunga		200.458.752,50				-25,00
Belanja Subsidi	403.840.000,00	403.840.000,00	403.800.000,00	403.713.720,00	403.884.960,00	0,00
Belanja Hibah	91.662.272.113,00	24.444.820.949,00	41.391.276.463,00	82.033.096.698,00	114.229.309.642,00	33,36
Belanja Bantuan Sosial	-	902.000.000,00	8.444.665.000,00	4.196.520.000,00	2.395.032.400,00	185,75
BELANJA MODAL	169.016.197.643,00	216.631.648.676,51	296.231.328.646,00	358.702.391.758,00	671.072.054.401,44	43,27
Belanja Modal-Tanah	355.548.475,00	251.494.220,00	-	540.059.109,00	868.905.947,00	-17,09
Belanja Modal-Peralatan dan Mesin	63.131.403.608,00	45.282.040.304,51	64.118.971.654,00	69.729.278.302,00	188.605.230.947,27	48,14
Belanja Modal-Gedung dan Bangunan	25.160.110.281,00	46.995.242.897,00	78.854.508.591,00	154.451.609.928,00	186.938.860.867,49	67,87
Belanja Modal-Jalan, Irigasi, dan Jaringan	80.278.231.879,00	123.230.853.685,00	152.509.584.401,00	133.597.972.919,00	294.280.781.639,68	46,28
Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya	90.903.400,00	872.017.570,00	748.264.000,00	375.471.500,00	30.000.000,00	175,81
Belanja Modal-Aset Lainnya				8.000.000,00	348.275.000,00	1.063,36
BELANJA TAK TERDUGA	20.975.044.282,00	19.164.519.356,00	1.690.350.700,00	1.228.330.539,00	158.933.800,00	53,55
TRANSFER DAERAH	353.071.089.581,00	361.190.909.730,00	351.923.676.504,00	381.757.667.871,00	417.039.485.805,00	4,36
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	13.565.884.050,00	14.065.884.050,00	18.066.274.824,00	12.943.866.569,00	14.345.058.805,00	3,65
Bagi Hasil Pajak Daerah	10.532.934.050,00	11.032.934.050,00	13.417.671.334,00	12.943.866.569,00	14.345.058.805,00	12,74
Bagi Hasil Retribusi	3.032.950.000,00	3.032.950.000,00	4.648.603.490,00			-25,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	339.505.205.531,00	347.125.025.680,00	333.857.401.680,00	368.813.801.302,00	402.694.427.000,00	4,52

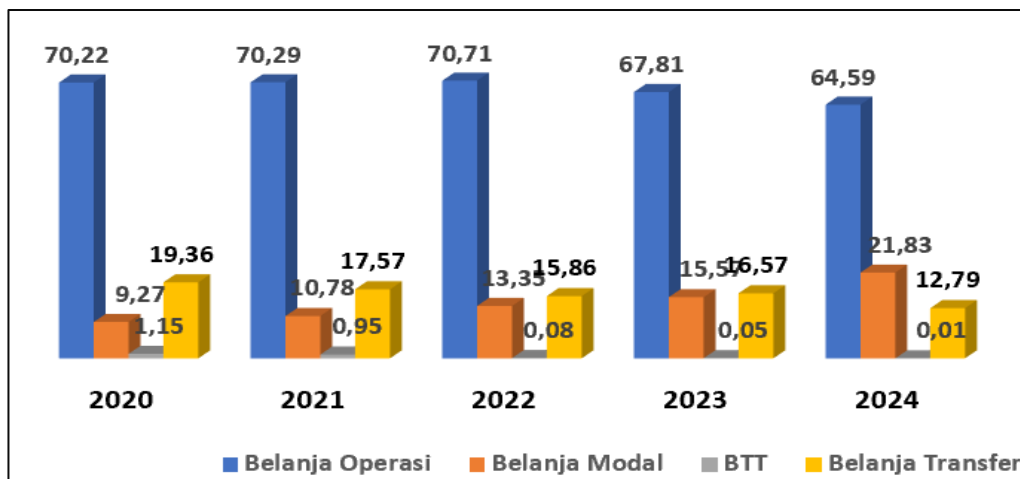


Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya						
Bantuan Keuangan Kepada Desa	338.746.616.500,00	344.825.025.680,00	333.857.401.680,00	368.813.801.302,00	402.694.427.000,00	4,57
Bantuan Keuangan Lainnya	758.589.031,00	2.300.000.000,00				25,80



Untuk proporsi masing-masing belanja daerah di gambarkan sebagaimana diagram berikut :

Gambar 2.70
Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer Tahun 2020-2024 (%)



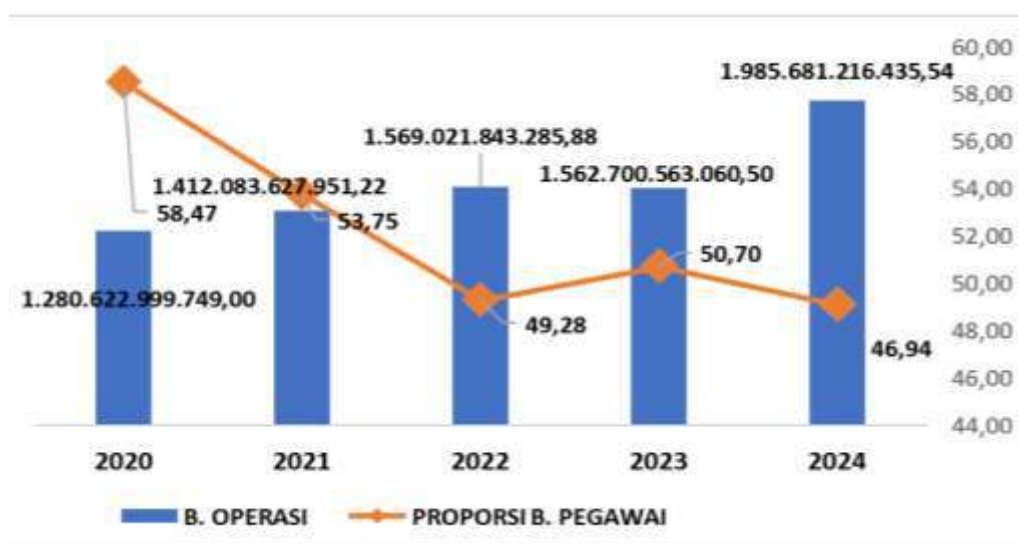
Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai 2025

Bila dilihat berdasarkan komponen belanja dan transfer daerah, maka proporsi belanja operasi relatif lebih besar dibandingkan belanja modal dan transfer. Namun apabila dianalisis lebih dalam, secara rata-rata pertumbuhan belanja operasi sebesar 12,01% sedangkan Belanja modal secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 43,27% dan transfer sebesar 4,36% meskipun secara absolut belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan belanja modal dan transfer, namun secara proporsi pertumbuhan belanja modal lebih besar daripada belanja operasi dan transfer hal ini ditunjukkan oleh besarnya proporsi pada belanja operasi tahun 2020 sebesar 70,22% dan mengalami kenaikan mulai tahun 2021 sebesar 70,29%, tahun 2022 naik sebesar 70,71%, mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 67,81% dan mencapai sebesar 64,59 di tahun 2024. Untuk proporsi belanja modal pada tahun 2020 adalah sebesar 9,27% dan naik tahun 2021 menjadi 10,78% dan kembali



mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu sebesar 13,35% dan 15,51% serta terakhir tahun 2024 menjadi sebesar 21,83%. Pada gambar 2.70 mencerminkan kecenderungan peningkatan proporsi belanja operasi menunjukkan adanya komitmen pemerintah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah.

Gambar 2.71
Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja Operasi
Tahun 2020-2024



Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai, 2024

Gambar 2.71 diatas menggambarkan proporsi belanja pegawai terhadap belanja operasi. Sesuai grafik di atas dimana pada tahun 2020 proporsi belanja pegawai terhadap Belanja operasi adalah sebesar 58,47%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 46,94% atau selama kurun waktu selama 5 tahun terjadi penurunan sebesar 11,53%. Sedang bila dilihat dari alokasi anggaran belanja operasi pada tahun 2020 sebesar Rp1.280.622.999.749,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp1.985.681.216.435,54 dengan kata lain belanja operasi selama kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan sebesar Rp705.058.216.686,54 atau naik sebesar 55,06%.



Belanja modal merupakan investasi penting bagi kemajuan ekonomi suatu daerah. Belanja modal dapat berupa pengadaan atau pembelian aset yang memiliki masa manfaat satu tahun dan ini merupakan aset yang bisa digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lain, sehingga meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan meningkatnya porsi belanja modal berarti penyediaan akan fasilitas belanja publik semakin besar ini berarti tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin baik.

Akan halnya kondisi yang terjadi di Kabupaten Banggai selama tahun 2020-2024 menunjukkan proporsi belanja modal terhadap total belanja dan transfer daerah dan nilainya menunjukkan bahwa rasio belanja modal terhadap total belanja dan transfer daerah pada tahun 2020 sebesar 9,27% naik menjadi sebesar 21,83% pada tahun 2024 dengan demikian terjadi kenaikan peran belanja modal terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2020-2024.

3) Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang dikeluarkan untuk menutupi defisit anggaran.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan kenaikan dari semula sebesar Rp31.854.786.494,82 pada tahun 2020 menjadi Rp201.294.492.918,07 pada tahun 2024. Adapun dalam Pengeluaran pembiayaan daerah cenderung meningkat dari sebesar Rp15.959.708.000 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp5.100.000.000,00 pada tahun 2024. Dari nilai tersebut di atas diperoleh besarnya Selisih antara penerimaan pembiayaan dan



pengeluaran pembiayaan maka diperoleh pembiayaan netto yaitu sebesar Rp15.895.078.494,82 pada tahun 2020 dan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp196.194.492.918,07 pada tahun 2024.

Nilai ini digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2020 dan defisit anggaran pada tahun 2024. Secara rinci perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Banggai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.39 berikut.



Tabel 2.39

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024 (Rupiah)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
PEMBIAYAAN DAERAH						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	31.854.786.494,82	149.581.923.057,79	256.251.001.265,54	256.556.561.655,78	201.294.492.918,07	104,87
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	17.840.078.494,82	149.544.923.057,79	256.251.001.265,54	256.556.561.655,78	201.259.492.918,07	104,87
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-		
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	13.959.708.000,00	37.000.000,00	-	-	35.000.000,00	
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-		
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	55.000.000,00	-	-	-		
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31.854.786.494,82	149.581.923.057,79	256.251.001.265,54	256.556.561.655,78	201.294.492.918,07	104,87
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.959.708.000,00	-	2.000.000.000,00	7.626.108.220,00	5.100.000.000,00	37,05
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	7.626.108.220,00	5.100.000.000,00	37,05
Pembayaran Pokok Utang	13.959.708.000,00	-	-	-		
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-		
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.959.708.000,00	-	2.000.000.000,00	7.626.108.220,00	5.100.000.000,00	37,05
PEMBIAYAAN NETTO	15.895.078.494,82	149.581.923.057,79	254.251.001.265,54	248.930.453.435,78	196.194.492.918,07	221,94



2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah Kabupaten Banggai periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang tercatat bahwa jumlah Aset Lancar mengalami kenaikan semula pada tahun 2020 adalah sebesar Rp245.671.225.654,77 naik menjadi Rp508.355.136.408,60 pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 26,29%. Aset tetap mengalami peningkatan tahun 2020 sebesar Rp2.107.264.256.095,62 meningkat menjadi Rp2.803.667.090.124,53 tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,50%. Hal serupa juga pada Kondisi Aset Lainnya tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp41.459.054.457,40 mengalami kenaikan menjadi Rp130.180.992.558,15 pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 216,13%. Dari nilai tersebut di atas memberikan gambaran pada jumlah aset daerah juga mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp2.425.740.806.471,97 meningkat menjadi sebesar Rp3.483.940.862.802,79 pada tahun 2024.

Hutang dalam tabel 2.40 dibawah ini bukan berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai melakukan pembiayaan by debt dengan cara menghutang, melainkan karena secara administratif ada kewajiban yang belum dilunasi, jadi bersifat administratif.

a. Rasio Lancar (Curent Ratio)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2.38, bila kita analisis modal kerja yaitu menganalisa kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin, dengan menggunakan rumus Aset lancar dikurangi kewajiban lancar neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai memberikan angka yang positif dimana pada Tahun 2020 sebesar Rp245.671.225.654,77 dan Tahun 2021 sebesar Rp407.582.872.353,47 dan tahun 2022 sebesar Rp308.786.887.380,15 dan Rp383.836.657.951,93 Rp508.355.136.408,60 hal ini menunjukkan kondisi pemerintah daerah masih dalam kondisinya yang baik.



Tabel 2.40
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Banggai

URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2020	2021	2022	2023	2024	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan Setara Kas	151.969.313.984,79	265.412.270.999,89	269.052.402.474,78	213.826.194.999,07	390.220.023.799,02	34,50
Kas di Kas Daerah	84.397.129.485.59	238.372.496.817.25	247.823.321.130.51	200.945.772.460.28	386.937.785.996.96	65,01
Kas di Bendahara penerimaan	293.817.309.00	3.067.772.93	1.613.970.04	58.130.164.37	3.167.000.00	815,20
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	34.593.112.12	0.00	0.00	0.00	-25,00
Kas di BLUD	2.227.101.851.12	5.340.877.097.15	884.396.082.14	832.690.369.33	222.421.296.16	-5,69
Kas Dana BOS	12.984.515.184.61	675.323.629.61	216.148.008.61	201.499.602.61	0.00	-67,39
Kas Dana Kapasitas pada FKTP	2.001.677.743.47	522.066.578.83	126.923.283.48	249.322.908.48	117.586.072.29	-26,50
Kas Lainnya	-	463.845.992.00	0.00	1.043.776.113.00	0.00	-50,00
Setara Kas	20.065.041.411.00	10.000.000.000.00	20.000.000.000.00	10.495.003.381.00	0.00	-24,42
Investasi Jangka Pendek	30.000.031.000.00	10.000.000.000.00	0.00	0.00	0.00	-41,67
Kas Dana BSOP		-	0.00	0.00	149.269.440.61	
Kas Dana BOK Puskesmas			0.00	0.00	2.789.793.993.00	
Piutang Pajak Daerah	30.349.321.514.80	29.745.060.934.65	30.957.026.749.21	34.129.625.553.81	32.780.735.410.20	2,09
Piutang Retribusi Daerah	989.939.660.00	1.866.540.900.00	1.399.786.600.00	1.778.289.500.00	2.108.447.500.00	27,29
Piutang Lain-lain PAD Yang SAH	12.295.314.620.61	52.894.609.485.61	23.251.854.971.61	17.855.555.757.88	32.512.763.526.61	83,26
Piutang Transfer Antar Derah	6.418.995.288.00	9.264.859.281.00	10.105.839.623.00	9.687.647.046.00	23.222.779.752.22	47,25
Piutang Lainnya	1.753.503.283.80	491.131.000.00	491.131.000.00	1.339.138.300.00	6.181.183.126.98	115,56
Penyisihan Piutang	-14.758.562.29.23	-15.514.602.862.31	-15.441.791.164.98	-21.554.912.421.41	-23.960.687.617.89	13,85
Beban di Bayar di Muka	9.708.333.33	20.708.333.33	14.886.986.30	16.666.666.67	0.00	-0,71



URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2020	2021	2022	2023	2024	
Persediaan	56.643.691.268.67	63.402.294.281.30	64.005.520.712.01	51.708.681.978.13	45.289.890.911.68	-4,69
Jumlah Aset Lancar	245.671.225.654.77	407.582.872.353.47	383.836.657.951.93	308.786.887.380.15	508.355.136.408.60	26,29
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.306.000.000.00	1.269.000.000.00	1.269.000.000.00	1.269.000.000.00	1.234.000.000.00	-1,40
Investasi Jangka Panjang Permanen	30.040.270.264.18	32.918.067.494.89	37.944.558.065.88	41.912.979.075.51	40.503.643.711.51	7,99
Jumlah Investasi Jangka Panjang	31.346.270.264.18	34.187.067.494.89	39.213.558.068.88	43.181.979.075.51	41.737.643.711.51	7,64
ASET TETAP						
Tanah	256.313.917.941.23	237.204.068.684.02	237.225.740.684.01	240.046.942.672.39	241.738.052.880.01	-1,39
Peralatan dan Mesin	708.127.541.764.19	766.983.765.515.74	781.632.823.285.17	850.273.540.264.72	917.582.803.407.26	6,73
Gedung dan Bangunan	900.030.796.682.67	946.447.974.800.62	1.050.330.796.721.17	1.191.507.036.039.97	1.283.138.356.116.91	9,32
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.580.658.599.880.48	1.707.362.838.521.64	1.880.208.155.795.75	2.009.380.618.948.17	2.256.521.357.759.70	9,33
Aset Tetap Lainnya	46.668.212.443.95	45.736.995.191.95	47.258.702.941.95	38.078.657.957.95	28.688.307.404.97	-10,69
Konstruksi dalam Pengerjaan	10.820.780.241	14.810.035.086.13	7911.388.511.109.66	62.485.983.938.00	123.784.055.776.23	140,13
Akumulasi Penyusutan	-1.395.355.592.857.92	-1.585.040.242.174.35	-1.732.491.671.686.91	-1.938.793.401.842.72	-2.047.785.838.220.55	10,11
Jumlah Aset Tetap	2.107.264.256.095.62	2.133.505.435.625.75	2.275.553.058.850.80	2.452.979.377.979.48	2.803.667.090.124.53	7,50
ASET LAINNYA						
Tagihan jangka Panjang	5.561.300.00	5.561.300.00	25.598.300.00	5.561.300.00	4.179.276.294.87	18.832,82
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			6.787.000.000.00	10.524.843.817.17	6.787.000.000.00	4,89
Aset Tidak Berwujud	7.568.075.000.00	8.052.574.500.00	8.502.038.500.00	8.864.760.000.00	14.548.452.288.96	20,09
Aset Lain-Lain	35.126.861.872.40	39.342.344.985.14	105.992.553.296.81	104.768.610.516.57	273.178.986.402.25	85,25



URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2020	2021	2022	2023	2024	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-1.241.443.715.00	-2.012.025.604.17	-2.821.527.162.50.	-3.684.399.466.67	-4.860.635.432.10	41,20
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			-77.098.843.991.91.	-70.705.104.877.22	-163.652.086.995.83	30,79
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)			34.641.630.352.00	687.606.436.000.00	0.00	446,23
Jumlah Aset Lainnya	41.459.054.457.40	45.388.455.180.97	76.028.449.294.40	737.380.707.289.85	130.180.992.558.15	216,13
JUMLAH ASET	2.425.740.806.471.97	2.620.633.830.655.08	2.774.631.724.163.01	3.542.328.951.724.99	3.483.940.862.802.	9,98
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	53.213.000.00	8.632.756.682.00	12.546.951.693.11	12.566.353.135.00	12.564.299.372.00	4.042,13
Pendapatan Diterima Dimuka	58.496.666.00	64.316.673.00	45.970.000.00	123.772.450.00	109.048.715.00	34,69
Utang Belanja	42.741.597.028.00	54.755.307.753.19	34.627.817.188.19	38.613.667.101.19	61.818.534.886.64	15,74
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.423.985.987.00	6.220.723.487.00	47.331.707.00	47.331.707.00	544.867.516.00	237,19
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	49.277.292.681.00	69.673.104.595.19	47.268.070.588.30	51.351.124.393.19	75.036.750.489.64	16,00
JUMLAH KEWAJIBAN	49.277.292.681.00	69.673.104.595.19	47.268.070.588.30	51.351.124.393.19	75.036.750.489.64	16,00
EKUITAS						
EKUITAS	2.376.463.513.790.97	2.550.990.726.059.89	2.727.363.653.574.71	3.490.977.827.331.80	3.408.904.112.313.15	9,98
JUMLAH EKUITAS	2.376.463.513.790.97	2.550.990.726.059.89	2.727.363.653.574.71	3.490.977.827.331.80	3.408.904.112.313.15	9,98
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.425.740.806.471.97	2.620.663.830.655.08	2.774.631.724.163.01	3.542.328.951.724.99	3.483.940.862.802.79	9,98



Untuk mendapatkan Rasio lancar yaitu dengan membagi jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar sehingga diperoleh nilai pada tahun 2020 sebesar 65,91% tahun 2021 sebesar 5,83%, tahun 2022 sebesar 19,55% tahun 2023 sebesar 64,63% serta tahun 2024 sebesar 26,29%, Nilai ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya melalui pencairan aset lancarnya, namun di sisi lain selama periode tersebut terjadi kecenderungan penurunan nilai rasio lancar, memberi pertanda yang kurang baik yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

b. Rasio Cepat (Quick Ratio)

Hasil perhitungan, nilai rasio cepat (rasio antara aset lancar dikurangi persediaan, terhadap hutang lancar) pada Tahun 2020 sebesar 383,60% tahun 2021 sebesar 493,99% tahun 2022 sebesar 676,63% dan tahun 2023 sebesar 500,63%. Hasil perhitungan tersebut memperlihatkan adanya kemampuan aset lancar dalam menyelesaikan hutang secara cepat namun terjadi kecenderungan penurunan nilai rasio cepat. Hal ini berarti pemerintah Kabupaten Banggai memiliki aset yang cukup untuk membayar utang namun perlu diwaspadai adanya kecenderungan penurunan kemampuan aset di dalam menutup utang.

c. Rasio Utang terhadap Total Aset (Total Debt to Total Assets Ratio)

Hasil perhitungan rasio total utang terhadap total aset menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 sebesar 2,03% dan Tahun 2021 sebesar 2,66%, dan Tahun 2022 sebesar 1,70%, dan Tahun 2023 sebesar Rp1,45%, serta Tahun 2024 sebesar 2,15%. Rasio total hutang terhadap total aset selama periode tersebut menunjukkan nilai yang relatif kecil sehingga Pemerintah Kabupaten Banggai mempunyai kemampuan untuk melunasi utang jika melakukan pinjaman kepada kreditur.



d. Rasio Utang Terhadap Ekuitas (Total Debt to Equity Ratio)

Hasil perhitungan rasio hutang terhadap ekuitas selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa Tahun 2020 sebesar 2,07%, Tahun 2021 sebesar 2,73%, Tahun 2022 sebesar 1,73%, dan Tahun 2023 sebesar 1,47%, serta Tahun 2024 sebesar 2,20%. Rasio total hutang terhadap ekuitas selama periode tersebut juga menunjukkan nilai yang relatif kecil sehingga Pemerintah Kabupaten Banggai mempunyai kemampuan untuk melunasi utang jika melakukan pinjaman kepada kreditur.

Hasil analisis terhadap current ratio, quick ratio, dan Total Debt to equity Ratio atas keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai menunjukkan kekuatan kemampuan keuangan yang baik. Demikian halnya dengan rasio total hutang terhadap aset yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan kapasitas keuangannya relatif cukup besar bila terdapat rencana peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang. Hal ini merupakan opsi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai dalam rangka lebih mendorong pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada publik

2.2.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banggai selama periode 2020-2024 di laksanakan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan selanjutnya sebagaimana telah diubah dengan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Berdasarkan berbagai peraturan di maksud, bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian/siklus APBD yang terintegrasi di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Secara umum kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banggai periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020-2024, diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan guna menjaga ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah anggaran yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya dan diupayakan adanya sumber-sumber pendapatan baru. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut adalah:

- a) Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- b) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui kegiatan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi;
- c) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota, POLRI;
- d) Meningkatkan kinerja Bank Sulteng dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;





- e) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Retribusi Daerah;
- f) Meningkatkan peran dan fungsi UPT Badan Pendapatan Daerah dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- g) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- h) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah; Meningkatkan kinerja pelayanan Masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima, dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak lainnya yang menjadi hak Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
- c. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

b. Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2020-2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional,



efisien dan optimal atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terutama merespon prioritas Pembangunan Nasional yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja. Kebijakan anggaran untuk belanja daerah diarahkan:

- a) Mengalokasikan belanja wajib/mengikat, meliputi belanja pegawai dan belanja bagi hasil;
- b) Belanja bantuan sosial dan belanja hibah, yang dapat menunjang ketercapaian target Indeks Pembangunan Manusia dan penurunan angka kemiskinan.
- c) Program Prioritas sesuai RPJMD Tahun 2020-2024;
- d) Program yang bersifat lanjutan dan sudah menjadi komitmen sebelumnya;
- e) Program baru sebagai landasan kegiatan baru;
- f) Penambahan alokasi belanja pelayanan dasar dan administrasi umum kantor (fixed cost);
- g) Mengalokasikan pembiayaan yang bersifat penting dan mendesak, seperti penanggulangan bencana;
- h) Penambahan alokasi anggaran untuk penunjang Program Nasional.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

Dalam menentukan proyeksi keuangan daerah, selain berdasarkan hasil analisis atas gambaran keuangan pada periode sebelumnya perlu mempertimbangkan beberapa asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Banggai.

Selama kurun waktu 2020-2024, proporsi pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dengan rata-rata 84,79%, diikuti pendapatan asli daerah sebesar 14,40% dan lain-lain PAD yang



sah sebesar 0,81%. Hal ini menunjukkan kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Banggai masih rendah. Walaupun terdapat peningkatan PAD yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan 71,99%, namun pendapatan daerah Kabupaten Banggai 2025-2029 sebagian besar diperkirakan masih bersumber pada pendapatan transfer daerah. Namun demikian pendapatan asli daerah diharapkan akan terus mengalami peningkatan yang signifikan pada masa yang akan datang. Sementara dari sisi belanja daerah, diproyeksikan bahwa belanja pemerintah Kabupaten Banggai masih didominasi belanja operasi. Namun demikian belanja daerah akan difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pengelolaan pembiayaan dan perumusan proyeksi pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan, asumsi dan metode proyeksi yang digunakan adalah linear dengan asumsi dan metode yang digunakan pada pendapatan dan belanja daerah

Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banggai untuk tahun 2026-2030 disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan asumsi yang relevan, memastikan bahwa rencana tersebut realistis dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu dalam menentukan proyeksi pendapatan dan belanja daerah dilakukan koreksi terhadap data pertumbuhan didasarkan pada analisis data historis dan kondisi ekonomi terkini. Koreksi ini dilakukan untuk menyesuaikan proyeksi dengan realitas ekonomi yang ada, serta menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proyeksi yang dihasilkan lebih akurat dan dapat diandalkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.



Tabel 2.41
Proyeksi APBD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030

URAIAN	PROYEKSI					Rata-Rata Pertumbuhan
	2026	2027	2028	2029	2030	
PENDAPATAN	3.216.442.500.777,80	3.553.443.901.998,78	4.249.264.733.012,26	4.689.199.995.360,88	5.116.478.783.944,37	10,85
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	377.218.146.583,00	430.297.112.384,50	813.803.264.436,55	910.192.379.927,61	959.570.406.967,77	29,71
Pendapatan Pajak Daerah	193.118.188.864,00	212.180.007.750,40	233.398.008.525,44	256.737.809.377,98	282.411.590.315,78	15,94
Pendapatan Retribusi Daerah	40.629.955.310,00	44.371.526.412,60	48.808.679.053,86	53.689.546.959,25	59.058.501.655,17	16,95
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	5.714.244.284,00	22.214.244.284,00	364.912.109.526,00	416.412.109.526,00	416.412.109.526,00	369,11
Lain-lain PAD Yang Sah	137.755.758.125,00	151.531.333.937,50	166.684.467.331,25	183.352.914.064,38	201.688.205.470,81	10,44
PENDAPATAN TRANSFER-LRA	2.811.894.983.788,00	3.093.084.482.166,80	3.402.392.930.383,48	3.742.632.223.421,83	4.116.895.445.764,01	8,44
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.735.101.874.000,00	3.008.612.061.400,00	3.309.473.267.540,00	3.640.420.594.294,00	4.004.462.653.723,40	8,37
Transfer antar Daerah	76.793.109.788,00	84.472.420.766,80	92.919.662.843,48	102.211.629.127,83	112.432.792.040,61	10,99
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA	27.329.370.406,80	30.062.307.447,48	33.068.538.192,23	36.375.392.011,45	40.012.931.212,60	10,00
Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	27.329.370.406,80	30.062.307.447,48	33.068.538.192,23	36.375.392.011,45	40.012.931.212,60	10,00
BELANJA DAERAH	3.345.669.295.654,46	3.694.073.376.363,11	4.387.729.052.485,16	4.828.897.889.797,54	5.261.373.190.576,68	10,19
BELANJA OPERASI	2.282.148.512.015,82	2.341.681.067.276,43	2.677.992.106.248,16	2.950.293.953.587,19	3.232.830.985.660,13	7,85
Belanja Pegawai	1.122.468.605.946,00	1.066.033.170.599,63	1.274.779.419.903,68	1.406.759.998.608,26	1.534.943.635.183,31	6,80
Belanja Barang dan Jasa	1.102.186.989.759,21	1.212.405.688.735,13	1.333.646.257.608,64	1.467.010.883.369,51	1.613.711.971.706,46	9,00



URAIAN	PROYEKSI					Rata-Rata Pertumbuhan
	2026	2027	2028	2029	2030	
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00	
Belanja Subsidi	404.000.000,00	444.400.000,00	488.840.000,00	537.724.000,00	591.496.400,00	8,00
Belanja Hibah	56.313.916.310,61	61.945.307.941,67	68.139.838.735,84	74.953.822.609,42	82.449.204.870,36	9,00
Belanja Bantuan Sosial	775.000.000,00	852.500.000,00	937.750.000,00	1.031.525.000,00	1.134.677.500,00	8,00
BELANJA MODAL	643.234.099.548,64	890.076.956.587,67	1.102.366.492.772,75	1.212.603.142.050,03	1.333.863.456.255,03	17,54
Belanja Modal-Tanah	14.556.938.926,35	20.379.714.496,89	26.493.628.845,96	29.142.991.730,55	32.057.290.903,61	10,62
Belanja Modal-Peralatan dan Mesin	90.083.097.456,45	117.108.026.693,39	152.240.434.701,40	167.464.478.171,54	184.210.925.988,70	17,00
Belanja Modal-Gedung dan Bangunan	219.353.942.129,07	305.852.176.965,92	377.607.830.055,69	415.368.613.061,26	456.905.474.367,39	16,58
Belanja Modal-Jalan, Irigasi, dan Jaringan	318.244.465.936,77	445.542.252.311,48	544.471.377.213,70	598.918.514.935,07	658.810.366.428,58	18,44
Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya	599.655.100,00	719.586.120,00	935.461.956,00	1.029.008.151,60	1.131.908.966,76	6,00
Belanja Modal Aset Lainnya	396.000.000,00	475.200.000,00	617.760.000,00	679.536.000,00	747.489.600,00	16,00
BELANJA TAK TERDUGA	10.284.301.600,00	11,312,731,760,00	21,067,046,503,55	21,067,046,503,55	23.067.046.503,55	21,14
BELANJA TRANSFER	410,002,382,490,00	451,002,620,739,00	586.303.406.960,70	644.933.747.656,77	671.611.702.157,97	10,83
Belanja Bagi Hasil	16,603,389,990,00	18,263,728,989,00	23.742.847.685,70	26.117.132.454,27	28.728.845.699,70	12,00
Belanja Bantuan Keuangan	393,398,992,500,00	432,738,891,750,00	562.560.559.275,00	618.816.615.202,50	642.882.856.458,27	0,78
SURPLUS/DEFISIT	(129.226.794.876,66)	(140.629.474.364,33)	(138.464.319.472,91)	(139.697.894.436,66)	(144.894.406.632,31)	(3,66)
PEMBIAYAAN DAERAH	129.226.794.876,66	140.629.474.364,33	138.464.319.472,91	139.697.894.436,66	144.894.406.632,31	(3,66)
Penerimaan Pembiayaan	133.026.794.876,66	146.329.474.364,33	148.464.319.472,91	154.697.894.436,66	164.894.406.632,31	(4,31)
Pengeluaran Pembiayaan	3,800,000,000,00	5,700,000,000,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	41,75
SISA LEBIH/ (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/ (SiKPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



a. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun 2025-2030 diproyeksikan mengalami kenaikan dari **Rp3.216.442.500.777,80** pada tahun 2026 menjadi **Rp5.261.373.190.576,68** pada tahun 2030. Dari tabel di atas terlihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Banggai sebagian besar bersumber dari pendapatan transfer. Pendapatan diproyeksikan naik namun dilakukan koreksi terhadap proyeksi rata-rata pertumbuhan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan potensi masing-masing komponennya, yaitu:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan melalui intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta penguatan basis data potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Proyeksi PAD dilakukan terukur secara rasional dapat dicapai berdasarkan kebijakan makro ekonomi, potensi pajak dan retribusi daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Adanya perubahan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebabkan beberapa perubahan seperti penurunan tarif pajak dan retribusi, penghapusan jenis tarif pajak dan retribusi serta pengurangan NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak).

b. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Koreksi pertumbuhan dilakukan karena diproyeksikan bahwa akan ada penerimaan PI 10% di mulai Tahun 2027 oleh BUMD Banggai Energi Utama (BEU) yang besarnya berdasarkan hasil Studi Kelayakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah



Kabupaten Banggai kepada PT. Banggai Energi Utama (PERSERODA).

c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Trend kenaikan di dasarkan pada pertumbuhan rata-rata pendapatan yang di catat pada akun Lain-Lain PAD yang sah, utamanya pada pendapatan BLUD RSUD Luwuk, yang trendnya meningkat dari tahun ke tahun.

2) Pendapatan Transfer

- a. Proyeksi pertumbuhan pendapatan transfer yang bersumber dari DBH, DAU dan bagi hasil akan dilakukan koreksi dalam RKPD pada setiap Tahun Anggaran jika kebijakan efisiensi anggaran yang masih akan berlangsung hingga lima tahun mendatang.
- b. Kecermatan dan kehati-hatian terhadap asumsi dan proyeksi dana transfer pemerintah pusat menjadi penting, mengingat share pendapatan transfer pusat, rata-rata tahun 2020-2024 mencapai% terhadap total pendapatan daerah, yang diartikan bahwa Kabupaten Banggai masih daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat. Secara umum sumber utama pendapatan transfer pemerintah pusat, bersumber dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik dan DBH baik reguler maupun DBH Kurang/Lebih Bayar.
- c. Pencermatan terhadap dana transfer, bersumber dari kebijakan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan asta cita dan Quick Win RPJMN 2025-2030, baik terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) serta DAK (Fisik dan Non Fisik). Pendapatan DAK telah dimasukkan dalam model, dengan asumsi baseline DAK Tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 tidak terdapat pertumbuhan. Sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat, yang berasal dari Dana



Insentif Daerah (DID) tidak dapat diprediksi, karena ini tergantung dari capaian prestasi daerah.

- d. Proyeksi pendapatan transfer antar daerah, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data realisasi tahun 2024. Pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari bagi hasil dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, sangat dipengaruhi dari asumsi dan potensi pendapatan DBH pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota tahun 2026-2030.

Tabel 2.42
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2026-2030

URAIAN	PROYEKSI					Rata - Rata Pertumbuhan
	2026	2027	2028	2029	2030	
PENDAPATAN	3.216.442.500.777,80	3.553.443.901.998,78	4.249.264.733.012,26	4.689.199.995.360,88	5.116.478.783.944,37	10,85
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	977.218.146.583,00	430.297.112.384,50	813.803.264.436,55	910.192.379.927,61	959.570.406.967,77	29,71
Pendapatan Pajak Daerah	193.118.188.864,00	212.180.007.750,40	233.398.008.525,44	256.737.809.377,98	282.411.590.315,78	15,94
Pendapatan Retribusi Daerah	40.629.955.310,00	44.371.526.412,60	48.808.679.053,86	53.689.546.959,25	59.058.501.655,17	16,95
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	5.714.244.284,00	22.214.244.284,00	364.912.109.526,00	416.412.109.526,00	416.412.109.526,00	369,11
Lain-lain PAD Yang Sah	137.755.758.125,00	151.531.333.937,50	166.684.467.331,25	183.352.914.064,38	201.688.205.470,81	10,44
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	2.811.894.983.788,00	3.093.084.482.166,80	3.402.992.930.383,48	3.742.632.223.421,83	4.116.895.445.764,01	8,44
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.735.101.874.000,00	3.008.612.061.400,00	3.309.473.267.540,00	3.640.420.594.294,00	4.004.462.653.723,40	8,37
Transfer antar Daerah	76.793.109.788,00	84.472.420.766,80	92.919.662.843,48	102.211.629.127,83	112.432.792.040,61	10,99
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	27.329.370.406,80	30.062.307.447,48	33.068.538.192,23	36.375.392.011,45	40.012.931.212,60	10,00
Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	27.329.370.406,80	30.062.307.447,48	33.068.538.192,23	36.375.392.011,45	40.012.931.212,60	10,00

Melihat bahwa kemandirian fiskal kabupaten Banggai masih rendah, kedepan perlu upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.



Implementasi dari kebijakan tersebut dijabarkan dalam beberapa arah kebijaka sebagai berikut:

- 1) Upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi serta adanya berbagai program investasi.
- 2) Optimalisasi pungutan PAD melalui perbaikan tatakelola dan administrasi PAD. Sumber-sumber PAD terus digali untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah, melalui :
 - a. Intensifikasi melalui penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah.
 - b. Peningkatan layanan pembayaran pajak dengan kemudahan berbasis teknologi informasi serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan.
 - c. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
 - d. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak.
 - e. Pengembangan dan peningkatan realisasi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan perijinan dan investasi melalui PD yang menangani pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
 - f. Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai, sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah.
 - g. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah.





3) Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Meningkatkan kualitas digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan kepastian dan optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi objek baru pajak daerah
- c. Melakukan intensifikasi retribusi daerah.
- d. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak berbasis GIS (Geographic Information System), sehingga potensi wajib pajak terdata dengan baik dengan menggunakan database dan data pertumbuhan dapat diprediksi dengan tepat.
- e. Memberlakukan tambahan pungutan pajak atau opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Langkah ini diambil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan tujuan meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
- f. Memberlakukan kebijakan pengelolaan Opsen Pajak sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak dengan menganggarkan 1,5% dari rencana penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap tahun untuk melaksanakan kegiatan antara lain : melakukan verifikasi dan validasi data tunggakan pajak kendaraan bermotor, penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan daerah di bidang perpajakan, penambahan titik pelayanan mobile serta kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak Bersama tim terpadu.





- 4) Pengembangan BUMD dan Unit Usaha Daerah
 - a. Merevitalisasi dan ekspansi usaha BUMD, seperti bidang air bersih, transportasi, perdagangan hasil pertanian sehingga BUMD memberikan kontribusi berupa deviden kepada Pemerintah Daerah.
 - b. Melakukan Kemitraan BUMD dengan sektor swasta (public-private partnership).
- 5) Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
 - a. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Pengangguran dan Pangan).
 - b. Melakukan inventarisasi dan sertifikasi aset daerah secara menyeluruh.
 - c. Meningkatkan pemanfaatan aset idle untuk investasi produktif (sewa, kerja sama operasional, BOT/Build Operate Transfer) kepada mitra strategis sehingga meningkatkan PAD.
- 6) Optimalisasi Manajemen kas Pemerintah Daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah
- 7) *Creative Financing*
 - a. Menjalin kerja sama pendanaan dengan swasta melalui CSR dan/atau filantropi.
 - b. Melalui Skema KPBU memungkinkan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur publik misalnya: Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAM), Transportasi dan Jalan serta fasilitas Kesehatan dan Pendidikan.

b. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu,



dan penganggaran berbasis kinerja. Belanja daerah dianggarkan dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai dengan target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan. Belanja daerah diprioritaskan untuk untuk pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian SPM.

Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2026-2030 di proyeksikan mengalami kenaikan dari **Rp3.345.669.295.654,46** pada tahun 2025 menjadi **Rp5.261.373.190.576,68,-** dengan pertumbuhan rata-rata 10,19% Pada tahun 2030, sebagaimana tabel 2.43 berikut :

Tabel 2.43
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2026-2030

URAIAN	PROYEKSI					Rata - Rata Pertumbuhan
	2026	2027	2028	2029	2030	
BELANJA DAERAH	3.345.669.295.654,46	3.694.073.376.363,11	4.387.729.052.485,16	4.828.897.889.797,54	5.261.373.190.576,68	10,19
BELANJA OPERASI	2.282.148.512.015,82	2.341.681.067.276,43	2.677.992.106.248,16	2.950.293.953.587,19	3.232.830.985.660,13	7,85
Belanja Pegawai	1.122.468.605.946,00	1.066.033.170.599,63	1.274.779.419.903,68	1.406.759.998.608,26	1.534.943.635.183,31	6,80
Belanja Barang dan Jasa	1.102.186.989.759,21	1.212.405.688.735,13	1.333.646.257.608,64	1.467.010.883.369,51	1.613.711.971.706,46	9,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00	
Belanja Subsidi	404.000.000,00	444.400.000,00	488.840.000,00	537.724.000,00	591.496.400,00	8,00
Belanja Hibah	56.313.916.310,61	61.945.307.941,67	68.139.838.735,84	74.953.822.609,42	82.449.204.870,36	9,00
Belanja Bantuan Sosial	775.000.000,00	852.500.000,00	937.750.000,00	1.031.525.000,00	1.134.677.500,00	8,00
BELANJA MODAL	643.234.099.548,64	890.076.956.587,67	1.102.366.492.772,75	1.212.603.142.050,03	1.333.863.456.255,03	17,54
Belanja Modal - Tanah	14.556.938.926,35	20.379.714.496,89	26.493.628.845,96	29.142.991.730,55	32.057.290.903,61	10,62
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	90.083.097.456,45	117.108.026.693,39	152.240.434.701,40	167.464.478.171,54	184.210.925.988,70	17,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	219.353.942.129,07	305.852.176.965,92	377.607.830.055,69	415.368.613.061,26	456.905.474.367,39	16,58
Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	318.244.465.936,77	445.542.252.311,48	544.471.377.213,70	598.918.514.935,07	658.810.366.428,58	18,44
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	599.655.100,00	719.586.120,00	935.461.956,00	1.029.008.151,60	1.131.908.966,76	6,00
Belanja Modal Aset Lainnya	396.000.000,00	475.200.000,00	617.760.000,00	679.536.000,00	747.489.600,00	16,00
BELANJA TAK TERDUGA	10.284.301.600,00	11.312.731.760,00	21.067.046.503,55	21.067.046.503,55	23.067.046.503,55	21,14
BELANJA TRANSFER	410.002.382.490,00	451.002.620.739,00	586.303.406.960,70	644.933.747.656,77	671.611.702.157,97	10,83
Belanja Bagi Hasil	16.603.389.990,00	18.263.728.989,00	23.742.847.685,70	26.117.132.454,27	28.728.845.699,70	12,00
Belanja Bantuan Keuangan	393.398.992.500,00	432.738.891.750,00	562.560.559.275,00	618.816.615.202,50	642.882.856.458,27	0,78
SURPLUS/DEFISIT	(129.226.794.876,66)	(140.629.474.364,33)	(138.464.319.472,91)	(139.697.894.436,66)	(144.894.406.632,31)	(3,66)



Sebagai upaya optimalisasi dan memfokuskan penggunaan belanja daerah maka direkomendasikan beberapa arah kebijakan penggunaan komponen belanja sebagai berikut.

1) Belanja Operasional

a. Belanja Pegawai

- Menjaga proporsionalitas belanja pegawai agar tidak membebani struktur APBD. Mulai tahun 2027 sudah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yaitu maksimal adalah 30% dari total belanja APBD.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai memfokuskan pada peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem reward and punishment berbasis kinerja.
- Melakukan optimalisasi penggunaan belanja pegawai untuk mendukung reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.

b. Belanja Barang dan Jasa

- Meningkatkan efisiensi belanja barang dan jasa untuk mendukung pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
- Menyusun standar prioritas pada pengadaan barang/jasa berbasis kebutuhan riil dengan prinsip value for money.
- Mengutamakan pengadaan barang/jasa dari UMKM lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- Menggunakan barang/jasa yang memiliki masa pakai lebih panjang dan mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang.

c. Belanja Hibah

- Memberikan hibah secara selektif untuk mendukung program strategis daerah, termasuk hibah kepada





organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan keagamaan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

- Memastikan akuntabilitas, transparansi, dan hasil manfaat dari setiap hibah yang diberikan.

d. Belanja Bantuan Sosial

- Difokuskan pada kelompok rentan, miskin, dan terdampak bencana sosial.
- Penyaluran bantuan sosial berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTKS) agar tepat sasaran.
- Difokuskan pada program bansos produktif yang mengarah pada pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

2) Belanja Modal

- a. Belanja modal mendukung pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari total belanja daerah, paling lambat Tahun 2027.
- b. Prioritas pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, puskesmas, rumah layak huni dan sarana air bersih.
- c. Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur wilayah.
- d. Menggunakan pendekatan multi-years project untuk pembangunan infrastruktur dengan skala besar agar lebih terencana dan berkesinambungan, selain itu tidak terlalu membebani APBD pada setiap tahun nya.

3) Belanja Tak Terduga

- a. Belanja ini difokuskan untuk kebutuhan yang sifatnya darurat, seperti penanganan bencana alam, kedarutan kesehatan masyarakat, dan kondisi force majeure lainnya.





- b. Penggunaan belanja tak terduga tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dengan pelaporan khusus pasca penggunaan.

4) Belanja Transfer

- a. Melakukan optimalisasi penyaluran dana transfer ke desa untuk mendukung program pembangunan desa berbasis kebutuhan masyarakat (bottom-up approach).
- b. Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk prioritas nasional di desa seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

c. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan analisa realisasi SiLPA 5 (lima) tahun sebelumnya.

2.2.3 Analisis Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan (Permendagri 86 Tahun 2017). Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

**Tabel 2.44****Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2026-2030**

No.	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	3.216.442.500.777,80	3.553.443.901.998,78	4.249.264.733.012,26	4.689.199.995.360,88	5.116.478.783.944,37
2.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Penerimaan	3.216.442.500.777,80	3.553.443.901.998,78	4.249.264.733.012,26	4.689.199.995.360,88	5.116.478.783.944,37
	Di Kurangi:					
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat					
	- Belanja Pegawai	1.122.468.605.946,00	1.066.033.170.599,63	1.274.779.419.903,68	1.406.759.998.608,26	1.534.943.635.183,31
	- Belanja Bagi hasil	16.603.389.990,00	18.263.728.989,00	23.742.847.685,70	26.117.132.454,27	28.728.845.699,70
	- Belanja Bantuan Keuangan	393.398.992.500,00	432.738.891.750,00	562.560.559.275,00	618.816.615.202,50	642.882.856.458,27
	KAPASITAS RIIL	1,683,971,512,341.80	2,036,408,110,660.15	2,388,181,906,147.88	2,637,506,249,095.85	2,909,923,446,603.09

Berdasarkan Tabel di atas, Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banggai 2026-2030 di gunakan untuk membiayai Prioritas sebagai berikut :

- 1) Prioritas I : Untuk membiayai belanja program pembangunan daerah yang menjadi unggulan kepala daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2026-2029 dan prioritas/kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang harus dilaksanakan oleh daerah. Program prioritas I yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti antara lain untuk prioritas belanja fungsi pendidikan minimum 20%, bidang Kesehatan, belanja fungsi pengawasan, Belanja



Pegawai maksimal 30% dan Belanja Infrastruktur publik minimal 40% dari total belanja paling lambat tahun 2027.

- 2) Prioritas II : berkaitan dengan program prioritas di tingkat PD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi PD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
- 3) Prioritas III : Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya, setelah belanja prioritas I dan II terpenuhi.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Dengan demikian, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Sedangkan Permasalahan pembangunan daerah pada hakikatnya menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan dengan cita-cita pembangunan.





2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat di antisipasi/diminimalisir dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Untuk itu di perlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah sangat berkaitan dengan tahapan atau rumusan dalam Bab-Bab selanjutnya dalam penyusunan dokumen RPJMD ini, yaitu pada tahapan perumusan Isu strategis Daerah, Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan dan sampai pada perumusan Program Perangkat Daerah yang selanjutnya akan di jabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah.

Guna memudahkan dalam perumusannya di tetapkan Kerangka Logis Permasalahan Pembangunan Daerah yang di mulai dari identifikasi masalah pokok/utama, yang akan berkaitan dengan rumusan Misi Jangka Panjang Daerah, kemudian identifikasi penyebab dari masalah pokok/utama menjadi masalah daerah, yang akan berkaitan dengan rumusan Arah Pembangunan dan sasaran Pokok Jangka Panjang Daerah, dan Identifikasi akar masalah, sebagai penyebab dari masalah yang lebih rinci yang akan berkaitan dengan rumusan arah kebijakan atau kebijakan umum jangka Panjang daerah.



Gambar 2.72

Kerangka Logis Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah



Berdasarkan Kerangka Logis sebagaimana di atas, berikut di sajikan hasil rumusan Permasalahan pembangunan daerah yang terdiri atas Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah serta Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

2.3.1.1 Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja



pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, sebagaimana di uraikan pada Bab II, di rumuskan Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Banggai yang terdiri atas 6 (enam) pokok permasalahan atau masalah utama sebagai berikut:

1. Kualitas, keunggulan dan daya saing Sumber daya Manusia Kabupaten Banggai masih perlu di tingkatkan.
2. Perekonomian Daerah belum sepenuhnya tangguh dan inklusif.
3. Sarana Prasarana Dasar, konektivitas dan TIK belum memadai, layak dan merata.
4. Potensi Bencana Daerah yang cukup tinggi, serta ancaman degradasi lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai Tata Ruang
5. Masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah
6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas belum sepenuhnya terwujud.

Keenam masalah pokok di atas kemudian di jabarkan menjadi masalah dan akar masalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.45 berikut :

Tabel 2.45
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Masih perlu di tingkatkan	1. Akses dan kualitas layanan pendidikan guna Mewujudkan Banggai Cerdas belum optimal dan masih perlu di tingkatkan.	1. Kendala geografis pada beberapa wilayah Kecamatan dan Desa, berkontribusi terhadap kelanjutan Pendidikan siswa utamanya ke jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat. 2. Sarana/Prasarana dan Fasilitas Pendidikan yang relatif belum memadai, baik di jenjang PAUD, SD



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			sederajat dan SMP Sederajat serta Pendidikan Non Formal. 3. Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar belum optimal 4. Pengembangan kurikulum serta Keterbatasan akses internet di beberapa Kecamatan/Desa sehingga digitalisasi Pendidikan tidak optimal untuk mendukung proses belajar mengajar. 5. Sebaran, Kualitas dan Kuantitas Tenaga pendidik dan kependidikan yang kurang dan tidak merata. 6. Peran serta masyarakat dalam Pendidikan masih perlu di tingkatkan. 7. Cakupan layanan perpustakaan dan Gerakan literasi masyarakat masih rendah.
		2. Kualitas Layanan Kesehatan menuju Banggai Sehat belum optimal dan masih perlu di tingkatkan.	1. Kendala geografis pada beberapa wilayah Kecamatan dan Desa, menyebabkan sulitnya akses ke fasilitas kesehatan. 2. Sarana dan prasarana di Fasilitas Kesehatan dan Pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Luwuk belum memadai untuk mendukung Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). 3. Ketersediaan Sumber daya manusia Kesehatan masih terbatas dan belum merata hingga kewilayah terpencil.



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			4. Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan relatif belum memadai dan mencukupi. 5. Kesadaran akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih rendah. 6. Pola Asuh, Pola Makan dan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak belum memadai sehingga menyebabkan tingginya prevalensi stunting.
		3. Kurangnya Tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta kurangnya wirausaha baru	1. Tingkat Pengangguran Terbuka masih cukup tinggi. 2. Kurangnya Pelatihan kerja dan rendahnya produktivitas tenaga kerja, akibat tidak di dukung oleh tersedianya sarana pelatihan kerja yang memadai. 3. Kurangnya Diklat Vokasi untuk penyiapan tenaga kerja dan calon wirausaha baru. 4. Lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi pencari kerja, utamanya di industri gas dan ikutannya. 5. Pengawasan dan Perlindungan tenaga melalui Hubungan Industrial belum optimal 6. Tumbuhnya usaha rintisan (Start up Company) kurang di fasilitasi.
		4. Penanggulangan kemiskinan daerah belum di laksanakan secara terpadu dan terintegrasi	1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tidak Update dan Mutakhir, sehingga program-program kesejahteraan sosial tidak tepat sasaran.



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			2. Masih adanya Egoisme Sektoral atau mentalitas SILO pada Perangkat Daerah, utamanya untuk penanggulangan kemiskinan. 3. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah kemiskinan dan kerawanan sosial masih kurang. 4. Program penanggulangan kemiskinan bersifat parsial dan tidak menyentuh langsung substansi masalah.
		5. Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan Keluarga Berencana guna mewujudkan Keluarga Sejahtera masih perlu di tingkatkan.	1. Kesadaran akan pentingnya Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi masih rendah, utamanya masyarakat di perdesaan. 2. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan gender. 3. Partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah. 4. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 5. Angka perkawinan usia muda/remaja masih cukup tinggi.
		6. Pemajuan dan Pelestarian Budaya Banggai, Balantak, Saluan dan Andio (Babasalan) belum di lakukan secara optimal	1. Peran lembaga pendidikan dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal belum optimal. 2. Penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari masih rendah.



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			3. Rendahnya apresiasi masyarakat dalam mengangkat dan menjaga nilai-nilai kebudayaan daerah. 4. Terbatasnya akses Informasi tentang kebudayaan daerah 5. Acara/festival budaya dan kesenian daerah masih relatif kurang. 6. Museum belum dioptimalkan.
		7. Kehidupan beragama yang harmonis, toleran dan saling menghargai antar pemeluk agama masih perlu ditingkatkan	1. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Wawasan Kebangsaan masih perlu di tingkatkan. 2. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideology dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kepercayaan.
		8. Kualitas Pemuda relatif masih rendah	1. Masih tingginya perilaku beresiko pada pemuda seperti bahaya kekerasan, penyalahgunaan NAPZA, Miras dan HIV/AIDS. 2. Ruang kreasi positif bagi pemuda dan fasilitasi wirausaha muda kreatif masih kurang 3. Peran Organisasi kepemudaan, Karang Taruna, Pramuka dan organisasi Kemahasiswaan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik relatif masih kurang dan perlu di tingkatkan.



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		9. Prestasi Olah Raga Kabupaten Banggai belum optimal	1. Pembinaan organisasi cabang olah raga prestasi oleh Pemda dan KONI masih kurang. 2. Sarana dan Prasarana olah raga prestasi maupun olah raga tradisional masih terbatas, kurang memadai dan tidak merata. 3. Partisipasi masyarakat dalam pembinaan dan kegiatan olah raga masih sangat kurang. 4. Even-even olahraga prestasi maupun tradisional masih sangat kurang.
2.	Perekonomian Daerah belum sepenuhnya tangguh dan inklusif.	1. Kualitas, Koperasi dan Usaha Mikro masih rendah di barengi pertumbuhan wirausaha baru yang belum optimal.	1. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro belum melakukan modernisasi dan mengakomodasi penerapan Inovasi teknologi dan informatika, utamanya untuk distribusi dan pemasaran. 2. Pendekatan kelompok, komunitas dan kluster dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro belum sepenuhnya di terapkan. 3. Kemitraan dalam pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro masih kurang, utamanya bantuan modal usaha dan Inovasi Produk. 4. Iklim usaha UMKM belum sepenuhnya mendukung. 5. Pengetahuan dan literasi Digital para pelaku UMKM masih terbatas.
		2. Sektor Industri Kecil Menengah	1. Jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		dan perdagangan masih perlu di tingkatkan	masih kurang, di sertai kontribusi terhadap PAD yang masih sangat kurang. 2. Nilai Eksport daerah masih kurang 3. Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah belum optimal. 4. Akses Industri Kecil Menengah terhadap modal dan pemasaran terbatas. 5. Belum siapnya IKM di era Digitalisasi ekonomi saat ini.
		3. Produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura perlu lebih di tingkatkan untuk mewujudkan Banggai swasembada pangan	1. Implementasi lahan pertanian berkelanjutan perlu di optimalkan. 2. Belum optimalnya dukungan sarana produksi pertanian, karena belum dapat memenuhi kebutuhan lahan pertanian seluas ± 27.778,53 Ha. 3. Penyediaan benih/bibit belum memenuhi prinsip 5 T yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga. 4. Kurangnya akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana pertanian. 5. Masih kurangnya pemanfaatan dan penerapan teknologi pertanian. 6. Kapasitas SDM Pertanian masih rendah dan peran



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kelembagaan Pertanian belum optimal.
		4. Kualitas Jaringan Irigasi sesuai kewenangan Kabupaten masih perlu di tingkatkan	1. Aksesibilitas, keberlanjutan, keamanan dan ketersediaan potensi Sumber Daya Air terbatas. 2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi partisipatif.
		5. Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan masih perlu di tingkatkan	1. Industri pengolahan hasil perkebunan masih kurang. 2. Penerapan teknologi pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan belum di terapkan secara optimal. 3. Konflik lahan industri perkebunan besar masih sering terjadi. 4. Kurangnya akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana perkebunan.
		6. Populasi dan produksi hasil peternakan masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan Banggai swasembada daging.	1. Peternakan yang umumnya masih tradisional. 2. Jaminan ketersediaan dan kestabilan harga pakan ternak bagi petani ternak belum ada. 3. Usaha atau unit pembibitan ternak di Kabupaten Banggai masih perlu di optimalkan. 4. Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan belum optimal, di sebabkan oleh wilayah kerja yang luas tidak sebanding dengan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			tenaga keswan serta biaya operasional pelayanan terbatas.
		7. Belum optimalnya produksi perikanan dan hasil olahan perikanan	1. Penggunaan teknologi oleh nelayan perikanan tangkap maupun budidaya yang masih sangat sederhana dan tradisional. 2. Masih tingginya harga pakan ikan dan biaya operasional yang berakibat pada produktifitas yang rendah 3. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dan akses terhadap teknologi perikanan. 4. Keterbatasan infrastruktur perikanan budidaya/tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (air bersih, listrik, BBM, sistem rantai dingin, TPI, dan pelabuhan perikanan).
		8. Kesejahteraan petani, peternak dan nelayan masih rendah dan perlu ditingkatkan serta Kelembagaan petani, peternak dan nelayan yang belum berfungsi optimal.	1. Belum adanya jaminan ketersediaan pupuk sepanjang waktu dan harga yang tetap serta berubsidi bagi kelompok tani. 2. Belum terlaksananya pembentukan institusi usaha agribisnis bagi kelompok tani dalam peningkatan nilai tambah produk pertanian. 3. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan pengetahuan kelompok petani/peternak/ nelayan dalam menjalankan usaha peningkatan kualitas produksi pertanian/perikanan.



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			4. Rendahnya akses pemasaran dan permodalan bagi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.
		9. Belum Optimalnya Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat.	1. Terdapat Desa Rawan pangan di Kabupaten Banggai. 2. Laju alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan cukup tinggi. 3. Lahan tidur dan Lahan pekarangan di perdesaan masih belum di manfaatkan secara optimal 4. Jaminan ketersediaan pangan daerah dan kestabilan harga 5. Kesadaran yang masih rendah terhadap keanekaragaman bahan makanan pokok selain beras
		9. Pemanfaatan potensi pertambangan mineral, minyak dan gas bumi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah belum optimal.	1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pertambangan perlu di bentuk/di revitalisasi. 2. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan industri minyak dan gas bumi untuk mendukung perekonomian daerah dan pengembangan SDM masih perlu di tingkatkan. 3. Kontribusi industri pertambangan terhadap PAD masih rendah. 4. Tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri pertambangan masih terbatas. 5. Pemanfaatan potensi Gas untuk jaringan Gas Rumah



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Tangga belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Banggai.
		10. Pengelolaan Pariwisata Daerah belum terintegrasi dan berkembang dengan baik	1. Belum adanya lokasi destinasi pariwisata prioritas yang akan di tangani secara terintegrasi. 2. Industri pariwisata/industri kreatif belum tumbuh dan berkembang dengan baik. 3. Promosi Pariwisata masih di lakukan secara terbatas. 4. Kelembagaan pariwisata belum berperan secara optimal
		11. Iklim Investasi dan Penanaman modal daerah masih perlu di tingkatkan	1. Sarana prasarana pendukung investasi di daerah terbatas. 2. Iklim investasi yang kurang terpromosi dengan intensif 3. Regulasi yang belum memihak kepada pelaku bisnis. 4. Sistem pelayanan perizinan investasi yang mudah dan profesional masih perlu ditingkatkan.
3.	Infrastruktur wilayah, konektivitas dan pelayanan dasar belum memadai, layak dan merata	1. Kualitas layanan Air bersih, air minum, sanitasi dan perumahan layak di perdesaan maupun perkotaan masih rendah.	1. Terdapat 11 Lokasi Kawasan kumuh di Kabupaten Banggai, dengan luas 78,81 Ha. 2. Masih terdapat Rumah Tidak layak Huni dan Rumah Tangga yang belum memiliki rumah (Backlog) di Kabupaten Banggai. 3. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum belum memadai.



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			4. Jaringan drainase perkotaan luwuk belum tertata dengan baik. 5. Pengelolaan sampah perkotaan belum berbasis masyarakat dengan pendekatan ekonomi sirkular
		2. Kualitas dan konektivitas jaringan jalan, jembatan dan sarana prasarana transportasi masih rendah dan tidak merata.	1. Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah untuk membiayai infrastruktur transportasi/ konektivitas terbatas. 2. Presentasi jaringan jalan dalam kondisi Rusak masih sangat besar. 3. Moda transportasi masih terbatas, belum memadai, terpadu dan nyaman. 4. Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan belum memadai 5. Sarana dan prasarana transportasi Pelabuhan rakyat tidak memadai. 6. Kontribusi sektor perhubungan terhadap peningkatan PAD belum optimal.
		3. Infrastruktur pelayanan publik/ perkantoran pemerintah belum memadai	1. Terdapat beberapa Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang belum memiliki kantor definif dan memadai. 2. Tertib bangunan Gedung melalui PBG perlu di tingkatkan.
		4. Pemanfatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam berbagi bidang, utamanya untuk mendukung	1. Masih terdapat Desa yang Blank Spot. 2. Jaringan komunikasi dan informatika berteknologi terkini masih belum tersedia secara merata.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		ekonomi digital/transformatasi digital dan E-Government belum optimal.	3. Belum adanya Master Plan pengembangan Teknologi dan Informatika Kabupaten Banggai. 4. Kompetensi Aparatur di bidang TIK masih terbatas 5. Literasi TIK masyarakat (<i>digital Society</i>) masih rendah.
4.	Potensi Bencana Daerah yang cukup tinggi, serta ancaman degradasi lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai Tata Ruang	1. Koordinasi dan integrasi Pemda dan Masyarakat dalam penanggulangan Bencana Daerah belum optimal. 2. Upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup serta dampak perubahan iklim belum terintegrasi	1. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan kajian Resiko Bencana Kabupaten belum di susun dan di integrasikan dalam dokumen perencanaan daerah. 2. Manajemen bencana berbasis masyarakat belum terlaksana dengan baik, terutama untuk sistem logistik pangan dan jaringan pengaman sosial untuk masyarakat terdampak bencana baik alam maupun non alam. 3. Data Bencana terpadu tidak tersedia. 4. Sistem Peringatan Dini Bencana belum tersedia. 5. Sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran belum memadai. 1. Kelembagaan dan penegakan hukum di bidang SDA dan Lingkungan Hidup masih belum konsisten. 2. Peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah. 3. Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca tidak di



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		dan terlaksana dengan baik	implementasikan dengan optimal. 4. Pengelolaan sampah perkotaan belum berbasis masyarakat dengan pendekatan ekonomi sirkular
		3. RTRW belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan daerah	1. Pelanggaran Pemanfaatan ruang cukup tinggi. 2. Data dan informasi geospasial belum tersedia. 3. Penyediaan RTH publik dari target 20% belum terpenuhi. 4. RTRW Kabupaten Banggai tahun 2012-2032 perlu di revisi dan dijabarkan kedalam rencana rincinya. 5. Terbatasnya akses informasi penataan ruang.
5.	Masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah	1. Rencana pemekaran daerah, kecamatan dan desa belum terealisasi sesuai yang di harapkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah	1. Belum ada desain besar untuk pemekaran wilayah di Kabupaten Banggai. 2. Belum ada kajian pemekaran untuk Kecamatan dan Desa di Kabupaten Banggai.
		2. Pemenuhan layananan dasar, infrastruktur, kemandirian ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat untuk mencapai Desa Maju dan Mandiri belum optimal.	1. Pembangunan perdesaan berbasis kawasan dan potensi lokal desa belum optimal yang di indikasikan dengan Kerjasama antar desa masih kurang. 2. Jumlah BUMDes yang terbentuk 265 Dari 291 Desa. BUMDes sehat/aktif 137 atau 47,7%, yang lebih banyak bergerak di bidang simpan pinjam.



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			3. Masih kurangnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam meningkatkan usaha produktif masyarakat perdesaan. 4. Masih banyak lahan produktif yang terlantar/pekarangan yang tidak di manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan ekonomi rumah tangga perdesaan.
		3. Fungsi perkotaan Luwuk sebagai Kota layak huni	1. Penerapan konsep Water Front city dalam penataan Kota Luwuk belum di rencanakan dengan baik. 2. Pemenuhan dan optimalisasi fungsi ekologis ruang terbuka hijau publik Kawasan perkotaan Luwuk belum optimal. 3. Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan Luwuk belum optimal 4. jaringan jalan alternatif dalam kota luwuk (ring Road atas dan bawah) untuk mengatasi kemacetan kota. 5. Penertiban parkir dalam kota luwuk belum optimal
6.	Implementasi Reformasi Birokrasi belum optimal	1. Kualitas Pelayanan publik berbasis teknologi informasi belum memuaskan	1. Sistem, mekanisme dan prosedur serta standar pelayanan publik. 2. Kualitas dan Kuatitas aparatur pelayanan publik. 3. Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan publik masih perlu di tingkatkan, agar lebih memadai.
		2. Indeks Inovasi Daerah Cukup	1. Implementasi Satu Inovasi per Perangkat Daerah per



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Baik, namun perlu di Tingkatkan	tahun belum berjalan optimal.
		3. Kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah belum optimal	1. Data dan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah belum memadai, karena Banggai Satu Data belum di terapkan. 2. Belum adanya Fungsional perencana dan Fungsional peneliti. 3. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan belum optimal. 4. Hasil penelitian dan pengembangan daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan. 5. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum berjalan dengan optimal. 6. Partisipasi masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media masa dalam pembangunan masih rendah.
		4. Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan	1. Opini WTP selama 9 Tahun berturut-turut. 2. Transparansi/keterbukaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah kepada publik belum di laksanakan secara maksimal. 3. Intgerasi <i>E-Planing</i> dan <i>E-Budgeting</i> melalui aplikasi SIPD belum optimal. 4. Masih adanya temuan BPK berkaitan dengan kesalahan administrasi pengelolaan keuangan daerah.



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			5. Pengamanan asset daerah belum optimal
		5. Belum Maksimalnya Penggalian Potensi-Pendapatan Asli Daerah (PAD).	1. Pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat belum maksimal. 2. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih rendah. 3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah belum optimal dilakukan. 4. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah belum maksimal dilaksanakan. 5. Pemberian insentif/ bonus dan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada Perangkat Daerah yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan. 6. Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Berbasis Teknologi Informasi belum sepenuhnya dilaksanakan.
		6. Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda sudah baik, namun masih perlu di tingkatkan	1. Nilai LHE SAKIP = 75,74 atau kategori B perlu di tingkatkan ke kategori A. 2. Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada Level 3, perlu di pertahankan dan di tingkatkan.



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			3. Nilai <i>Monitoring Centre Prevention (MCP)</i> pada kategori baik 4. Fungsi Pengawasan masyarakat yang di laksanakan DPRD belum berjalan optimal dan sinergis dengan tindak lanjutnya.
		7. Kualitas Produk Hukum Daerah Belum optimal.	1. Kualitas program pembentukan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya masih rendah. 2. Penegakan pelaksanaan produk hukum daerah belum optimal karena keterbatasan personil Pol PP, yang di tunjukan oleh rasio Pol PP per 10.000 penduduk baru belum sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Banggai. 3. Masih tingginya kasus pelanggaran Perda Oleh Masyarakat.
		8. Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah belum tepat fungsi dan tepat ukuran dan Tata Laksana yang belum berbasis TIK	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) rendah 2. Tingkat Kematangan Organisasi relatif baik 3. Peralihan Jabatan Fungsional dan penyesuaian terhadap Nomenklatur Program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019. 4. Penataan Arsip Daerah belum maksimal
		9. Kualitas pelaksanaan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa	1. Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD masih pada kategori sedang atau cukup baik.



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		belum sesuai yang di harapkan.	2. Belum di laksanakan secara optimal pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan. 3. Kapasitas Aparat dan Kelembagaan Pemerintah Desa masih rendah. 4. Persandian Daerah belum berfungsi secara optimal. 5. Penataan Arsip Daerah belum optimal.
		10. Manajemen Sumber Daya Aparatur yang belum optimal	1. Kesejahteraan dan profesionalisme ASN belum optimal. 2. Kapasitas SDM Aparatur masih rendah. 3. Sistem Merit belum sepenuhnya di terapkan.

2.3.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan tujuan serta sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dalam suatu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan pemerintah daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib (Urusan Pemerintahan yang



berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) serta urusan pilihan. Permasalahan masing-masing urusan dimaksud digambarkan sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

Gambaran permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan

- a. Indeks SPM Pendidikan Tahun 2024 telah mencapai mencapai 95,51%, dengan nilai kemampuan literasi dan kemampuan Numerasi pada kategori Sedang dan Rendah.
- b. Wajib belajar 9 tahun belum tuntas, yang di tunjukan oleh angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2024 yang baru mencapai 8,81 Tahun. Baru sebanyak 61,72% penduduk usia 15 tahun keatas berhasil menyelesaikan wajib belajar 9 Tahun.
- c. Angka Putus Sekolah di Kabupaten Banggai relatif masih tinggi
- d. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pendidikan dasar.
- e. Kualitas dan kuantitas guru masih rendah dan distribusinya belum merata.
- f. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pendidikan.
- g. Masih rendahnya akses Masyarakat terhadap layanan Pendidikan, utamanya berkaitan dengan kondisi geografis.
- h. Pembiayaan Pendidikan melalui APBD masih perlu di tingkatkan.



2. Kesehatan

- a. Indikator-indikator utama sektor Kesehatan menunjukkan peningkatan, tetapi perlu optimalisasi lebih lanjut.
- b. Capaian SPM Kesehatan cukup baik, tetapi perlu peningkatan terutama pada pelayanan Kesehatan hipertensi, diabetes melitus, tuberculosis dan HIV/Aids.
- c. Jumlah SDM/Tenaga Kesehatan sesuai standar belum terpenuhi secara merata di fasilitas Kesehatan
- d. Jumlah sarana Baik RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes sesuai standar belum terpenuhi di beberapa fasilitas kesehatan.
- e. Ketersediaan Alkes, Obat dan BMHP di sarana faskes belum terpenuhi secara maksimal.
- f. Peningkatan kasus morbiditas penyakit menular hingga emerging wabah serta peralihan kasus degeneratif atau penyakit tidak menular pada populasi masyarakat yang semakin tinggi.
- g. Pembiayaan Kesehatan belum sepenuhnya maksimal dalam Upaya mendukung pelaksanaan Pembangunan Kesehatan serta indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
- h. Mutu manajemen pelayanan Kesehatan di unit faskes belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat Puskesmas dengan status akreditasi dasar.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Tingkat kemantapan jalan belum optimal, jalan dalam kondisi mantap baru mencapai kurang lebih 63%. Masih terdapat beberapa ruas jalan yang belum terhubung dan masih banyak jembatan penghubung yang belum terbangun. Serta Kapasitas Ruas jalan yang perlu di tingkatkan, terutama Kawasan perkotaan.
- b. Di bidang sumber daya air, masalah yang di hadapi adalah Belum tersedianya jaringan pengukur data hidroklimatologi





untuk DAS yang berada di wilayah Kabupaten Banggai, Ketersediaan air baku di wilayah perkotaan dan perdesaan belum memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauannya dan Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas infrastruktur yang terbangun dan pemeliharaan lingkungan DAS.

- c. Di bidang air bersih/air minum masalahnya adalah Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SPAM, Belum optimalnya ketersediaan data skema jaringan perpipaan existing baik SPAM IKK Perkotaan maupun SPAM IKK Perdesaan, dan Jaringan perpipaan existing telah melampaui umur teknis.
- d. Beberapa wilayah Perkotaan Luwuk belum terlayani PDAM secara optimal, yang antara lain disebabkan oleh kapasitas Instalasi Pengolahan Air, sumber air dan jaringan instalasi perpipaan dalam Kota Luwuk yang telah berkurang kehandalannya.
- e. Kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan infrastruktur terbatas.
- f. Belum optimalnya fungsi jaringan irigasi. Kondisi saluran primer dan saluran sekunder masih perlu di tingkatkan kemantapannya.
- g. Belum selesainya revisi RTRW Kabupaten Banggai dan rencana rincinya.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih terdapat Rumah Tidak layak huni yang tersebar di wilayah Kabupaten Banggai.
- b. Adanya Rumah Tangga yang belum memiliki Rumah (Backlog perumahan).
- c. Lahan untuk pembangunan perumahan sangat mahal yang mengakibatkan Sulitnya kepemilikan rumah murah.





- d. Terdapat perumahan yang berada di lokasi Terlarang (Rawan Bencana, perumahan berada di lokasi yang bukan peruntukannya) 38 Kawasan.
- e. Masih terdapat kawasan Perumahan dan Permukiman kumuh di wilayah kabupaten Banggai seluas 71,80 Ha
- f. Perkembangan Perumahan dan Permukiman tidak dibarengi dengan pengembangan Prasarana, sarana dan utilitas.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Rasio Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk belum sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Banggai.
- b. Masih tingginya kejadian kriminal di wilayah Kabupaten Banggai.
- c. Masih terjadinya kasus pelanggaran perda oleh masyarakat.

6. Sosial

- a. Perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi PMKS belum di laksanakan secara optimal.
- b. Belum adanya shelter atau tempat penampungan sementara bagi PMKS terlantar khususnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
- c. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah kerawanan sosial masih kurang.
- d. Data mutakhir dan update untuk penanggulangan kemiskinan.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

Gambaran permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah berikut :



1. Tenaga Kerja

- a. Jumlah angkatan kerja belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Hal ini terlihat dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,11% di Tahun 2024, serta Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) atau presentasi Angkatan Kerja terhadap penduduk usia kerja mencapai 71,70% di tahun 2024.
- b. Lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi pencari kerja, utamanya di industri gas dan ikutannya.
- c. Pengawasan dan Perlindungan tenaga kerja belum optimal
- d. Tumbuhnya usaha rintisan (Start up Company) masih kurang di fasilitasi.
- e. Kurangnya Diklat Vokasi untuk penyiapan tenaga kerja dan calon wirausaha baru.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Angka perkawinan usia muda/remaja masih cukup tinggi.
- b. Jumlah keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I masih cukup besar
- c. Kabupaten Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak belum bisa di wujudkan.
- d. Partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah.
- e. Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan gender.
- f. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Pangan

- a. Jaminan ketersediaan pangan daerah dan kestabilan harga
- b. Kesadaran yang masih rendah terhadap keanekaragaman bahan makanan pokok selain beras





- c. Pola pangan harapan masyarakat masih belum mencerminkan kondisi yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
- d. Terdapat 8 Desa Rawan pangan di Kabupaten Banggai
- e. Lahan tidur dan Lahan pekarangan di perdesaan masih belum di manfaatkan secara optimal

4. Pertanian

- a. Masih rendahnya kepemilikan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat dan pemerintah daerah
- b. Penguasaan tanah oleh pemerintah daerah bagi pembangunan dan fasilitas umum masih kurang

5. Lingkungan Hidup

- a. Meningkatnya ancaman kerusakan lingkungan hidup oleh berbagai aktivitas
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup
- c. Kelembagaan dan penegakan hukum di bidang SDA dan Lingkungan Hidup masih belum konsisten.
- d. Peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah.
- e. Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca tidak di implementasikan dengan optimal.
- f. Pengelolaan sampah perkotaan belum berbasis masyarakat dengan pendekatan ekonomi sirkular.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Kepemilikan terhadap dokumen kependudukan. Masih terdapat $\pm 5\%$ penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP. Sedangkan kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk telah mencapai 77,85%.





- b. Belum maksimalnya pelayanan administrasi kependudukan yang menjangkau wilayah kecamatan dan perdesaan terpencil.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Jumlah BUMDes yang terbentuk 167 Dari 291 Desa. 16 BUMDes terbit sertifikat Badan Hukum, dan 32 BUMDes dalam proses perbaikan.
- b. Status desa Mandiri dan Maju berdasarkan Indeks Desa Membangun 2023 baru mencapai 62,20% atau 181 Desa. Sedangkan untuk kategori desa berkembang sejumlah 108 Desa dan masih terdapat desa tertinggal sejumlah 2 Desa.
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi desa belum optimal
- d. Delegasi kewenangan ke pemerintah desa belum optimal
- e. Kemampuan aparat desa dan anggota BPD terbatas.
- f. Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa belum optimal.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Rasio akseptor KB cukup tinggi yaitu 0.70%, perlu di pertahankan.
- b. Tenaga penyuluh KB yang tidak cukup. Tenaga penyuluh KB terdiri dari P3K dan ASN Pusat berjumlah 35 Orang, tenaga kontrak 24 orang.

9. Perhubungan

- a. Belum adanya sistem angkutan umum publik dalam kota dan perdesaan yang terpadu dan nyaman
- b. Masih rendahnya frekuensi kapal berlabuh di pelabuhan Bunta dan Pagimana
- c. Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan berupa rambu, pagar pengaman dan marka jalan masih kurang.





- d. Belum terwujudnya fasilitas dermaga kecil yang aman dan nyaman
- e. Optimalisasi pemanfaatan terminal oleh jasa angkutan umum di seluruh kecamatan,
- f. Kondisi Pelabuhan Rakyat Luwuk kurang memadai.

10. Komunikasi dan Informatika

- a. Keterbukaan informasi publik belum di laksanakan
- b. Mekanisme check and balances di kalangan pers.
- c. Belum terbentuknya Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) pada semua Kecamatan
- d. Masih terdapat Kecamatan dan 42 Desa yang Blank Spot.
- e. Kompetensi Aparatur di bidang TIK masih terbatas
- f. Literasi TIK masyarakat (digital Society) masih rendah.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Rendahnya jumlah koperasi aktif yaitu tahun 2024 154 Unit, Tidak aktif = 39 Unit, Koperasi yang melaksanakan RAT = 55 Unit, Koperasi yang memiliki sertifikat NIK = 95 Unit.
- b. Daya saing UMKM masih rendah, era Digitalisasi Ekonomi. Jumlah UMKM tahun 2024 = 10.366
- c. Pembinaan manajemen perkoperasian dan UKM
- d. Akses permodalan dan pemasaran koperasi dan UKM masih terbatas.
- e. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro belum melakukan modernisasi dan mengakomodasi penerapan Inovasi teknologi dan informatika.
- f. Pendekatan kelompok, komunitas dan kluster dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro belum sepenuhnya di terapkan.
- g. Kemitraan dalam pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro masih kurang.
- h. Iklim usaha UMKM perlu di kembangkan



12. Penanaman Modal

- a. Sistem pelayanan perizinan investasi yang mudah dan profesional masih perlu ditingkatkan, menuju digitalisasi pelayanan.
- b. Sarana prasarana pendukung investasi di daerah terbatas.
- c. Iklim investasi yang kurang terpromosi dengan intensif.
- d. Kurang optimalnya kerjasama dan promosi penanaman modal.
- e. Masih kurangnya peta potensi digital.

13. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Pembinaan organisasi cabang olah raga prestasi oleh Pemda dan KONI perlu di optimalkan.
- b. Sarana dan Prasarana olah raga prestasi maupun olah raga tradisional masih terbatas dan kurang merata.
- c. Partisipasi masyarakat dalam pembinaan dan kegiatan olah raga masih sangat kurang.
- d. Even-even olah raga prestasi maupun tradisional perlu ditingkatkan.
- e. Masih tingginya perilaku beresiko pada pemuda seperti bahaya kekerasan, penyalahgunaan NAPZA, Miras dan HIV/AIDS.
- f. Ruang kreasi positif bagi pemuda dan fasilitasi wirausaha muda kreatif masih kurang
- g. Peran Organisasi kepemudaan, Karang Taruna, Pramuka dan organisasi Kemahasiswaan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik relative perlu di tingkatkan.

14. Statistik

- a. Belum optimalnya dukungan PD dalam penyediaan data statistik sektoral.
- b. Masih banyak jenis data statistik yang belum tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna data.





- c. Banggai Satu Data masih perlu di optimalkan.

15. Persandian

- a. Rendahnya fasilitas, sarana dan prasarana persandian daerah
- b. Belum terlaksananya pengukuran/penilaian system keamanan informasi.
- c. Keterbatasan SDM.

16. Kebudayaan

- a. Peran lembaga pendidikan dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal belum optimal.
- b. Penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari masih rendah.
- c. Rendahnya apresiasi masyarakat dalam mengangkat dan menjaga nilai-nilai kebudayaan daerah.
- d. Terbatasnya akses Informasi tentang kebudayaan daerah
- e. Acara/festival budaya dan kesenian daerah perlu ditingkatkan.
- f. Museum daerah belum berfungsi secara optimal.

17. Perpustakaan

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan daerah
- b. Koleksi buku di perpustakaan terbatas
- c. Minat baca masyarakat rendah
- d. Kebijakan untuk mendukung gerakan gemar membaca.
- e. Masih belum optimalnya penggunaan perpustakaan daerah oleh masyarakat umum

18. Kearsipan

- a. Keterbatasan sarana prasarana kearsipan daerah.
- b. Layanan informasi kearsipan
- c. Tenaga arsiparis terbatas.





C. Urusan Pilihan

Gambaran permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan pilihan adalah sebagai berikut :

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Nilai tambah produksi kelautan dan perikanan.
- b. Penggunaan teknologi oleh nelayan perikanan tangkap maupun budidaya yang masih sangat sederhana dan tradisional.
- c. Masih tingginya harga pakan ikan dan biaya operasional yang berakibat pada produktifitas yang rendah
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dan akses terhadap teknologi perikanan.
- e. Keterbatasan infrastruktur perikanan budidaya/tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (air bersih, listrik, BBM, sistem rantai dingin, TPI, dan pelabuhan perikanan).
- f. Rendahnya akses permodalan bagi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan

2. Pariwisata

- a. Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB belum optimal.
- b. Industri pariwisata/industri kreatif masih perlu dikembangkan.
- c. Promosi Pariwisata perlu dioptimalkan.
- d. Kelembagaan pariwisata belum berperan secara optimal.
- e. Belum berkembangnya pariwisata berbasis lingkungan (Ecotourism), pariwisata berbasis sejarah dan budaya serta berbasis religi dan olah raga.

3. Pertanian

- a. Alih Fungsi Lahan pertanian Tanaman Pangan.
- b. Belum optimalnya dukungan sarana produksi pertanian. Penyediaan benih/bibit belum memenuhi prinsip 5 T yaitu





tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga.

- c. Kurangnya akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana pertanian.
- d. Masih kurangnya pemanfaatan dan penerapan teknologi pertanian.
- e. Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pertanian perlu dioptimalkan.
- f. Jaminan ketersediaan pupuk sepanjang waktu dan harga yang tetap dan berubsidi bagi kelompok tani.
- g. Pembentukan institusi usaha agribisnis bagi kelompok tani dalam peningkatan nilai tambah produk pertanian
- h. Peternakan yang umumnya masih tradisional
- i. Jaminan ketersediaan dan kestabilan harga pakan ternak bagi petani ternak.
- j. Keberadaan usaha atau unit pembibitan ternak di Kabupaten Banggai perlu di tingkatkan perannya.
- k. Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan belum optimal.
- l. Nilai Tambah produksi hasil peternakan

4. Kehutanan

- a. Masih maraknya penebangan liar walaupun dalam skala yang kecil
- b. Belum optimalnya pemanfaatan hutan untuk tujuan lain selain hasil kayu, misalnya ekowisata
- c. Belum terkelolanya penataan taman hutan rakyat

5. Perdagangan

- a. Sarana dan prasarana perdagangan seperti pasar dan pertokoan/kios bagi pedagang kecil belum mampu mendukung peningkatan volume perdagangan





- b. Revitalisasi pasar
- c. Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah belum optimal.

6. Perindustrian

- a. Belum luasnya jangkauan pembinaan bagi pelaku industri kecil dan rumah tangga.
- b. Pola pemasaran hasil industri yang masih skala lokal
- c. Upaya penciptaan iklim industri yang menarik investasi masuk ke daerah.
- d. Belum optimalnya antisipasi terhadap transformasi digital.

7. Transmigrasi

- a. Tidak adanya program transmigrasi lokal
- b. Belum optimalnya program penyiapan kawasan permukiman transmigrasi baru.

D. Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum.

Permasalahan Pembangunan berkaitan dengan Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

- a. Implementasi Penyederhanaan Birokrasi dengan sistem kerja baru berbasis fungsional, serta tata Laksana Birokrasi Pemerintahan daerah melalui pengembangan/optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b. Reformasi Produk hukum daerah.
- c. Pengembangan Inovasi Daerah.
- d. Kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD perlu di tingkatkan.





2. Perencanaan

- a. Implementasi Satu Data Banggai untuk mendukung perencanaan Pembangunan.
- b. Partisipasi masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media masa dalam pembangunan dengan pendekatan PENTAHHELIX perlu dioptimalkan.

3. Keuangan

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerima daerah masih perlu di tingkatkan.
- b. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah melalui SIPD.
- c. Transparansi Pengelolaan Keuangan daerah.
- d. Pengamanan Aset Daerah belum optimal.

4. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- a Transformasi SDM Aparatur melalui Core Values ASN yaitu BERAHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif serta Kolaboratif) dan Employer Branding ASN yaitu “Bangga Melayani Bangsa”.
- b Implementasi *Meryt System* perlu dioptimalkan.
- c Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional perlu dioptimalkan.

5. Penelitian dan Pengembangan

- a. Indeks Inovasi Daerah perlu di tingkatkan.
- b. Hasil penelitian dan pengembangan daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan.

6. Pengawasan

- a. Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja perlu di pertahankan dan di tingkatkan.
- b. Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP perlu di pertahankan dan di tingkatkan.





7. Kecamatan

Delegasi/Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan perlu di optimalkan.

8. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Penerapan moderasi beragama melalui Forum Komunikasi Umat Beragama belum optimal.
- b. Pemahaman wawasan Kebangsaan dan Idiologi Pancasila perlu dioptimalkan lagi.

2.3.2 Isu Strategis Daerah

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Mendasari Permendagri 86 Tahun 2017, penentuan isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional.



2.3.2.1 Isu Strategis Global/International

Mengacu pada Dokumen RPJPN 2025-2045, terdapat sepuluh isu/tantangan/megatrend global yang akan di hadapi Indoneisa menuju tahun 2045. Perubahan Global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang dan bersifat sangat masif, terutama di sebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi, termasuk kecerdasan buatan.

Gambar 2.73
Megatrend Global 2045



a. Perkembangan Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan factor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan. Sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi



dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (life-span) yang semakin panjang.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (childfree), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran. Sementara itu, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal

b. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara





lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan unenjadi salah satu Pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang.

c. Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti Internet of Things (IOT), blockchain Hyper Connection, Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Lifecycle Management; Robotic Process Automation (RPA), Edge Computing, Auto Robotic System, 3D, dan Future Technologies.

Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam





memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik). Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Teknologi yang berkembang di masa depan akan mempengaruhi sektor manufaktur, sektor pendidikan, perkembangan teknologi juga menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Dampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi, berdampak besar pada cara kerja pemerintah.

d. Peningkatan Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan





Afrika, sekitar 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari Sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (compact) melalui efisiensi layanan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Di Sisi lain, dampak pandemi COVID-19, di samping menimbulkan kerugian jiwa dan material, juga menjadi pemicu perkembangan teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya.

e. Konstelasi Perdagangan Global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat kawasan Asia-Afrika. erekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang





akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpotensi semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

f. Tata Kelola Keuangan Global

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju aging society pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, Tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.



g. Pertumbuhan Kelas Menengah (*midle class*)

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui virtual-metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di Sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antarjenis pekerjaan.

h. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya aktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

i. Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat,



dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan. Selain itu pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya.

j. Pemanfaatan Luar Angkasa (*space economy*)

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (*commons heritage of humankind*), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak unduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*).

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, di sebutkan Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama





seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setora negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Gambar 2.74
Visi Misi Presiden Republik Indonesia 2025-2029



Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins.



Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Gambar 2.75

17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air 2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara 3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Pemberantasan Kemiskinan 6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat 8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi 9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 10 Penguatan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup 12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersantitas Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya 15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi 16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah 17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersantitas baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi



dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Gambar 2.76
Asta Cita Sebagai Prioritas Pembangunan



Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

PRIORITAS NASIONAL 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PRIORITAS NASIONAL 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
PRIORITAS NASIONAL 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	PRIORITAS NASIONAL 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
PRIORITAS NASIONAL 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PRIORITAS NASIONAL 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
PRIORITAS NASIONAL 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PRIORITAS NASIONAL 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di



Kementerian/Lrmbaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Terdapat 7 (tujuh) tantangan pembangunan lima tahun ke depan yang menjadi perhatian utama dalam RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu:

a. Rendahnya Produktivitas

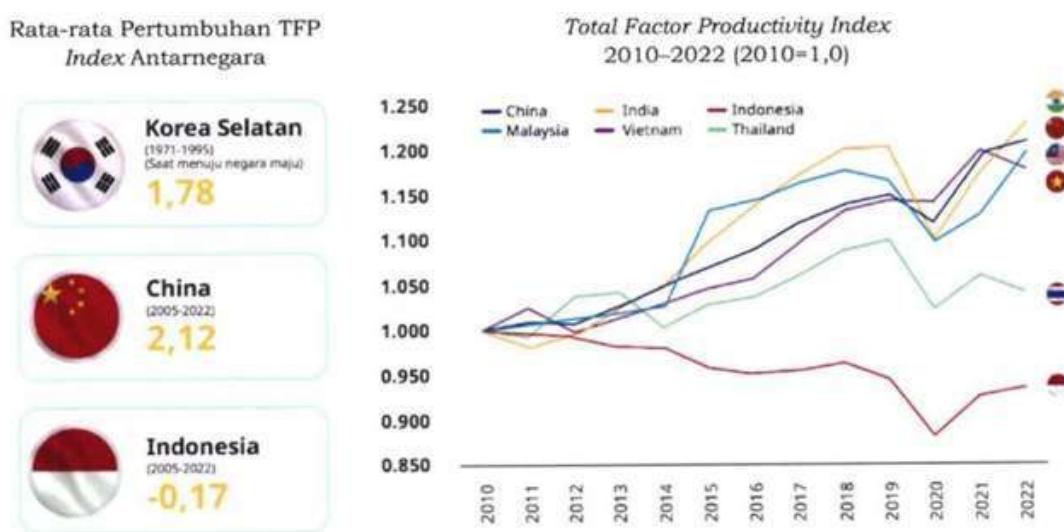
Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari Local Factor Productivity selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005-2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya Produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali

mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015-2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023.

Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

Gambar 2.77
Rata-rata Pertumbuhan Total Factor Productivity Index



Sumber: Asian Productivity Organization (2024), diolah

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan *Asian Productivity Organization* (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$ 28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US\$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan *Association of Southeast Asian Nations* sebesar US\$ 0,200 per pekerja. Tantangan peningkatan Produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek



(membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara *The Organization for Economic Cooperation and Development* sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan



miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut laporan lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

d. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan





pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

e. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (triple planetary crisis) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022). Kerusakan ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp.22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019). Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi particulate mater 2,5 (World Health organization, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.





Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen pertahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (United Nations Environment Programme, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko Triple Planetary Crisis berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

f. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai seluruh kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.





Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (International Monetary Fund, 2024). Sementara itu, inovasi global diperkirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (International Monetary Fund, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.





Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh *The Federal Reserve*. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti *Bank of England* dan *The Federal Reserve*. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tercermin dari penurunan *Battic Dry Index Level* menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.





g. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan Pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ *Corruption Perception Index* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren Perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2.3.2.3 Isu Regional Sulawesi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 pembangunan wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi penunjang Superhub ekonomi nusantara, pintu gerbang Internasional KTI dan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA). Selain itu, menjadi peluang munculnya kota-kota dengan peningkatan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Sulawesi sebagai penyangga berdirinya



Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Pulau Kalimantan. Beberapa isu strategis di wilayah Sulawesi, dan Isu strategis pembangunan kewilayahan berdasarkan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, regional Sulawesi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.46
Isu Strategis Wilayah Sulawesi

Isu Strategis	Potensi Wilayah
Meskipun sektor pertambangan dan industri pengolahan tumbuh pesat, dampaknya terhadap kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja belum optimal	Posisi geografis terletak di antara ALKI II dan III yang dapat mendukung peran Sulawesi sebagai HUB dan pintu gerbang internasional KTI
Produktivitas dan daya saing tenaga kerja belum optimal, Sebagian karena ketidaksesuaian antara keahlian dan kebutuhan lapangan kerja	Pembahasan IKN di Kalimantan membuka peluang besar bagi wilayah Sulawesi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sebagai daerah penyangga
Tingkat kemiskinan yang masih tinggi yang disebabkan oleh struktur tenaga kerja yang didominasi oleh sektor pertanian	Potensi peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan
Kurang memadainya sarana dan prasarana layanan dasar dan belum meratanya konektivitas antar daerah	Potensi pertambangan dan pengolahan nikel dan tembaga yang mendukung pengembangan dan implementasi energi baru terbarukan

Dinamika ekonomi, kondisi sosial budaya, perkembangan teknologi, tantangan tata kelola pemerintahan, serta berbagai perkembangan lain yang terjadi baik ditingkat lokal, nasional, dan global dalam lima Tahun mendatang akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perkembangan di wilayah Sulawesi. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan potensi dan isu utama



pembangunan yang akan menjadi dasar perumusan arah kebijakan untuk wilayah Sulawesi dalam jangka menengah.

Tabel 2.47

Isu Strategis Regional Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara Berbasis Sumber Daya Alam

Kawasan Komoditas Unggulan	Kawasan Perkotaan	Pengembangan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi (Industri Pengolahan Hasil Pertambangan dan Smelter Terintegrasi Tambang)	Kawasan konservasi (Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Pesisir dan Kepulauan)	Kawasan Afirmasi
1. Pengembangan Kawasan berbasis Pertanian di Bolaang Mongondow dan sekitarnya dan Pengembangan Kawasan Perikanan Bitung di Kota Bitung, Sulawesi Utara. 2. Pengembangan Kawasan Pertanian Jagung, Kelapa dan Garam di Kab. Gorontalo Utara, Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab. Pohuwato, Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo 3. Peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan (kelapa sawit, kakao, dan kopi) yang berkelanjutan di Kab. Mamasa dan Kab. Polewali Mandar dan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Kab. Pasangkayu dan Kota Mamuju, Sulawesi Barat 4. Pengembangan kawasan ekonomi (pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian) di Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Parigi Moutong, Kab. Donggala dan sekitarnya di Sulteng 5. Kawasan Perikanan dan Hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT) Sulawesi Tengah, Kawasan Hilirisasi Rumpit Laut Sulawesi Tengah 6. Pengembangan Kawasan Sentra Perikanan Tangkap di Sulawesi Tenggara dan Kawasan Lumbung Pangan di Sulawesi Tenggara.	Pembangunan Wilayah Metropolitan yang berkelanjutan di WM Manado (Bimindo), Sulawesi Utara sebagai Gerbang Perdagangan Asia Timur dan Pasifik dan Peningkatan Kawasan Pertumbuhan Mamasasata - Pare-Pare, Sulawesi Selatan Kawasan Perkotaan Kecil (bahodopi, Morowali), Sulawesi Tengah	1. KI Standart Estate Investment, KI IMP Morowali, dan Morut KI IHPHulubao - (nikel dan hasil pertambangan lainnya), Sulawesi Tengah 2. Kawasan Smelter terintegrasi Tambang Sorowako, Sulawesi Selatan 3. KI IPIP Pomalaa, KI VDHP Konawe (nikel, aspal, pertanian, perkebunan, dan perikanan), Sulawesi Tenggara 4. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang di Sulawesi Utara dan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi di Sulawesi Tenggara dengan implementasi blue green, circular economy 5. Kawasan Hilirisasi Gas Bumi, Sulawesi Tengah	1. Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Pesisir dan Kepulauan di Kawasan Konservasi Teluk Gorontalo dan sekitarnya 2. Pengembangan Kawasan Perairan Togean-Banggai dan sekitarnya, Sulteng 3. Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Pesisir dan Kepulauan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya, serta Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulut	Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Perbatasan di Kab. Kepulauan Sangihe Kab. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara

Sumber : RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029

Berdasarkan permasalahan dan capaian pembangunan, secara umum pembangunan belum dirasakan secara merata di wilayah Sulawesi. Beberapa Provinsi memiliki nilai indikator diatas rata-rata nasional, namun ada beberapa indikator juga masih berada dibawah rata-rata nasional. Olehnya berdasarkan hasil analisis tersebut, menunjukkan masih adanya hambatan dan menjadi isu strategis nasional untuk wilayah regional Sulawesi.

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah 2023 sebesar 11,91 persen tertinggi se-Regional Sulawesi dan di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor yang menjadi penyumbang dalam tingginya pertumbuhan ekonomi yaitu pada sektor pertambangan dan industri pengolahan. Namun dirasakan dampaknya sangat minim bagi kesejahteraan masyarakat serta pada penyerapan tenaga kerja. Hal ini terjadi antara lain karena adanya



distribusi manfaat yang tidak merata misalnya kenaikan dalam sektor pertambangan dan pengolahan sering kali menguntungkan sebagian kecil populasi, seperti pemilik perusahaan atau pekerja yang memiliki keterampilan khusus, kemudian, sektor ini juga tidak menyediakan lapangan kerja yang stabil atau berkualitas tinggi, karena pekerjaan yang tersedia hanya bersifat musiman atau kontrak tanpa ada penawaran pelatihan atau pengembangan keterampilan berkelanjutan. Selain hal tersebut di atas, sektor pertambangan dan industri pengolahan cenderung berpusat di lokasi tertentu dan mungkin tidak memacu pertumbuhan sektor ekonomi lokal yang lebih luas, seperti pertanian, perdagangan, atau jasa, yang juga penting untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kondisi infrasturkur diwilayah Sulawesi, baik infrastruktur dasar, maupun konektivitas masih belum optimal. Pelabuhan yang menjadi simpul utama belumperberan optimal sebagai Hub transshipment KTI karena belum optimalnyapengembangan Kawasan ekonomi pada hinterland. Belum tuntasnya pembangunanjalan trans Sulawesi, serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan daerah yang masih rendah juga menyumbang pada keterbatasan aksesibilitas.

Tabel 2.48
Isu Strategis Regional Pengembangan Ekonomi Lokal dan Perlindungan Lingkungan

Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas	Pengembangan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kawasan Kecamatan Prioritas Nasional, dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat dan Perlindungan Pemulihan Lingkungan	Eliminasi Stunting, Pengendalian Penyakit menular, Penyakit Tropis dan Lainnya	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul, Pelatihan dan Pendidikan Vokasi, dan Rerutalisasi Sernalasanana Sekolah
1. Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Mapalus Sulawesi Utara 2. Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Gullira, Sulawesi Selatan 3. Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Morowali, Sulawesi Tengah	1. PKSN, Tohuna dan Melonguane Sulawesi Utara Kecamatan perbatasan Prioritas : 1. Kab. Sangihe dan Kep. Talaud Sulut 2. Kab. Buol dan Kab. Toitoli, Sulawesi Tengah 3. Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo Kawasan Transmigrasi (KT) : 1. KT Ulumanda, Tobadak, SULUT 2. KT Sulamata, Gorontalo 3. KT Tompalore dan KT Bungku, Sulawesi Tengah 4. KT Mutiara dan KT Anawua, Sultra	1. Kawasan Konservasi Sulawesi Tengah 2. Kawasan Pesisir, Gorontalo 3. Kawasan Pengembangan Pulau Kecil, Sulbar 4. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Kota Palu	1. Seluruh Provinsi di Regional Sulawesi 2. Eliminasi Schistosomiosis : Sulawesi Tengah	Seluruh Provinsi di Regional Sulawesi

Sumber : RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029



Secara Umum Isu Strategis Regional Sulawesi adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Belum Optimalnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini antara lain adanya ketidaksesuaian keterampilan yang diberikan kepada tenaga kerja mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini disebabkan oleh perubahan teknologi atau evolusi industri yang cepat, dimana keterampilan yang diberikan pada saat pekerja mengikuti pelatihan mungkin sudah tidak relevan lagi dikemudian harinya. Kemajuan teknologi yang cepat dapat menyebabkan keterampilan yang sudah ada menjadi using. Hal lain yaitu urangnya informasi yang cukup untuk dimiliki oleh pekerja mengenai peluang kerja yang tersedia ataupun keterampilan yang dibutuhkan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar. Selain keterampilan teknis, *soft skills* seperti komunikasi, pemecahan masalah, dan kerja sama tim juga sangat penting. Kurangnya pelatihan dalam *soft skills* ini dapat menghambat produktivitas dan efektivitas tenaga kerja.

2) Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan Dimana Struktur Tenaga Kerja Masih Didominasi Pada Sektor Pertanian dan Menyumbang Tingkat Kemiskinan

Hubungan dominasi sektor pertanian dengan tingkat kemiskinan dijelaskan dalam beberapa penyebabnya antara lain: pendapatan rendah dari sektor pertanian dibanding dengan sektor industri atau jasa akibat hasil pertanian dipengaruhi oleh faktor cuaca, harga komoditas yang fluktuatif serta kurangnya pemanfaatan teknologi modern serta karena sifatnya musiman, jadi penghasilan pekerja sektor pertanian tidak memiliki penghasilan yang tetap. Selain itu, yang menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan dari sektor pertanian adalah petani umumnya di



Sulawesi Tengah memiliki akses yang terbatas ke teknologi terbaru serta infrastruktur yang kurang memadai sehingga menghambat produktivitas dan pendapatan mereka. Kepemilikan tanah dan struktur kepemilikan juga tidak merata karena sebagian besar lahan pertanian dimiliki oleh pemodal yang besar serta petani dengan modal yang kecil hanya mampu menyewa lahan atau tanah garapan sehingga kesulitan dalam meningkatkan produksi mereka.

3) Tingginya Ketimpangan Antarkelompok dan Wilayah Akibat Belum Meratanya Infrastruktur Daerah

Kesenjangan ekonomi antar wilayah kepulauan dengan daratan juga masih menjadi isu pembangunan. Selain itu, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti Wilayah Metropolitan (WM), Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) masih belum memberikan dampak secara optimal dalam mempercepat penurunan persentase penduduk miskin di Wilayah Sulawesi. Kawasan perdesaan, termasuk kawasan transmigrasi juga belum optimal dikembangkan sebagai daerah penyangga dari pusat-pusat pertumbuhan. Ketimpangan antarkelompok dan wilayah seringkali disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan infrastruktur. Ketika infrastruktur, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, tidak tersebar secara merata, wilayah yang kurang berkembang atau terpinggirkan akan mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai layanan dan peluang ekonomi. Ketimpangan ini tentunya akan berdampak pada ekonomi, kesehatan dan pendidikan, pembangunan sosial serta mobilitas dan konektivitas.





4) Masih Rendahnya Akses dan Mutu Bidang Pendidikan Kesehatan Karena Sarana dan Prasarana Yang Belum Memadai

Isu ini merupakan isu kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek masyarakat, faktornya karena keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, aksesibilitas yang minim serta adanya ketimpangan sosial. Hambatan pada aspek SDM kesehatan dan pendidikan akibat keterbatasan sarana dan prasarana masih dialami oleh sebagian besar Provinsi di wilayah Sulawesi, seperti Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Gorontalo.

5) Masih Tingginya Kerentanan dan Potensi Bencana Alam (Gempa, Tsunami, Banjir dan Likuifaksi)

Pulau Sulawesi terletak di daerah yang aktif secara tektonik, dimana beberapa lempeng tektonik bertemu dan saling bertabrakan, juga berada di sekitar jalur Cincin Api Pasifik, yang dikenal dengan daerah dengan aktivitas seismik dan vulkanik yang tinggi. Selain itu, karakteristik topografi dan geologi Pulau Sulawesi dengan pegunungan dan lembah yang dalam dapat memperburuk dampak bencana alam, salah satunya akibat struktur geologi yang kompleks dimana proses tanah kehilangan kekuatan dan kestabilan dari getaran gempa bumi sangat rentan. Wilayah Sulawesi memiliki lima perairan pesisir yaitu Teluk Tomini, Teluk Tolo, Selat Makassar, Laut Sulawesi dan Laut Banda yang masuk dalam rangkaian tektonik.

2.3.2.4 Isu Provinsi Sulawesi Tengah

Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yaitu **“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029”** yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) Misi yaitu :



1. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.
2. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.

Untuk memastikan konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan nasional, 9 Program Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diselaraskan dengan program-program sesuai nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Setiap program prioritas tersebut diampu oleh perangkat daerah terkait yang memiliki tugas dan fungsi sesuai substansi program. Tabel berikut menyajikan persandingan antara 9 Program Prioritas Daerah, program sesuai nomenklatur Kepmendagri, serta perangkat daerah pengampunya.





Tabel 2.49
Keselarasan Antara Program Prioritas dengan Implementasi
Program dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-406	Perangkat Daerah
1	Berani Cerdas		
	- Pemberian BOSDA bagi SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta; - Pemberian biaya SPP bagi siswa miskin di sekolah swasta SMA/SMK/SLB - Pemberian beasiswa bagi siswa cerdas, istimewa dan bakat istimewa. - Biaya uji kompetensi dan biaya prakerin bagi siswa SMK negeri maupun swasta; - Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin dan/atau berprestasi dengan kategori: - mahasiswa baru jalur prestasi nonakademik - mahasiswa baru jalur afirmasi - mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) - mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) - mahasiswa aktif jalur prestasi akademik - mahasiswa aktif jalur afirmasi - mahasiswa aktif jalur prestasi nonakademik - Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa aktif miskin dan/atau	- Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pengembangan Kurikulum - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Program Pengendalian Perizinan Pendidikan - Program Pembinaan Perpustakaan - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Program Kepegawaian Daerah - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Program Pengelolaan Profil Kependudukan - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Kesejahteraan Rakyat - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Dinas Pendidikan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Sosial - Badan Kepegawaian Daerah - Dinas Dukcapil - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Biro Kesejahteraan Rakyat - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-406	Perangkat Daerah
	berprestasi dalam masa penyelesaian studi. 7. Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi guru, ASN serta pendidikan profesi. 8. Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berbasis Digital SMA/SMK 9. Pelatihan “Vokasional Siap Kerja” bagi Generasi Milenial dan Gen-Z 10. <i>Sulteng Career Center</i> 11. Peningkatan minat baca dan budaya literasi masyarakat dengan mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).		
2	Berani Sehat		
	1. Integrasi layanan kesehatan bersama BPJS, berobat Gratis menggunakan KTP 2. Pencegahan stunting 3. Dukungan terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis 4. Peningkatan kualitas layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum UNDATA dan MADANI 5. Mendorong Rumah Sakit Undata dan Rumah Sakit Madani menjadi rumah sakit rujukan bertaraf internasional 6. Jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Naseha Kami) 7. Integrasi layanan kesehatan dengan rumah sakit lainnya di Kota Palu	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 9. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Undata dan RSUD Madani 3. Dinas Sosial 4. DP3A 5. Dinas P2KB



No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-406	Perangkat Daerah
		10. Program Pengendalian Penduduk 11. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 12. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
3	Berani Sejahtera		
	1. Jaminan harga bahan pokok murah dan stabil 2. Menjamin kebutuhan dasar Masyarakat miskin melalui Program Pangan Daerah (PANADA) 3. Graduasi masyarakat miskin melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Graduasi 4. Revitalisasi Rutilahu 5. Program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan UMKM 6. Mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG)	1. Program Kesejahteraan Rakyat 2. Program Pemberdayaan Sosial 3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 6. Program Penanganan Bencana 7. Program Penanganan Kerawanan Pangan 8. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 9. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 10. Program Perekonomian dan Pembangunan 11. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 12. Program Kawasan Permukiman 13. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 14. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 15. Program Pengembangan	1. Biro Kesejahteraan Rakyat 2. Dinas Sosial 3. Dinas Pangan 4. Biro Administrasi Perekonomian 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6. Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan 7. Dinas Koperasi dan UMKM 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10. Dinas P2KB 11. Dinas Dukcapil 12. DP3A



No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-406	Perangkat Daerah
		UMKM 16. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 17. Program Penempatan Tenaga Kerja 18. Program Penataan Desa 19. Program Peningkatan Kerja Sama Desa 20. Program Administrasi Pemerintahan Desa 21. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 22. Program Pengendalian Penduduk 23. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 24. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 25. Program Pendaftaran Penduduk 26. Program Pencatatan Sipil 27. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 28. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 29. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 30. Program Perlindungan Khusus Anak	
4	Berani Lancar		
	1. Pembangunan/ peningkatan 1000 kilometer jalan desa untuk; peningkatan konektivitas antarwilayah dengan menghubungkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, serta memperlancar akses	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Program Pengembangan Permukiman 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 2. Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan 3. Dinas Perhubungan 4. BPBD 5. Satuan Polisi



No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-406	Perangkat Daerah
	menuju sentra-sentra pertanian, perikanan dan industri. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat basis ekonomi lokal, mempercepat pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat pedesaan; 2. Peningkatan konektivitas penghubung antara wilayah barat Sulawesi Tengah menuju wilayah timur Sulawesi Tengah dengan mendukung konektivitas Tambu-Kasimbar; 3. Melaksanakan rekonstruksi, pemeliharaan dan pembangunan beberapa ruas jalan melalui paket <i>Multi Year Contract (MYC)</i> yang berlokasi di Kabupaten/Kota; 4. Pembangunan Kawasan Agropolitan, kawasan perikanan dan hilirisasi Tongkol, Cakalang Tuna (TCT), kawasan sentra hilirisasi rumput laut, kawasan afirmasi, kawasan konservasi dan rawan bencana, dan kawasan pertumbuhan; 5. Peningkatan konektivitas penghubung antara Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut; 6. Jaminan ketersediaan air bersih bagi desa-desa yang belum mempunyai akses air bersih	5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 7. Program Pengembangan Perumahan 8. Program Kawasan Permukiman 9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 10. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 12. Program Pengelolaan Pelayaran 13. Program Pengelolaan Perkeretaapian 14. Program Penanggulangan Bencana 15. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Pamong Praja



No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-406	Perangkat Daerah
5	Berani Menyala		
	1. Jaminan ketersediaan jaringan internet bagi desa yang masih termasuk dalam wilayah <i>blank spot</i>, 2. Jaminan ketersediaan akses listrik bagi masyarakat miskin dan penyediaan lampu jalan bagi daerah yang belum terjangkau penerangan jalan umum 3. Peningkatan kualitas layanan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana Poso agar dapat menjamin ketersediaan pasokan listrik Sulawesi Tengah	1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 2. Dinas Komunikasi dan Informasi dan Persandian
6	Berani Makmur		
	1. Berani Produktivitas melalui peningkatan produktivitas padi sebesar 5-6 Ton/Ha GKG 2. Berani Tangkap Banyak melalui pemberian bantuan alat tangkap nelayan 3. Program Petani Milenial 4. Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memastikan ketersediaan Benih unggul, Pupuk serta mendorong modernisasi Alsintan 5. Mendukung Program resi gudang 6. Jaminan sosial bagi petani, nelayan dan pekerja lainnya 7. Berani Panen Raya, hasil panen melimpah dengan jaminan harga jual tinggi bagi petani 8. Pembangunan sentra pangan berbasis kawasan dan	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan 3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 5. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 7. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 8. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 10. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Dinas Perkebunan dan Peternakan 5. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 6. Dinas Pangan 7. Dinas Koperasi dan UMKM 8. Dinas Kominfo, Persandian dan Statistika 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10. Dinas Cipta Karya dan SDA 11. Dinas Kehutanan



No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-406	Perangkat Daerah
	masyarakat 9. Berani membangun lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan 10. Berani Inseminasi buatan untuk ternak 11. Berani KUR melalui pemberian modal usaha dengan bunga 0%	11. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 12. Program Penyuluhan Pertanian 13. Program Perizinan Usaha Pertanian 14. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 15. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 16. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara Minyak dan Gas Bumi 17. Program Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 18. Program Pengawasan Keamanan Pangan 19. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 20. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 21. Program Peningkatan Kerja Sama Desa 22. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 23. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 24. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 25. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 26. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	12. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 13. Dinas Lingkungan Hidup 14. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang



No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-406	Perangkat Daerah
		27. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 28. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 29. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 30. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 31. Pengelolaan Persampahan 32. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 33. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 34. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang terkait Dengan PPLH 35. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 36. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 37. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 38. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 39. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau	



No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-406	Perangkat Daerah
		Kerusakan Lingkungan Hidup 40. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 41. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 42. Program Pengelolaan Hutan	
7	Berani Berkah		
	Dengan program unggulan : 1. Sulteng Berjamaah, 2. Sulteng Mengaji; 3. Insentif bagi guru mengaji, marbot, pendeta/tokoh agama dan pemangku adat; 4. Penyetaraan status pesantren, madrasah dan sekolah keagamaan; 5. Perbaikan sarana prasarana keagamaan 6. Penguatan peran FKUB dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 3. Program Kesejahteraan Rakyat 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 6. Program Pembinaan Sejarah 7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 8. Program Pengelolaan Permuseuman	1. Badan Kesbangpol 2. Biro Kesejahteraan Rakyat 3. Dinas Kebudayaan
8	Berani Harmoni		
	1. Berani Wisata dengan Program Kunjungan Desa Wisata (Dewi) di Sulawesi Tengah melalui pariwisata partisipatoris, Seribu Megalith dan Geopark Poso, penetapan Kepulauan Togean Kabupaten Tojo Una Una sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional. Selain itu Berani Wisata juga	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja 2. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 3. Program Penempatan Tenaga Kerja 4. Program Hubungan Industrial 5. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Dinas Pemuda dan Olahraga 3. DP3A 4. DPMPTSP 5. Dinas Pariwisata 6. Dinas Koperasi dan UMKM 7. BRIDA 8. Dinas Kebudayaan



No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-406	Perangkat Daerah
	mengusung konsep pariwisata partisipatoris yaitu integrasi pelestarian bahasa daerah, tenun ikat bomba, dan potensi adat dan budaya Sulawesi Tengah melalui penyelenggaraan event-event Community-Based Tourism, mendorong pergerakan ekonomi melalui event/atraksi: mendorong <i>one company one event</i>; <i>one cabor one event</i>; <i>one community one event</i> 2. Berani Ekonomi Kreatif melalui Sulteng Creative Center (SCC); melakukan inkubasi UMKM dengan fokus peningkatan ekonomi masyarakat melalui keberlanjutan destinasi dan aktifitas ekonomi kreatif 3. Pembentukan Sulteng Creative Center serta penyusunan roadmap SCC, penyediaan infrastruktur bagi pelaku ekraf dan fasilitasnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan asset Provinsi 4. Berani 20.000 Wirausaha Baru menciptakan wirausaha baru yang mandiri dan berdaya saing terutama generasi muda 5. Berani Carier center melaksanakan bimbingan jabatan, Naker to campuss, Naker to school SMA dan SMK. 6. Berani Berbudaya; menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dalam	Kepemudaan 7. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 8. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 9. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 10. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 11. Program Promosi Penanaman Modal 12. Program Pelayanan Penanaman Modal 13. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 14. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 15. Program Kerja Sama Penanaman Modal 16. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 17. Program Pemasaran Pariwisata 18. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 19. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 20. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra 21. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 22. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 23. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	



No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-406	Perangkat Daerah
	Pemerintahan; Berani menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan religi pada kehidupan masyarakat 7. Berani Lestari: Berani menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal; Dalam menjaga kelestarian kebudayaan dan ekonomi kreatif 8. Berani Produktif dan Berekspresi: Berani mengembangkan dan memanfaatkan obyek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya Bernilai ekonomi 9. Berani Bumdes Sukses memfasilitasi Bumdes berbadan hukum melaksanakan pelatihan, penguatan bumdes, mengikuti bumdes dalam setiap event; melakukan revitalisasi kelembagaan Bumdes/Bumdes Bersama; peningkatan kualitas management atau penguatan organisasi Bumdes atau Bumdes Bersama; penguatan pengelolaan usaha Bumdes/Bumdes Bersama dan Unit usaha Bumdes/Bumdes 10. Berani berinvestasi mempermudah proses investasi dengan layanan cepat, transparan dan berbasis digital; memberikan kepastian hukum dan regulasi; menawarkan investasi	24. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 25. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 26. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 27. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 28. Program Riset dan Inovasi Daerah 29. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 30. Pengembangan Kebudayaan 31. Pengembangan Kesenian Tradisional	



No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-406	Perangkat Daerah
	menarik bagi investor; meningkatkan promosi, memberikan insentif kepada pelaku usaha, mengarahkan untuk investasi hijau dan investasi biru; membuat kajian investasi hijau dan investasi biru; 11. Berani bermitra dalam rangka mendukung UMKM untuk naik kelas serta dukungan pelaksanaan Koperasi Merah Putih 12. Pembangunan/peningkatan sarana prasarana olahraga dengan mendukung pembangunan stadion olahraga atau <i>sport center</i>		
9	Berani Berintegritas		
	1. Tim Gaspol (Gerakan Aksi Satset Pemerintah Optimal Layani Langsung) – <i>Call Center</i>, Siaga Laporan - <i>Command Center</i> 2. Implementasi Sistem Administrasi Layanan Publik Terintegrasi (Super Aps Si-Berani) dan peningkatan kualitas penerapan SPBE 3. Budaya kerja birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif (Berani) 4. <i>Co-Working Space</i> (CWS) bagi ASN Bantuan keuangan bagi pemerintah desa	1. Program Penataan Organisasi 2. Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 4. Program Pelayanan Penghubung 5. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 6. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 7. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 8. Program Perekonomian dan Pembangunan 9. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 10. Program Kesejahteraan Rakyat	1. Biro Organisasi 2. Biro Pengadaan Barang Dan Jasa 3. Seluruh Perangkat Daerah 4. Badan Penghubung 5. Biro Hukum 6. Sekretariat DPRD 7. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 8. Biro Administrasi Perekonomian 9. Biro Administrasi Pembangunan 10. Biro Kesejahteraan Rakyat 11. Dinas Komunikasi dan Informasi dan Persandian 12. Inspektorat Daerah 13. Bappeda 14. Badan Kepegawaian Daerah



No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-406	Perangkat Daerah
		11. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 12. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 13. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 14. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 15. Program Kepegawaian Daerah 16. Program Pengelolaan Arsip 17. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 18. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 19. Program Riset dan Inovasi Daerah 20. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 21. Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 16. Badan Riset Dan Inovasi Daerah 17. BPKAD 18. Satuan Polisi Pamong Praja 19. Seluruh Perangkat Daerah

Visi, Misi dan Program Prioritas Sesuai RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana di atas di dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan dan Isu Strategis Sulawesi Tengah yang teridentifikasi mencakup hal-hal antara lain:

1) **Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing**

Upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas mutlak diperlukan. Transformasi sosial yang dititik beratkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi social bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, resilien, unggul, dan berdaya saing. Masih terdapat



sejumlah tantangan Pembangunan bidang kesehatan, antara lain: (a) masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, baik kesehatan ibu dan anak, usia sekolah, usia produktif maupun lansia, (b) pengendalian penyakit dan kapasitas ketahanan kesehatan juga belum optimal, (c) penyakit menular masih tinggi, (d) penyakit tropis terabaikan belum dapat dieliminasi, (e) adanya ancaman penyakit berpotensi wabah/kejadian luar biasa, dan perilaku hidup sehat belum membudaya, (f) disparitas kapasitas sistem kesehatan terjadi di seluruh wilayah yang menyebabkan permasalahan pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.

Sementara dibidang pendidikan juga masih terdapat sejumlah tantangan dibidang pendidikan, diantaranya: (a) belum meratanya akses pendidikan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi, (b) kualitas pendidikan masih relatif rendah yang disebabkan oleh sarana prasarana pendidikan yang belum memadai, (c) keterbatasan dan distribusi guru yang berkualitas belum sepenuhnya merata, (d) produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global juga masih rendah.

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Tantangan ini dapat dilihat dari adanya sejumlah indikator sebagai berikut: (a) akses Pendidikan belum merata, (b) Kualitas pendidikan masih rendah, (c) proporsi PTK bersertifikat masih kurang, (d) proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi masih rendah.

Sementara dibidang perlindungan sosial juga masih terdapat sejumlah tantangan perlindungan sosial. Perlindungan sosial berfokus pada percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga kesinambungan kesejahteraan, khususnya untuk penduduk





rentan. Sejumlah tantangan yang dihadapi antara lain: (a) masih rendahnya akurasi dan integrasi program bantuan sosial, (b) risiko bencana alam dan non alam, (c) perubahan iklim, (d) terbatasnya layanan dan pengasuhan bagi kelompok rentan, (e) belum meratanya kesempatan kerja dan berusaha bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, serta (f) rendahnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, (g) penyelenggaraan program jaminan sosial belum optimal akibat kepesertaan aktif dan (h) literasi masyarakat serta program yang belum sepenuhnya konvergen memberikan perlindungan yang inklusif khususnya bagi pekerja informal dan jaminan hari tua bagi seluruh penduduk.

Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Sejumlah tantangan yang masih dihadapi antara lain: (a) akurasi program bantuan sosial masih rendah, (b) ancaman bencana dan dampak perubahan iklim, (c) kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, (d) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah, (e) belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan dan (f) program jaminan sosial belum optimal dan inklusif.

Sejumlah **tantangan di bidang Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif** difokuskan pada upaya untuk mendorong kemampuan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, saling mendukung, dan memiliki komunikasi yang baik, memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi pada masyarakat, serta menekankan pada upaya kesetaraan hak, kesempatan, dan partisipasi penuh bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Untuk



mewujudkan hal tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi antara lain: (a) Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda, (b) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia belum optimal, (c) Ketimpangan gender yang masih tinggi, dan (d) Kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi sulit terwujud.

Pembangunan kebudayaan merupakan upaya untuk menjaga, mengembangkan, dan mempromosikan nilai-nilai, tradisi, dan praktik budaya suatu masyarakat, dengan tujuan untuk memperkuat identitas, warisan, dan karakter bangsa, serta mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi berbasis budaya. Dalam mewujudkan pembangunan kebudayaan tersebut sejumlah isu yang menjadi tantangan antara lain: (a) karakter dan jati diri bangsa menghadapi ancaman negative budaya global, (b) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (c) kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat, yang ditandai dengan masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan.

2) Rendahnya Daya Saing Sektor Pertanian, (Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan Perikanan), Pariwisata dan Pertambangan

Pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah jangka menengah dalam rangka menuju Provinsi dengan pendapatan tinggi dan mengejar pertumbuhan berbasis produktivitas akan menghadapi berbagai isu dan tantangan struktural. Industrialisasi belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Upaya pengembangan sektor industri pengolahan dihadapkan pada berbagai isu strategis, baik dari sisi





penawaran (*supply*) seperti inefisiensi faktor produksi, kompleksitas dan nilai tambah produk yang masih rendah, struktur industri yang belum kuat, serta kemampuan adopsi teknologi, pemanfaatan RD&D (*Research, Development, and Demonstration*) dan penerapan standarisasi yang masih terbatas atau pun dari sisi permintaan (*demand*). Rendahnya produktivitas tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi tantangan besar dalam memperluas kelas pendapatan tinggi karena sebagian besar angkatan kerja Sulawesi Tengah berpendidikan menengah ke bawah dan bekerja di sektor bernilai tambah rendah. Akibatnya, laju peningkatan nilai tambah di beberapa sub sektor industri padat karya pun relatif terbatas. Hal tersebut terjadi juga di sektor pertanian, (Sub sektor Tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan Perikanan), Pariwisata dan Pertambangan bahkan penyerapan tenaga kerja berpendidikan menengah ke bawah pada sektor pertanian relatif tinggi. Selain itu, sektor tersebut masih memiliki tantangan untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas. Hal ini disebabkan antara lain adalah disebabkan karena dukungan pendanaan untuk mendukung peningkatan produktivitas khususnya benih, pupuk dan alsintan yang seyogyanya sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Pusat tidak *in-line* dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Sulawesi Tengah. Selain hal tersebut disebabkan oleh rendahnya adopsi teknologi, lambatnya regenerasi petani serta degradasi kualitas lahan. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga dihadapkan pada pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang belum berkualitas karena SDM, dukungan fasilitas, serta sarana dan prasarana yang terbatas. Sektor UMKM dan koperasi masih terkendala dalam meningkatkan kapasitasnya, terutama dari sisi permodalan dan adopsi teknologi sehingga menghambat UMKM dan koperasi untuk naik kelas. BUMN sebagai agen pembangunan masih bersifat eksklusif dalam melaksanakan penugasan pembangunan. Diharapkan BUMN





dan UMKM dapat bersinergi dalam mendukung pembangunan sehingga dapat lebih berdampak, inklusif, dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang diharapkan dapat mendorong Indonesia berperan di pasar global dihadapkan pada berbagai isu antara lain masih belum optimalnya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, terbatasnya pasar bagi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia domestik maupun global, masih rendahnya pemanfaatan keuangan syariah dalam mendukung perekonomian, serta regulasi dan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah baik pusat maupun daerah yang belum optimal. Upaya pembangunan berkelanjutan melalui transisi energi perlu diakselerasi utamanya pada isu ketergantungan pada energi fosil dan rendahnya pemanfaatan potensi energi terbarukan, emisi GRK pada sektor pembangkit dan transportasi yang sangat tinggi, keterbatasan dukungan pendanaan dan investasi, keterbatasan infrastruktur kelistrikan, serta keterbatasan infrastruktur gas bumi untuk sektor industri. Pendekatan ekonomi hijau dan biru belum mencapai posisi yang kuat. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya karena membutuhkan biaya dan teknologi tinggi untuk implementasinya. Percepatan digitalisasi dihadapkan pada tantangan keberagaman geografi dan karakteristik daerah yang berbeda sehingga pelaksanaannya masih perlu terus didorong secara kolaboratif. Kesenjangan dan karakteristik antar daerah dan wilayah yang berbeda juga menyebabkan pengintegrasian ekonomi domestik masih perlu intervensi lebih jauh untuk optimalisasinya. Selain itu, rendahnya akses hunian layak dan layanan perkotaan yang menimbulkan permukiman kumuh dan urban sprawl berdampak pada belum optimalnya kualitas urbanisasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Disamping masih juga terdapat ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan.





Sulawesi Tengah memiliki beberapa komoditas unggulan daerah dari sektor pertanian dan pertambangan seperti: padi, kakao, kelapa dalam, sapi potong, nikel, gas alam, ikan tuna dan rumput laut. Sampai saat ini, tingkat produktivitas sektor unggulan daerah masih berada dalam kategori rendah karena nilai tambah produk yang belum memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat Sulawesi Tengah, meskipun persentase tenaga kerja dan profesi di sektor petani, pekebun, penambang dan nelayan memiliki persentase terbesar dibandingkan profesi lainnya.

Rendahnya tingkat produktivitas sektor unggulan daerah lebih disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (a) proporsi tenaga kerja yang besar di sektor pertanian cenderung memiliki tingkat pengetahuan dan keahlian yang rendah sehingga akses terhadap kemampuan pengelolaan dan aksesibilitas terhadap faktor produksi terutama lahan; (b) peralatan dan modal sangat minim menyebabkan tingkat pengembalian dari keuntungan usaha akan menjadi rendah menyebabkan kecenderungan penduduk pada profesi sektor-sektor unggulan memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Oleh karena itu, komoditas sektor unggulan harus memiliki kriteria tertentu dan memiliki daya saing sehingga dapat menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah, diantaranya yaitu (a) komoditas unggulan harus mampu menjadi motor penggerak utama Pembangunan perekonomian, yakni dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran; (b) komoditas unggulan mempunyai keterkaitan dari hulu sampai hilir dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya; (c) seharusnya komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-



aspek lainnya; (d) komoditas unggulan memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi; dan (f) arah pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan.

Jika dilihat dari struktur PDRB Provinsi Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha pada Tahun 2024, maka Sektor pertanian, perikanan dan kelautan memberikan andil yang cukup besar yaitu 15,80 persen yang menempati posisi kedua dari sektor industri pengolahan sebesar 41,18 persen (BPS Sulteng, 2025).

Sampai saat ini, sektor pertambangan dan penggalian, khususnya nikel dan gas bumi terus mendominasi, sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan produktivitas tanaman pertanian dan hasil tangkap perikanan untuk kesejahteraan para petani dan nelayan. Langkah kedepannya yaitu memajukan sektor pertanian seperti pemanfaatan sumber daya pertanian (modal, teknologi, pasar, informasi, lahan, alsintan) secara optimal, pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian, pembinaan skill dan talenta petani millennial serta sektor perikanan dan kelautan, seperti peningkatan hasil tangkap laut melalui sarana dan prasarana (kapal ikan, alat tangkap, *smart fishing*) yang modern, teknologi budidaya perikanan dan konservasi habitat-habitat pesisir yang berkelanjutan. Hal tersebut merupakan hal yang terpenting dalam upaya percepatan kesejahteraan petani dan nelayan juga masyarakat secara luas dan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai daerah tujuan dalam berinvestasi.

Sulawesi Tengah memiliki keanekaragaman wisata yang meliputi wisata Bahari, wisata alam serta wisata budaya yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Isu strategis kedepannya yaitu bagaimana meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan ekonomi daerah melalui nilai tambah pariwisata yang saling terkait satu sama lainnya. Kondisi saat





ini, pariwisata yang ditawarkan belum memiliki hubungan obyek wisata yang saling terkait dan mendukung antara satu dengan lainnya, misalnya wisata bahari yang ditawarkan belum dilengkapi dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti: bandara dan pelabuhan yang memadai, hotel dan *cottage*, *restaurant* dan kuliner lokal serta aksesibilitas jalan yang memadai.

Kondisi obyek wisata yang tidak berdiri sendiri atau wisata yang dapat menggerakkan pusat-pusat perekonomian lainnya maka akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lainnya. Sudah saatnya, pariwisata Sulawesi Tengah mempromosikan paket wisata bernilai tambah. Sulawesi Tengah tidak hanya sekedar melakukan strategi *business as usual* atau hanya menjadi *trend followers* tetapi keanekaragaman budaya, bahasa, kuliner, dan alam yang dimiliki dapat mengantarkan Sulawesi Tengah menjadi pusat pariwisata nasional bahkan dunia.

Isu pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Tengah harus diikuti dengan kegiatan mempertahankan kualitas lingkungan (*carrying capacity*), meningkatkan kualitas tata kelola destinasi, meningkatkan pelayanan pariwisata yang prima, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, membuka aksesibilitas udara, darat, dan laut, membuka peluang investasi sektor pariwisata, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana khususnya di daerah-daerah wisata.

Upaya peningkatan pembangunan pariwisata yang berkualitas ditunjukkan dengan peningkatan nilai tambah yang dapat diterima oleh Sulawesi Tengah atau masyarakat setempat, peningkatan nilai devisa melalui peningkatan lama tinggal dan belanja para wisatawan, peningkatan kualitas destinasi, kesiapan industri dan masyarakat, serta kapasitas sumber daya manusia pariwisata. Penerimaan nilai tambah dipersiapkan dengan peningkatan daya saing dan membangun ketahanan sektor pariwisata, termasuk melalui



diversifikasi aktivitas ekonomi dalam rantai pasok pariwisata, perbaikan lingkungan usaha mikro, kecil, dan menengah yang kondusif dan berkesinambungan serta pembangunan citra pariwisata Sulawesi Tengah yang berkualitas. Dalam pengembangan pariwisata, maka dukungan ekonomi kreatif sangat diperlukan dan dalam pengembangan pariwisata tetapi dalam pengelolaanya masih terdapat hal hal berikut ini :

1. Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal.
 - Indeks Kekayaan Intelektual Indonesia berada pada posisi 50 dari 55 negara, di bawah rata-rata nilai Indeks di Asia (2023).
 - Merujuk data yang sama pilar komersialisasi KI menjadi skor terendah dengan 2,5 skala 100.
2. Ketersediaan data ekonomi kreatif yang sangat terbatas, sedangkan peranan data sangat penting untuk menyusun kebijakan.
3. Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual.
4. Daya saing SDM ekonomi kreatif yang rendah, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual.
5. Rantai pasok ekonomi kreatif yang belum optimal.

Selain hal tersebut di atas, sektor pariwisata perlu di dukung oleh UMKM. Dalam pengembangan UMKM masih terdapat permasalahan yaitu:

1. Rendahnya kontribusi dan jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.
2. Rendahnya pemanfaatan riset dan adopsi teknologi pada UMKM.
3. Belum optimalnya akses UMKM terhadap pembiayaan dan pemasaran.
4. Rendahnya wirausaha yang berorientasi untuk berkembang atau naik kelas





Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah sangat tinggi selama kurun beberapa Tahun terakhir, bahkan berada di atas rata-rata nasional, namun masih bersifat eksklusif karena belum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat.

Pembangunan ekonomi dengan 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi PDRB tinggi yaitu (i) Industri Pengolahan; (ii) Pertanian; (iii) Pertambangan dan Penggalian; (iv) Konstruksi dan (v) Perdagangan Besar dan Eceran belum memberikan dampak positif terhadap pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan fiskal daerah. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah belum bisa dimanfaatkan secara optimal dan belum memberikan dampak besar kepada kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pembangunan Ekonomi terdapat pembangunan ekonomi Biru yang perlu mendapatkan perhatian yang disebabkan oleh :

1. Upaya konservasi kawasan perairan dan pesisir belum maksimal.
2. Rendahnya produktivitas, nilai tambah, daya saing ekonomi biru yang tercermin pada rendahnya kontribusi PDB maritim terhadap PDRB Provinsi.
3. Rendahnya Kualitas, Keterjangkauan, dan Keamanan Pangan Akuatik/Pangan Biru.
4. Rendahnya jumlah dan kualitas riset, penggunaan teknologi, inovasi, ketersediaan data dan informasi terkait kemaritiman dan perairan darat.
5. Kurangnya pendanaan dan tata kelola pada sektor-sektor penghasil barang penghasil jasa, dan upaya konservasi di kawasan perairan dan pesisir.

3) Tata Kelola Pemerintahan

Aksesibilitas Transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas diarahkan pada peningkatan tata kelola ASN dengan





meningkatkan kualitas SDM ASN sertamenerapkan sistem merit dan manajemen talenta ASN. Sementara itu dilakukan peningkatan kualitas layanan publik terpadu (fisik dan non fisik) yang inklusif berbasis digital. Pemerintahan yang efektif dan efisien akan dilaksanakan berbasis digital dan inovatif yang didukung oleh penguatan implemementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh Perangkat Daerah, peningkatan Integritas ASN, penguatan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah untuk kemandirian fiskal berbasis elektronik serta penataan kelembagaan daerah menuju organisasi pemerintahan yang modern, adaptif dan profesional. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada upaya penguatan budaya kepatuhan hukum guna terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil untuk terwujudnya *Open Government Partnership*. Stabilitas ekonomi daerah bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan meningkatkan peran sektor keuangan dalam mendorong aktivitas pembangunan, serta stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat. Serta meningkatkan investasi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan bidang tata kelola pemerintahan yaitu menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Tengah dimana integritas partai politik belum terwujud karena standar etika belum ada, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi belum terlembaga, rekrutmen politik belum terbuka, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan belum optimal, disamping biaya politik tinggi dan pendanaan dari negara yang belum memadai. Selain hal tersebut di atas **masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik** dimana belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat





serta belum memadainya kompetensi digital penyelenggara dan pengguna pelayanan publik. Selain hal tersebut masih lamahnya kontrol dalam pencegahan disektor sektor rawan korupsi serta rendahnya budaya anti korupsi yang akhirnya mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Belum adanya sistem penilaian Perangkat Daerah/lembaga/daerah terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran, dan integritas. Belum optimalnya peran APIP untuk dapat memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan peningkatan manajemen risiko. Kondisi hiper regulasi, kewenangan pengelolaan regulasi yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah, belum memadainya SDM di bidang regulasi, dan partisipasi pembentukan regulasi yang belum optimal.

Isu-isu tata kelola pemerintahan yang berfokus pada tata Kelola pemerintahan yang baik yaitu berupaya optimal untuk mewujudkan aspek-aspek pembentuk zona integritas. Aspek-aspek tersebut meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Reformasi Birokrasi sebagai langkah awal dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang berkualitas. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih berdaya guna dalam melaksanakan pembangunan daerah. Birokrasi pemerintah daerah dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Olehnya itu untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, diperlukan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa





berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif seharusnya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Namun untuk konteks daerah masalah pelayanan publik sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Hal tersebut di atas, mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Pelayanan yang berbelit-belit, in-efisiensi, lambat, tidak ramah serta tidak jelasnya waktu penyelesaian dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan indikasi bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah daerah masih rendah dan pelayanan publik belum berkualitas.

Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkannya prinsip *good governance* dan komunikasi birokrasi.

Kedepannya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tantangan tentang hal ini, dikarenakan tuntutan profesionalitas ASN yang tepat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Di kondisi saat ini, tata kelola pemerintahan perlu dibenahi lagi untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Perkembangan kehidupan masyarakat di masa mendatang ditunjukkan dengan semakin cepatnya perubahan dalam segala bidang kehidupan, semua itu diakibatkan efek globalisasi serta



perkembangan teknologi informasi yang sangatakseleratif. Negara-negara dengan tingkat kapabilitas teknologi informasi yang tinggakan memiliki daya inovasi dan daya saing yang sangat besar yang sanggup menentukan arah perkembangan ekonomi dalam skala global.

4) Konduvisitas Daerah dan Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro masih menghadapi tantangan dalam 5 Tahun ke depan. Secara eksternal, perlambatan kinerja ekonomi mitra dagang utama, divergensi ekonomi global, tekanan dari sisi domestik, rendahnya penerimaan perpajakan, belum optimalnya kualitas belanja negara baik belanja pemerintah pusat maupun belanja transfer ke daerah. Terakhir, dangkalnya pendalaman sektor keuangan, belum optimalnya fungsi intermediasi sektor keuangan, terbatasnya peran sektor keuangan non bank, ketimpangan inklusi dan literasi keuangan, belum optimalnya pengembangan keuangan syariah, dan lemahnya perlindungan konsumen/investor menjadi tantangan bagi sektor keuangan dalam menyediakan likuiditas yang memadai untuk pembiayaan pembangunan. Selain hal tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yaitu **Integrasi Ekonomi Domestik dan Global** yaitu keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas: infrastruktur konektivitas belum memadai dan belum terintegrasi, kinerja sistem logistik nasional belum optimal, pembangunan wilayah tidak merata, ketimpangan pembangunan antar daerah dan kebutuhan pendekatan.

Perdagangan domestik, antar wilayah, dan ekspor serta partisipasi dalam rantai nilai global masih belum optimal *supply side*: masih rendahnya daya saing ekspor domestik, masih belum terintegrasinya fasilitasi dan informasi terkait perdagangan, keterbatasan informasi dalam mengakses data sektor perdagangan jasa, masih belum optimalnya ekosistem persaingan usaha, daya saing produk sektor jasa yang masih rendah, minat pelaku industri sektor jasa yang masih rendah untuk masuk ke dalam pasar global,



adanya kebijakan dekarbonisasi (decarbonization policies) di beberapa negara. tantangan lainnya belum optimalnya penguatan investasi untuk integrasi dan konektivitas ekonomi domestik: infrastruktur yang belum memadai menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, kekurangan pembiayaan, terutama dengan sumber daya keuangan terbatas, perlunya pasar yang kuat untuk mendukung investasi, biaya tinggi dan hambatan dalam menarik investasi daya dukung tercapainya integrasi ekonomi domestik dan konektivitas domestik perlu diperkuat, masih terdapat regulasi yang menghambat perbaikan iklim berusaha, terbatasnya investasi produktif dan berkualitas yang mendukung upaya transformasi ekonomi, tumpang tindih peraturan dan birokrasi yang menghambat pembangunan infrastruktur, koordinasi cermat diperlukan dalam integrasi modal transportasi, perlunya penguatan pondasi dalam percepatan transformasi digital, belum meratanya infrastruktur konektivitas digital dan komputasi yang berkualitas, penguatan pengelolaan ekosistem infrastruktur, termasuk tata kelola dan regulasi, belum optimalnya adopsi perkembangan perangkat teknologi infrastruktur digital dan infrastruktur penyiaran, terdapat layanan pendidikan dan kesehatan belum berinternet, penguatan pemerintah digital (SPBE dan SDI), adopsi digital bagi pelaku umkm belum optimal dan inovasi dan pengembangan keuangan digital (*FinTech*).

5) Potensi Bencana Daerah yang Cukup Tinggi dan Ancaman Degradasi Lingkungan

Pembangunan Seiring dengan meningkatnya populasi, maka dihadapkan pada isu penurunan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati dan ketersediaan sumber daya alam. Konversi lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan telah mengurangi fungsi lingkungan hutan. Petani dan nelayan yang merupakan produsen pangan menghadapi masalah serius berupa stagnasi kesejahteraan. Saat ini, Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Tengah



berupaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan intensitasnya di lima sektor kunci, yakni energi, lahan, kelautan dan pesisir, industri, dan pengelolaan limbah. Pada sektor energi, pemenuhan ketahanan energi masih menghadapi tantangan dalam segi penyediaan, akses, maupun harga. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dari aspek pendanaan, regulasi, inovasi, hingga kelembagaan diharapkan dapat menggantikan peran energi fosil. Dampak seiring dengan meningkatnya populasi, Indonesia dihadapkan pada isu penurunan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan sumber daya alam. Konversi lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan telah mengurangi fungsi lingkungan hutan. Petanidan nelayan yang merupakan produsen pangan menghadapi masalah serius perubahan iklim berpotensi meningkatkan kerugian ekonomi, kerentanan masyarakat, dan intensitas bencana lingkungan.

6) Disparitas Pembangunan Antar Wilayah

Kehidupan Disparitas wilayah menjadi fokus dan prioritas pembangunan daerah. Isu disparitas wilayah ini merujuk pada ketidakseimbangan dalam pembangunan dan kesejahteraan antar berbagai daerah dalam suatu wilayah, baik itu antar kabupaten/kota, maupun antar daerah perkotaan dan perdesaan. Disparitas ini mencerminkan perbedaan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, kependudukan dan fisik.

Pembangunan kewilayahan yang didukung sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan pemenuhan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan Peningkatan sarana dan prasaran sumber daya air pemerataan Pembangunan antar wilayah, ini diperkuat upaya optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dengan penguatan kerja sama antar daerah, penuntasan RDTR kabupaten/kota, serta peningkatan infrastruktur pelayanan dasar.





Aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Sulawesi Tengah masih menjadi salah satu isu strategis. Kondisi geografis Sulawesi Tengah berupa kepulauan, perbukitan, pedalaman dan hutan membuat sulit dalam penataan aksesibilitas dan konektivitas atau jaringan penghubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Aksesibilitas yang rendah menyebabkan sulitnya suatu daerah untuk dijangkau sehingga terjadi perlambatan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, muncul berbagai permasalahan klasik yang ditemui daerah dan masyarakat, seperti tingginya daerah rawan pangan, harga barang-barang pokok tinggi, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang tidak maksimal, kemampuan digitalisasi rendah, pembangunan tidak merata serta kondisi keamanan daerah yang rentan terhadap ancaman. Demikian juga dengan konektivitas yang rendah akan menyebabkan pemerataan pembangunan yang tidak merata karena terhambat pada terbatasnya tata kelola jaringan penghubung antara wilayah-wilayah yang minus ekonomi dengan sentra-sentra produksi atau pusat-pusat ekonomi.

Penguatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan maka diperlukan tercapainya kondisi aksesibilitas dan konektivitas yang ideal sehingga dapat mendukung perkembangan wilayah dan pemerataan pembangunan dapat tercapai.

Pengembangan wilayah pedesaan di Sulawesi Tengah masih memerlukan dukungan aksesibilitas yaitu kemudahan atau keterjangkauan oleh wilayah lain atau keterjangkauan pedesaan terhadap wilayah sekitarnya. Jika aksesibilitas terbangun maka akan membuka peluang besar untuk potensi pengembangan wilayahnya. Adapun konektivitas dapat diartikan sebagai keberadaan aksesibilitas yang mampu mempermudah jangkauan antar wilayah yang berarti akses terhadap keanekaragaman informasi yang tersedia dalam skala





global yang mendukung pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah.

Upaya yang hendak dilakukan dalam rangka isu strategis tersebut, yaitu: pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (*inclusive development*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui *inter-moda supply chain system* yang menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan serta ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

Ketersediaan infrastruktur dan literasi (kemampuan penguasaan) digital di Sulawesi Tengah, masih minim dikarenakan masih banyaknya daerah di Kabupaten/Kota yang masih ber status ‘*blank spot*’. Hal yang paling prioritas yaitu tersedianya infrastruktur digital yang menjangkau hingga daerah-daerah pedesaan di kepulauan, pegunungan, pedalaman dan area hutan. Biaya pengadaan infrastruktur adalah tergolong mahal sehingga diperlukan langkah awal berupa perencanaan yang baik, terarah dan terukur.

Literasi digital sangat penting dalam era digital saat ini dan di kemudian hari karena teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan menjadi alat yang penting dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Kemampuan literasi digital yang baik akan membantu seseorang untuk beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus dalam dunia teknologi dan meningkatkan kesempatan untuk sukses dalam bidang yang terkait dengan TIK.

Saat ini, isu infrastruktur dan digital di Sulawesi Tengah dikategorikan minim karena masih kurangnya akses ke perangkat teknologi dan kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan





teknologi terutama bagi kaum milenial. Selain itu, masih banyak masyarakat yang kurang memahami manfaat dan cara menggunakan teknologi digital, sehingga tidak tertarik untuk meningkatkan kemampuan. Pemanfaatan teknologi informasi teknologi juga belum sepenuhnya, seperti rendahnya kemampuan masyarakat untuk terhindar dari korban penipuan dan berita hoaks di platform daring yang tidak terlepas dari masih rendahnya literasi keamanan digital warga sehingga diperlukan upaya lebih masif untuk meningkatkannya. Pihak pemerintah daerah, pihak swasta dan mitra pembangunan melakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi digital di Sulawesi Tengah melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, namun masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Selain hal tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yaitu dimana **perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masih** belum optimal dalam memberikan kontribusi ekonomi. disebabkan potensi ekonomi perkotaan yang belum teroptimalisasi secara maksimal, pertumbuhan ekonomi perkotaan yang belum berkontribusi pada kawasan sekitar, pola pembangunan perkotaan yang tersebar, penggunaan lahan perkotaan yang belum efisien, pengendalian pemanfaatan ruang yang belum, terlaksana secara efektif. Pemenuhan layanan perkotaan yang belum memadai dan inklusif ketersediaan rumah layak huni terjangkau belum memadai dimana pemenuhan layanan air minum dan akses, sanitasi layak terjangkau belum merata Pengelolaan dan penanganan sampah belum berkelanjutan, Rendahnya ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur dan jaringan aksesibilitas kawasan perkotaan, rendahnya penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan, sarana pendidikan dan kesehatan belum memadai dan merata. Masalah sosial-ekonomi masyarakat perkotaan: rendahnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja penduduk perkotaan, penanganan sektor ekonomi informal perkotaan yang belum optimal, tingkat





kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih tinggi, tingkat kriminalitas yang tinggi di perkotaan. Degradasi lingkungan perkotaan dan rendahnya ketangguhan bencana: tingkat pencemaran lingkungan perkotaan yang tinggi, risiko bencana alam dan nonalam yang tinggi di perkotaan, tata kelola yang belum terpadu, inovatif, dan kolaboratif. Belum adanya regulasi yang khusus mengatur perkotaan secara terpadu: belum sinkronnya kebijakan pembangunan perkotaan antar lembaga sektoral dan antar pusat daerah, belum lengkapnya ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang di daerah, rendahnya pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan alternatif perkotaan, rendahnya kapasitas fiskal daerah dan rendahnya kualitas belanja daerah, belum optimalnya digitalisasi pelayanan publik, belum terintegrasi dan belum memenuhinya standar data perkotaan dengan data lainnya.

7) Dukungan Sarana dan Prasarana Dasar

Peningkatan sarana dan prasarana dan utilitas umum serta rumah layak huni yang terjangkau dan pengentasan kawasan kumuh dan peningkatan layanan air minum dan sanitasi aman pada tahap ini juga diarahkan pada peningkatan pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (infrastruktur dasar termasuk listrik, air bersih dan air layak minum, sanitasi aman persampahan, perumahan dan telekomunikasi terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber pendanaan inovatif berbasis lingkungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; meningkatkan pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi; pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain hal tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yaitu **percepatan transisi energi masih**





mengalami kendala diakibatkan ketergantungan terhadap energi fosil, emisi GRK sektor energi yang cukup tinggi terutama sektor pembangkit dan transportasi potensi energi terbarukan yang sangat besar dan pemanfaatan masih sangat kecil kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang belum memadai, keterbatasan dukungan pendanaan transisi energi, pemanfaatan energi baru yang belum berkembang, dominasi pembangkit listrik berbasis fosil dan keterbatasan sistem penyaluran, ketimpangan dan rendahnya kualitas pelayanan ketenagalistrikan ketergantungan pada produksi impor, belum optimalnya tata kelola ketenagalistrikan termasuk kebijakan tarif dan harga, Terbatasnya rantai nilai domestik pendukung transisi energi, Keterbatasan untuk adopsi dan adaptasi perkembangan teknologi (termasuk digitalisasi).

8) Inovasi Pembiayaan Pembangunan dalam Mendukung Kesenambungan

Kesenambungan pembangunan, diarahkan pada upaya peningkatan inovasi pembiayaan daerah melalui mitra pembangunan untuk percepatan dan kesinambungan pembangunan keberlanjutan kapasitas fiskal daerah yang adaptif serta sumber pembiayaan alternatif.

2.3.2.5 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029

Dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud menjadi





pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.

KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJMD. Analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berupa analisis capaian indikator pada setiap tujuan pilar pembangunan. Metode perhitungan dan analisis capaian TPB dilakukan berdasarkan amanah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dokumen meta data indikator 4 pilar tujuan pembangunan berkelanjutan dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018.

Hasil kajian TPB KLHS RPJMD menjadi kewenangan provinsi adalah sebanyak 220 indikator TPB. Hasil capaian monitoring dan evaluasi tim pembuat KLHS RPJMD Kabupaten Banggai, bahwa rincian TPB Tahun 2024 memiliki jumlah indikator yang relevan dengan kondisi Kabupaten Banggai sebanyak 208 indikator TPB. Jumlah indikator TPB tersebut berbeda dengan hasil penilaian KLHS RPJPD Kabupaten Banggai sebanyak 213 indikator. Berdasarkan hasil penilaian tim pembuat KLHS RPJMD Kabupaten Banggai adanya 5 indikator pada KLHS RPJPD berstatus tidak memiliki data menjadi indikator yang tidak relevan dengan kondisi Kabupaten Banggai, sehingga terdapat total 12 indikator yang tidak relevan dengan kondisi Kabupaten Banggai





Gambar 2.78

Gambaran Umum Capaian TPN di Kabupaten Banggai Tahun 2024



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai 2024

Berdasarkan Gambar 2.78 di atas, kinerja pencapaian TPB Kabupaten Banggai diindikasikan dengan pencapaian atas target masing-masing indikator dalam setiap tujuan. Pencapaian tersebut dibagi ke dalam empat kategori yakni mencapai target nasional (berlabel HIJAU), belum mencapai target nasional (berlabel BIRU), serta memerlukan perhatian khusus yakni belum dilaksanakan (berlabel Orange) dan indikator yang belum memiliki data (berlabel MERAH). Hasil capaian indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional yaitu sebesar 64% atau 133 indikator, indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional yaitu sebesar 22% atau 45 indikator, sementara indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebesar 2% atau 4 indikator dan yang perlu menjadi perhatian khusus adalah



indikator yang belum memiliki data yaitu sebesar 12% atau 26 indikator.

Berdasarkan Tabel 2.50 TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) sebesar 133 indikator, TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB) sebesar 45 indikator, TPB yang belum/tidak mempunyai data sebesar 26 indikator dan TPB yang belum dilaksanakan dan belum tercapai sebesar 4 indikator. Hal ini menunjukkan pemerintah Kabupaten Banggai masih belum maksimal dalam upaya memenuhi target TPB, sehingga masih sangat diperlukan usaha dalam upaya mencapai dan memenuhi target pada TPB yang belum dilaksanakan dan belum tercapai target dan TPB yang belum/tidak mempunyai data.

Tabel 2.50
Rekapitulasi Capaian Indikator TPB di Kabupaten Banggai
Tahun 2024

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Capaian TPB				Jumlah
	SS	SB	NA	BB	
1. Tanpa Kemiskinan	13	8	3		24
2. Tanpa Kelaparan	6	4	1		11
3. Kehidupan Sehat & Sejahtera	25	6	3		34
4. Pendidikan Berkualitas	7	4	2		13
5. Kesenjaraan Gender	11	3			14
6. Air Bersih & Sanitasi Layak	8	5		4	17
7. Energi Bersih & Terjangkau		1			1
8. Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	10	6	3		19
9. Industri, Inovasi, & Infrastruktur	8		3		11
10. Berkurangnya Kesenjaraan	7	2	2		11
11. Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan	5	1	2		8
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	3				3
13. Penanganan Perubahan Iklim	2				2
15. Ekosistem Daratan	3	1			4
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	15	2	5		22
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	10	2	2		14
Total Jumlah Indikator TPB	133	45	26	4	208

Sumber: Tim Pembuat KLHS, Tahun 2024

Keterangan:

SS = Sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional

SB = Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional

BB = Belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional

NA = Tidak memiliki data



Gambaran hasil analisis capaian indikator TPB Kabupaten Banggai berdasarkan Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

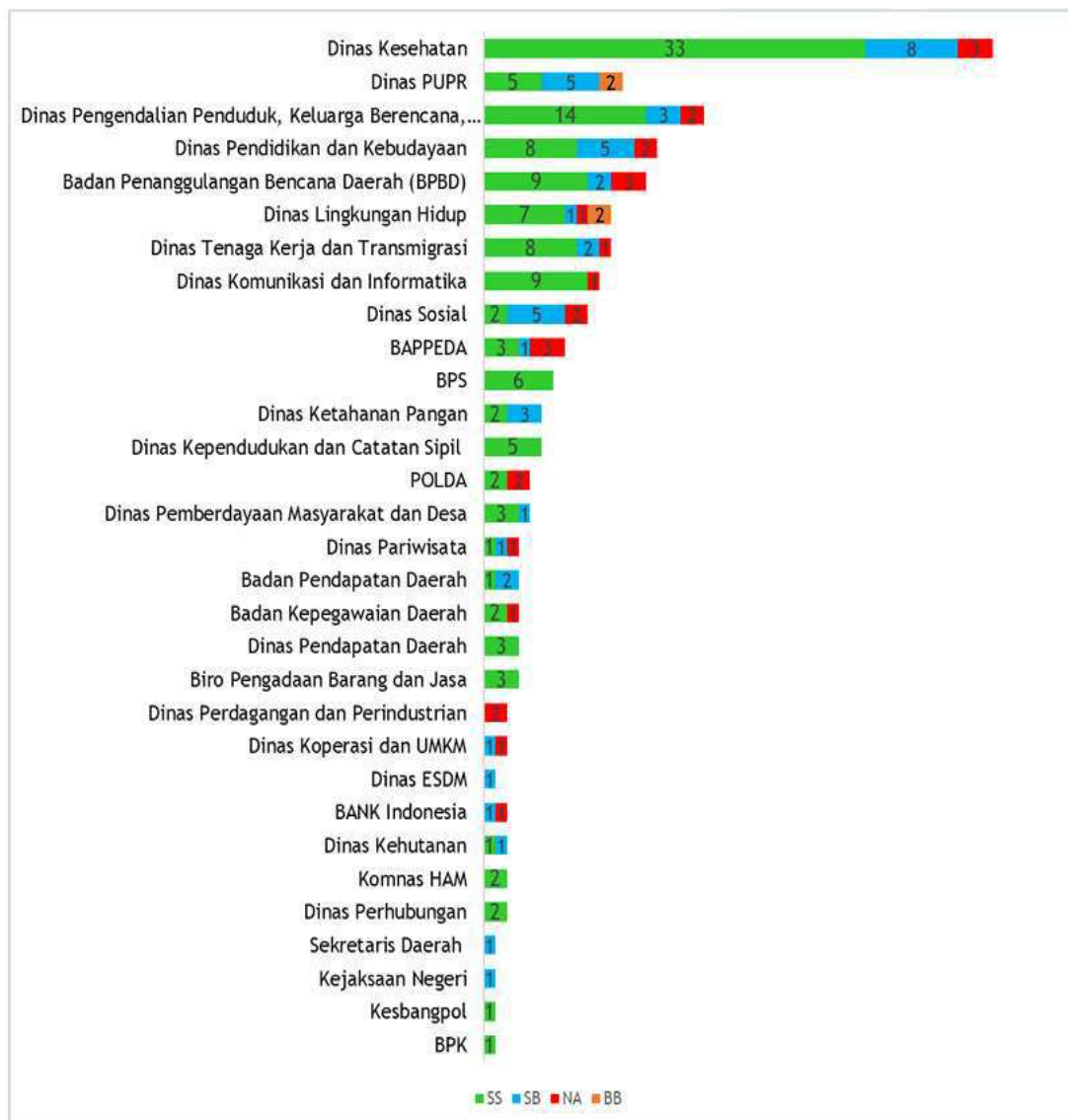
Tabel 2.51
Rekapitulasi Capaian Indikator TPB pada Perangkat Daerah
Kabupaten Banggai

Perangkat Daerah	SS	SB	NA	BB	Total
BPK	1				1
Badan Kesbangpol	1				1
Kejaksaan Negeri		1			1
Sekretaris Daerah		1			1
Dinas Perhubungan	2				2
Komnas HAM	2				2
Dinas Kehutanan	1	1			2
BANK Indonesia		1	1		2
Dinas ESDM		1			1
Dinas Koperasi dan UMKM		1	1		2
Dinas Perdagangan dan Perindustrian			2		2
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3				3
Dinas Pendapatan Daerah	3				3
Badan Kepegawaian Daerah	2		1		3
Badan Pendapatan Daerah	1	2			3
Dinas Pariwisata	1	1	1		3
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	1			4
POLDA	2		2		4
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5				5
Dinas Ketahanan Pangan	2	3			5
BPS	6				6
BAPPEDA	3	1	3		7
Dinas Sosial	2	5	2		9
Dinas Komunikasi dan Informatika	9		1		10
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	2	1		11
Dinas Lingkungan Hidup	7	1	1	2	11
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	9	2	3		14
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	5	2		15
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan	14	3	2		19
Dinas PUPR	5	5		2	12
Dinas Kesehatan	33	8	3		44
Total	133	45	26	4	208

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029



Secara digramatis capaian indikator TPB pada Perangkat Daerah Dapat di gambarkan sebagai berikut :



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029

Kajian isu berbasis capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dilaksanakan dengan mengidentifikasi indikator-indikator yang belum mencapai target nasional, belum dilaksanakan, dan TPB yang tidak memiliki data. Tabel di bawah ini menyajikan indikator-indikator yang belum mencapai target nasional sebagai isu strategis TPB.



Tabel 2.52
Isu Strategis TPB Berbasis Indikator-Indikator yang Belum
Mencapai Target Nasional, Belum di Laksanakan dan TPB
yang Memiliki Data

TUJUAN / NO. INDIKATOR TPB	INDIKATOR
Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
1.a.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.



TUJUAN / NO. INDIKATOR TPB	INDIKATOR
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).
Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.
Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).
Tujuan 5. Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.



TUJUAN / NO. INDIKATOR TPB	INDIKATOR
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
Tujuan 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.
Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.
Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.
Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarneagra	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	

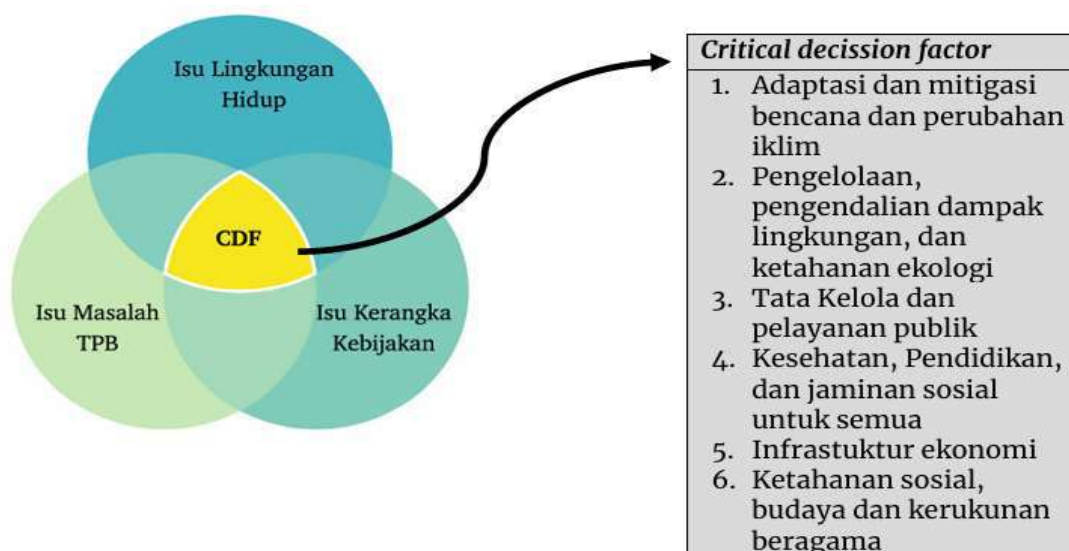


TUJUAN / NO. INDIKATOR TPB	INDIKATOR
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.
Tujuan 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
Tujuan 16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.

Pemetaan isu strategis menggunakan metode critical decision factor (CDF), atau faktor terpenting pembuatan keputusan. Pendekatan CDF mengkaji isu-isu strategis, isu lingkungan dan keberlanjutan, isu gap/permasalahan TPB, dan isu kerangka acuan kebijakan atau isu penting perencanaan pembangunan. Pendekatan



identifikasi isu mengarah pada akar masalah, irisan isu kemudian ditetapkan sebagai critical decision factor atau faktor-faktor penting yang akan diselesaikan dalam perencanaan pembangunan. Irisan isu diperoleh dengan menghitung jumlah isu yang terbagi di antara berbagai jenis kelompok isu dan dianalisis dengan diagram Venn.



Berdasarkan analisis Critical Decision Faktor (CDF), diidentifikasi isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

a. Adaptasi dan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim

Bencana dan perubahan iklim tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi tetapi juga menyebabkan pengaruh terhadap lingkungan, sosial dan kualitas kehidupan masyarakat. Peningkatan emisi gas rumah kaca akibat meningkatnya aktivitas manusia dan polusi memicu terjadinya pemanasan global. Pemanasan global mendatangkan efek negatif bagi lingkungan, antara lain : peningkatan suhu rata-rata bumi, mencairnya es di kutub, peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, perubahan pola curah hujan, perubahan iklim. Pemanasan global mendorong terjadinya bencana hidrometeorologi.



Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas cuaca dan iklim, seperti hujan, angin, dan suhu udara. Bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Kabupaten Banggai adalah banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan gelombang pasang (abrasi). Berdasarkan dokumen kajian risiko bencana kab. Banggai prioritas penanganan risiko bencana yang sifatnya tetap dan kelasnya tinggi adalah : cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tsunami, likuefaksi. Sedangkan prioritas penanganan risiko bencana yang terus meningkat dan kelasnya tinggi adalah: banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, dan tanah longsor.

Dari pencatatan kejadian yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Banggai dari tahun 2015 sampai 2021, kejadian bencana tercatat yang berdampak pernah terjadi adalah bencana banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, dan gempa bumi. Dari kejadian tersebut, bencana banjir yang terjadi tahun 2017 memiliki dampak paling besar dalam kurun 10 tahun terakhir. Dimana kejadian banjir berdampak menyeluruh di beberapa desa disetiap kecamatan di Kabupaten Banggai. Beberapa dampak tersebut berpengaruh besar terhadap jiwa terdampak, akses transportasi, aktivitas kehidupan masyarakat, aktivitas perekonomian.

b. Pengelolaan, Pengendalian dan Ketahanan Ekologi

Kabupaten Banggai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Namun, kekayaan alam tersebut juga rentan terhadap kerusakan akibat berbagai aktivitas manusia, seperti industri, pertanian, dan pertambangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai, sektor pertambangan dan penggalan memberikan kontribusi sebesar 13,09% terhadap





Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banggai pada tahun 2022. Sektor ini juga menyerap tenaga kerja sebanyak 12.851 orang pada tahun yang sama.

Jenis pertambangan yang dominan di Kabupaten Banggai adalah pertambangan nikel. Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai memiliki potensi nikel sebesar 1,7 miliar ton. Saat ini, terdapat 20 perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Banggai. Selain nikel, Kabupaten Banggai juga memiliki potensi pertambangan emas, batubara, batu gamping, andesit, baru quarry, dan pasir. Namun, pengelolaan potensi pertambangan tersebut masih belum optimal. Kegiatan pertambangan tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan sehingga terganggu keanekaragaman hayati di wilayah ini.

Beberapa usaha pertambangan nikel yang terdapat di wilayah ini berada pada hulu dan hilirnya adalah cagar alam. Sehingga jika terjadi kerusakan pada daerah hulu maka akan merusak ekosistem dan ekologis. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan, pengendalian dampak lingkungan, dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Banggai.

c. Tata Kelola Pelayanan Publik

Peningkatan tata kelola dan pelayanan publik sangat penting dilakukan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kepuasan warga, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Tantangan dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas adalah meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi publik, anggaran, dan kebijakan





pemerintah daerah, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menerapkan teknologi informasi untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendorong budaya kerja yang inklusif dan berorientasi pada pelayanan pelanggan.

d. Kesehatan, Pendidikan dan Jaminan Sosial Untuk Semua

Salah satu isu kesehatan yang dihadapi di Banggai adalah masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan tenaga kesehatan, masih tingginya biaya layanan kesehatan, terutama untuk layanan kesehatan rujukan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan. Beberapa isu kesehatan di Banggai antara lain Penyakit tidak menular (PTM). PTM merupakan penyebab kematian terbesar di Kabupaten Banggai. Kasus PTM yang paling banyak terjadi adalah hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Peningkatan kasus PTM di Kabupaten Banggai disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan gaya hidup, peningkatan usia harapan hidup, dan peningkatan polusi udara. Pada tahun 2015, dikutip dari pemberitaan Antara jumlah penderita diabetes melitus di Kabupaten Banggai sebanyak 1.089 kasus lama dan 768 kasus baru, total 1.857 kasus. Kemudian, tahun 2021 penderita diabetes melitus di Kabupaten Banggai sebanyak 24.694. Angka ini mengacu pada profil kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang dirilis Dinkes Sulawesi Tengah pada tahun 2022 lalu. Penyakit menular. Penyakit menular yang menjadi perhatian di Kabupaten Banggai adalah malaria, demam berdarah dengue (DBD), dan tuberculosis (TBC). Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. DBD merupakan penyakit menular yang



disebabkan oleh virus dengue. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Beberapa isu kesehatan lingkungan yang menjadi perhatian di Kabupaten Banggai adalah sanitasi yang buruk, pencemaran air dan udara, serta kurangnya akses air bersih. ketersediaan tenaga pendidik dan minimnya sarana penunjang para guru dalam mengembangkan kualitas anak didik. Kondisi ini diakuinya disebabkan belum meratanya program pendidikan di daerah ini. Berdasarkan data, APM SD.MI/ sederajat masih belum mencapai target nasional (91,9), APK SD/MI/ sederajat belum mencapai target nasional.

e. Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Infrastruktur ekonomi adalah prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi.

Infrastruktur ekonomi dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Public utilities, yaitu infrastruktur yang menyediakan layanan dasar untuk masyarakat, seperti listrik, air bersih, telekomunikasi, dan gas alam. Public work, yaitu infrastruktur yang menyediakan sarana dan prasarana umum, seperti jalan, jembatan, bendungan, irigasi, dan drainase. Transportasi, yaitu infrastruktur yang menghubungkan berbagai wilayah, seperti jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara.

Infrastruktur ekonomi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing



suatu negara. Berikut adalah beberapa manfaat pembangunan infrastruktur ekonomi: Meningkatkan produktivitas. Infrastruktur yang memadai dapat mempermudah dan mempercepat pergerakan barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Meningkatkan efisiensi. Infrastruktur yang memadai dapat mengurangi biaya produksi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Meningkatkan daya saing. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan daya saing produk domestik di pasar global. Meningkatkan pemerataan pembangunan. Infrastruktur yang memadai dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Sarana jalan di Kabupaten Banggai yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai sepanjang 1.178,46 km dengan kondisi yang relatif baik.

f. Ketahanan Sosial, Budaya dan Kerukunan Beragama

Ketahanan sosial secara sederhana dapat dipahami sebagai kemampuan individu dan kelompok warga beradaptasi menghadapi berbagai perubahan global dan cepat dalam bidang politik, ekonomi, agama, sosial-budaya, teknologi dan informasi yang terjadi di lingkungannya. kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tahun 2021 di Kabupaten Banggai terjadi beberapa demonstrasi baik dari mahasiswa/akademisi dan masyarakat, total kejadian demonstrasi yang berjumlah 5 (lima) yaitu :

- Aksi demo penolakan masyarakat Kecamatan Masama terhadap Investasi Nikel
- Aksi demo terhadap pembebasan lahan Tanjung Sari



- Aksi demo mahasiswa penolakan kebijakan penunjukan Rektor Untika.
- Aksi demo Masyarakat terhadap Kebijakan penetapan Dirut Perumdam.
- Aksi demo masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa Longkoga Kecamatan Bualemo.
- Aksi demo mahasiswa terhadap pemadaman listrik yang tidak menentu waktu dan jadwalnya oleh PLN UP3 Luwuk.
- Aksi demo penolakan buruh terhadap pemindahan bongkar muat peti kemas dari Pelabuhan Luwuk ke Pelabuhan Tangkiang.

2.3.2.5 Telaahan RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045, visi Pembangunan Kabupaten Banggai 2025-2045 yaitu : **“Banggai Sebagai Gerbang Timur Sulawesi Tengah Yang Maju Dan Berkelanjutan Melalui Industri Komoditas Sumber Daya Alam (Banggai Emas 2045)”**

Secara ringkas pokok-pokok atau makna visi Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Banggai 2025-2045 dijelaskan pada gambar 2.79 berikut.





Gambar 2.79
Pokok-Pokok Visi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2025-2045



Rumusan misi Pembangunan jangka Panjang daerah Kabupaten Banggai tahun 2025–2045 mengacu pada visi, masalah pokok, isu strategis dan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Banggai periode 2005–2025, sebagai berikut :

- 1. Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing melalui Transformasi Sosial**
- 2. Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif melalui Transformasi Ekonomi**
- 3. Transformasi Tata Kelola untuk Pemerintahan yang Baik dan Inovatif**
- 4. Ketahanan Sosial dan Budaya untuk Kehidupan Bermasyarakat yang Berkualitas.**
- 5. Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan.**
- 6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**
- 7. Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan Kestinambungan Pembangunan**



Mengacu pada kerangka transformasi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045, maka sesuai Misi RPJPD Kabupaten Banggai diatas di rumuskan kerangka Transformasi Banggai Emas 2045 untuk mendukung Indonesia Emas 2045 sebagai berikut :

a. Tranformasi Banggai

1. Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing melalui Transformasi Sosial.
2. Ekonomi Tangguh dan Inklusif melalui Transformasi Ekonomi.
3. Transformasi Tata Kelola untuk Pemerintahan yang Baik dan Inovatif.

b. Landasan Transformasi

1. Ketahanan Sosial dan Budaya untuk Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas
2. Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan.

c. Kerangka Implementasi Transformasi

1. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.
2. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.
3. Kestinambungan Pembangunan

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045 di rumuskan dari Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) hasil penyelarasan RPJPD Kabupaten Banggai dengan RPJPD Provinsi Sulteng dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

a. Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka



panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Arah Pembangunan Daerah harus berjumlah 17 (tujuh belas).

Adapun Arah Pembangunan Daerah RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

- BE.1** Pelayanan Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin.
- BE.2** Pendidikan Berkualitas yang Merata
- BE.3** Perlindungan Sosial Berkeadilan dan Inklusif sesuai Kerentanannya
- BE.4** Produktivitas, Nilai Tambah, Inovasi dan Penerapan IPTEK di Sektor Ekonomi Produktif dan Unggulan
- BE.5** Penerapan Ekonomi Hijau
- BE.6** Lapangan Kerja dan SDM Kompeten
- BE.7** Transformasi Digital
- BE.8** Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
- BE.9** Reformasi Birokrasi Berdampak dan Berkelanjutan
- BE.10** Berkebudayaan Maju dan Moderasi Beragama
- BE.11** Keluarga Berkualitas dan Kesenjangan Gender
- BE.12** Lingkungan Hidup Berkualitas
- BE.13** Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
- BE.14** Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
- BE.15** Pemekaran Wilayah, Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan
- BE.16** Sarana Prasarana Dasar dan Konektivitas
- BE.17** Kestinambungan Pembangunan

Keterangan : **BE** = Banggai Emas.

b. Indikator utama Pembangunan Daerah

Berdasarkan Arah Pembangunan Daerah dan penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Daerah sebagaimana table di atas,



maka Indikator Utama Pembangunan Daerah RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.53

Misi, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045

No	Misi/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Daerah	Target RPJPD Banggai Tahun 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045
Misi 1 : SDM Unggul dan Berdaya Saing melalui Transformasi Sosial			
BE1. Pelayanan Kesehatan Terjangkau dan Berkualitas Terjamin			
1.	Usia Harapan Hidup (Tahun)	72.12	77.89
2.	Kesehatan Ibu dan Anak		
	a) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	72	56
	b) Prevalensi Stunting (%)	12	5
3.	Penanganan Tuberkulosis		
	a) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) (%)	90	95
	b) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	100
	c) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98,00	99,5
BE.2 Pendidikan Berkualitas yang Merata			
4.	Hasil Pembelajaran		
	a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	- Literasi Membaca	Sedang	Tinggi
	- Numerasi	Sedang	Tinggi
	b) Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8.72	9.64
	c) Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.42	14.68
5.	Angka Partisipasi Sekolah		



No	Misi/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Daerah	Target RPJPD Banggai Tahun 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045
	a) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD Sederajat	98,88 (2022)	100
	b) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP Sederajat	94,18 (2022)	100
BE.3 Perlindungan Sosial Berkeadilan dan Inklusif sesuai Kerentanannya			
6.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,51-6,93	5,0
7.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	74.78	90,00
8.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	Rakor Provinsi	
Misi 2 : Ekonomi Tangguh dan Inklusif Melalui Transformasi Ekonomi			
BE.4 Produktivitas, Nilai Tambah, Inovasi dan Penerapan IPTEK di Sektor Ekonomi Produktif dan Unggulan			
9.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	35,00-38,41	53,75
10.	Pengembangan Pariwisata		
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,26-0,35	0,20
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang)*	150-200	1.000
11.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)		
12.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	1,28	1,49
	b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	0,01	0,21
	c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,02	0,43



No	Misi/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Daerah	Target RPJPD Banggai Tahun 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045
	d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,65	7,94
	e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,0	4,0
13.	Tingkat Penguasaan IPTEK		
	a) Anggaran Penelitian dan Inovasi (persen Belanja Daerah)	0,03	1,00
	b) Indeks Inovasi Daerah	50,65 Inovatif (peringkat 115 Tahun 2023)	Sangat Inovatif
14.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	25,38	20,00
BE.5 Penerapan Ekonomi Hijau			
15.	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Rakor Provinsi	
BE.6 Lapangan Kerja dan SDM Kompeten			
16.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.88-3,00	1,50-2.00
17.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	57,90-58,18	60-70
BE.7 Transformasi Digital			
18.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rakor Provinsi	
BE.8 Stabilitas Ekonomi Makro Daerah			
19.	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHK (%)	0,57-0,61	1,00
20.	Tingkat Inflasi (%)	3,0-4,0	3,0-4,0
Misi 3 : Transformasi Tata Kelola untuk Pemerintahan yang Baik dan Inovatif			
BE.9 Reformasi Birokrasi Berdampak dan Berkelanjutan			
21.	Indeks Reformasi Birokrasi	B	A



No	Misi/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Daerah	Target RPJPD Banggai Tahun 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045
22.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,23 "Baik" (2023)	5,0
23.	Indeks pelayanan Publik	3,51-4,00	4,00-5,00
24.	Anti Korupsi		
	a) Survey penilaian Integritas (SPI)	68,00-70,00	90.00
Misi 4 : Ketahanan Sosial dan Budaya untuk Kehidupan Bermasyarakat yang Berkualitas			
BE.10 Berkebudayaan maju dan Moderasi Beragama			
25.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Sedang	Tinggi
26.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	79,3 (2023)	85,00
BE.11 Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender			
27.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Rakor Provinsi	
28.	Indeks Ketimpangan Gender	0,43	0,35
Misi 5 : Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan			
BE.12 Lingkungan Hidup Berkualitas			
30.	Kualitas Lingkungan Hidup :		
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,43	81,77
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	82,66	100
	c) Pengelolaan Sampah :		
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	19	90
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	18	90
BE.13 Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan			
31.	Ketahanan Energi, Air dan Pangan		



No	Misi/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Daerah	Target RPJPD Banggai Tahun 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045
	a) Ketahanan Energi		
	- Konsumsi Listrik Per Kapita (KWh)	Rakor Provinsi	
	b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	8,71	3,65
	c) Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IPKD)	86,80	95,15
	d) Ketahanan Air		
	- Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)		
	- Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang di Layani oleh Jaringan Irigasi	50,00	100
BE.14 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
32.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	163,20 Tinggi (2022)	Sedang
33.	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	Rakor Provinsi	
	- Kumulatif		
	- Tahunan		
34.	Indeks Ketahanan Daerah	Rendah	Tinggi
Misi 6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan berkadiliran			
BE.15 Pemekaran Wilayah, Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan			
35.	Persentase realisasi pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan pembentukan DOB Baru (%)	20	100
36.	Persentase Desa Mandiri (%)	14,09	82,82
BE.16 Sarana Prasarana Dasar dan Konektivitas			
37.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	45	100
38.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	89,34	94,84



No	Misi/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Daerah	Target RPJPD Banggai Tahun 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045
39.	Kondisi Jalan Mantap	65	75
BE.17 Kesiambungan Pembangunan			
40.	Persentasi Keselarasan antar Dokumen Perencanaan (%)	100	100
41.	Kapasitas Fiskal Daerah	1.165 Rendah (2023)	Tinggi

c. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045

Berdasarkan uraian tentang Arah Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Transformasi daerah dan Indikator Utama Pembangunan Daerah hasil penyelarasan sebagaimana di atas, maka di rumuskan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045 yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya derajat Kesehatan Masyarakat yang tinggi
2. Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas dan merata
3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui perlindungan sosial yang adaptif.
4. Meningkatnya produktivitas, nilai tambah, inovasi dan penerapan Iptek disektor-sektor ekonomi produktif dan unggulan.
5. Terciptanya lapangan pekerjaan dan SDM yang Tangguh, adaptif, inovatif, kompeten dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global.
6. Terwujudnya Transformasi Digital
7. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Secara Berkelanjutan.



8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatif, Transparan, Akuntabel dan Inovatif.
9. Terwujudnya Kebudayaan Daerah yang Maju dan Moderasi Beragama.
10. Terwujudnya Keluarga berkualitas dan gender yang setara
11. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas, lestari dan berkelanjutan
12. Terwujudnya air, energi dan pangan yang berketahanan
13. Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.
14. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah
15. Tersedianya Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
16. Terwujudnya Kestinambungan Pembangunan Daerah

Visi, Misi, Arah Kebijakan, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 di susun dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan masalah dan isu strategis jangka Panjang Kabupaten Banggai sebagai berikut :

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Ekonomi Inklusif
3. Sarana Prasarana Konektivitas dan Pelayanan Dasar
4. Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah
5. Ketahanan Sosial dan Budaya
6. Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan Daerah.
7. Infrastruktur TIK dan Transformasi Digital
8. Penataan Ruang, Ketahanan Ekologi, Adaptasi dan Mitigasi Bencana
9. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.





2.3.2.6 Isu Strategis Kabupaten Banggai

Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi Kabupaten Banggai dari berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat global, nasional, provinsi maupun lokal, dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kabupaten Banggai.

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai 2025-2029 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan isu strategis yang tepat akan menghindarkan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang salah didefinisikan. Input dari tahap ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran pada Bab selanjutnya.

Perumusan isu strategis Kabupaten Banggai dilakukan melalui serangkaian tahapan yaitu dengan mengidentifikasi isu-isu penting yang di tinjau dari hasil telaahan terhadap permasalahan Pembangunan, Isu Strategis Global/Internasional, Isu strategis Nasional RPJMN 2025-2029, TPB SDGs, Isu Strategis Provinsi dan Isu Strategis KLHS. Proses pemilihan, penilaian dan penapisan isu strategis ini dilakukan melalui FGD dalam forum konsultasi publik.





Tabel 2.54
Kesimpulan Isu Strategis Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH	MASALAH POKOK	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KAB. BANGGAI	
			GLOBAL	NASIONAL	SULAWESI TENGAH		
Potensi Sumber daya Alam yang terdiri atas : ▪ Potensi Pertanian/ Peternakan ▪ Potensi Perikanan Kelautan ▪ Potensi kehutanan ▪ Potensi Pariwisata ▪ Potensi Energi dan Sumber Daya mineral (gas alam, minyak bumi, nikel, granit, emas, bahan galian lainnya)	Kualitas, keunggulan dan daya saing Sumber daya Manusia Kabupaten Banggai masih perlu di tingkatkan.	Kesehatan, Pendidikan dan Jaminan Sosial Untuk Semua	Perkembangan Demografi Global	Rendahnya kualitas sumber daya manusia Rendahnya produktivitas	Kualitas Sumber daya Manusia	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Masih Rendah.	
		Ketahanan Sosial, Budaya dan Kerukunan Beragama	Peningkatan Urbanisasi Dunia	Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif			
			Pertumbuhan Kelas Menengah	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat			
				Perekonomian Daerah belum sepenuhnya tangguh dan inklusif.			Infrastruktur Ekonomi
	Konstelasi Perdagangan Global						
	Tata Kelola Keuangan Global						
	Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Daya Saing Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, Perikanan dan Pariwisata					
	Pemanfaatan Luar Angkasa (Space Economy)						
	Sarana Prasarana Dasar, konektivitas dan TIK belum					Dukungan Sarana dan Parasarana Dasar	Sarana Prasarana Konektivitas
						Inovasi Pembiayaan	



POTENSI DAERAH	MASALAH POKOK	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KAB. BANGGAI
			GLOBAL	NASIONAL	SULAWESI TENGAH	
	memadai, layak dan merata.				Pembangunan dalam Mendukung Kesenambungan	dan Pelayanan Dasar masih belum memadai
	Potensi Bencana Daerah yang cukup tinggi, serta ancaman degradasi lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai Tata Ruang	Adaptasi dan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim Pengelolaan, Pengendalian dan Ketahanan Ekologi	Perubahan Iklim	Krisis lingkungan	Potensi Bencana Daerah Yang Cukup Dan Ancaman Degradasi Lingkungan	Penataan Ruang, Ketahanan Ekologi, Adaptasi dan Mitigasi Bencana
	Masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah				Disparitas Pembangunan Antar Wilayah Inovasi Pembiayaan Pembangunan dalam Mendukung Kesenambungan	Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah
	Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas belum sepenuhnya terwujud.	Tata Kelola Pelayanan Publik	Perkembangan Teknologi Tata Kelola Keuangan Global		Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.



Selanjutnya berdasarkan Tabel 2.54 di atas di lakukan prioritisasi isu strategis untuk menentukan isu strategis yang paling prioritas dan akan mempengaruhi rumusan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun kedepan. Prioritisasi isu dilakukan dengan menggunakan sejumlah kriteria dimana setiap kriteria memiliki bobot. Setiap isu strategis diberi nilai berdasarkan setiap kriteria dan akhirnya diperoleh nilai total masing-masing isu strategis.

Tabel 2.55
Kriteria dan Bobot Kriteria dalam Prioritisasi Isu Strategis

No	Isu Strategis	Bobot (%)
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;	15
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	15
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
3.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;	15
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
Jumlah		100

Berdasarkan hasil penilaian dan pembobotan terhadap isu strategis sebagaimana di atas, maka di dapatkan prioritas isu RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 sebagai berikut :



Tabel 2.56
Rata-Rata Skor dan Prioritas Isu Strategis RPJMD
Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor	Prioritas Isu
1.	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Masih Rendah	89,90	14,98	1
2.	Pembangunan Ekonomi belum Inklusif	89,85	14,98	1
3.	Sarana Prasarana Konektivitas dan Pelayanan Dasar masih belum memadai	88,50	14,75	2
3.	Penataan Ruang, Ketahanan Ekologi, Adaptasi dan Mitigasi Bencana	78,00	13,00	7
5.	Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah	81,50	13,58	5
6.	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	80,00	13,33	6

Berdasarkan proses perumusan isu strategis sebagaimana di atas, di rumuskan isu strategis Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Masih Rendah.**
- 2. Pembangunan Ekonomi belum Inklusif**
- 3. Sarana Prasarana Konektivitas dan Pelayanan Dasar masih belum memadai**
- 4. Penataan Ruang, Ketahanan Ekologi, Adaptasi dan Mitigasi Bencana**
- 5. Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah**
- 6. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.**

Gambaran masing-masing isu strategis Kabupaten Banggai 2025-2029 yakni sebagai berikut :





1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Masih Rendah

Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai antara lain di tunjukan oleh capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan komposit dari indeks pendidikan, indeks Kesehatan dan pengeluaran riil perkapita yang menggambarkan pencapaian dimensi standar hidup layak. Capaian IPM Kabupaten Banggai setiap tahun cenderung menunjukkan peningkatan. di Tahun 2023 IPM Kabupaten Banggai mencapai 72,19 atau kategori Tinggi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya terjadi kenaikan IPM sebesar 1,83 point dengan rata-rata pertumbuhan 0,86%. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kabupaten Banggai.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak terlepas dari program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Peningkatan IPM tidak dapat terjadi secara instan namun melalui sebuah proses yang bertahap yang memerlukan waktu cukup panjang. Oleh karena itu, program pembangunan manusia perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaanya agar lebih terarah.

Pendidikan berkualitas yang merata, masih menjadi tantangan di Kabupaten Banggai. Wajib Belajar 9 Tahun belum berhasil di tuntaskan, hal ini terlihat dari angka Rata-Rata Lama Sekolah yang masih 8,63 Tahun, walaupun angka Harapan Lama Sekolah cenderung membaik menjadi 13,34 Tahun. Sedangkan untuk dimensi Pendidikan berkaitan dengan antara lain penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan serta penyebarannya, rasio murid terhadap guru, kelas, dan sekolah serta sarana dan prasarana pendukung. Pembangunan Pendidikan di arahkan untuk menciptakan penduduk Kabupaten Banggai yang cerdas, kreatif, dan berbudi pekerti luhur.

Tantangan lainnya untuk mewujudkan SDM Kabupaten Banggai yang berkualitas dan unggul adalah derajat Kesehatan



Masyarakat. Usia Harapan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2023 meningkat 0,14 tahun menjadi 72,09 Tahun, dari tahun sebelumnya 71,95 Tahun. Beberapa masalah yang masih menjadi tantangan kedepan di sektor Kesehatan yaitu peningkatan pelayanan Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk Kabupaten Banggai. Kebijakan untuk meningkatkan Upaya Kesehatan harus di tekankan pada peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat promotif dan preventif, penanggulangan masalah Gizi terutama terkait penurunan stunting, pelayanan Kesehatan ibu, anak dan lanjut usia, Keluarga Berencana, pemerataan sarana prasarana, serta pelayanan Kesehatan yang responsif dan perluasan cakupan jaminan Kesehatan.

Masalah Pendidikan dan Kesehatan sebagaimana di uraikan di atas, tentunya sangat terkait dengan persoalan kemiskinan penduduk Kabupaten Banggai. Isu kualitas dan Daya Saing SDM Kabupaten Banggai sangat erat kaitannya dengan Upaya percepatan penuntasan kemiskinan, melalui perlindungan sosial yang adaptif.

Kualitas sumberdaya manusia juga berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang terbuka di daerah. Oleh sebab itu pembangunan SDM di Kabupaten Banggai diarahkan agar benar-benar mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan Daerah. Selain itu, dalam menyongsong pembangunan digital, pemerintah Indonesia memperbaiki kurikulum pendidikan, memperkuat kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, serta pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di wilayah Indonesia.





Peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif merupakan salah satu Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keluarga berkualitas antara lain di wujudkan melalui penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan ketrampilan keluarga dan penyediaan pusat layanan keluarga. Terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang perlu mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu antara lain peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dalam perspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam Pendidikan/pengasuhan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak/usia dini.

Di bidang kepemudaan, pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing dengan semangat kewirausahaan yang tinggi menjadi sasaran utama, sedangkan di bidang olah raga upaya pemasaran dan pemasyarakatan olahraga, yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat dengan budaya olahraga, serta pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terancang dan berkesinambungan, mutlak perlu di lakukan sebagai wahana yang strategis dan efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membentuk watak dan karakter bangsa (nation and character building).

Sedangkan ketahanan budaya, terkait dengan Upaya Pemajuan dan pelestarian kebudayaan daerah guna memperteguh jati diri bangsa, pembinaan idiologi Pancasila dan penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar Pembangunan.

2. Pembangunan Ekonomi belum Inklusif

Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah Pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh





lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Menurut International Disability and Development Consortium (IDDC), pembangunan ekonomi inklusif adalah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan sepenuhnya dilibatkan dalam proses pembangunan.

Karena itu, konsep pembangunan ekonomi inklusif akan mengupayakan adanya kebijakan afirmatif dalam setiap kebijakan yang diambil negara/daerah. Dalam konsep ini sebuah pertumbuhan harus merupakan pertumbuhan yang mampu menciptakan kesempatan ekonomi bagi penduduk miskin, serta memastikan bahwa semua kelompok masyarakat yang terpinggirkan bisa terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Banggai perlu memfokuskan pada peningkatan produktivitas dan inovasi pada sektor-sektor produktif dan keunggulan potensi daerah, beralih kepada kegiatan ekonomi bernilai tambah serta ekonomi yang mengandalkan pengetahuan, inovasi dan ketrampilan tinggi.

Keberadaan UMKM dan Koperasi perlu di optimalkan melalui antara lain kemudahan berusaha dan perizinan, peningkatan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas, perluasan jaringan pasar domestik dan global, akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi, peningkatan kapasitas tenaga kerja dan penciptaan wirausaha, serta perluasan akses pembiayaan usaha.

Ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu dikembangkan dengan mengangkat nilai-nilai budaya, seni dan kearifan Masyarakat, serta kreatifitas talenta Banggai ketingkat nasional dan global. Hal ini juga merupakan bagian dari Upaya membangun pariwisata daerah Kabupaten Banggai ke depan.





Aktivasi dan produktivitas BUMD juga perlu mendapatkan perhatian untuk mendukung Pembangunan ekonomi di Kabupaten Banggai sesuai bidang usahanya masing-masing. Peningkatan kinerja BUMD diharapkan dapat memperbesar manfaat bagi daerah dan Masyarakat. Perlu dikembangkan kolaborasi sinergis antara BUMD dengan BUMN, swasta dan Masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Banggai.

Kabupaten Banggai adalah salah satu daerah yang dianugerahi oleh Allah SWT potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Dengan kontur dan kondisi geografis yang ada, Kabupaten Banggai memiliki potensi pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, potensi perikanan dan kelautan serta potensi sumber daya mineral serta minyak dan gas bumi.

Berdasarkan data Meskipun secara umum Kabupaten Banggai sudah mampu mewujudkan sebagai daerah yang berdaulat pangan, tetapi belum mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat, dan sesuai sumber daya dan budaya dengan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani, peternak dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin rawan pangan.

Adapun beberapa Isu Strategis pada sektor pertanian di Kabupaten Banggai adalah :

- a. Fenomena perubahan iklim global memberikan dampak terhadap capaian produksi dan produktivitas pertanian;
- b. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumber daya alam;
- c. Belum optimalnya peran Kelembagaan petani;





- d. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan sistem agribisnis;
- e. Ketahanan Pangan;
 - 1) Ketergantungan beras sebagai komoditas pangan pokok masih cukup tinggi.
 - 2) Pola konsumsi masyarakat masih belum Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman (B2SDA).
- f. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian.

Selain potensi sumber daya alam sebagaimana diatas, Kabupaten Banggai memiliki potensi SDA Mineral, Minyak dan Gas Bumi yang potensial dan di harapkan dapat menimbulkan efek pengganda bagi perekonomian daerah. Isu yang mengemuka saat ini adalah bagaimana Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari sektor pertambangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong potensi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan Migas dan Perusahaan lainnya untuk berkontribusi dalam program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai.

3. Sarana Prasarana Konektivitas dan Pelayanan Dasar masih belum memadai

Kabupaten Banggai memiliki masalah sarana prasarana yang belum memadai, baik sarana prasarana konektivitas seperti jalan, jembatan, irigasi, telekomunikasi dan ketenagalistrikan maupun infrastruktur pelayanan dasar seperti air bersih/air minum, sanitasi dan perumahan layak.





Total Panjang jalan di Kabupaten Banggai adalah sepanjang 1.885,88 Km, yang terdiri atas 340,07 Km Jalan Negara/Nasional, 367,35 Km Jalan Provinsi dan 1.178,46 Km Jalan Kabupaten dengan kondisi baik mencapai 68,90%. Dari gambaran kondisi jalan ini, menunjukkan bahwa infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Banggai, utamanya wilayah perdesaan masih belum memadai dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kesenjangan infrastruktur jalan terjadi pada wilayah Kepala Burung Kabupaten Banggai yang meliputi 8 Kecamatan dan di lintasi oleh jalan Provinsi sepanjang kurang lebih 230 Km, dan sebagian besar dalam kondisi rusak. Kondisi ini kemudian juga di perparah dengan tidak memadainya sarana dan prasarana transportasi darat yang melayani wilayah kepala burung di maksud.

Air dan sanitasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap ada air minum atau air bersih maka pasti akan ada air limbah. Tidak kurang dari 85% air bersih berubah menjadi air limbah. Oleh karenanya, pengelolaan air bersih akan berkaitan pula dengan pengelolaan sanitasi. Fasilitas sanitasi yang layak yang memenuhi standar kesehatan yang disertai perilaku hidup bersih dan sehat merupakan elemen yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sumber air dengan kualitas yang buruk akan mengancam kondisi kesehatan masyarakat yang menggunakannya.

Akses terhadap sanitasi dan air bersih merupakan hal yang penting dalam upaya melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Ketiadaan sanitasi yang layak dan air bersih dalam jumlah yang mencukupi merupakan awal dari munculnya berbagai persoalan kesehatan di masyarakat, seperti: stunting, kematian bayi serta ibu, penularan berbagai virus, dan penyakit lainnya.

Selain isu air bersih dan sanitasi lingkungan, pembangunan perumahan dan permukiman menjadi isu penting pemenuhan





layanan dasar yang di butuhkan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan perumahan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.

Sementara untuk kebutuhan ketenagalistrikan di Kabupaten Banggai relative telah tercukupi dengan akan di operasikannya Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Luwuk yang berkapasitas 40 MW atau setara dengan 30 ribu pelanggan baru. Mesin pembangkit itu dinilai memberikan dampak positif bagi lingkungan, dengan pengurangan emisi gas karbon CO₂ sebesar 105 ribu ton per tahun dan mereduksi penggunaan BBM untuk operasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebesar Rp20 miliar/bulan.

Selain konektivitas fisik yaitu sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara sebagaimana di atas, konektivitas dan talenta digital menjadi isu terkini yang menjadi prioritas pemerintah saat ini untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat transformasi digital. Hal ini dapat di lakukan melalui penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pengembangan SDM yang memiliki talenta digital.

Untuk mendukung akselerasi transformasi digital di Indonesia, pemerintah telah menetapkan kegiatan strategis di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Yang menjadi fokus utamanya adalah membangun infrastruktur digital dan memperluas jangkauan internet ke seluruh Indonesia. Pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan digital capabilities dengan kerjasama pemerintah, publik dan swasta untuk dapat berinvestasi di teknologi digital seperti cloud, data center, security management dan infrastruktur broadband.





Salah satu infrastruktur yang memegang peranan penting dalam transformasi digital adalah kehandalan koneksi internet. Banyak desa-desa yang akses internetnya sudah kencang, tetapi tidak sedikit juga yang hanya bisa dapat sinyal 2G atau bahkan blankspot sama sekali. Ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar transformasi digital masih masalah infrastruktur. Peralihan ke ruang digital tidak hanya butuh sekadar koneksi tetapi juga akses yang berkualitas. Demi mencapai hal tersebut, dibutuhkan partisipasi berbagai sektor untuk menjamin ketersediaan infrastruktur.

Masalah koneksi internet sebagaimana di gambarkan di atas itulah yang menjadi hal utama di Kabupaten Banggai. Bahwa masih terjadi kesenjangan digital di beberapa wilayah di kabupaten banggai yang disebabkan karena adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kesenjangan digital ini menyebabkan terbatasnya akses masyarakat di beberapa wilayah terhadap informasi dan komunikasi. Luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Banggai yang berbentuk pegunungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penggunaan satelit yang kurang optimal juga menyebabkan jangkauan komunikasi dan penyebaran informasi menjadi tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha juga menyebabkan adanya blank spot di wilayah non-komersial seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Balantak Utara, pesisir utara Kecamatan Bunta dan beberapa desa yang terletak wilayah pegunungan di Kecamatan Lobu. Kendala serius yang juga dihadapi pemerintah Kabupaten Banggai untuk mengatasi kesenjangan digital terletak pada cara pandang masyarakat mengenai pemanfaatan TIK, sehingga pemerintah perlu meyakinkan dan melatih masyarakat bahwa penggunaan TIK mampu meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan ketersediaan informasi yang cepat serta mudah digunakan di berbagai aspek bidang kehidupan.





Berkaitan dengan isu ini, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Banggai yaitu antara lain :

- a. Mengatasi kesenjangan digital yang terjadi pada beberapa Kecamatan dan Desa *Blank Spot*, karena di anggap bukan sebagai wilayah komersial dalam pandangan penyedia jasa telekomunikasi.
- b. Kebutuhan akses internet untuk Digitalisasi Pendidikan, ekonomi, E-Government dan pelayanan public.
- c. Maraknya konten hoax, konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, malware dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerusuhan antar suku atau agama, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak. Oleh sebab itu di perlukan literasi TIK bagi masyarakat secara lebih masif.
- d. Penguatan terhadap fungsi persandian untuk pengamanan informasi rahasia, mengamankan data, informasi dan aset informasi secara keseluruhan.

4. Penataan Ruang, Ketahanan Ekologi, Adaptasi dan Mitigasi Bencana

Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang merupakan isu strategis dalam pembangunan wilayah dikarenakan semua kegiatan pembangunan khususnya yang memanfaatkan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang. Saat ini sedang dalam proses revisi terhadap RTRW Kabupaten Banggai 2013-2023 dan di harapkan akan menyusul produk hukum mengenai rencana tata ruang yang lebih operasional, baik berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Rinci Kawasan Strategis, serta perangkat pengendalian pemanfaatan ruang berupa peraturan zonasi, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dan standar-standar teknis lainnya yang belum tersedia.





Berkaitan dengan isu lingkungan hidup, selain upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, masalah persampahan juga menjadi perhatian utama. Pengelolaan persampahan menjadi fenomena masalah lingkungan terutama di kawasan perkotaan seperti ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten yaitu Kota Luwuk. Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Selain itu keterbatasan lahan TPA menuntut peran serta dan kesadaran masyarakat untuk ikut membantu dalam mengelola sampah domestik. Selama ini peran serta masyarakat hanya diwujudkan sebatas membayar retribusi sampah. Peran serta tersebut diharapkan dapat ditingkatkan lagi dengan mengurangi sampah dari sumbernya (masing-masing rumah tangga) dan melakukan pemilahan sampah. Perlu inovasi daerah yang lebih masif dan sistematis untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Selanjutnya berkaitan dengan penanggulangan bencana, isu yang mengemuka adalah masih rendahnya kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanganan bencana. penanggulangan bencana untuk lima tahun ke depan harus di fokuskan pada upaya untuk meningkatkan tata kelola resiko bencana yang ada, kolaborasi pentahelix atau dengan melibatkan semua pihak. Karena bencana bukan tanggung jawab bersama melainkan bencana adalah urusan kita bersama, serta memperhatikan laju perkembangan teknologi dengan adaptasi industri 5.0 yang baik. Resiko bencana akan tetap ada selama manusia masih beraktifitas, tapi dengan kesiapan dan monitoring yang di laksanakan, di harapkan bisa mengurangi resiko itu

5. Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah

Pengembangan wilayah di lakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan





keseluruh wilayah dan masyarakat. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui percepatan pengembangan Kawasan-Kawasan pertumbuhan, sedangkan koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan Pusat Kegiatan Lokal sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, di wilayah Kecamatan pada koridor pemerataan.

Kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial-ekonomi di Kabupaten Banggai masih merupakan salah satu tantangan penting dalam pembangunan Daerah. Saat ini, kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Banggai dipandang relatif masih cukup tinggi, khususnya kesenjangan pembangunan antara wilayah beberapa wilayah kecamatan, daerah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Banggai. Oleh karena itu, upaya untuk melakukan percepatan pemerataan pembangunan, termasuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar kelompok sosial-ekonomi dan antar wilayah menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan daerah.

Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini berimplikasi terhadap kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah akibat kecemburuan masyarakat terutama yang berasal dari daerah dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Kesenjangan antar wilayah dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah perbedaan kandungan sumberdaya alam; perbedaan kondisi geografis; kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa; konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah; serta alokasi dana pembangunan antar-wilayah.

Oleh sebab itu kebijakan yang harus di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mengatasi isu kesenjangan wilayah ini antara lain melalui meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mempercepat pembangunan infrastruktur





untuk pertumbuhan dan pemerataan serta mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah, terutama di daerah perdesaan.

Salah satu upaya untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan wilayah adalah melalui pembangunan infrastruktur terpadu berbasis Kawasan, utamanya yang terkait dengan logistik dan konektivitas. Fakta empiris menunjukkan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur di suatu wilayah berjalan seiring dengan perkembangan ekonominya. Keberadaan infrastruktur mendorong peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi. Perbaikan infrastruktur meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, karena investasi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Infrastruktur yang baik juga akan merangsang peningkatan pendapatan masyarakat, karena aktivitas ekonomi yang semakin meningkat sebagai akibat mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan yang semakin tinggi.

6. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.

Upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntable serta pelayanan publik yang prima dan berkualitas hanya dapat di capai melalui Reformasi Birokrasi. Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kemajuan yang berarti. Berdasarkan hasil evaluasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) tahun 2023, indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai bernilai “B” atau kategori Baik, sedangkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah dengan Predikat “BB”. Pada tahun 2020 juga, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banggai berhasil menjadi salah satu unit kerja “Zona Integritas” dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kabupaten Banggai juga berhasil mendapatkan Predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 11 Tahun berturut-turut.



Tantangan lainnya terkait tata Kelola pemerintahan yaitu penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dan penerapan manajemen talenta ASN. Dibidang pelayanan publik, berdasarkan penilaian dari Kemenpan RB dan Ombudsman RI, tingkat kepatuhan pemerintah Kabupaten Banggai terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Publik bernilai Sangat Baik dan berada pada Zona Hijau berdasarkan Kategori Ombudsman RI. Sementara itu untuk Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai mengalami penurunan, dari Kabupaten Terinovatif menjadi Kabupaten Inovatif di tahun 2023.

Berdasarkan capaian di atas, maka yang menjadi isu sentralnya adalah upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian yang sudah ada dan menunjukkan bahwa hasil penilaian di atas telah benar-benar di implementasikan secara terus menerus dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai, yang tujuan akhirnya adalah pada perwujudan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, beberapa hal yang menjadi tantangan dalam isu ini yaitu antara lain:

- a. Peningkatan layanan public yang berkualitas dan inklusif melalui peningkatan aksesibilitas dan inklusifitas pelayanan terpadu (fisik dan Non fisik).
- b. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital di barengi Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang masih sangat rendah dan belum bersesuaian dengan capaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP diatas.
- c. Peningkatan Indeks Inovasi daerah melalui kebijakan minimal satu Perangkat Daerah/Unit Kerja satu Inovasi per tahun.
- d. Penerapan *Performance Based Budgetting* dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, sehingga dapat terwujud pemerintahan yang berorientasi hasil (*Result Oriented Government*).
- e. Transformasi produk hukum daerah.





- f. Penyederhanaan Birokrasi dengan system kerja baru berbasis fungsional, serta tata Laksana Birokrasi Pemerintahan daerah melalui pengembangan/optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- g. Transformasi SDM Aparatur melalui *Core Values* ASN yaitu BERAHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaktif serta Kolaboratif) dan *Employer Branding* ASN yaitu “Bangga Melayani Bangsa”.

Berdasarkan Isu Strategis di atas, maka di gambarkan sandingan/keselarasan Isu Strategis Nasional, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai sebagai berikut :

Tabel 2.57
Keselarasan Isu Strategis Nasional,
Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai

Isu Strategis / Tantangan Pembangunan Nasional	Isu Strategis Sulawesi Tengah	Isu Strategis Kabupaten Banggai
Aspek Ekonomi	Kesenjangan Ekonomi antar Wilayah Masih Tinggi	Pembangunan Ekonomi Inklusif
	Produktivitas Sektor Unggulan Daerah Masih Rendah	
	Nilai Tambah Sektor Pariwisata masih rendah	
	Produktivitas dan Kualitas SDM/Tenaga Kerja Masih rendah	
	Kontribusi UMKM dan Koperasi masih kecil	
	Iptek dan Riset masih lemah	
	Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah masih rendah	Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah
	Infrastruktur dan Literasi Digital masih rendah	Infrastruktur TIK dan Transformasi Digital
	Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) belum memberikan	



Isu Strategis / Tantangan Pembangunan Nasional	Isu Strategis Sulawesi Tengah	Isu Strategis Kabupaten Banggai
	dampak Optimal terhadap Penurunan Kemiskinan	
Aspek Sosial	Produktivitas dan Kualitas SDM/Tenaga Kerja Masih rendah	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	Pembangunan Berkelanjutan belum berjalan dengan baik	
Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan belum Optimal	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.
Sistem Hukum, Stabilitas Pertahanan dan Diplomasi	Tata Kelola Pemerintahan belum Optimal	
Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	Produktivitas dan Kualitas SDM/Tenaga Kerja Masih rendah	Ketahanan Sosial dan Budaya
		Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
		Penataan Ruang, Perubahan Iklim, Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Kewilayahan dan Infrastruktur	Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah masih rendah	Sarana Prasarana Konektivitas dan Pelayanan Dasar
	Infrastruktur dan Literasi Digital masih rendah	Infrastruktur TIK dan Transformasi Digital
	Kawasan Pedesaan belum optimal dikembangkan menjadi daerah penyangga.	Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah
Kestinambungan Pembangunan	Pembangunan Berkelanjutan belum berjalan dengan baik	Kestinambungan Pembangunan
		Penataan Ruang, Perubahan Iklim, Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Sedangkan Keterkaitan Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Banggai dengan Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Banggai 2025-2045, tergambar sebagai berikut :



Tabel 2.58
Keterkaitan Isu Strategis Jangka Panjang dengan Isu Strategis
KLHS RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029

ISU STRATEGIS KLHS RPJMD TAHUN 2025-2029	ISU STRATEGIS KABUPATEN BANGGAI 2025-2029
Adaptasi dan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim	Penataan Ruang, Ketahanan Ekologi, Adaptasi dan Mitigasi Bencana
	Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan Daerah.
Pengelolaan, Pengendalian dan Ketahanan Ekologi	Penataan Ruang, Ketahanan Ekologi, Adaptasi dan Mitigasi Bencana
	Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan Daerah.
Tata Kelola Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.
Kesehatan, Pendidikan dan Jaminan Sosial Untuk Semua	Ketahanan Sosial dan Budaya
	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Infrastruktur Ekonomi	Sarana Prasarana Konektivitas dan Pelayanan Dasar
	Infrastruktur TIK dan Transformasi Digital
	Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah
	Pembangunan Ekonomi Inklusif
Ketahanan Sosial, Budaya dan Kerukunan Beragama	Ketahanan Sosial dan Budaya



BerAKHLAK **#** bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten melayani
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangsa



BAB-III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



BAB III

VISI, MISI DAN

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi merupakan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus memberikan arah pembangunan atau *clarity of direction*. Visi dan misi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan /atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi dan misi merupakan gambaran ke depan Kabupaten Banggai pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2025-2029. Gambaran tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang mempedomani/merujuk pada Visi dan Misi, tahapan, arah pembangunan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045, mempedomani RTRW Kabupaten Banggai 2012-2032 dan RPJMN 2025-2029 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2024, Visi RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045 yaitu:

“BANGGAI SEBAGAI GERBANG TIMUR SULAWESI TENGAH YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN MELALUI INDUSTRI KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM (BANGGAI EMAS 2045)“

Visi ini merupakan hasil ekstraksi dari segenap pemikiran, keinginan, harapan dan cita-cita seluruh masyarakat agar Kabupaten Banggai dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan Pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa, industri





pertanian, perikanan/kelautan, pariwisata dan pertambangan di bagian timur Sulawesi Tengah, yang memiliki daya saing, baik secara regional maupun nasional, maju dalam segala bidang pembangunan, sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya di Indonesia yang telah maju serta masyarakatnya yang sejahtera bertumpu pada kekuatannya sendiri, melalui potensi Sumber Daya Alam yang di miliki dan di kelola secara berkelanjutan.

Kondisi ini pada tahun 2045 kedepan akan mewujudkan melalui Banggai Emas 2045, yang pada gilirannya akan mendukung terwujudnya Sulawesi Tengah Emas dan Indonesia Emas 2045.

Gambar 3.1

Kerangka Perumusan Visi Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045



Berdasarkan Visi di atas, di tetapkan Misi RPJPD Kabupaten Banggai 2025-2045, sebagai berikut : :

- 1. Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing melalui Transformasi Sosial**
- 2. Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif melalui Transformasi Ekonomi**
- 3. Transformasi Tata Kelola untuk Pemerintahan yang Baik dan Inovatif**



4. Ketahanan Sosial dan Budaya untuk Kehidupan Bermasyarakat yang Berkualitas.
5. Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan.
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Kestinambungan Pembangunan

Secara Diagramatis Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai tahun 2025-2045, tergambar sebagai berikut :

Gambar 3.2
Rumusan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045



Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045 ini kemudian di jabarkan kedalam 17 Arah Pembangunan (Banggai Emas), 16 Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai. Yang kemudian menjadi dasar perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai 2025-2029, dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029.



3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

3.1.1 Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2020-2024 yang tergambar dalam kondisi umum daerah, permasalahan pembangunan daerah, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, baik skala lokal, regional, nasional maupun isu global, maka dirumuskan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

**Bergerak Bersama Berkelanjutan Menuju Gerbang Timur
Sulawesi Tengah (GERakan BANGgai Terdepan, Inovatif,
MajU dan sejahteRa)**

Pokok-Pokok atau Makna Visi di maksud adalah sebagai berikut :

BERGERAK BERSAMA	Bergerak bersama secara kolaboratif dengan seluruh stakeholders Pembangunan di daerah dengan prinsip PENTAHHELIX
BERKELANJUTAN	Merupakan kelanjutan dari kinerja dan capaian Pembangunan pada periode kepemimpinan kami sebelumnya.
GERBANG TIMUR	▪ GERBANG TIMUR merupakan singkatan dari GERAKAN BANGGAI TERDEPAN, INOVATIF, MAJU DAN SEJAHTERA. ▪ GERBANG TIMUR dapat di makanakan sebagai Kondisi Kabupaten Banggai sebagai pusat pelayanan pendidikan, Kesehatan, perdagangan, jasa, industri pertanian, perikanan/kelautan, pertambangan dan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kawasan Timur Sulawesi Tengah ▪ TERDEPAN artinya Kabupaten Banggai sebagai Kabupaten juara, unggul dan terdepan di bandingkan daerah lainnya di Sulawesi Tengah dalam berbagai aspek Pembangunan.



	▪ INOVATIF artinya mengarusutamakan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan publik. ▪ MAJU artinya Berdaya, kualitas hidup tinggi, modern, Tangguh, inovatif, produktif dan mampu memanfaatkan sumber daya local untuk memenuhi kebutuhan daerah secara mandiri. ▪ SEJAHTERA artinya taraf hidup meningkat, sehat, produktif, berpendidikan, aman dan Bahagia.
SULAWESI TENGAH	Bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten Banggai sebagai Gerbang Timur Sulawesi Tengah

di maknakan sebagai posisi geografis Kabupaten Banggai yang sangat strategis, berada di semenanjung timur pulau Sulawesi dan merupakan bagian timur Sulawesi Tengah. Dalam WIKIPEDIA disebutkan bahwa **Semenanjung Timur** atau **Semenanjung Banggai** adalah satu dari 4 semenanjung utama di Pulau Sulawesi. Semenanjung Timur membentang dari bagian tengah pulau hingga ke timur, membentuk batas selatan Teluk Tomini dan batas utara Teluk Tolo. Wilayah Semenanjung Timur berada sepenuhnya dalam Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Banggai.

Melalui Visi ini Kabupaten Banggai ingin memposisikan diri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta pelayanan perdagangan, jasa dan pariwisata di bagian timur Sulawesi Tengah. Hal ini di dasari oleh pertimbangan antara lain yaitu :

- Kabupaten Banggai memiliki posisi strategis dalam jaringan transportasi darat, penerbangan dan pelayaran di Kawasan timur pulau Sulawesi. Letak geografisnya dapat menghubungkan antara manado, Gorontalo, Kawasan teluk tomini, taliabu (ternate), buton, Kendari dan makassar serta kabupaten sekitarnya yaitu Banggai



Laut, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una dan Morowali Utara, baik melalui darat, laut dan udara, baik untuk distribusi orang, barang dan cargo. Posisi strategis ini memungkinkan kota Luwuk menjadi pusat perdagangan karena memiliki kawasan industri besar atau ditopang oleh infrastruktur transportasi seperti bandar udara dan pelabuhan.

- b. Hal ini diperkuat oleh posisi Kabupaten Banggai sebagai lumbung pangan kedua di Sulawesi Tengah, sentra terbesar komoditas perkebunan kelapa dalam, dan populasi ternak terbesar di Sulawesi Tengah, pariwisata, serta potensi industri perikanan dan maritim yang menjanjikan karena diapit oleh Teluk Tolo dan Teluk Tomini.
- c. Kabupaten Banggai memiliki 3 (tiga) Perguruan Tinggi swasta yang telah eksis selama kurang lebih 24 Tahun, dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar dan berasal dari wilayah di Kawasan Timur Sulawesi Tengah dan Kepulauan Sula Maluku Utara. Berpotensi dikembangkan untuk menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan terbaik.
- d. RSUD Luwuk merupakan Rumah Sakit Rujukan di Bagian timur Sulawesi Tengah, yang dapat ditingkatkan kelasnya menjadi tipe A serta membangun dan meningkatkan fasilitas Kesehatan lainnya menjadi Rumah Sakit tipe D dan C.

Berdasarkan Visi dan maknanya sebagaimana telah diuraikan di atas, ditetapkan ukuran keberhasilan pencapaian/perwujudan Visi Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Indikator keberhasilan visi ini didasarkan pada Sasaran Visi RPJP dan RPJM Nasional, sasaran Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 dan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Banggai 2025-2045. Sasaran Visi dimaksud adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1
Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

NO	Sasaran Visi RPJMD Tahun 2025-2029	Target Sasaran	
		BASE LINE 2025	TARGET 2029
PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA			
1.	PDRB Perkapita (Juta Rp)	115,95	124,46
2.	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (%)	41,29	45,82
3.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	35,30-38,41	40,14
KEMISKINAN MENURUN DAN KETIMPANGAN BERKURANG			
1.	Tingkat Kemiskinan	6,23	4,58-5,50
2.	Indeks Gini	0,268-0,300	0,248-0,260
3.	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	11,66	11,75
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,61-5,00	4,78 -6,20
KEPEMIMPINAN DAERAH UNTUK MENCAPAI VISI DAERAH			
1.	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Sangat Inovatif
2.	Indeks Daya Saing Daerah	3,50	3,90
PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Indeks Pembangunan Manusia	73,44	75,56-77,25
PENURUNAN EMISI GRK MENUJU NET ZERO EMISSION			
1.	Penurunan Intesitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	609.706,30	965.469,34
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,88	83,63

Visi RPJMD 2025-2029 di atas selain merefleksikan Visi Daerah yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Banggai 2025–2045 sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, juga memiliki keterkaitan dan sinkron dengan Visi Presiden dalam RPJMN 2025-2029 dan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029, sesuai prinsip konsistensi perencanaan yang di atur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjelasan keterkaitan itu bisa dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:



Tabel 3.2
Keterkaitan Visi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Banggai

Visi Nasional		Visi Sulawesi Tengah		Visi Kabupaten Banggai	
RPJPN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025-2029	RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025-2029
Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029	Banggai Sebagai Gerbang Timur Sulawesi Tengah Yang Maju Dan Berkelanjutan Melalui Industri Komoditas Sumber Daya Alam (Banggai Emas 2045)	Bergerak Bersama Berkelanjutan Menuju Gerbang Timur Sulawesi Tengah (Gerakan Banggai Terdepan, Inovatif, Maju dan Sejahtera)

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau pemerintah dalam usahanya mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi daerah.

Rumusan Misi sebagai penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Terpilih, yang akan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- 1. SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing**
- 2. Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan**
- 3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas , Merata dan Ramah Lingkungan.**
- 4. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.**
- 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif.**

Secara Diagramatis Gambaran Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 sebagai berikut :



Gambar 3.3
Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029



Penjelasan masing-masing Misi adalah sebagaimana gambaran berikut ini :



Misi ini di arahkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang sehat, cerdas, terampil, produktif, sejahtera dan mandiri serta berbudaya. Kualitas Sumber Daya manusia dapat dilihat melalui angka *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*, dan angka pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi angka IPM suatu daerah, maka kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya juga tinggi. IPM akan menunjukan antara lain indeks/derajat pendidikan, derajat kesehatan serta kemampuan/daya beli masyarakat (*Purchasing Power Parity (PPP)*), dimana kesemuanya itu merupakan ukuran/indikator tingkat kesejahteraan suatu kelompok masyarakat. Pada sisi lain, laju pertumbuhan penduduk yang kecil, angka harapan hidup yang tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga dan



berkembangnya jiwa wirausaha, sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran, juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai.

Misi ini juga berkaitan dengan upaya pemajuan Kebudayaan daerah Banggai, Balantak, Saluan dan Andio, yang dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Daerah dengan mempedomani Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Banggai. Misi kebudayaan ini merupakan basis atau dasar dari pelaksanaan misi lainnya, artinya seluruh pelaksanaan misi pembangunan daerah Kabupaten Banggai 2021-2026, harus memperhatikan dan di dasarkan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Babasalan yang bersendikan agama, dan selama ini tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Misi ini juga bermakna bahwa melalui pembinaan, kerukunan dan harmonisasi keagamaan akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang aman dan damai, dengan pembinaan yang intensif akan meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai religi dalam kehidupan bermasyarakat dan memelihara toleransi antar umat beragama dalam mewujudkan kerukunan dan harmonisasi, sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya secara baik dan tentram.



**EKONOMI DAERAH
TANGGUH DAN
INKLUSIF BERBASIS
POTENSI
UNGGULAN**

Misi ini di arahkan pada upaya untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang lebih produktif dan berdaya saing dengan memanfaatkan teknologi, baik di perdesaan maupun perkotaan, terbentuknya kluster-kluster/kawasan ekonomi produktif dalam bentuk industri pengolahan hasil perikanan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, termasuk pengembangan



UMKM dan koperasi, dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting guna meningkatkan kemandirian ekonomi, karena memiliki potensi sebagai pertumbuhan pendapatan per kapita, sumber pertumbuhan lapangan pekerjaan, sebagai motor penggerak pembangunan perdesaan, pengurangan impor, penyelamat kegiatan ekonomi pada masa krisis, sebagai wadah pengembangan kewirausahaan, dan sumber investasi produksi. Olehnya itu daya saing Koperasi dan UMKM perlu di tingkatkan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang Go Modern, Go Digital, Go Online dan berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”), baik pada aspek-aspek kegiatan usaha yang dijalani, seperti aspek produksi, pemasaran, pembiayaan, kelembagaan dan SDM, maupun kemampuan entrepreneur dalam meningkatkan usahanya.

Pengelolaan potensi unggulan daerah seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan serta potensi pertambangan migas dan non migas perlu di optimalkan secara berkelanjutan dan memperhatikan kelestarian lingkungan, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkualitas serta mendorong bergerakaknya sektor ekonomi lainnya lebih signifikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Upaya ini dapat di wujudkan antara lain melalui :

- 1 Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.
- 2 Peningkatan Populasi dan Produksi Peternakan.
- 3 Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya, serta industry maritime/perikanan.
- 4 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah.





5 Pengelolaan dan Investasi pertambangan milik daerah

Misi ini di arahkan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan, dalam mewujudkan Banggai Swasembada pangan berkelanjutan. Banggai Swasembada Pangan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan yang beragam, bergizi dan seimbang, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.

Berkaitan dengan potensi Sumber Daya Alam Gas Bumi yang di miliki oleh Kabupaten Banggai, Pemerintah daerah di beri ruang dan peran oleh Pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan untuk dapat terlibat secara langsung dalam pengelolaan Wilayah Kerja Migas melalui penawaran Partisipating Interest (PI) 10%. Oleh karena itu, sebagai salah satu daerah penghasil migas, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Participating Interest harus dipastikan dimanfaatkan oleh daerah melalui BUMD yang sepenuhnya dimiliki oleh Daerah. Keterlibatan Pemerintah Daerah ini di harapkan akan memberikan keuntungan/profit bagi BUMD yang akan menambah pendapatan daerah. Selain itu akan memberikan pengetahuan dan pengalaman BUMD dalam pengelolaan Blok Migas sebagai Kontraktor, juga menciptakan transparansi atau keterbukaan mengenai lifting, cadangan, cost dan lain-lain. Saat ini melalui BUMD Banggai Energi Utama (BEU) sedang berproses upaya pemerintah daerah untuk memperoleh PI 10% di maksud yang di targetkan akan di peroleh di tahun 2027.



Keseluruhan Upaya di atas dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan Masyarakat.



Pemenuhan kebutuhan infrastruktur/sarana prasarana merupakan kebutuhan yang vital bagi daerah yang masih kekurangan sarana prasarana pelayanan dasar atau yang memerlukan infrastruktur penunjang yang penting bagi peningkatan produktivitas ekonomi daerah. Keinginan Kabupaten Banggai untuk membangun infrastruktur merupakan kebutuhan yang semakin nyata, sejalan dengan pembangunan ekonomi yang dilakukan. Infrastruktur sangat penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah serta untuk mendorong tumbuhnya perekonomian daerah secara lebih cepat.

Ketersediaan infrastruktur wilayah yang memadai dan berkualitas seperti jalan, jembatan, air bersih, irigasi, transportasi, telekomunikasi serta energi dan ketenagalistrikan menjadi syarat mutlak bagi masuknya investasi di daerah ini, selain karena potensi wilayah yang kita miliki. Oleh karena penyediaan dan peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan merata tidak saja menjadi prasarana yang dapat memberi daya ungkit terhadap optimalisasi pengembangan berbagai potensi daerah, tetapi juga akan membuka keterisolasian wilayah dan aksesibilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Misi ini diarahkan pada upaya untuk mempercepat penyediaan sarana prasarana termaksud diatas, utamanya sarana prasarana pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Banggai, secara merata dan berkualitas. Di harapkan tidak ada lagi rumah tangga yang tidak menikmati listrik, air bersih,



fasilitas sanitasi lingkungan dan tidak ada lagi area Blank Spoot yang tidak terjangkau telekomunikasi, serta tidak ada lagi desa-desa yang terisolir dan tidak dapat di jangkau.

Selain masalah sarana prasarana, upaya untuk meningkatkan ketahanan bencana daerah melalui koordinasi/integrasi dan peningkatan kapasitas pemda dan masyarakat dalam penanggulangan bencana menjadi sangat penting. Hal ini mengingat Kabupaten Banggai juga merupakan salah satu wilayah dengan kategori rawan bencana. Oleh sebab itu upaya penanggulangan bencana mesti diintegrasikan/diinternalisasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, agar program penanggulangan bencana dapat di lakukan secara efektif, sinergis dan tidak tumpang tindih. Selain itu upaya ini untuk memastikan ketersediaan pendanaan bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah., sehingga tercipta kemandirian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana..



**PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN
YANG MERATA
DAN BERKEADILAN**

Misi Ke empat Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan di arahkan pada 3 hal yaitu Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM atau Indeks Desa), Kemandirian Ekonomi Perdesaan melalui BUMDes dan Koperasi Merah Putih dan Pemekaran Wilayah untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah.

Wilayah perdesaan memiliki peranan yang vital dan strategis di dalam pembangunan ekonomi mandiri dan berkelanjutan, terutama melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah Lembaga ekonomi desa yang di kelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa, dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan Asli Desa, pengelolaan potensi desa serta





sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan. Pendirian dan pengelolaan BUMDesa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu diperlukan upaya yang cukup serius agar BUMDesa dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Program/ Inovasi 1 BUMDes 500 Juta akan di lanjutkan melalui misi ini.

Selain BUMDes, misi ini di arahkan untuk mendukung Program Koperasi Merah Putih untuk mendorong kemandirian desa dan kesejahteraan anggotanya. Sementara, BUMDes berorientasi pada pengelolaan aset ekonomi desa untuk kepentingan masyarakat desa.

Desa mandiri adalah salah satu tujuan dari pembangunan desa di Indonesia. Desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa dan memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya. Desa mandiri tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah, tetapi juga mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada di desanya. Desa mandiri adalah desa yang memiliki kemandirian dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pemerintahan. Desa mandiri juga memiliki identitas dan karakteristik yang khas, serta menjaga nilai-nilai lokal yang positif.

Sedangkan Pemekaran wilayah adalah proses pembentukan daerah baru dari wilayah yang sudah ada, seperti Provinsi, Kabupaten, Kecamatan ataupun Desa. Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk menciptakan daerah yang lebih mandiri, meningkatkan pelayanan public dan mempercepat pemerataan Pembangunan.





Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik/amanah (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government) telah menjadi komitmen nasional dan daerah. Misi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif arahkan pada upaya menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (good dan clean governance) pada seluruh struktur pemerintahan daerah secara disiplin dan sungguh-sungguh, sehingga diharapkan akan tercipta sistem pemerintahan dan birokrasi daerah yang bebas praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan didukung oleh adanya penegakan hukum serta pengawasan internal dan eksternal melalui Reformasi birokrasi. Misi ini juga diarahkan pada upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan fungsi pelayanan publik yang prima dan berbasis teknologi informasi, serta peningkatan sinergitas antar pelaku / stakeholders pembangunan, utamanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Reformasi birokrasi ini juga mesti diikuti oleh meningkatnya kapasitas kelembagaan partai politik dan parlemen daerah.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), Reformasi birokrasi juga mendorong setiap pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, reformasi birokrasi mendesak pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set



harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukan performa/kinerjanya. Birokrasi juga harus lebih lincah, sederhana, adaptif dan inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo bahwa kecepatan melayani serta birokrasi akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya Reformasi Birokrasi, oleh sebab itu harus di bangun secara sistematis dan berkelanjutan, dengan melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program Reformasi Birokrasi.

Misi yang tertuang RPJMD Tahun 2025-2029, disamping sebagai penjabaran tahapan, arah dan kebijakan dalam pencapaian Visi, harus pula menjadi bagian dari arah, kebijakan dan tahapan dalam pencapaian Misi RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025–2045. Oleh karena itu, maka Misi dari kedua dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut satu sama lain harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sehingga keselarasan keduanya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Keselarasan Misi RPJPD 2025–2045
dengan Misi RPJMD 2025–2029

Misi RPJPD 2025-2045	Misi RPJMD 2025– 2045
Misi 1 Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing melalui Transformasi Sosial	Diterjemahkan ke dalam Misi 1 SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing
Misi 2 Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif melalui Transformasi Ekonomi	Diterjemahkan kedalam Misi 2 Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan



Misi RPJPD 2025-2045	Misi RPJMD 2025- 2045
	Misi 4 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
Misi 3 Transformasi Tata Kelola untuk Pemerintahan yang Baik dan Inovatif	Diterjemahkan kedalam Misi 5 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif
Misi 4 Ketahanan Sosial dan Budaya untuk Kehidupan Bermasyarakat yang Berkualitas.	Diterjemahkan kedalam Misi 1 SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing
Misi 5 Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan	Diterjemahkan kedalam Misi 3 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan
Misi 6 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Diterjemahkan kedalam Misi 3 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan Misi 4 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
Misi 7 Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Diterjemahkan kedalam Misi 3 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan Misi 4 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
Misi 8 Kestinambungan Pembangunan	Diterjemahkan kedalam Misi 5 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif



RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025–2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah seyogyanya menjadi bagian dari pencapaian Misi yang tertuang RPJM Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029, sehingga antara misi perencanaan pembangunan Kabupaten Banggai dengan misi perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah terjadi keselarasan.

Tabel 3.4

Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029 dengan Misi RPJMD Sulawesi Tengah 2025-2029

Misi RPJMD Sulteng 2025-2029	Misi RPJMD Banggai 2025-2029
Misi 1 Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.	Misi 1 SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing
Misi 2 Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan..	Misi 1 SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing Misi 2 Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan
Misi 3 Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.	Misi 3 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan. Misi 4 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.
Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah Yang tangguh	Misi 1 SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing



Misi RPJMD Sulteng 2025-2029	Misi RPJMD Banggai 2025-2029
berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.	Misi 5 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPN) Pasal 5 ayat (2), maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029, disamping berpedoman pada RPJP Daerah perlu pula memperhatikan RPJM Nasional, sehingga penjabaran program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai menjadi bagian integral dari program nasional. Oleh karena itu, maka misi yang diemban oleh pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD harus memiliki keselarasan dengan misi yang tertuang dalam RPJMN sebagai arah dan kebijakan pembangunan nasional.

Tabel 3.5

Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029 dengan Misi RPJM Nasional 2025-2029

Misi RPJMN 2025-2029 (ASTA CITA/PRIORITAS NASIONAL)	Misi RPJMD Banggai 2025-2029
Misi/Asta Cita/PN 1 Memperkokok Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Misi 1 SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing Misi 5 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif
Misi/Asta Cita/PN2 Memantapkan Sistem Pertahanan Kemananan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Misi 2 Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan



Misi RPJMN 2025-2029 (ASTA CITA/PRIORITAS NASIONAL)	Misi RPJMD Banggai 2025-2029
Misi/Asta Cita/PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, mengembangkan industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Misi 3 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan. Misi 4 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
Misi/Asta Cita/PN 4 Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z dan penyandang disabilitas	Misi 1 SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing
Misi/Asta Cita/PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Misi 2 Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan
Misi/Asta Cita/PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Misi 2 Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan Misi 4 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan



Misi RPJMN 2025-2029 (ASTA CITA/PRIORITAS NASIONAL)	Misi RPJMD Banggai 2025-2029
Misi/Asta Cita/PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	Misi 5 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif
Misi/Asta Cita/PN 8 Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur	Misi 1 SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing Misi 3 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam hal ini tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.





Tujuan (goal) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sasaran (objective) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai selama Periode 2025-2029 berdasarkan Visi dan Misi adalah:

Tabel 3.6
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	1.1 Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera.	1.1.1 Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi
		1.1.2 Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata
		1.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Perluasan Kesempatan Kerja
		1.1.4 Terwujudnya Keluarga



Misi	Tujuan	Sasaran
		Berkualitas dan Gender yang setara
		1.1.5 Terwujudnya Kebudayaan Daerah yang Maju dan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran
		1.1.6 Meningkatnya daya saing Pemuda dan prestasi olah raga
Misi 2 : Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan	2.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah	2.1.1 Terwujudnya Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang inklusif secara berkelanjutan.
		2.1.2 Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Menuju Banggai Swasembada Pangan Berkelanjutan untuk Mendukung Perekonomian Daerah
Misi 3 : Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan.	3.1 Peningkatan Penyediaan, dan Pemenuhan Sarana Prasarana Dasar, Infrastruktur wilayah, TIK dan Konektivitas yang berkualitas dan Merata.	3.1.1 Tersedia dan terpenuhinya Sarana Prasarana Dasar, Infrastruktur wilayah, TIK dan Konektivitas yang berkualitas dan Merata.
	3.2 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta kelestarian Lingkungan Hidup	3.2.1 Meningkatnya Ketahanan Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam



Misi	Tujuan	Sasaran
		Penanggulangan Bencana
		3.1 Terwujudnya Tata Ruang, lingkungan hidup yang berkualitas, lestari dan berkelanjutan
Misi 4 : Pembangunan Kewilayahan Merata dan Berkeadilan	4.1 Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	4.1.1 Terwujudnya pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan pembentukan DOB Baru
		4.1.2 Meningkatnya Kemandirian Desa
		4.1 Terwujudnya Kota Luwuk sebagai Kota Layak Huni
Misi 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif	5.1 Penguatan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif.	5.1.1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah
		5.1.2 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
		5.1.3 Meningkatnya Manajemen dan Tata Kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui prinsip Meritokrasi

Agar terwujud keselarasan antara RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029, maka tujuan dan sasaran yang ditetapkan juga harus selaraskan. Gambaran keselarasan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai dan Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tabel 3.7 berikut :



Tabel 3.7
Keselarasn Tujuan RPJMD Kabupaten Banggai dan Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

No	Tujuan RPJMD Sulteng		Tujuan RPJMD Banggai
1.1	Mewujudkan Kualitas Masyarakat Sulawesi Tengah yang Berdaya Saing	1.1	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera
1.2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Tengah Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penyediaan Lapangan Kerja		
2.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	2.1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Unggulan Daerah
		4.1	Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
3.1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana Daerah	3.2	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Kelestarian Lingkungan Hidup
3.2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	3.1	Peningkatan Penyediaan dan Pemenuhan Sarana Prasarana Dasar, Infrastruktur Wilayah, TIK dan Konektivitas yang Berkualitas dan Merata
		4.1	Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
4.1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis, Bersih, Inovatif dan Kolaboratif.	5.1	Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif
4.2	Mewujudkan Masyarakat yang Toleran, Harmonis serta Berkarakter Budaya Maju	1.1	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera



Tabel 3.8
Keselarasan Sasaran RPJMD Kabupaten Banggai dan Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

No	Sasaran RPJMD Sulteng		Sasaran RPJMD Banggai
1.1.1	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat;	1.1.1	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi
1.1.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.1.2	Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata
		1.1.6	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga
1.1.3	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender	1.1.4	Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Gender yang setara
1.2.1	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	1.1.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Perluasan Kesempatan Kerja
1.2.2	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja		
2.1.1	Meningkatnya nilai investasi daerah	2.1.1	Terwujudnya Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Secara Berkelanjutan.
2.1.3	Meningkatnya Peran koperasi dan UMKM		
2.1.4	Meningkatnya Pendapatan Daerah		
2.1.2	Meningkatnya PDRB sektor unggulan daerah	2.1.2	Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Menuju Banggai Swasembada Pangan
2.1.5	Meningkatnya daya saing daerah dan produktivitas ekonomi sektoral		
3.1.1	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	3.2.2	Terwujudnya Tata Ruang, Lingkungan Hidup yang Berkualitas, Lestari dan Berkelanjutan
3.1.2	Menurunkan Intensitas Emisi GRK menuju Net Zero Emission		
3.1.3	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang		
3.1.4	Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	3.2.1	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui



No	Sasaran RPJMD Sulteng		Sasaran RPJMD Banggai
			Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
3.2.1	Meningkatnya layanan infrastruktur jalan dan jembatan	3.1.1	Tersedia dan Terpenuhinya Sarana Prasarana Dasar, Infrastruktur Wilayah, TIK dan Konektivitas yang Berkualitas dan Merata
3.2.2	Meningkatnya layanan infrastruktur Keciaptakaryaan dan sumber daya air	4.1.3	Terwujudnya Kota Luwuk sebagai Kota Layak Huni
3.2.3	Meningkatnya layanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman		
3.2.4	Meningkatnya kualitas simpul transportasi		
3.2.5	Konsumsi Listrik Per Kapita		
4.1.1	Meningkatnya kualitas demokrasi daerah dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan	4.1.1	Terwujudnya pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan pembentukan DOB Baru
		4.1.2	Meningkatnya Kemandirian Desa
4.1.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	5.1.1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah
		5.1.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efesien, Transparan dan Akuntabel
		5.1.3	Meningkatnya Manajemen dan Tata Kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Prinsip Meritorasi
4.2.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	1.1.5	Terwujudnya Kebudayaan Daerah yang Maju serta Masyarakat yang Harmonis dan Toleran
4.2.2	Meningkatnya kualitas pembangunan kebudayaan		



No	Sasaran RPJMD Sulteng		Sasaran RPJMD Banggai
	dan ketahanan sosial budaya masyarakat yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal.	4.1.2	Meningkatnya Kemandirian Desa

Selanjutnya Gambaran keselarasan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dengan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Keselarasan Sasaran Pembangunan Nasional dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

No	Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2029		Sasaran RPJMD Banggai Tahun 2025-2029
1.	Meningkatkan Pendapatan per Kapita Menuju Setara Negara Maju	2.1.1	Terwujudnya Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Secara Berkelanjutan.
		2.1.2	Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Menuju Banggai Swasembada Pangan
		3.1.1	Tersedia dan Terpenuhinya Sarana Prasarana Dasar, Infrastruktur Wilayah, TIK dan Konektivitas yang Berkualitas dan Merata
		4.1.3	Terwujudnya Kota Luwuk sebagai Kota Layak Huni
2.	Kemiskinan Menuju 0 % dan Ketimpangan Berkurang	1.1.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Perluasan Kesempatan Kerja
		4.1.1	Terwujudnya pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan pembentukan DOB Baru



No	Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2029		Sasaran RPJMD Banggai Tahun 2025-2029
		4.1.2	Meningkatnya Kemandirian Desa
3.	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	5.1.1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah
		5.1.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
		5.1.3	Meningkatnya Manajemen dan Tata Kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Prinsip Meritorasi
4.	Daya Saing SDM Meningkat	1.1.1	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi
		1.1.2	Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata
		1.1.4	Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Gender yang setara
		1.1.5	Terwujudnya Kebudayaan Daerah yang Maju serta Masyarakat yang Harmonis dan Toleran
		1.1.6	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga
5.	Intensitas Emisi GRK Menurun menuju <i>Net Zero Emission</i>	3.2.1	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
		3.2.2	Terwujudnya Tata Ruang, Lingkungan Hidup yang Berkualitas, Lestari dan Berkelanjutan



Secara rinci gambaran masing-masing tujuan dan sasaran sesuai Misi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 dapat di gambarkan sebagai berikut :

a. Tujuan dan Sasaran Misi 1

Misi **Sumber Daya Manusia Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing** di lakukan melalui Transformasi pada seluruh siklus hidup manusia Kabupaten Banggai melalui Pendidikan, pelatihan dan penguasaan IPTEK, peningkatan Gizi dan Kesehatan Masyarakat, pengasuhan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif, pemajuan kebudayaan daerah, beragama maslahat, serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran, perlindungan dan bantuan sosial yang adaatif.

Misi pertama ini mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menciptakan SDM unggul, sehat, berkarakter dan adaatif terhadap perkembangan zaman. Fokus Misi pertama di arahkan pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, keagamaan serta prestasi pemuda dan olah raga.

Di bidang pendidikan layanan akan di dilaksanakan secara inklusif dan berkelanjutan. Pemerataan akses pendidikan gratis di SD dan SMP, pemberian beasiswa hingga ke jenjang SMA/SMK dan Perguruan Tinggi, serta penerapan Dana Operasional Sekolah (DOS) SD/SMP merupakan upaya konkrit yang akan di lakukan dalam enciptakan kesempatan belajar yang setara bagi masyarakat Kabupaten Banggai. Penguatan kurikulum berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia industri, juga menjadi prioritas untuk mempersiapkan generasi muda kabupaten Banggai yang cerdas, kreatif dan siap bersaing di era digital.

Pelayanan Kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan di lakukan untuk memastikan seluruh warga Kabupaten Banggai mendapatkan akses layanan berobat gratis, melalui kesinambungan



program Jaminan Kesehatan Nasional, pengembangan telemedicine dan pelayanan kesehatan bergerak untuk desa-desa yang sulit terjangkau (pegunungan dan kepulauan). Penanganan stunting, kesehatan ibu hamil dan balita, penguatan posyandu dan rintisan peningkatan status Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe C/D di 4 wilayah prioritas juga menjadi perhatian.

Sekain itu, sasaran dalam Misi ini juga di arahkan pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial yang adaptif dan perluasan lapangan kerja untuk pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan gender yang setara, pemajuan kebudayaan daerah (BABASALAN) dan masyarakat yang harmonis dan toleran serta meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olah raga.

Untuk mencapai Misi 1 tersebut, di rumuskan Tujuan dan Sasaran di sertai indikator pencapaian sasaran sebagai berikut sebagai mana tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 1 RPJMD
Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera					
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Angka	72,86	73,44	75,56 - 77,25
1.	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi				
	a. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,26	72,52	73,00
	b. Prevalensi Stunting (SGGI)	%	28,6	24,1	14,2
2.	Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata				
	a. Hasil Pembelajaran : Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
	– Literasi Membaca				
	a) SD	Angka	51,31	53,81	63,81



Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
	b) SMP	Angka	63,78	64,88	69,28
	– Numerasi				
	a) SD	Angka	45,94	48,84	60,44
	b) SMP	Angka	57,16	58,66	64,66
	b. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,35	13,43	14,13
	c. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,81	8,94	9,53
3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Perluasan Kesempatan Kerja					
	a. Tingkat Kemiskinan	%	6,56	6,23	4,58-5,50
	b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,11	3,07	2,28-2,74
4. Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Gender yang setara					
	a. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	58,76	61,40	66,00
	b. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,450	0,444	0,394
	c. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	N/A	59,5	66,37
5. Terwujudnya Kebudayaan Daerah yang Maju dan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran					
	a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	27,17	29,72	39,92
	b. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	N/A	80,00	85,40
	c. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka	N/A	40	48
6. Meningkatnya daya saing Pemuda dan Prestasi Olah Raga					
	a. Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	N/A	65	75
	b. Indeks Pembangunan Olahraga	Angka	N/A	0,450	0,650

Secara diagramatis, berdasarkan cascading kinerja tujuan dan sasaran Misi 1 dapat di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.4

Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 1 RPJMD

MISI 1 RPJMD	SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING					
TUJUAN RPJMD	PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING SDM KABUPATEN BANGGAI YANG BERBUDAYA, PRODUKTIF DAN SEJAHTERA					
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)					
SASARAN RPJMD	TERWUJUDNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG TINGGI	TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN MERATA	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF DAN KEMEMANTAHAN KERJA	TERWUJUDNYA KELUARGA BERKUALITAS DAN GENDER YANG SETARA	TERWUJUDNYA KEBUDAYAAN DAERAH YANG MAJU SERTA MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN TOLERAN	MENINGKATNYA DAYA SAING PEMUDA DAN PRESTASI OLAH RAGA
	1. URAH HARAPAN HAYAT (SAHE) 2. PERALIHAN STUNTING (RSGE)	1. NILAI PEMBELAJARAN Pendidikan adalah pondasi untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. 2. KURANG LAMA SEKOLAH 3. RATA - RATA LAMA SEKOLAH	1. TINGKAT KEMISKINAN 2. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPP)	1. INDEKS PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA (IKKKG) 2. INDEKS KETIMPANGAN GENDER 3. INDEKS PERLINDUNGAN ANAK	1. INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (IPK) 2. INDEKS KEMAJUAN UNIT BANGSA (IKUB) 3. INDEKS KETERTAMBAHAN DAN KETERBARUAN UMUM	1. INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA 2. INDEKS PEMBANGUNAN OLAH RAGA
TUJUAN PD	DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG TINGGI	PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN MERATA	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF PERLUASAN KESEMAKUTAN KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	KELUARGA BERKUALITAS, ANAK TERLINDUNG DAN GENDER YANG SETARA	KEBUDAYAAN DAERAH MAJU MASYARAKAT TERTEB, HARMONIS, TANGGULUH DAN TOLERAN	PENINGKATAN DAYA SAING PEMUDA DAN PRESTASI OLAH RAGA
SASARAN PD	MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN MELALUI GERBANG SEHAT	MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN MELALUI GERBANG CERDAS	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF MENINGKATNYA KEMAMPUAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	MENINGKATNYA KELUARGA BERKUALITAS, PERLINDUNGAN ANAK DAN KESETARAAN GENDER	TERWUJUDNYA KEBUDAYAAN DAERAH YANG MAJU TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG TERTEB, HARMONIS, TANGGULUH DAN TOLERAN	MENINGKATNYA DAYA SAING PEMUDA DAN PRESTASI OLAH RAGA
URUSAN	KESEHATAN + CROSS CUTTING	PENDIDIKAN + CROSS CUTTING	SOSIAL, TENAGA KERJA + CROSS CUTTING	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENCUKILAN, PENCUKILAN, PENCUKILAN DAN KELUARGA BERKUALITAS + CROSS CUTTING	KEBUDAYAAN, UNSUR PEMERINTAHAN UMUM, TRANSFORMASI LIRIKAS + CROSS CUTTING	KEPENDUDUKAN DAN OLAH RAGA + CROSS CUTTING

Cascading Kinerja RPJMD di atas, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait, pengampu Misi 1 untuk menjabarkan lebih lanjut dalam Renstra Perangkat Daerah masing-masing. Sasaran RPJMD akan menjadi Tujuan Perangkat Daerah, sedangkan sasaran strategis Perangkat Daerah di sesuaikan dengan tupoksi masing-masing sebagai penjabaran dari tujuan Perangkat Daerah di Misi 1.

b. Tujuan dan Sasaran Misi 2

Misi **Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan** dimaksudkan untuk mewujudkan ekonomi daerah yang maju dan berkeadilan yang di tunjukan dengan pertumbuhan sektor ekonomi yang tinggi dan stabil, produktivitas kuat, berdaya saing dan nilai tambah tinggi. Hal ini di lakukan melalui percepatan terwujudnya industri sektor pangan (pertanian dan perikanan/kelautan), pengembangan koperasi dan UMKM, transformasi digital, serta peningkatan peran BUMD dalam pengelolaan potensi Minyak dan Gas Bumi.



Misi ini juga di fokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kompetitif, peningkatan kualitas pelayanan investasi, penyederhanaan perizinan, kemudahan berusaha, kemudahan akses pembiayaan hingga pemberian stimulus investasi yang pro rakyat serta tumbuhnya wirausaha muda baru yang inovatif, kreatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu Misi ini juga di arahkan untuk meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah, peningkatan nilai tambah perdagangan dan daya saing industri serta berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Misi 2 ini juga di arahkan pada upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan, dalam rangka mewujudkan Banggai Swasembada Pangan berkelanjutan, sehingga mampu menjamin ketersediaan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat. Misi 2 ini di harapkan meneguhkan posisi Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan di kawasan Timur Sulawesi Tengah dan pulau Sulawesi.

Untuk mencapai Misi 2 tersebut, di rumuskan Tujuan dan Sasaran di sertai indikator pencapaian sasaran sebagai berikut sebagaimana tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11
Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 2
RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan daerah				
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,92	4,61 - 5,00	4,78 - 6,20
PDRB Perkapita	JutaRp.	107,88	115,95	124,46

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
1.	Terwujudnya Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang inklusif secara berkelanjutan				
	a. Indeks Gini	Angka	0,316	0,268 - 0,300	0,248 - 0,260
	b. Tingkat Inflasi	%	2,75	2,5±1	2,5±1
	c. Pertumbuhan Ekonomi	%	3,92	4,61 - 5,00	4,78 - 6,20
	d. Indeks Akses Keuangan Daerah	%	3,44	3,50	3,63
2.	Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Menuju Banggai Swasembada Pangan				
	a. Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi Pangan	%	9,52	9,09	7,37
	b. Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,14	85,60	87,33

Secara diagramatis, berdasarkan cascading kinerja tujuan dan sasaran Misi 2 dapat di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.5
Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 2 RPJMD
Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029





Cascading Kinerja RPJMD di atas, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait, pengampu Misi 2 untuk menjabarkan lebih lanjut dalam Renstra Perangkat Daerah masing-masing. Sasaran RPJMD akan menjadi Tujuan Perangkat Daerah, sedangkan sasaran strategis Perangkat Daerah di sesuaikan dengan tupoksi masing-masing sebagai penjabaran dari tujuan Perangkat Daerah di Misi 2.

c. Tujuan dan Sasaran Misi 3

Misi 3 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan di maksudkan sebagai dasar dan pijakan untuk Pembangunan daerah tahap berikutnya, maka percepatan Pemenuhan sarana prasarana dasar, konektivitas dan TIK yang berkualitas, ramah lingkungan, terjangkau dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Banggai, akan di lakukan melalui Misi 3 ini. Misi ini juga memberi arahan pengelolaan lingkungan hidup yang Lestari dan berketahanan, resiliensi bencana dan perubahan iklim.

Misi ini sebagai perwujudan komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai untuk memperkuat ketahanan daerah melalui pembangunan dan penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur yang berkelanjutan, merata dan adaptif terhadap tantangan lingkungan. Penyediaan air bersih, rumah layak huni, sanitasi aman, pembangunan jalan dan jembatan, transportasi perdesaan dan perkotaan mejandi fokus dalam misi ini. Selain itu Misi ini juga di fokuskan terhadap peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dengan mengoptimalkan kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana serta revisi Tata Ruang Wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang Lestari dan berkelanjutan

Untuk mencapai Misi 3 tersebut, di rumuskan Tujuan dan Sasaran di sertai indikator pencapaian sasaran sebagai berikut sebagai mana tabel 3.12 berikut :





Tabel 3.12
Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 3
RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Peningkatan Penyediaan dan Pemenuhan Sarana Prasarana Dasar, Infrastruktur Wilayah, TIK dan Konektivitas yang Berkualitas dan Merata					
Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur		Indeks	N/A	76,61 (Baik)	78,95 (Baik)
1.	Tersedia dan Terpenuhinya Sarana Prasarana Dasar, Infrastruktur Wilayah, TIK dan Konektivitas yang Berkualitas dan Merata				
	a. Persentase pemenuhan akses layanan dasar (Air Bersih, Sanitasi Aman serta Hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan)	%	88,43	89,34	95,00
	b. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	34,29	40,99	83,66
	c. Rasio Konektivitas	%	64	65	69
	d. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	N/A	5,90	6,30
Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta kelestarian Lingkungan Hidup					
Indeks Resiko Bencana (IRB)		Angka	156,37	147,48	119,28
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Angka	81,16	81,88	83,63
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana				
	a. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,37	0,39	0,51
2.	Terwujudnya Tata Ruang, lingkungan hidup yang berkualitas, lestari dan berkelanjutan				
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	81,16	82,21	82,86
	b. Persentasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO2eq	NA	609.706,30	965.469,34

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
	c. Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Ruang	%	80	81	92

Secara diagramatis, berdasarkan cascading kinerja tujuan dan sasaran Misi 3 dapat di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.6
Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 3 RPJMD
Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029



Cascading Kinerja RPJMD di atas, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait, pengampu Misi 3 untuk menjabarkan lebih lanjut dalam Renstra Perangkat Daerah masing-masing. Sasaran RPJMD akan menjadi Tujuan Perangkat Daerah, sedangkan sasaran strategis Perangkat Daerah di sesuaikan dengan tupoksi masing-masing sebagai penjabaran dari tujuan Perangkat Daerah di Misi 3.

d. Tujuan dan Sasaran Misi 4

Misi ini di arahkan pada Upaya untuk mengurangi kesenjangan wilayah di Kabupaten Banggai dengan cara antara lain percepatan pencapaian desa Maju dan Mandiri, persiapan dan percepatan



pemekaran wilayah desa, Kecamatan dan DOB, Pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan dan Tambahan Dana Kelurahan.

Untuk mencapai Misi 4 tersebut, di rumuskan Tujuan dan Sasaran di sertai indikator pencapaian sasaran sebagai berikut sebagaimana tabel 3.13 berikut :

Tabel 3.13
Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 4 RPJMD
Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan					
Realisasi Pemekaran Wilayah		%	10	15	35
Indeks Desa		Indeks	0,750	0,773	0,861
Indeks Kota Layak Huni		Indeks	N/A		
1.	Terwujudnya pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan pembentukan DOB Baru				
	Realisasi Pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan DOB, sesuai Design besar pemekaran di Kabupaten Banggai.	%	10	15	35
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa				
	a. Persentase Desa Mandiri Berdasarkan IDM	%	19,24	20,96	45,02
3.	Terwujudnya Kota Luwuk sebagai Kota Layak Huni				
	Indeks Kota Layak Huni untuk Kota Luwuk	Indeks	N/A		

Secara diagramatis, berdasarkan cascading kinerja tujuan dan sasaran Misi 4 dapat di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.7
Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 4 RPJMD
Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

MISI 4 RPJMD	PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN		
TUJUAN RPJMD	PEMEKARAN WILAYAH, PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN		
	1. REALISASI PEMEKARAN WILAYAH; 2. INDEKS DESA MEMBANGUN; 3. INDEKS KOTA LAYAK HUNI		
SASARAN RPJMD	TERWJUDNYA PEMEKARAN DESA/KELURAHAN, KECAMATAN DAN PEMBENTUKAN DOB BARU	MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DESA	TERWJUDNYA KOTA LUWUK SEBAGAI KOTA LAYAK HUNI
	REALISASI PEMEKARAN DESA, KELURAHAN, KECAMATAN DAN DOB SESUAI DESIGN DASAR PEMERINTAH DI KABUPATEN BANGGAI	PERSENTASE DESA MANDIRI BERDASARKAN IDM	INDEKS KOTA LAYAK HUNI UNTUK KOTA LUWUK
TUJUAN PD	TERWJUDNYA PEMEKARAN DESA/KELURAHAN, KECAMATAN DAN PEMBENTUKAN DOB BARU	PENINGKATAN KEMANDIRIAN DESA SECARA HOLISTIK DAN BERKELANJUTAN	PENINGKATAN FUNGSI KAWASAN PERKOTAAN LUWUK UNTUK MENJADI KOTA LAYAK HUNI
SASARAN PD	TERWJUDNYA PEMEKARAN DESA/KELURAHAN, KECAMATAN DAN PEMBENTUKAN DOB BARU	MENINGKATNYA STATUS DESA MAJU DAN MANDIRI BERDASARKAN INDEKS DESA MELALUI TRANSFORMASI EKONOMI, SOSIAL DAN EKOLOGI/LINGKUNGAN	MENINGKATNYA FUNGSI KAWASAN PERKOTAAN LUWUK UNTUK MENJADI KOTA LAYAK HUNI
URUSAN	SEKRETARIAT DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN + CROSS CUTTING	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA + CROSS CUTTING	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PERUMUKAN, LINGKUNGAN HIDUP + CROSS CUTTING

Cascading Kinerja RPJMD di atas, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait, pengampu Misi 4 untuk menjabarkan lebih lanjut dalam Renstra Perangkat Daerah masing-masing. Sasaran RPJMD akan menjadi Tujuan Perangkat Daerah, sedangkan sasaran strategis Perangkat Daerah di sesuaikan dengan tupoksi masing-masing sebagai penjabaran dari tujuan Perangkat Daerah di Misi 4.

e. Tujuan dan Sasaran Misi 5

Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berorientasi hasil, di lakukan transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang meliputi antara lain kelembagaan daerah yang efektif, penguatan system merit, manajemen talenta ASN, peningkatan aksesibilitas dan inklusifitas pelayanan public terpadu, serta transformasi layanan pemerintahan berbasis digital.

Untuk mencapai Misi 5 tersebut, di rumuskan Tujuan dan Sasaran di sertai indikator pencapaian sasaran sebagai berikut sebagai mana tabel 3.14 berikut :



Tabel 3.14
Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 5 RPJMD
Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak dan Berkelanjutan					
Indeks Reformasi Birokrasi		Predikat	BB	BB	A
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah				
a.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks/Predikat	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi
b.	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif
2.	Meningkatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel				
a.	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	BB	A
b.	Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	A
c.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	2,87	2,96	3,15
d.	Indeks SPBE/PEMDI	Indeks/Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
e.	Indeks Kebijakan Publik	Indeks	Baik	Baik	Baik
f.	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD MCPS)	%		80	88
3.	Meningkatnya Efektivitas Kelembagaan Daerah dan Manajemen Sumber Daya Aparatur				
	Indeks Sistem Merit	Indeks	Baik	Baik	Baik

Secara diagramatis, berdasarkan cascading kinerja tujuan dan sasaran Misi 5 dapat di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.8
Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 5 RPJMD
Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

MISI 5 RPJMD	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN INOVATIF		
TUJUAN RPJMD	PENKUATAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN INOVATIF		
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI		
SASARAN RPJMD	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN INOVASI DAERAH	MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABLE	MENINGKATKAN MANAJEMEN dan TATA KELOLA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELALUI PRINSIP MERITOKRASI
	1. INDEKS PELAYANAN PUBLIK 2. INDEKS INOVASI DAERAH	1. INDEKS REFORMASI BIROKRASI 2. NILAI SAKIP 3. INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)	4. INDEKS SPBE/INDEKS PEMERINTAHAN DIGITAL 5. INDEKS KEBERHAJUAN PUBLIK 6. INDEKS PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH (IPKD MKPS)
			INDEKS SISTEM MERIT
TUJUAN PD	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN INOVASI DAERAH	MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABLE	MENINGKATKAN MANAJEMEN dan TATA KELOLA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELALUI PRINSIP MERITOKRASI
SASARAN PD	MENINGKATKAN KUALITAS DAN CAPAIAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAKUPAN SIPIL MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN MENINGKATKAN PERAN Riset dan Inovasi Daerah dalam Mendukung Pembangunan Berbasis Riset MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK di Kecamatan MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN	MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA APBD DAERAH MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF dan BERKUALITAS MELALUI REFORMASI BIROKRASI TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN DIGITAL MELALUI TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL di KABUPATEN BANGGAI MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN TUGAS dan FUNGSI DPRD MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN di Kecamatan	MENINGKATKAN KUALITAS PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PENCANAAN dan PENGANGGARAN MELALUI APBD SEHAT MENINGKATKAN PROFESIONALITAS ASN
LURUSAN	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL, LITBANG, PENANAMAN MODAL, PERTANAHAN KECAMATAN, SETDA + CROSS CUTTING	KEARSIPAN, SETWAN, SETDA, INSPEKTORAT, KECAMATAN, KEUANGAN, PERENCANAAN, STATISTIK DAN PERSANDIAN + CROSS CUTTING	KEPEGAWAIAN, SETDA + CROSS CUTTING

Cascading Kinerja RPJMD di atas, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait, pengampu Misi 5 untuk menjabarkan lebih lanjut dalam Renstra Perangkat Daerah masing-masing. Sasaran RPJMD akan menjadi Tujuan Perangkat Daerah, sedangkan sasaran strategis Perangkat Daerah di sesuaikan dengan tupoksi masing-masing sebagai penjabaran dari tujuan Perangkat Daerah di Misi 5.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029, adalah sebagaimana tergambar dalam tabel 3.15 berikut :



Tabel 3.15

Keterkaitan Visi Misi Tujuan Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029

NO	VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2025)	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR	
						2026	2027	2028	2029	2030		
	Visi : Bergerak Bersama Berkelanjutan Menuju Gerbang Timur Sulawesi Tengah (Gerakan Banggai Terdepan, Inovatif, Maju dan Sejahtera)											
1.	Misi I : Sumber Daya Manusia Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing											
		Tujuan 1.1 Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	73,44	73,95	74,51	75,04	75,56	76,09	76,09	
		Sasaran 1.1.1 Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,52	72,65	72,78	72,91	73,00	73,12	73,12	
			Prevalensi Stunting (SGGI)	%	24,1	20,1	18,1	16,3	14,2	14,0	14,0	
		Sasaran 1.1.2 Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	1. Hasil Pembelajaran Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:									
			a. Literasi Membaca									
			▪ SD	Kategori	53,81	56,31	58,81	61,31	63,81	66,31	66,31	
			▪ SMP	Kategori	64,88	65,98	67,08	68,18	69,28	70,38	70,38	
b. Numerasi												



NO	VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2025)	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR
						2026	2027	2028	2029	2030	
			▪ SD	Kategori	48,84	51,74	54,64	57,54	60,44	63,34	63,34
			▪ SMP	Kategori	58,66	60,16	61,66	63,16	64,66	66,16	66,16
			2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,43	13,66	13,82	13,98	14,13	14,28	14,28
			3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,94	9,10	9,25	9,39	9,53	9,67	9,67
		Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Kemiskinan	%	6,23	5,94	5,61	5,28	4,95	4,65	4,65
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,07	2,74	2,59	2,43	2,28	2,12	2,12
		Sasaran 1.1.4 Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Gender yang setara	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	61.40	62,6	63,7	64,9	66	67,2	67,2
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0.444	0,432	0,419	0,397	0,394	0,391	0,391
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	59.51	60.47	62.44	64.50	66.37	68.33	68.33
		Sasaran 1.1.5 Terwujudnya Kebudayaan Daerah yang Maju dan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	29,72	32,27	34,82	37,37	39,92	42,47	42,47
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	80,00	81,40	82,80	84,00	85,40	86,80	86,80



NO	VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2025)	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR
						2026	2027	2028	2029	2030	
			Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	40	42	44	46	48	50	50
		Sasaran 1.1.6 Meningkatnya daya saing Pemuda dan prestasi olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	65	67	69	72	75	78	78
			Indeks Pembangunan Olah Raga	Angka	0,400	0,405	0,425	0,450	0,475	0,500	0,500
2.	Misi II : Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan										
		Tujuan 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,61-5,00	4,28	4,43	4,60	4,78	4,90	4,90
			PDRB Perkapita	Juta Rp.	115,95	118,10	120,25	122,40	124,46	126,50	126,50
		Sasaran 2.1.1 Terwujudnya Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Secara Berkelanjutan.	Indeks Gini	Angka	0,300	0,290	0,280	0,270	0,260	0,250	0,250
			Tingkat Inflasi	%	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1
			Pertumbuhan Ekonomi	%	4,14	4,28	4,43	4,60	4,78	4,90	4,90
			Indeks Akses Keuangan Daerah	%	3,50	3,53	3,56	3,60	3,63	3,63	3,63
		Sasaran 2.1.2 Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan	Prevalensi Ketidacukupan konsumsi Pangan	%	9,09	8,66	8,23	7,80	7,37	6,94	6,94



NO	VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2025)	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Kelautan Menuju Banggai Swasembada Pangan.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,60	85,78	86,05	86,69	87,33	87,74	87,74
3.	Misi III : Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan										
		Tujuan 3.1 Peningkatan Penyediaan dan Pemenuhan Sarana Prasarana Dasar, Infrastruktur Wilayah, TIK dan Konektivitas yang Berkualitas dan Merata	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks/ predikat	N/A	75,83 (Kurang Baik)	76,61 (Baik)	77,39 (Baik)	78,17 (Baik)	78,95 (Baik)	78,95 (Baik)
		Sasaran 3.1.1 Tersedia dan Terpenuhinya Sarana Prasarana Dasar, Infrastruktur Wilayah, TIK dan Konektivitas yang Berkualitas dan Merata	Persentase pemenuhan akses layanan dasar (Air Bersih, Sanitasi Aman serta Hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan)	%	N/A	89,34	91,50	93,20	95,00	96,70	96,70
			Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	40,99	48,99	58,56	69,99	83,66	100	100
			Rasio Konektivitas	%	65	66	67	68	69	70	70
			Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	5,90	6,00	6,10	6,20	6,30	6,40	6,40
		Tujuan 3.2	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Angka	147,48	140,43	133,38	126,33	119,28	112,23	112,23



NO	VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2025)	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	81,88	82,05	82,73	83,14	83,63	84,02	84,02
		Sasaran 3.2.1 Meningkatnya Ketahanan Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,39	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54	0,54
		Sasaran 3.2.2 Terwujudnya Tata Ruang, lingkungan hidup yang berkualitas, lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	81,88	82,05	82,73	83,14	83,63	84,02	84,02
			Persentasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO2eq	609.706,30	683.274,46	770.062,89	869.062,83	965.469,34	1.074.069,78	1.074.069,78
			Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Ruang	%	81	83	86	89	92	95	95
		4.	Misi IV : Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan								
		Tujuan 4.1 Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.	Realisasi Pemekaran Wilayah	Angka	15	20	25	30	35	40	40
			Indeks Desa	Angka	0,773 (Maju)	0,795 (Maju)	0,817 (Mandiri)	0,839 (Mandiri)	0,861 (Mandiri)	0,884 (Mandiri)	0,884 (Mandiri)



NO	VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2025)	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR
						2026	2027	2028	2029	2030	
			Indeks Kota Layak Huni	Angka							
		Sasaran 4.1.1 Terwujudnya pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan pembentukan DOB Baru.	Realisasi Pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan DOB Baru, sesuai Design besar pemekaran di Kabupaten Banggai.	%	15	20	25	30	35	40	40
		Sasaran 4.1.2 Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri Berdasarkan IDM	%	20,96	24,40	29,55	36,43	45,02	55,33	55,33
		Sasaran 4.1.3 Terwujudnya Kota Luwuk sebagai Kota Layak Huni	Indeks Kota Layak Huni untuk Kota Luwuk								
5.	Misi V : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif										
		Tujuan 5.1 Penguatan Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A	A



NO	VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2025)	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Sasaran 5.1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi
			Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
		Sasaran 5.1.2 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efesien, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A	A
			Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	A	A	A	A	A
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	3,50	3,53	3,56	3,60	3,63	3,64	3,64
			Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD MCPS)	Angka							
			Indeks SPBE/PEMDI	Indeks/ Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
			Indeks Kebijakan Publik	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Sasaran 5.1.3 Meningkatnya Manajemen dan Tata Kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Prinsip Meritokrasi	Indeks Sistem Merit	Indeks/ Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik



3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Guna mewujudkan Visi dan Misi, serta Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, pentahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir, kerangka kerja atau rangkaian kerja, sebagai penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD, guna menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Arah Kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan pembangunan tahunan (milestone) Kabupaten Banggai periode 2025-2029.

Sedangkan Program prioritas dihasilkan dari *cascading* kinerja (bukan *cascading* indikator) yang di mulai dari Visi sampai dengan *outcomes* serta dilengkapi dengan indikator sesuai tingkatannya.





3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banggai tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tabel 3.16 di bawah ini :



Tabel 3.16

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Visi : Bergerak Bersama Berkalanjutan Menuju Gerbang Timur Sulawesi Tengah
(GERakan BANGgai Terdepan, Inovatif, MajU dan sejahteRa)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1 : SDM UNGGUL, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING			
Tujuan 1.1 Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	Sasaran 1.1.1 Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi	Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui transformasi sistem kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya melalui Gerbang Sehat	1. Penguatan pelaksanaan integrasi layanan primer 2. Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan gizi ibu, anak, usia dewasa dan lansia serta dukungan program Makan Bergizi Gratis. 3. Pemenuhan sarana prasarana sesuai standar, obat, vaksin dan BMHP di fasilitas pelayanan Kesehatan primer dan laboratorium Kesehatan. 4. Peningkatan Upaya pemberdayaan Masyarakat dalam pembudayaan hidup sehat, pengendalian faktor resiko PTM dan peningkatan literasi Kesehatan Masyarakat. 5. Pengendalian penyakit menular dan penuntasan TBC 6. Penguatan surveilens, pengendalian KLB/Wabah dan penanganan bencana.





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			7. Peningkatan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional. 8. Peningkatan status Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D atau Tipe C. 9. Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas layanan RSUD Luwuk sebagai Rumah Sakit Rujukan. 10. Penyediaan tenaga kesehatan dengan distribusi yang merata hingga ke wilayah terpencil dan sulit akses. 11. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi.
	Sasaran 1.1.2 Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui Gerbang Cerdas	1. Penuntasan Program pendidikan wajar 9 tahun menuju wajib belajar 13 tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 tahun Pendidikan dasar dan menengah). 2. Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dan Penanganan Dewasa Tidak Sekolah (DTS). 3. Penyaluran bantuan Pendidikan yang tepat sasaran melalui penerapan DOS (Dana Operasional Sekolah). 4. Perluasan dan Penguatan Kualitas Layanan PAUD 1 Tahun Pendidikan pra sekolah. 5. Percepatan Pelaksanaan PAUD Holistik Integratif, Kelas Parenting, Penguatan UKS



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			dan Sanitasi Sekolah, untuk pencegahan stunting 6. Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan non formal. 7. Peningkatan kualitas Pendidikan agama, budaya dan budi pekerti/karakter serta pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Digital di sekolah. 8. Pelestarian dan pemajuan budaya, Bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam Pendidikan. 9. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan, serta sebaran yang merata pada semua satuan Pendidikan dasar. 10. Peningkatan cakupan pelayanan perpustakaan melalui Gerakan literasi masyarakat.
	Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Gerbang produktif melalui pengembangan Diklat Vokasional dan Kewirausahaan	1. Peningkatan Pelatihan kerja dan Penyelenggaraan Diklat Vokasional. 2. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3. Peningkatan layanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kesempatan kerja. 4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang baik. 5. Fasilitasi Perkembangan usaha rintisan lokal (Start up Company) dan pelatihan vokasi digital. 6. Fasilitasi Wirausaha Pemuda, Santri, Wirausaha Sosial dan Komunitas.
		Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu dan lintas sektor, menuju Banggai Sejahtera	1. Validasi Data Penduduk Miskin, rentan miskin serta data penerima penerima bantuan sesuai skema Bansos Adaktif. 2. Sinkronisasi program lintas Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, melalui Inovasi “Tumis Ikan Teri” (Tuntaskan Kemiskinan melalui kegiatan Terintegrasi). 3. Penyelenggaraan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UGD Kemiskinan) 4. Meningkatkan Kapasitas PSKS dan Kelembagaan Kesos dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 5. Peningkatan Upaya Pemberdayaan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			6. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana (alam dan sosial) pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
	Sasaran 1.1.4 Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Gender yang setara	Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan Keluarga Berencana guna mewujudkan Keluarga Sejahtera.	1. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi. 2. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan serta Peningkatan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan. 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG). 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan. 5. Peningkatan Kualitas Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 6. Perwujudan Kabupaten Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Pemenuhan Hak Anak (PHA).



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Sasaran 1.1.5 Terwujudnya Kebudayaan Daerah yang Maju serta Masyarakat yang Harmonis dan Toleran.	Meningkatkan Pemajuan dan pelestarian Kebudayaan Banggai, Balantak, Saluan dan Andio.	1. Revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal Babasalan. 2. Pengembangan seni dan budaya Babasalan 3. Pemanfaatan kekayaan Budaya Babasalan untuk kesejahteraan rakyat banggai melalui pengembangan Pariwisata Budaya. 4. Pelestarian serta pengelolaan Cagar Budaya dan Museum Daerah.
		Pengarusutamaan Moderasi Beragama (Wasathiyah) sebagai karakter beragama masyarakat Kabupaten Banggai.	1. Peningkatan wawasan kebangsaan dan pembinaan idiologi Pancasila di tengah masyarakat. 2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan
		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Optimalisasi penegakan Peraturan Daerah 2. Peningkatan penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 3. Peningkatan Perlindungan Masyarakat
	Sasaran 1.1.6 Meningkatkan daya saing Pemuda dan Prestasi olah raga	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah serta pengembangan olah raga.	1. Peningkatan Kapasitas dan daya saing Kepemudaaan agar dapat berpartisipasi Aktif dalam pembangunan daerah (Sosial, Politik dan Ekonomi), melalui Fasilitasi Ruang Kreasi



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			positif bagi pemuda termasuk membangun wirausaha muda kreatif. 2. Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda (bahaya kekerasan, penyalahgunaan NAPZA, Miras dan HIV/AIDS). 3. Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Karang Taruna dan Pramuka. 4. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan, olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan organisasi olah raga. 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga.
MISI 2 : EKONOMI DAERAH TANGGUH DAN INKLUSIF BERBASIS POTENSI UNGGULAN			
Tujuan 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah	Sasaran 2.1.1 Terwujudnya Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang inklusif secara berkelanjutan.	Fasilitasi Koperasi Generasi Baru yang Maju, Modern serta UMKM Naik Kelas dan Go Digital	1. Pengembangan Koperasi dan UMKM berbasis kewirausahaan dengan pendekatan kelompok, komunitas dan kluster sesuai sentra komoditas dan wilayah. 2. Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan UMKM secara lintas sektor dan mengedepankan kemitraan. 3. Modernisasi dan penerapan Inovasi Teknologi pada produk dan jasa Koperasi dan UMKM.





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			4. Iklim Usaha UMKM yang kondusif 5. Digitalisasi pemasaran UMKM dan koperasi.
		Memperkuat pertumbuhan ekonomi di sektor industri dan perdagangan.	1. Peningkatan tertib usaha perdagangan melalui peningkatan jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. 2. Peningkatan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. 3. Peningkatan nilai ekspor daerah. 4. Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah. 5. Peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang dan mampu mengakses pasar.
		Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.	1. Peningkatan peluang dan potensi serta promosi investasi/penanaman modal di daerah, berbasis potensi lokal. 2. Peningkatan kualitas layanan Penanaman modal/ pelayanan perizinan berusaha melalui optimalisasi sistem OSS. 3. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing. 4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha/swasta.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			5. Peningkatan kemitraan antara PMA dan PMD dengan UKM Lokal.
		Meningkatkan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	1. Pengembangan destinasi pariwisata prioritas 2. Pengembangan pemasaran pariwisata berbasis digital. 3. Peningkatan kapasitas tenaga kerja pariwisata melalui pelatihan Vokasi dan peningkatan kompetensi digital pelaku pariwisata. 6. Pengembangan kelembagaan pariwisata dan masyarakat sadar wisata. 7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan (<i>event</i>) dan <i>Meetings, incentives, Conferences, Exhibitions (MICE)</i>. 8. Pelibatan Masyarakat lokal dalam mendukung produktivitas pariwisata.
		Pengembangan dan pemanfaatan Potensi pertambangan (Mineral, Minyak dan Gas) untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Pengembangan sistem pola Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas, melalui pembentukan/revitalisasi dan pemberdayaan BUMD. 2. Percepatan pembangunan usaha industri minyak dan gas daerah dengan melakukan Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas. 3. Peningkatan Kerjasama Pendidikan antara pemerintah dan perusahaan industri minyak





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			dan gas untuk meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Banggai yang dapat diserap menjadi tenaga kerja industri minyak dan gas 4. Re-negosiasi antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Banggai 5. Percepatan pembangunan Jaringan Gas (City Gas) melalui Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas.
	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Menuju Banggai Swasembada Pangan Berkelanjutan untuk Mendukung Perekonomian Daerah..	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan (LCP2B). 2. Penyediaan benih yang memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga). 3. Peningkatan Penyediaan prasarana dan pemanfaatan teknologi pertanian. 4. Penyediaan akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2. Meningkatkan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat khususnya untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangan Kabupaten Banggai.	1. Peningkatan ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi dalam mendukung produksi dan produktivitas tanaman pangan. 2. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.
		3. Meningkatkan populasi dan produksi peternakan menuju Banggai sejuta ternak	1. Peningkatan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak. 2. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak. 3. Meningkatkan ketersediaan dan produksi pakan ternak. 4. Menjamin produk hewani yang ASUH dan berdaya saing. 5. Peningkatan Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan.
		4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan dan pemasarannya dalam rangka memenuhi	1. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya melalui pemanfaatan teknologi perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. 2. Peningkatan infrastruktur perikanan tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		kebutuhan protein yang berasal dari ikan.	(air bersih, listrik, BBM, sistem rantai dingin, pelabuhan perikanan). 3. Penyediaan Akses nelayan/pembudidaya ikan terhadap permodalan, teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
		5. Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat.	1. Peningkatan Infrastruktur pangan, diversifikasi dan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan. 2. Implementasi Perda Lahan Pangan Berkelanjutan. 3. Pemanfaatan Lahan pekarangan melalui implementasi Inovasi satu juta satu pekarangan.
		6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan Petani/Peternak dan Nelayan.	1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian/ perkebunan. 2. Peningkatan peran dan fungsi Kelembagaan Peternak 3. Peningkatan Pembinaan Kelompok Nelayan dan pembudidaya ikan
MISI 3 : PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA BERKUALITAS, MERATA DAN RAMAH LINGKUNGAN.			
Tujuan 3.1 Penyediaan, Pemenuhan dan Pemerataan Sarana	Sasaran 3.1.1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar yang Berkualitas, Layak dan Merata	1. Meningkatkan kualitas layanan Air Minum dan Perumahan layak di	1. Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten menuju Banggai Tanpa Kekumuhan.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Prasarana Dasar, TIK dan Konektivitas	Untuk Penanggulangan Kemiskinan.	perkotaan dan perdesaan untuk kehidupan masyarakat yang lebih layak dan bermartabat.	2. Penyediaan Akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana. 3. Penyediaan akses dan peningkatan system penyediaan air minum yang aman melalui jaringan perpipaan di perkotaan maupun perdesaan. 4. Peningkatan kualitas layanan Air Minum perkotaan melalui PDAM
		2. Meningkatkan kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan dan perdesaan.	1. Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan drainase dan sistem air limbah domestik di perkotaan dan perdesaan. 2. Eliminasi Praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
	Sasaran 3.1.2 Tersedianya sarana dan prasarana konektivitas yang Berkualitas dan Merata untuk mendukung Aktivitas Perekonomian dan Penanggulangan Kemiskinan	1. Meningkatkan Jaringan jalan, jembatan, sarana dan prasarana transportasi secara merata dan berkualitas untuk konektivitas wilayah	1. Kerjasama penyediaan infrastruktur dengan pihak swasta melalui mekanisme KPBU. 2. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang berkualitas yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Banggai. 3. Peningkatan kinerja pelayanan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			utama di wilayah terpencil, pedalaman dan daerah rawan bencana. 4. Penyediaan sistem angkutan umum publik dalam kota dan perdesaan yang terpadu dan nyaman. 5. Penyediaan Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan. 6. Pengembangan infrastruktur dan layanan angkutan laut/pelayaran untuk mendukung konektivitas dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan kepulauan Taliabo
		2. Meningkatkan tertib pembangunan bangunan Gedung.	1. Peningkatan layanan PBG dan regulasi bangunan gedung 2. Penyediaan Fasilitas Pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik.
		3. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta ketenagalistrikan sampai ke pelosok desa.	1. Percepatan Implementasi Master Plan pengembangan Teknologi dan Informatika Kabupaten Banggai. 2. Pembangunan Infrastruktur TIK dan system jaringan intra Pemerintah Daerah untuk mendukung transformasi digital. 3. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK). 4. Peningkatan keterbukaan informasi public dan Literasi TIK masyarakat (<i>Digital society</i>).



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 3.2 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta kelestarian Lingkungan Hidup	Sasaran 3.2.1 Meningkatnya Ketahanan Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatkan ketahanan bencana daerah melalui koordinasi/ integrasi pemda dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Daerah.	1. Integrasi Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana daerah ke dalam perencanaan pembangunan daerah. 2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dan data Bencana terpadu. 3. Penguatan system peringatan dini bencana. 4. Penguatan system logistiik pangan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak bencana. 5. Pengembangan Desa Tangguh Bencana 6. Penguatan system penanggulangan bahaya kebakaran melalui penyiapan sarana dan prasarana, pencegahan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.
	Sasaran 3.2.2 Terwujudnya Tata Ruang, lingkungan hidup yang berkualitas, lestari dan berkelanjutan	1. Meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup..	1. Penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang SDA dan LH. 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3. Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			4. Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman hayati. 5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui pembangunan rendah karbon. 6. Pengelolaan sampah perkotaan berbasis masyarakat dengan pendekatan <i>Reduce</i> , <i>Reuse</i> dan <i>Recycle</i> .
		2. Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Daerah dan pertanahan	1. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 dan rencana rincinya. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfatn ruang daerah. 3. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 4. Pengurangan jumlah sengketa, konflik dan perkara tata ruang dan pertanahan.
MISI 4 : PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN.			
Tujuan 4.1 Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	Sasaran 4.1.1 Terwujudnya pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan pembentukan DOB Baru	Meningkatkan realisasi pemekaran Desa, Kecamatan dan Rintisan Pembentukan DOB Baru sesuai yang di rencanakan	1. Penyusunan Desain Besar Pemekaran daerah Kabupaten Banggai 2. Kajian pemekaran daerah Kabupaten Banggai 3. Rintisan dan persiapan pemekaran Desa, Kecamatan dan Pembentukan DOB Baru





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Sasaran 4.1.2 Meningkatnya Status Desa Maju dan Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) atau Indeks Desa	Meningkatkan Desa Maju dan Mandiri melalui pemenuhan layanan dasar, infrastruktur, kemandirian ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat di perdesaan.	1. Peningkatan pembangunan perdesaan berbasis kawasan dan potensi lokal desa, melalui Kerjasama antar desa. 2. Revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama melalui kebijakan satu BUMDes 500 Juta. 3. Peningkatan Investasi produk unggulan perdesaan/ kawasan perdesaan melalui BUMDes dan koperasi Merah Putih untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. 4. Peningkatan partisipasi Masyarakat Desa 5. Pemasalan Pemanfaatan Pekarangan melalui system pertanian terintegrasi di Perdesaan (kelanjutan program satu juta satu pekarangan)
	Sasaran 4.1.3 Meningkatnya Fungsi Kawasan Perkotaan Luwuk	Mewujudkan Luwuk Kota Layak Huni	1. Penerapan konsep <i>Water Front city</i> dalam penataan Kota Luwuk di sepanjang pesisir Pantai, Sungai jolek dan Sungai Soho, sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan rekreasi. 2. Pemenuhan dan optimalisasi fungsi ekologis ruang terbuka hijau publik Kawasan perkotaan Luwuk. 3. Fasilitasi/rintisan Luwuk <i>City Gas</i>





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			4. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan Luwuk. 5. Penataan dan Pembangunan jaringan jalan dalam kota luwuk (ring Road atas dan bawah), sebagai jalan alternatif mengatasi kemacetan kota. 6. Penertiban parkir dalam kota luwuk.
MISI 5 : TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN INOVATIF			
Tujuan 5.1 Peningkatan Kualitas Reformasi di Kabupaten Banggai untuk terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Sasaran 5.1.1 Meningkatnya indeks reformasi birokrasi Kabupaten Banggai	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK	1. Peningkatan kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha 2. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan 3. Peningkatan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 4. Modernisasi/Digitalisasi system dan manajemen pelayanan publik. 5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Perangkat Daerah pengampu SPM. 6. Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		2. Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	1. Banggai Inovatif 2. Penguatan Kembali Laboratorium Inovasi Daerah





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		3. Meningkatkan kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.	1. Penerapan Open Data, Satu Data Banggai. 2. Pengembangan <i>performance base budgeting</i> melalui integrasi perencanaan dan penganggaran daerah berbasis IT. 3. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan. 4. Pemanfaatan hasil penelitian pengembangan daerah. 5. Peningkatan Partisipasi masyarakat, dunia usaha dan akademisi dalam pembangunan melalui pendekatan Pentahelix.
		4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan pendapatan Daerah
		5. Meningkatkan pengawasan, transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Banggai.	1. Peningkatan level Maturitas SPIP 2. Peningkatan Level Kapabilitas APIP 3. Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 4. Penerapan Rencana Aksi/Komitmen Global Pemerintahan Terbuka (<i>Open Government Partnership</i>) Kabupaten Banggai.





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			5. Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan DPRD dan Masyarakat.
		6. Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan daerah dan penegakan Perda.	1. Peningkatan kualitas proses dan substansi Peraturan Perundang-undangan daerah. 2. Peningkatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah, sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
		7. Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi tepat ukuran.	1. Peningkatan ketepatan ukuran, ketepatan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 2. Pengurangan dan penghapusan tugas dan fungsi yang tumpang tindih antar unit kerja atau antar Perangkat Daerah. 3. Peningkatan koordinasi dan pola hubungan kerja antar Perangkat daerah. 4. Peralihan Jabatan Fungsional dan penyesuaian terhadap Nomenklatur Program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019.
		8. Penataan Tata Laksana Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa serta fungsi Pemerintahan Umum.	1. Penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis <i>e-Government</i> . 2. Pengembangan <i>e-Government</i> secara terintegrasi.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3. Peningkatan kualitas <i>e-procurement</i> 4. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah. 5. Peningkatan Kualitas Persandian Daerah. 6. Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 7. Peningkatan Fungsi Kesbangpol. 8. Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan kinerja pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.
		9. Peningkatan kompetensi, profesionalitas dan disiplin ASN serta budaya kerja.	1. Penegakan disiplin ASN melalui penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>. 2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur pejabat struktural melalui diklat kepemimpinan Tkt IV, III dan II. 3. Peningkatan jabatan fungsional. 4. Peningkatan budaya dan etos kerja ASN. 5. Penerapan system manajemen kinerja individu. 6. Pengembangan system informasi manajemen SDM Aparatur yang komprehensif dan terintegrasi.



Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banggai tahun 2025-2029 harus berkesesuaian dengan strategi utama pembangunan nasional untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM dan pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Transformasi sektor publik sebagai pengungkit.



Strategi Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Berkelanjutan

1. Produktivitas pertanian menuju swasembada pangan;
2. Industrialisasi (hilirisasi) padat karya, ekspor, dan berkelanjutan;
3. Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau;
5. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
6. Transformasi digital;
7. Investasi (FDI ekspor dan non-APBN);
8. Belanja negara untuk peningkatan produktivitas; dan
9. Deregulasi kebijakan fiskal dan moneter termasuk stabilitas harga dan nilai tukar.

Strategi Penurunan Kemiskinan

1. Pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk *targeting* program-program pemerintah baik di pusat dan daerah;
2. Menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan inklusif;
3. Kartu Kesejahteraan sebagai integrator bansos dan subsidi;
4. Penguatan wirausaha dan penciptaan lapangan kerja (Kartu Usaha); dan
5. Penguatan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah.

Peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM)

1. Pencegahan *stunting* terutama pada 1000 HPK;
2. Pencegahan dan deteksi dini penyakit serta pembudayaan hidup sehat;
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
4. Peningkatan akses layanan pendidikan;
5. Peningkatan kualitas pendidikan; dan
6. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.

Strategi Penurunan Ketimpangan

1. Penggunaan DTSEN untuk penargetan bantuan dan jaminan sosial;
2. Penyaluran bantuan sosial dan sembako untuk menjaga daya beli masyarakat tidak mampu;
3. Mempermudah akses aset, lahan, modal, dan mendorong inklusi keuangan lewat pendampingan dan pelatihan;
4. Memperluas pelatihan vokasi dan sertifikasi kerja di sektor jasa, manufaktur, dan digital yang sesuai dengan kebutuhan kawasan industri dan potensi lokal; dan
5. Peningkatan *tax ratio* dan pengurangan relaksasi pajak untuk redistribusi kekayaan.

Pembangunan Rendah Karbon

1. Penurunan emisi GRK dari sektor energi;
2. Penurunan emisi GRK sektor berbasis lahan;
3. Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru;
4. Peningkatan upaya dekarbonisasi industri;
5. Penguatan aksi penurunan emisi GRK di sektor pengelolaan limbah; dan
6. Penguatan tata kelola dan faktor pendukung pencapaian target penurunan emisi GRK serta nilai ekonomi karbon.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

1. Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai/danau;
2. Peningkatan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota;
3. Peningkatan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut;
4. Peningkatan kualitas lahan;
5. Peningkatan kualitas ekosistem gambut;
6. Pengelolaan B3, limbah B3, dan limbah radioaktif;
7. Penguatan Kelembagaan, Pengendalian, Penertiban dan Penegakan Hukum LHK dan Penataan Ruang; dan
8. Penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan.

Strategi Pencapaian Sasaran TPT

1. Penciptaan lapangan pekerjaan di sektor bernilai tambah tinggi, bersifat padat karya dan produktif;
2. Pengembangan lapangan kerja hijau dan berbasis teknologi;
3. Pengembangan peluang kewirausahaan;
4. Perluasan kesempatan tenaga kerja Indonesia berketerampilan menengah-tinggi di pasar kerja global;
5. Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara konsisten;
6. *Reskilling* dan *upskilling* untuk memenuhi dinamika pekerjaan baru (teknologi, pekerjaan hijau);
7. Pemagangan dan peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
8. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK), termasuk data ketenagakerjaan, yang kredibel;
9. Penciptaan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsif gender, inklusif dan memfasilitasi dinamika perubahan pola bekerja; dan
10. Penguatan sistem perlindungan sosial adaptif bagi pekerja, termasuk bagi pekerja migran Indonesia.



Mengacu pada 3 (tiga) strategi utama di maksud maka strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 di selaraskan dengan strategi dan prioritas utama pembangunan nasional sebagaimana di atas, yang termuat dalam RPJMN 2025-2029. Tabel 3.17 berikut menggambarkan keselarasan dan keterkaitan strategi di maksud.

Tabel 3.17
Keselaran Strategi Utama Pembangunan Nasional
(Trisula RPJMN 2025-2029 dengan Strategi RPJMD Kabupaten
Banggai Tahun 2025-2029

No	Strategi Pembangunan Nasional 2025-2029	No.	Sasaran RPJMD Banggai Tahun 2025-2029
1.	Penurunan Tingkat Kemiskinan		Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui transformasi sistem kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya melalui Gerbang Sehat
			Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui Gerbang Cerdas
			Gerbang produktif melalui pengembangan Diklat Vokasional dan Kewirausahaan
			Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu dan lintas sektor, menuju Banggai Sejahtera
			Meningkatkan kualitas layanan Air Minum dan Perumahan layak di perkotaan dan perdesaan untuk kehidupan masyarakat yang lebih layak dan bermartabat
			Meningkatkan kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase)



No	Strategi Pembangunan Nasional 2025-2029	No.	Sasaran RPJMD Banggai Tahun 2025-2029
			permukiman perkotaan dan perdesaan
			Meningkatkan Jaringan jalan, jembatan, sarana dan prasarana transportasi secara merata dan berkualitas untuk konektivitas wilayah
			Meningkatkan tertib pembangunan bangunan Gedung.
			Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta ketenagalistrikan sampai ke pelosok desa
			Meningkatkan ketahanan bencana daerah melalui koordinasi/ integrasi pemda dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Daerah.
			Meningkatkan Desa Maju dan Mandiri melalui pemenuhan layanan dasar, infrastruktur, kemandirian ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat di perdesaan.
			Mewujudkan Luwuk Kota Layak Huni
2.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui transformasi sistem kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya melalui Gerbang Sehat
			Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui Gerbang Cerdas
			Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan Keluarga



No	Strategi Pembangunan Nasional 2025-2029	No.	Sasaran RPJMD Banggai Tahun 2025-2029
			Berencana guna mewujudkan Keluarga Sejahtera.
			Meningkatkan Pemajuan dan pelestarian Kebudayaan Banggai, Balantak, Saluan dan Andio.
			Pengarusutamaan Moderasi Beragama (Wasathiyah) sebagai karakter beragama masyarakat Kabupaten Banggai.
			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
			Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah serta pengembangan olah raga
3.	Pencapaian Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan		Fasilitasi Koperasi Generasi Baru yang Maju, Modern serta UMKM Naik Kelas dan Go Digital
			Memperkuat pertumbuhan ekonomi di sektor industri dan perdagangan
			Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.
			Meningkatkan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah
			Pengembangan dan pemanfaatan Potensi pertambangan (Mineral, Minyak dan Gas) untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah
			Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
			Meningkatkan penyediaan air baku untuk kebutuhan



No	Strategi Pembangunan Nasional 2025-2029	No.	Sasaran RPJMD Banggai Tahun 2025-2029
			masyarakat khususnya untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangan Kabupaten Banggai.
			Meningkatkan populasi dan produksi peternakan menuju Banggai sejuta ternak
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan dan pemasarannya dalam rangka memenuhi kebutuhan protein yang berasal dari ikan.
			Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat.
			Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan Petani/Peternak dan Nelayan.
			Meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup..
			Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Daerah dan pertanahan
			Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.	Transformasi Sektor Publik Sebagai Pengungkit		Meningkatkan realisasi pemekaran Desa, Kecamatan dan Rintisan Pembentukan DOB Baru sesuai yang di rencanakan
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK
			Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah



No	Strategi Pembangunan Nasional 2025-2029	No.	Sasaran RPJMD Banggai Tahun 2025-2029
			Meningkatkan kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
			Meningkatkan pengawasan, transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Banggai.
			Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan daerah dan penegakan Perda
			Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi tepat ukuran.
			Penataan Tata Laksana Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa serta fungsi Pemerintahan Umum
			Peningkatan kompetensi, profesionalitas dan disiplin ASN serta budaya kerja.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tabel 3.18 merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan tema/urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan sampai akhir periode perencanaan.

Pentahapan pembangunan daerah dalam kurun waktu 2025-2030 kedepan di lakukan secara terukur dan konsisten agar terwujud Gerbang Timur di akhir periode perencanaan.

Tahap Transisi (Tahun 2025-2026) adalah tahapan **Transisi menuju Gerbang Timur** yang merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari RPJMD 2021-2026. Pada tahapan ini di lakukan penyesuaian,





sinkronisasi dan penajaman terhadap visi dan misi termasuk penyelesaian permasalahan pembangunan, program dan kegiatan periode sebelumnya selama periode menjabat Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2021-2024.

Tahap Pertama (Tahun 2026) adalah tahapan Penyiapan **Fondasi Gerbang Timur**. Berdasarkan permasalahan dan kinerja pembangunan sampai dengan tahun 2025 di lakukan persiapan, penyelesaian, pemenuhan dan peningkatan berbagai sektor pembangunan untuk menjadi dasar atau pondasi dalam melaksanakan tahap awal proses Banggai menuju Gerbang Timur Sulawesi Tengah. Peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, utamanya sektor pangan menuju swasembada dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi tema di tahun ini, menyesuaikan dengan tema Provinsi dan Nasional di tahun 2026. Penataan infrastruktur pendukung ekonomi seperti pasar, kawasan perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan UMKM go Digital dan ekonomi kreatif, menjadi prioritas, di samping pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur pendukung ekonomi dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tahap Kedua (Tahun 2027) adalah tahapan Akselerasi Gerbang Timur, yaitu proses percepatan atau peningkatan capaian di tahap pertama tahun 2026. Peningkatan kualitas SDM melalui layanan digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan perluasan perlindungan sosial adaptif menjadi prioritas utama pada tahap kedua ini, di barengi dengan penuntasan prasarana dasar untuk percepatan penurunan kemiskinan.

Tahap Ketiga (Tahun 2028) adalah tahapan pemantapan Gerbang Timur, yaitu pemantapan dari seluruh tahapan sebelumnya terkait dengan upaya menciptakan sumberdaya manusia unggul dan berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, infrastruktur/sarana prasarana dasar dan konektivitas wilayah yang



di dukung oleh pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan, peemataan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang keseluruhannya di dukung oleh Tata kelola Pemerintahan yang baik dan inovatif.

Tahap Empat (Tahun 2029-2030) adalah tahapan perwujudan Gerbang Timur Sulawesi Tengah, sekaligus sebagai masa transisi ke pemerintahan baru tahun 2030.

Gambar 3.9
Tahapan Implementasi RPJMD Kabupaten Banggai
Tahun 2025-2029



Periode RPJMD Kabupaten Banggai yang disusun ini adalah 2025-2029, namun tahapan arah kebijakan yang dipergunakan terhitung sejak tahun 2026 hingga tahun 2030, dengan dasar asumsi bahwa di tahun 2030, merupakan masa transisi antara periode pembangunan, sehingga tetap bisa memedomani arah kebijakan yang termuat di dalam dokumen ini. Rincian arah kebijakan yang selaras dengan strategi pembangunan Daerah Kabupaten Banggai di tahun 2026-2030, di gambarkan sebagaimana tabel 3.18 berikut :



Tabel 3.18
Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2026-2030

Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui Gerbang Sehat	1. Penguatan pelaksanaan integrasi layanan primer					
	2. Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan gizi ibu, anak, usia dewasa dan lansia serta dukungan program Makan Bergizi Gratis.					
	3. Pemenuhan sarana prasarana sesuai standar, obat, vaksin dan BMHP di fasilitas pelayanan Kesehatan primer dan laboratorium Kesehatan.					
	4. Peningkatan Upaya pemberdayaan Masyarakat dalam kebudayaan hidup sehat, pengendalian faktor resiko PTM dan peningkatan literasi Kesehatan Masyarakat.					
	5. Pengendalian penyakit menular dan penuntasan TBC					
	6. Penguatan surveilens, pengendalian KLB/Wabah dan penanganan bencana.					
	7. Peningkatan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional.					
	8. Peningkatan status Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D atau Tipe C.					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	9. Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas layanan RSUD Luwuk sebagai Rumah Sakit Rujukan.					
	10. Penyediaan tenaga kesehatan dengan distribusi yang merata hingga ke wilayah terpencil dan sulit akses.					
	11. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi					
Meningkatkan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui Gerbang Cerdas	1. Penuntasan Program pendidikan wajar 9 tahun menuju wajib belajar 13 tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 tahun Pendidikan dasar dan menengah).					
	2. Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dan Penanganan Dewasa Tidak Sekolah (DTS).					
	3. Penyaluran bantuan Pendidikan yang tepat sasaran melalui penerapan DOS (Dana Operasional Sekolah).					
	4. Perluasan dan Penguatan Kualitas Layanan PAUD 1 Tahun Pendidikan pra sekolah.					
	5. Percepatan Pelaksanaan PAUD Holistik Integratif, Kelas Parenting, Penguatan UKS dan Sanitasi Sekolah, untuk pencegahan stunting					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	6. Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan non formal.					
	7. Peningkatan kualitas Pendidikan agama, budaya dan budi pekerti/karakter serta pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Digital di sekolah.					
	8. Pelestarian dan pemajuan budaya, Bahasa dan sastra serta pengarusutamaanya dalam Pendidikan.					
	9. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan, serta sebaran yang merata pada semua satuan Pendidikan dasar.					
	10. Peningkatan cakupan pelayanan perpustakaan melalui Gerakan literasi masyarakat.					
Gerbang produktif melalui pengembangan Diklat Vokasional dan Kewirausahaan	1. Peningkatan Pelatihan kerja dan Penyelenggaraan Diklat Vokasional.					
	2. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja.					
	3. Peningkatan layanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kesempatan kerja.					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang baik.					
	5. Fasilitasi Perkembangan usaha rintisan (Start up Company) dan pelatihan vokasi digital.					
	6. Fasilitasi Wirausaha Pemuda, Santri, Wirausaha Sosial dan Komunitas.					
Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu dan lintas sektor, menuju Banggai Sejahtera	1. Validasi Data Penduduk Miskin, rentan miskin serta data penerima penerima bantuan sesuai skema Bansos Adaftif.					
	2. Sinkronisasi program lintas Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, melalui Inovasi “Tumis Ikan Teri” (Tuntaskan Kemiskinan melalui kegiatan Terintegrasi).					
	3. Penyelenggaraan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UGD Kemiskinan)					
	4. Meningkatkan Kapasitas PSKS dan Kelembagaan Kesos dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.					
	5. Peningkatan Upaya Pemberdayaan, Perlindungan dan					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS.					
	6. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana (alam dan sosial) pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.					
Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan Keluarga Berencana guna mewujudkan Keluarga Sejahtera.	1. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.					
	2. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan serta Peningkatan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan.					
	3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).					
	4. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.					
	5. Peningkatan Kualitas Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.					
	6. Perwujudan Kabupaten Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Pemenuhan Hak Anak (PHA).					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Pemajuan dan pelestarian Kebudayaan Banggai, Balantak, Saluan dan Andio.	1. Revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal Babasalan.					
	2. Pengembangan seni dan budaya Babasalan					
	3. Pemanfaatan kekayaan Budaya Babasalan untuk kesejahteraan rakyat banggai melalui pengembangan Pariwisata Budaya.					
	4. Pelestarian serta pengelolaan Cagar Budaya dan Museum Daerah.					
Pengarusutamaan Moderasi Beragama (Wasathiyyah) sebagai karakter beragama masyarakat Kabupaten Banggai.	1. Peningkatan wawasan kebangsaan dan pembinaan idiologi Pancasila di tengah masyarakat.					
	2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama					
Meningkatkannya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Optimalisasi penegakan Peraturan Daerah					
	2. Peningkatan penanganan Gangguan Ketrentaman dan Ketertiban Masyarakat					
	3. Peningkatan Perlindungan Masyarakat					
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah serta pengembangan olah raga.	1. Peningkatan Kapasitas dan daya saing Kepemudaaan agar dapat berpartisipasi Aktif dalam pembangunan daerah (Sosial, Politik dan Ekonomi), melalui Fasilitasi Ruang Kreasi					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	positif bagi pemuda termasuk membangun wirausaha muda kreatif.					
	2. Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda (bahaya kekerasan, penyalahgunaan NAPZA, Miras dan HIV/AIDS).					
	3. Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Karang Taruna dan Pramuka.					
	4. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan, olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan organisasi olah raga.					
	5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga.					
Fasilitasi Koperasi Generasi Baru yang Maju, Modern serta UMKM Naik Kelas dan Go Digital	1. Pengembangan Koperasi dan UMKM berbasis kewirausahaan dengan pendekatan kelompok, komunitas dan kluster sesuai sentra komoditas dan wilayah.					
	2. Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan UMKM secara lintas sektor dan mengedepankan kemitraan.					
	3. Modernisasi dan penerapan Inovasi Teknologi pada produk					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	dan jasa Koperasi dan UMKM.					
	4. Iklim Usaha UMKM yang kondusif					
	5. Digitalisasi pemasaran UMKM dan koperasi.					
Memperkuat pertumbuhan ekonomi di sektor industri dan perdagangan	1. Peningkatan tertib usaha perdagangan melalui peningkatan jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.					
	2. Peningkatan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.					
	3. Peningkatan nilai ekspor daerah.					
	4. Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah.					
	5. Peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang dan mampu mengakses pasar.					
Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.	1. Peningkatan peluang dan potensi serta promosi investasi/penanaman modal di daerah, berbasis potensi lokal.					
	2. Peningkatan kualitas layanan Penanaman modal/ pelayanan perizinan berusaha melalui optimalisasi sistem OSS.					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	3. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing.					
	4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha/swasta.					
	5. Peningkatan kemitraan antara PMA dan PMD dengan UKM Lokal.					
Meningkatkan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	1. Pengembangan destinasi pariwisata prioritas 2. Pengembangan pemasaran pariwisata berbasis digital. 3. Peningkatan kapasitas tenaga kerja pariwisata melalui pelatihan Vokasi dan peningkatan kompetensi digital pelaku pariwisata. 4. Pengembangan kelembagaan pariwisata dan masyarakat sadar wisata. 5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan (<i>event</i>) dan <i>Meetings, incentives, Conferences, Exhibitions (MICE)</i> . 6. Pelibatan Masyarakat lokal dalam mendukung produktivitas pariwisata					
Pengembangan dan pemanfaatan Potensi pertambangan (Mineral, Minyak dan Gas) untuk peningkatan	1. Pengembangan sistem pola Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas, melalui pembentukan/revitalisasi dan pemberdayaan BUMD.					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Asli Daerah	2. Percepatan pembangunan usaha industri minyak dan gas daerah dengan melakukan Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas.					
	3. Peningkatan Kerjasama Pendidikan antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas untuk meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Banggai yang dapat diserap menjadi tenaga kerja industri minyak dan gas					
	4. Re-negosiasi antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Banggai					
	5. Percepatan pembangunan Jaringan Gas (City Gas) melalui Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas.					
Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan (LCP2B).					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	2. Penyediaan benih yang memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga).					
	3. Peningkatan Penyediaan prasarana dan pemanfaatan teknologi pertanian.					
	4. Penyediaan akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan.					
Meningkatkan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat khususnya untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangan Kab. Banggai	1. Peningkatan ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi dalam mendukung produksi dan produktivitas tanaman pangan.					
	2. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.					
Meningkatkan populasi dan produksi peternakan menuju Banggai sejuta ternak	1. Peningkatan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak.					
	2. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak.					
	3. Meningkatkan ketersediaan dan produksi pakan ternak.					
	4. Menjamin produk hewani yang ASUH dan berdaya saing.					
	5. Peningkatan Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	hewan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan.					
Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan dan pemasarannya dalam rangka memenuhi kebutuhan protein yang berasal dari ikan.	1. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya melalui pemanfaatan teknologi perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.					
	2. Peningkatan infrastruktur perikanan tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (air bersih, listrik, BBM, sistem rantai dingin, pelabuhan perikanan).					
	3. Penyediaan Akses nelayan/pembudidaya ikan terhadap permodalan, teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.					
Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat.	1. Peningkatan Infrastruktur pangan, diversifikasi dan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan.					
	2. Implementasi Perda Lahan Pangan Berkelanjutan.					
	3. Germas Pemanfaatan Lahan pekarangan					
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan	1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian/ perkebunan.					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
kesejahteraan Petani/Peternak dan Nelayan.	2. Peningkatan peran dan fungsi Kelembagaan Peternak					
	3. Peningkatan Pembinaan Kelompok Nelayan dan pembudidaya ikan					
Meningkatkan kualitas layanan Air Minum dan Perumahan layak di perkotaan dan perdesaan untuk kehidupan masyarakat yang lebih layak dan bermartabat.	1. Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten menuju Banggai Tanpa Kekumuhan.					
	2. Penyediaan Akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana.					
	3. Penyediaan akses dan peningkatan system penyediaan air minum yang aman melalui jaringan perpipaan di perkotaan maupun perdesaan.					
	4. Peningkatan kualitas layanan Air Minum perkotaan melalui PDAM					
Meningkatkan kualitas layanan sanitasi (air limbah, jambanisasi dan drainase) permukiman perkotaan dan perdesaan.	1. Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan drainase dan sistem air limbah domestik di perkotaan dan perdesaan.					
	2. Eliminasi Praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS)					
Meningkatkan Jaringan jalan,	1. Kerjasama penyediaan infrastruktur dengan					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
jembatan, sarana dan prasarana transportasi secara merata dan berkualitas untuk konektivitas wilayah	pihak swasta melalui mekanisme KPBU.					
	2. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang berkualitas yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Banggai.					
	3. Peningkatan kinerja pelayanan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, utamanya di wilayah terpencil, pedalaman dan daerah rawan bencana.					
	4. Penyediaan sistem angkutan umum publik dalam kota dan perdesaan yang terpadu dan nyaman.					
	5. Penyediaan Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan.					
	6. Pengembangan infrastruktur dan layanan angkutan laut/pelayaran untuk mendukung konektivitas dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan kepulauan Taliabu					
Meningkatkan tertib pembangunan bangunan Gedung.	1. Peningkatan layanan PBG dan regulasi bangunan gedung					
	2. Penyediaan Fasilitas Pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik.					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta ketenagalistrikan sampai ke pelosok desa.	1. Percepatan Implementasi Master Plan pengembangan Teknologi dan Informatika Kabupaten Banggai.					
	2. Pembangunan Infrastruktur TIK dan system jaringan intra Pemerintah Daerah untuk mendukung transformasi digital.					
	3. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK).					
	4. Peningkatan keterbukaan informasi public dan Literasi TIK masyarakat (<i>Digital society</i>).					
Meningkatkan ketahanan bencana daerah melalui koordinasi/ integrasi pemda dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Daerah.	1. Integrasi Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana daerah ke dalam perencanaan pembangunan daerah.					
	2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dan data Bencana terpadu.					
	3. Penguatan system peringatan dini bencana.					
	4. Penguatan system logistik pangan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak bencana.					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	5. Pengembangan Desa Tangguh Bencana					
	6. Penguatan system penanggulangan bahaya kebakaran melalui penyiapan sarana dan prasarana, pencegahan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.					
Meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup..	1. Penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang SDA dan LH.					
	2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.					
	3. Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.					
	4. Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman hayati.					
	5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui pembangunan rendah karbon.					
	6. Pengelolaan sampah perkotaan berbasis masyarakat dengan pendekatan <i>Reduce, Reuse</i> dan <i>Recycle</i> .					
Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Daerah dan pertanahan	1. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 dan rencana rincinya.					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	2. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah.					
	3. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.					
	4. Pengurangan jumlah sengketa, konflik dan perkara tata ruang dan pertanahan.					
Meningkatkan realisasi pemekaran Desa, Kecamatan dan Rintisan Pembentukan DOB Baru sesuai yang di rencanakan	1. Penyusunan Desain Besar Pemekaran daerah Kabupaten Banggai					
	2. Kajian pemekaran daerah Kabupaten Banggai					
	3. Rintisan dan persiapan pemekaran Desa, Kecamatan dan Pembentukan DOB Baru					
Meningkatkan Desa Maju dan Mandiri melalui pemenuhan layanan dasar, infrastruktur, kemandirian ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat di perdesaan.	1. Peningkatan pembangunan perdesaan berbasis kawasan dan potensi lokal desa, melalui Kerjasama antar desa.					
	2. Revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama melalui kebijakan satu BUMDes 500 Juta.					
	3. Peningkatan Investasi produk unggulan perdesaan/ kawasan perdesaan melalui BUMDes dan koperasi Merah Putih untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	4. Peningkatan partisipasi Masyarakat Desa					
	5. Pemasalan Pemanfaatan Pekarangan melalui system pertanian terintegrasi di Perdesaan (kelanjutan program satu juta satu pekarangan)					
Mewujudkan Luwuk kota layak huni	1. Penerapan konsep Water Front city dalam penataan Kota Luwuk di sepanjang pesisir Pantai, Sungai Jolek dan Sungai Soho, sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan rekreasi.					
	2. Pemenuhan dan optimalisasi fungsi ekologis ruang terbuka hijau publik Kawasan perkotaan Luwuk.					
	3. Fasilitasi/rintisan Luwuk City Gas					
	4. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan Luwuk.					
	5. Penataan dan Pembangunan jaringan jalan dalam kota luwuk (ring Road atas dan bawah), sebagai jalan alternatif mengatasi kemacetan kota.					
	6. Penertiban parkir dalam kota luwuk.					
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK	1. Peningkatan kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha					
	2. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	administrasi kependudukan					
	3. Peningkatan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.					
	4. Modernisasi/Digitalisasi system dan manajemen pelayanan publik.					
	5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Perangkat Daerah pengampu SPM.					
	6. Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)					
Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	1. Banggai Inovatif					
	2. Penguatan Kembali Laboratorium Inovasi Daerah					
Meningkatkan kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.	1. Penerapan Open Data, Satu Data Banggai.					
	2. Pengembangan <i>performance base budgeting</i> melalui integrasi perencanaan dan penganggaran daerah berbasis IT.					
	3. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan.					
	4. Pemanfaatan hasil penelitian pengembangan daerah.					
	5. Peningkatan Partisipasi masyarakat, dunia usaha dan akademisi dalam pembangunan melalui					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	pendekatan PENTAHHELIX.					
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah					
	2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah					
	3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan pendapatan Daerah					
Meningkatkan pengawasan, transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.	1. Peningkatan level Maturitas SPIP					
	2. Peningkatan Level Kapabilitas APIP					
	3. Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).					
	4. Penerapan Rencana Aksi/Komitmen Global Pemerintahan Terbuka (<i>Open Government Partnership</i>) Kabupaten Banggai.					
	5. Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan DPRD dan Masyarakat					
Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan daerah dan penegakan Perda	1. Peningkatan kualitas proses dan substansi Peraturan Perundang-undangan daerah.					
	2. Peningkatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah, sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).					
Penataan Organisasi	1. Peningkatan ketepatan ukuran, ketepatan tugas					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
Perangkat Daerah yang tepat fungsi tepat ukuran.	dan fungsi Perangkat Daerah.					
	2. Pengurangan dan penghapusan tugas dan fungsi yang tumpang tindih antar unit kerja atau antar Perangkat Daerah.					
	3. Peningkatan koordinasi dan pola hubungan kerja antar Perangkat daerah.					
	4. Peralihan Jabatan Fungsional dan penyesuaian terhadap Nomenklatur Program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019.					
Penataan Tata Laksana Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa serta fungsi Pemerintahan Umum.	1. Penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis <i>e-Government</i> .					
	2. Pengembangan <i>e-Government</i> secara terintegrasi.					
	3. Peningkatan kualitas <i>e-procurement</i>					
	4. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah.					
	5. Peningkatan Kualitas Persandian Daerah.					
	6. Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.					
	7. Peningkatan Fungsi Kesbangpol.					



Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	8. Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan kinerja pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.					
Peningkatan kompetensi, profesionalitas dan disiplin ASN serta budaya kerja.	1. Penegakan disiplin ASN melalui penerapan <i>reward</i> dan <i>funishment</i> .					
	2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur pejabat struktural melalui diklat kepemimpinan Tkt IV, III dan II.					
	3. Peningkatan jabatan fungsional.					
	4. Peningkatan budaya dan etos kerja ASN.					
	5. Penerapan system manajemen kinerja individu.					
	6. Pengembangan system informasi manajemen SDM Aparatur yang komprehensif dan terintegrasi.					

Arah kebijakan di atas merupakan arahan indikatif menuju tercapainya Visi Pembangunan RPJMD Kabupaten Banggai di akhir periode perencanaan tahun 2026. Secara teknokratik, arah kebijakan tahunan ini sinergis dengan tema rencana Pembangunan Tahunan (RKPD) setiap tahun berkenaan. Selain itu, arah kebijakan tahunan ini juga disesuaikan dengan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta Tema Pembangunan Tahunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah. Keselarasan Tema, Fokus dan Arah Kebijakan baik secara vertical maupun horizontal akan menjamin keserasian pembangunan antarlevel maupun antar daerah.



Selain arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana di atas, strategi dan Arah pengembangan wilayah Kabupaten Banggai di dasarkan pada arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai 2012-2032. Adapun strategi dan kebijakan di maksud adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk kebijakan peningkatan keterkaitan ekonomi dan ruang antara Kabupaten Banggai dengan wilayah luar baik di dalam Provinsi Sulawesi Tengah maupun luar wilayah Provinsi dengan pengembangan prasarana transportasi yang meningkatkan aksesibilitas dengan wilayah luar, terdiri atas:
 - a. Mengembangkan sistem prasarana utama wilayah yang terdiri dari jaringan transportasi udara, laut serta jaringan transportasi darat yang terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas antar kota di kabupaten, lintas wilayah, lintas Provinsi dan lintas pulau;
 - Pengembangan sistem transportasi laut diarahkan dan diprioritaskan pada Pelabuhan Luwuk, Tangkiang (Kecamatan Kintom), Pagimana dan Bunta yang merupakan daerah transit ke wilayah Kabupaten Banggai;
 - Pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Pelabuhan Luwuk dan Pagimana.
 - Pengembangan sistem transportasi udara diarahkan pada pengoptimalan Bandara Syukuran Aminudin Amir untuk meningkatkan akses antara Kota Luwuk dengan wilayah-wilayah luar kabupaten;
 - Optimalisasi Penerbangan Komersial
 - Optimalisasi tingkat pelayanan dan Kelas Bandara
 - Optimalisasi Tingkat Kenyamanan dan Keselamatan Operasi Penerbangan
 - Pengembangan fungsi jaringan jalan, pengembangan sarana angkutan dan pengembangan prasarana jalan.





- b. Meningkatkan peran ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan kabupaten sekitarnya melalui pengembangan infrastruktur.
 2. Strategi untuk kebijakan pengembangan ibukota Kabupaten Banggai di Luwuk dan sebagai pintu masuk-keluar (*multi-gate*) Kabupaten Banggai dalam menciptakan hubungan/keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya, terdiri atas:
 - a. Mengembangkan ibukota Kabupaten Banggai di Luwuk sebagai pusat pertumbuhan utama kabupaten; dan
 - Pemantapan pengembangan Kota Luwuk dengan skala pelayanan dan sistem jaringan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Promosi dan Kota Orde I di Sulawesi Tengah.
 - Pengembangan Kota Luwuk sebagai ibukota kabupaten diarahkan sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat pelayanan skala regional/Provinsi dan pusat koleksi-distribusi barang dan jasa bagi daerah belakangnya.
 - Pengembangan ini juga diarahkan pada kota-kota yang berfungsi sebagai pintu keluar/masuk dari wilayah luar, yaitu Luwuk, Bunta, Pagimana dan Tangkiang-Kintom.
 - b. Mengembangkan prasarana dan sarana kota sesuai dengan fungsi dan peran kota-kota agar terjadi pemerataan pelayanan dan sebagai pendukung fungsi jasa Kota Luwuk.
 - Pengembangan diprioritaskan pada pengembangan prasarana dan sarana dasar kota serta jaringan transportasi yang menghubungkan dengan wilayah pelayanannya.
 3. Strategi untuk kebijakan penguatan struktur kegiatan dan implikasi ruangnya bagi kota-kota sebagai pusat pertumbuhan pelayanan, terdiri atas:
 - a. Mengembangkan sistem pusat-pusat kota dan permukiman;
 - Pengembangan sistem kota-kota yang terdiri dari ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan untuk mengarahkan





pengembangan kegiatan fungsional perkotaan sesuai dengan jenis dan skala pelayanannya, pada pusat-pusat yang diharapkan dapat menjalankan dan menyeimbangkan perkembangan kota sesuai dengan struktur tata ruang wilayah kabupaten yang diinginkan.

- Mengembangkan dan mengoptimalkan peran Ibu Kota Kecamatan, baik sebagai PKL maupun PPK.
- Mengembangkan pusat pelayanan baru yang dapat berfungsi sebagai PKLp.
- b. Mengembangkan prasarana pusat-pusat kota kabupaten;
- c. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kota kecil dan pedesaan sebagai wilayah belakangnya.
 - Kota-kota kecil yang berfungsi sebagai ibukota kecamatan dalam sistem kota-kota perlu ditingkatkan untuk lebih dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan. Maka diarahkan agar kota-kota itu juga menjadi atau meningkatkan fungsinya sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah belakang (wilayah pedesaan).
 - strategi pengembangan kawasan perkotaan diarahkan melalui pengembangan pusat-pusat jasa, koleksi, dan distribusi produk-produk pedesaan, disesuaikan dengan kondisi dan potensi fungsi masing-masing kota.
 - Mengembangkan sistem pusat pedesaan yang terhirarki dengan baik dan mampu meningkatkan keterhubungan kawasan pedesaan dengan pusat-pusat kawasan perkotaan terdekatnya.
 - strategi pengembangan kawasan pedesaan diarahkan melalui pengembangan fasilitas dan infrastruktur serta permukiman yang dapat menunjang budidaya pedesaan dalam rangka mempertahankan luas lahan pertanian dan peningkatan produksi pertanian.





4. Strategi untuk kebijakan pengembangan aksesibilitas internal antar wilayah dalam kabupaten, terdiri atas:
 - a. Mengembangkan keterkaitan fungsi antar pusat-pusat kegiatan kabupaten; dan
 - b. Meningkatkan sistem jaringan prasarana utama yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan kabupaten dengan wilayah sekitarnya melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan laut, utamanya untuk membuka keterisoliran kawasan perdesaan terpencil.
5. Strategi untuk kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pendukung di wilayah kabupaten untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, terdiri atas:
 - a. Meningkatkan pelayanan dan distribusi sistem jaringan energi;
 - Optimalisasi tingkat pelayanan energy listrik melalui perluasan dan pemerataan jaringan, pengembangan jaringan baru, peningkatan infrastruktur pendukung, serta penambahan dan perbaikan system jaringan.
 - Perluasan jaringan listrik sampai kepelosok perdesaan, termasuk perdesaan kepulauan di wilayah Kabupaten Banggai.
 - Pengembangan sumber energi listrik terbarukan meliputi energi biomassa, mikro/minihidro dan panas bumi sebagai alternatif sumber energi konvensional.
 - Perencanaan pemanfaatan energi gas bumi bagi kebutuhan industri dan rumah tangga.
 - b. Meningkatkan pelayanan prasarana telekomunikasi untuk menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal serta membuka kawasan-kawasan yang terisolir;
 - Peranan prasarana telekomunikasi akan semakin meningkat terutama dalam proses pengembangan potensi ekonomi lokal serta mendukung kawasan-kawasan yang





sulit dijangkau oleh prasarana perhubungan/transportasi (terisolir/rawan bencana). Sebagai salah satu prasarana komunikasi yang cepat, telepon makin dibutuhkan untuk saat ini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan jumlah SST (Satuan Sambungan Telepon) dan ketersediaan prasarana telekomunikasi lainnya.

- Peningkatan jangkauan pelayanan telekomunikasi dan kemudahan mendapatkannya, contohnya melalui penyediaan menara/tower *Base Transceiver Station* (BTS) yang di gunakan secara bersama sehingga menjangkau pelosok perdesaan.
 - Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan Ibu Kota Kabupaten.
- c. Mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air untuk menunjang pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan air bersih; dan
- Peningkatan sistem jaringan irigasi yang di arahkan untuk mempertahankan kelangsungan ketersediaan dan distribusi air ke lahan pertanian.
 - Meningkatkan jaringan air baku untuk perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- d. Mengembangkan sistem jaringan prasarana persampahan dan sistem jaringan prasarana air limbah kabupaten.
- Optimalisasi penanganan sampah perkotaan dan perdesaan, melalui peningkatan prasarana pengelolaan sampah, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dan penanganan sampah berkelanjutan.
 - Meningkatkan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.





- Redesain jaringan drainase perkotaan Luwuk.
- 6. Strategi untuk kebijakan penguatan potensi kawasan lindung yang mendukung kualitas lingkungan yang berkelanjutan, terdiri atas:
 - a. Memantapkan kawasan lindung yang disesuaikan dengan karakteristik biogeofisik wilayah dan keunikan masing-masing;
 - Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah bangsa guna pembangunan berkelanjutan.
 - Memantapkan dan menetapkan kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, saluran irigasi, kawasan sekitar mata air, kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kawasan Suaka Alam, pelestarian alam dan cagar budaya serta Kawasan Rawan bencana Alam, sesuai kriteria teknis yang ditetapkan.
 - b. Mempertahankan kawasan lindung untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup;
 - Dalam upaya mempertahankan fungsi utama kawasan lindung yaitu untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian kehidupan hayati dan perlindungan terhadap sumber daya alam terutama konservasi air, tanah dan udara dalam wilayah pengaruhnya, maka kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan lindung tidaklah mengganggu fungsi lindungnya. Adapun areal yang perlu diamankan fungsi lindungnya tersebut adalah kawasan lindung yang telah ditetapkan kriterianya di atas, dan kawasan rawan bencana Alam.
 - Melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.





- c. Mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya agar tidak terjadi konflik kepentingan antar sektor;
- Dalam upaya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya, maka berlandaskan pada rencana penggunaan tanah yang mengacu pada berbagai peraturan terkait dan yang berhubungan dengan masalah pertanahan telah disusun pedoman penggunaan lahan kawasan budidaya oleh Badan Pertanahan Nasional, sebagai berikut:
 1. Penetapan lokasi kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah diarahkan pada tanah-tanah yang kurang produktif atau tanah kosong.
 2. Penetapan lokasi disesuaikan dengan kondisi fisik (kesatuan lahan) dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Penetapan lokasi disesuaikan melalui rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait, agar tidak terjadi konflik kepentingan.
 4. Tanah-tanah yang mempunyai kemiringan lebih 40% dan terletak pada kawasan budidaya ditetapkan menjadi kawasan lindung.
 5. Lokasi-lokasi yang akan diarahkan untuk pembangunan, diprioritaskan yang dekat dengan sarana pendukung seperti jaringan jalan.
 6. Dalam penyediaan areal untuk investor perlu disediakan areal untuk pengembangan usaha masyarakat.
 - Selain itu, dasar-dasar hukum yang mengatur kemungkinan adanya masalah dalam pengalokasian tanah untuk pengembangan sektor-sektor terkait yang kemungkinan





saling tumpang tindih, tertuang dalam SKB Menteri yang bersangkutan.

- d. Menjaga kualitas lingkungan di sekitar kawasan pertambangan.
7. Strategi untuk kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya lahan pertanian guna pengembangan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan darat, terdiri atas:
 - a. Meningkatkan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan darat berbasis masyarakat melalui program-program pembangunan guna meningkatkan ketahanan pangan;
 - b. Meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna untuk pertanian, perkebunan dan perikanan darat;
 - c. Mengembangkan sentra-sentra produksi dan sentra-sentra pemasaran produk unggulan pertanian dan perkebunan; dan
 - d. Meningkatkan infrastruktur, prasarana, dan sarana pertanian, perkebunan dan perikanan darat.
8. Strategi untuk kebijakan peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan, terdiri atas:
 - a. Mengembangkan budidaya perikanan dan kelautan yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil;
 - b. Meningkatkan kemampuan dan teknologi perikanan budidaya dan perikanan tangkap; dan
 - c. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas kawasan mangrove sebagai pendukung lingkungan pesisir.
9. Strategi untuk kebijakan pengembangan sektor-sektor usaha yang mendukung pembangunan kabupaten di bidang jasa, pertanian, perkebunan, perikanan darat, kelautan serta pengembangan pertambangan, terdiri atas:
 - a. Mengembangkan industri penyediaan jasa, industri pertanian dan industri kelautan yang memiliki keunggulan komparatif dan berorientasi ekspor;





- b. Memperkuat kemitraan antara usaha ekonomi besar dengan usaha perekonomian rakyat;
 - c. Mengelola sumberdaya pertambangan yang telah teridentifikasi guna kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan pasokan bagi kebutuhan daerah;
 - d. Mengembangkan sektor-sektor pertambangan potensial baru guna memacu perekonomian kabupaten; dan
 - e. Mengembangkan sektor minawisata dan sektor agrowisata.
10. Strategi untuk kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang jasa, pertanian, kelautan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya yang mendukung tujuan penataan ruang kabupaten, terdiri atas:
- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dengan menyelenggarakan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan guna mendukung pelayanan jasa, pertanian dan kelautan termasuk pendidikan yang mendukung bidang pertambangan;
 - b. Mengembangkan sistem pendidikan non formal yang berkelanjutan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat yang dapat menunjang kualitas hasil pertanian dan kelautan;
 - c. Menjamin ketersediaan informasi pertanian dan kelautan;
 - d. Menjamin tersedianya sarana kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat kabupaten; dan
 - e. Mengembangkan dan menjaga potensi budaya daerah dalam pendidikan formal maupun non formal.
11. Strategi untuk kebijakan pengembangan potensi kawasan yang memiliki nilai strategis bagi kabupaten, terdiri atas:
- a. Mendorong terbentuknya kawasan strategis serta meningkatkan kawasan tumbuh cepat yang mengacu pada sentra-sentra produksi dan kawasan unggulan;



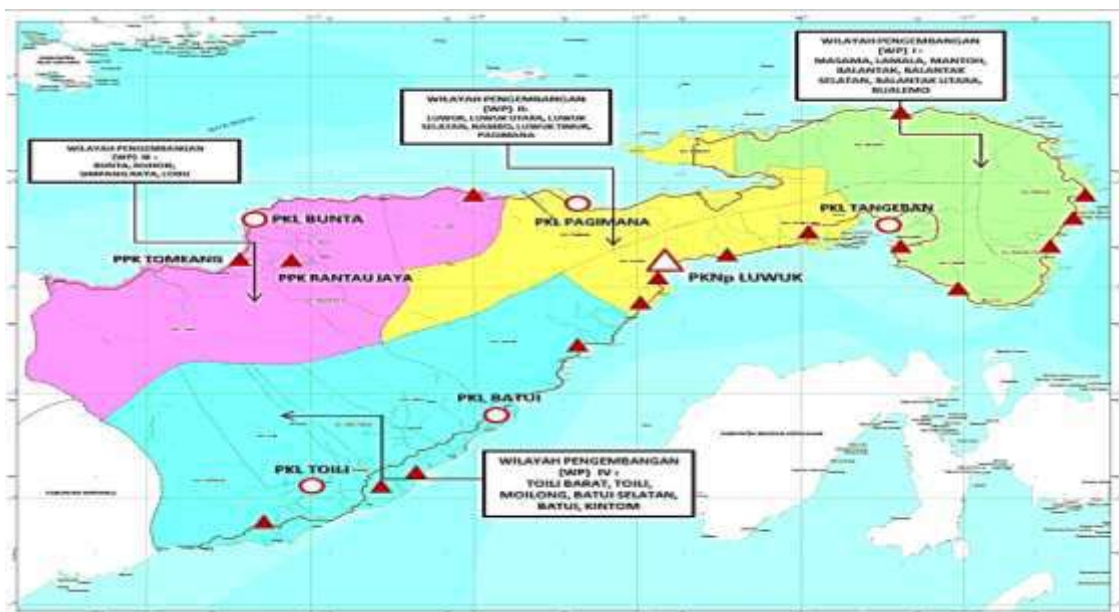


- b. Memberikan dukungan penataan ruang pada kawasan-kawasan yang mengakomodasikan kepentingan sektor-sektor strategis;
 - Dalam pengembangan kawasan-kawasan tertentu tersebut harus diperhatikan adanya sektor-sektor strategis serta tingkat kepentingan sektor-sektor tersebut terhadap pengembangan wilayah baik dalam hal potensi, kendala dan permasalahan-permasalahannya, serta ketersediaan dan kesiapan investasi untuk mendukungnya. Secara umum kawasan-kawasan tertentu yang perlu mendapat prioritas adalah:
 1. Sentra produksi pertanian tanaman pangan terutama padi dan palawija.
 2. Sentra produksi kehutanan yang tersebar di seluruh kabupaten yang menempati kawasan kehutanan di pedalaman pada kawasan budidaya di bagian tengah sampai perbatasan dengan kawasan lindung.
 3. Sentra produksi perkebunan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan menempati kawasan budidaya yang merupakan perbukitan.
 4. Sentra produksi perikanan mencakup pola penangkapan pada perairan laut dan maupun budidaya pantai (tambak ikan, rumput laut, udang, ubur-ubur dan lain-lain). Kegiatan budidaya biota laut ini perlu memperhatikan kelestarian lingkungan dan menghindari terjadinya konflik dengan kegiatan lain seperti kegiatan pariwisata, sandar perahu dan industri galangan kapal/perahu.
- c. Menjamin pengelolaan kawasan pertambangan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;



- d. Meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, budaya dan prasarana fisik pada kawasan yang relatif tertinggal agar terpacu pertumbuhan dan perkembangannya;
- Peningkatan kapasitas diharapkan dapat mendukung terjadinya keterkaitan (*linkage*) dengan wilayah lainnya. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah.
12. Strategi untuk kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, terdiri atas :
- a. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan.

Gambar 3.10
Wilayah Pengembangan dan Pusat-Pusat Kegiatan
di Kabupaten Banggai



Sumber : RTRW Kabupaten Banggai 2012-2032



Berdasarkan strategi dan kebijakan penataan ruang/pengembangan wilayah sebagaimana di atas, maka secara perwilayahan Kabupaten Banggai di bagi kedalam 4 (empat) wilayah pengembangan (WP) yaitu :

1. Wilayah Pengembangan Timur (WP 1) : Wilayah pengembangan ini terletak di sebelah timur, yaitu meliputi Kecamatan Bualemo, Kecamatan Balantak, Kecamatan Balantak Selatan, Kecamatan Balantak Utara, Kecamatan Mantoh, Kecamatan Masama, dan Kecamatan Lamala.
2. Wilayah Pengembangan Tengah (WP 2) : Wilayah pengembangan ini terletak dibagian tengah wilayah Kabupaten Banggai yaitu meliputi Kecamatan Pagimana, Kecamatan Luwuk Selatan, Kecamatan Luwuk, Kecamatan Luwuk Timur, Kecamatan Luwuk Utara dan Kecamatan Nambo.
3. Wilayah Pengembangan Utara (WP 3) : Wilayah pengembangan ini terletak dibagian utara yang meliputi Kecamatan Nuhon, Simpang Raya, Bunta dan Lobu.
4. Wilayah Pengembangan Selatan (WP 4) : Wilayah pengembangan ini meliputi Kecamatan Toili Barat, Toili, Moilong, Batui, Batui Selatan dan Kintom.

Selain wilayah pengembangan, strategi pengembangan wilayah Kabupaten Banggai diarahkan berdasarkan Kawasan Strategis yang telah di tetapkan dalam RTRW 2012-2032 yaitu :

1. Kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - a. KSK-pengembangan Kawasan Koridor Kota Luwuk (ibukota Kabupaten Banggai)-Kota Bonebakal (ibukota Kecamatan Lamala);
KSK-koridor Kota Luwuk-Bonebakal ini melintasi beberapa kecamatan di wilayah Kepala Burung yaitu Kecamatan Luwuk



Timur, Masama dan Lamala, yang selama ini relatif tertinggal dibanding Kecamatan lainnya. Untuk menggenerate pertumbuhan ekonomi wilayah kawasan tersebut perlu dilakukan upaya pengembangan potensi ekonominya, dengan fokus utama pengembangan teluk Lamala. Teluk lamala di lingkari oleh tiga kecamatan termaksud diatas. Untuk pengelolaan teluk ini, kedepan perlu di susun perencanaan kawasan Teluk Lamala secara lebih komprehensif.

b. KSK-pengembangan Kawasan Koridor Pantai Timur (Balantak dan sekitarnya);

Kawasan strategis ini meliputi kawasan pesisir di bagian timur wilayah Kabupaten Banggai, yang terdiri atas empat Kecamatan yaitu Kecamatan Balantak Utara, Kecamatan Balantak, Kecamatan Balantak Selatan dan Kecamatan Mantoh. Kondisi saat ini wilayah pesisir timur Kabupaten Banggai ini cenderung lebih tertinggal dibanding wilayah di bagian selatan. Pengembangan wilayah timur ini ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah tersebut. Strategi pengembangan Koridor Pantai Timur Balantak dan sekitarnya adalah:

- 1) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi.
- 2) Pengaturan pemanfaatan ruang.
- 3) Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa.
- 4) Pengembangan Pariwisata Bahari.
- 5) Optimalisasi potensi Perkebunan, perikanan, kelautan dan pertambangan.

c. KSK-pengembangan Kawasan Koridor Pantai Selatan (Batui Selatan-Toili-Moilong dan Toili Barat);

Kawasan ini merupakan kawasan yang sudah relatif maju dibandingkan wilayah lainnya dari sisi pengembangan sektor





pertanian. Kegiatan pada kawasan ini merupakan pertanian: padi sawah, sayur-sayuran, kakao, dan kelapa.

Strategi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian adalah:

- 1) Pengembangan jaringan infrastruktur pertanian.
- 2) Pengembangan teknologi pertanian.
- 3) Pengembangan fasilitas pertanian, seperti: pergudangan, pengolahan hasil-hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah, pasar hasil-hasil pertanian.
- 4) Pengembangan desa-desa yang menjadi pusat-pusat pertanian,
- 5) Penetapan Kawasan tanaman pangan berkelanjutan.

d. KSK-pengembangan Koridor Kintom-Batui

Koridor Kintom-Batui akan menjadi Koridor yang paling berkembang dari sisi ekonomi kedepan. Pada koridor ini terdapat antara lain :

- 1) Kawasan Industri Tangkiang-Uso
- 2) Pelabuhan Samudra Tangkiang
- 3) Pelabuhan Khusus CPO-Sawit
- 4) Rencana pelabuhan khusus lainnya seperti untuk industri pupuk dan metanol.
- 5) Rencana Pangkalan Danlanal TNI Angkatan Laut

e. KSK-pengembangan Kawasan Kurang Berkembang Bunta, Pagimana, Lobu dan Bualemo)

Kawasan tertinggal di Kabupaten Banggai adalah bagian utara (Daerah belakang Kecamatan Pagimana, Lobu, Bunta, Nuhon dan Simpang Raya) dan bagian timur (Kecamatan Balantak dan sekitarnya serta Kecamatan Bualemo). Keteringgalan wilayah ini disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana transportasi pada bagian wilayah Utara dan terutama Timur, sehingga aksesibilitas bagi pergerakan barang dan jasa





menjadi rendah. Di samping itu, secara geografis perkembangan berlangsung secara linier mengikuti jalur jalan Nasional dan Strategis Nasional.

Untuk menangani kawasan kurang berkembang/tertinggal sebagaimana di maksud di lakukan strategi pengembangan sebagai berikut:

- 1) Membentuk kesatuan ruang Kabupaten Banggai dengan pembangunan prasarana jalan lintas Utara-Selatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan beserta prasarana pelabuhan di wilayah bagian Timur.
 - 2) Memperkecil disparitas wilayah dengan pengembangan wilayah-wilayah sekitar kawasan tertinggal yang sudah relatif maju dan membentuk efek penjararan perkembangan (*spreadh effect*).
 - 3) Pembangunan sarana wilayah yang mendorong perekonomian.
 - 4) Identifikasi dan pengembangan sektor dan komoditas unggulan.
2. Kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu KSK- Kawasan Hutan Lindung Luwuk.



Gambar 3.11
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Banggai



Sumber : RTRW Kabupaten Banggai 2012-2032

Sesuai Arah Kebijakan Perwilayahan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2045, yang berbasis kluster perwilayahan sesuai arahan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai berada pada Kluster Industri **Morubang** dan Kluster Wisata Bahari dan Perikanan **Balatoju**. Masing-masing dengan arah Kebijakan Pengembangan Wilayah sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Morubang (Morowali, Morowali Utara, dan Banggai), Arah konsep pengembangan Wilayah Morubang adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembangan kawasan industri memiliki dampak multiplier effect terhadap pengembangan permukiman dan pusat kegiatan;
 - b. Hilirisasi perindustrian memerlukan aksesibilitas yang terpadu
 - c. Penggunaan sabuk hijau terhadap pengembangan kawasan budidaya yang berbatasan dengan kawasan lindung
 - d. Pengembangan sempadan pantai; dan





- e. Pemulihan lahan bekas tambang sebagai kawasan hulu perindustrian tambang.
2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Klaster Balatoju (sebagian Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Tojo Una-Una). Arah konsep pengembangan Wilayah Klaster Balatoju adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas obyek wisata bahari; pengembangan Kepulauan Togean sebagai Kawasan Destinasi Super Prioritas Nasional dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berbasis pengurangan risiko bencana;
 - b. Pembuatan suatu paket terintegrasi antar wilayah melalui peningkatan jalur pelayaran;
 - c. Penetapan kawasan perlindungan setempat;
 - d. Perlindungan dan pengawasan terhadap potensi ekowisata bahari;
 - e. Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang sebagai upaya pengurangan risiko bencana tsunami; dan
 - f. Peningkatan sarana prasarana pengembangan potensi perikanan dan pengolahannya

Detail dari Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Indonesia Emas 2045 terdiri atas 3 Pilar yang merupakan satu kesatuan dalam pengembangan tiap wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Sulawesi Tengah sebagai Pusat Ekonomi Global KTI
2. Sulawesi Tengah sebagai Penunjang Ekonomi IKN dan Industri Berbasis SDA
3. Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Indonesia yang Hijau, Ekologis, dan Produktif.





Setiap wilayah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah memiliki kekhususan arah pengembangan wilayahnya dalam mendukung pencapaian 3 pilar Sulawesi Tengah Emas 2045 sebagaimana di atas, yakni sebagaimana tabel 3.19 berikut :

Tabel 3.19
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045

	 KABUPATEN BANGGAI Klaster Industri MORUBANG Klaster Wisata Bahari dan Perikanan BALATOJU
PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANGGAI 2025-2045
1	KABUPATEN BANGGAI Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (MORUBANG: Industri, Pariwisata, Sekolah Vokasi dan Pendidikan Tinggi Lingkungan; BALATOJU: Perikanan, Kelautan, Pariwisata, Sekolah Vokasi dan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan) • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. <u>Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan</u> Kawasan industri berkelanjutan: • Hilirisasi hasil tambang • Hilirisasi hasil hutan produksi dan hasil perkebunan • UMKM, Ekonomi Kreatif, Korporasi Masyarakat Lokal • Konektivitas, infrastruktur, sarana prasarana • Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional • Riset industri, perikanan dan kelautan, dan lingkungan • Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi lingkungan, kelautan dan perikanan • Layanan jasa pariwisata MORUBANG-BALATOJU.
2	KABUPATEN BANGGAI MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA <u>Produk</u> : Hasil tambang, hasil hutan produksi, hasil perkebunan; produk industri berbasis SDA dan layanan pariwisata terintegrasi pada Klaster MORUBANG-BALATOJU.
3	KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI BAGIAN WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF • Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Revitalisasi/Restorasi Kawasan Tambang • Pengembangan Kota Hijau di Kawasan Industri dan Kawasan Tambang di Klaster Industri MORUBANG • Pengembangan Kawasan Minapolitan yang Produktif dan Ekologis di Klaster Wisata Bahari dan Perikanan BALATOJU • Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi MORUBANG-BALATOJU • Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi • Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif yang anti polusi • Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.



Program-Program Prioritas Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup Prioritas Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Banggai dan Program-Program Prioritas sesuai Tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029.

3.2.2.1 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Banggai masa menjabat Tahun 2025-2030, yang akan di wujudkan melalui 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, yaitu terdiri dari:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera.
2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah
3. Penyediaan, Pemenuhan dan Pemerataan Sarana Prasarana Dasar, TIK dan Konektivitas
4. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta kelestarian Lingkungan Hidup
5. Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
6. Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak dan Berkelanjutan.

Penjelasan rinci masing-masing prioritas daerah di maksud adalah sebagai berikut :

a. Prioritas Daerah 1 : Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera.

Prioritas daerah ini merupakan penjabaran sekaligus sebagai tujuan dari Misi 1 Sumber Daya Manusia Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing. Prioritas daerah ini di lakukan melalui





Transformasi pada seluruh siklus hidup manusia Kabupaten Banggai melalui Pendidikan, pelatihan dan penguasaan IPTEK, peningkatan Gizi dan Kesehatan Masyarakat, pengasuhan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif, pemajuan kebudayaan daerah (BABASALAN), beragama maslahat, serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran, perlindungan dan bantuan sosial yang adaptif.

b. Prioritas Daerah 2 : Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah

Prioritas daerah ini merupakan penjabaran sekaligus sebagai tujuan dari Misi 2 Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan. Prioritas Daerah ini di arahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan, dalam mewujudkan Banggai Swasembada pangan berkelanjutan. Banggai Swasembada Pangan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan yang beragam, bergizi dan seimbang, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.

Melalui Prioritas Daerah ini, hendak di wujudkan ekonomi daerah yang maju dan berkeadilan yang di tunjukan dengan pertumbuhan sektor ekonomi yang tinggi dan stabil, produktivitas kuat, berdaya saing dan nilai tambah tinggi. Hal ini di lakukan melalui percepatan terwujudnya industri sektor pangan (pertanian dan perikanan/kelautan), pengembangan koperasi dan UMKM, berbasis inovasi teknologi dan tranformasi digital. Serta peningkatan peran BUMD dalam pengelolaan potensi Minyak dan Gas Bumi maupun potensi unggulan lainnya.





c. Prioritas Daerah 3 : Penyediaan, Pemenuhan dan Pemerataan Sarana Prasarana Dasar, TIK dan Konektivitas yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Prioritas daerah ini merupakan penjabaran sekaligus sebagai tujuan dari Misi 3 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan yang di arahkan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi daerah. merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar yaitu air bersih, rumah layak huni dan sanitasi layak, serta infrastruktur wilayah yaitu jalan, jembatan, infrastruktur perhubungan, telekomunikasi dan ketenagalistrikan.

Sebagai dasar dan pijakan untuk Pembangunan daerah tahap berikutnya, maka percepatan Pemenuhan sarana prasarana dasar, konektivitas dan TIK yang berkualitas, ramah lingkungan, terjangkau dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Banggai, akan di lakukan melalui Misi 3 ini. Misi ini juga memberi arahan pengelolaan lingkungan hidup yang Lestari dan berketahanan, resiliensi bencana dan perubahan iklim.

d. Prioritas Daerah 4 : Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Misi ini di arahkan pada Upaya untuk mengurangi kesenjangan wilayah di Kabupaten Banggai dengan cara antara lain percepatan pencapaian desa Maju dan Mandiri, persiapan dan percepatan pemekaran wilayah desa, Kecamatan dan DOB, Pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan dan Tambahan Dana Kelurahan serta penciptaan kemandirian ekonomi perdesaan melalui optimalisasi BUMDes dan Koperasi Merah Putih.





e. Prioritas Daerah 5 : Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak dan Berkelanjutan.

Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berorientasi hasil, di lakukan transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang meliputi antara lain kelembagaan daerah yang efektif, penguatan system merit, manajemen talenta ASN, peningkatan aksesibilitas dan inklusifitas pelayanan public terpadu, serta transformasi layanan pemerintahan berbasis digital.

3.2.2.2 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Banggai

Sebagai percepatan terwujudnya fondasi untuk Banggai Emas 2045 sebagaimana tahapan awal dalam periodisasi RPJPD 2025-2045, dan juga sebagai kelanjutan dari program Bupati dan Wakil Bupati Banggai periode sebelumnya 2021-2024, maka dalam 5 Tahun kedepan pada periode 2025-2029 di tetapkan **9 Program Unggulan Kreatif dan Inovatif, 9 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) dan 9 Program Aksi** yang di sebut sebagai **NAWAITU**.

Sesuai Visi BERGERAK BERSAMA MENUJU GERBANG TIMUR SULAWESI TENGAH (GERakan BANGgai Terdepan, Inovatif, MajU dan sejahteRa), GERBANG diterjemahkan sebagai GERAKAN BANGGAI atau GERAKAN MEMBANGUN untuk mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Kabupaten yang Terdepan, Inovatif, Maju dan Sejahtera (TIMUR). Untuk mewujudkan GERBANG di maksud, maka di rumuskan program unggulan kreatif dan inovatif yaitu sebagai berikut :

- 1. GERBANG SEHAT**, Gerakan Banggai untuk mewujudkan derajat Kesehatan Masyarakat yang tinggi.
- 2. GERBANG CERDAS**, Gerakan Banggai untuk mewujudkan generasi cerdas, berahlak dan berbudi pekerti luhur serta menguasai IPTEK.





3. **GERBANG PRODUKTIF SEJAHTERA**, Gerakan Banggai untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil, sesuai dengan tuntutan pasar kerja, pengangguran berkurang, ekonomi produktif, investasi meningkat dan Tanpa miskin ekstrim,
4. **GERBANG BERBUDAYA**, Gerakan Banggai untuk melestarikan nilai-nilai budaya BAbasalan, serta pengembangan pariwisata daerah (alam dan Budaya).
5. **GERBANG DESA**, Gerakan Banggai membangun Desa untuk mencapai Desa Maju dan Mandiri.
6. **GERBANG PANGAN**, Gerakan Banggai untuk meningkatkan nilai tambah potensi pertanian, perikanan dan kelautan, dan peternakan, serta Gerakan Banggai untuk pemasaran pemanfaatan pekarangan oleh rumah tangga di seluruh wilayah Kabupaten Banggai.
7. **GERBANG DIGITAL DAN TERANG**, Gerakan Banggai untuk mempercepat terlaksananya Transformasi Digital di berbagai sektor, serta Gerakan Banggai untuk mewujudkan akses Masyarakat terhadap penerangan Listrik Rumah Tangga maupun penerangan jalan.
8. **GERBANG LAYAK, BERSIH DAN LANCAR**, Gerakan Banggai untuk pemenuhan sarana prasarana dasar (perumahan, air bersih, sanitasi layak), Banggai (Luwuk) Bersih, Lingkungan Hidup Terjaga dan Mitigasi Bencana serta Pemenuhan infrastruktur jalan dan jembatan.
9. **GERBANG AMANAH**, Gerakan Banggai untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Inovatif dan Akuntabel

Jabaran 9 (Sembilan) Program Unggulan Kreatif dan Inovatif kedalam kegiatan prioritas yang kemudian di sandingkan dengan





program nomenklatur dan Perangkat Daerah Penanggungjawab adalah sebagaimana tergambar pada tabel 3.20 berikut :

Tabel 3.20

**Jabaran Program Unggulan Kreatif dan Inovatif
(Nawaitu 2025-2029) kedalam kegiatan Prioritas, Program
Nomenklatur dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab**

No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
1.	Gerbang Cerdas		
	a. Bea Siswa Untuk Siswa dan Mahasiswa Miskin b. Bea Siswa untuk Guru. c. Hibah Pengembangan untuk Perguruan Tinggi Daerah d. Penerapan Dana Operasional Sekolah (DOS) untuk mendukung BOS e. Dukungan pembelajaran berbasis digital f. Pengembangan perpustakaan digital dan perpustakaan daerah g. Pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana PAUD, SD dan SMP sesuai standar h. Gerakan kembali ke sekolah bagi anak putus sekolah dan dewasa tidak sekolah (ADE kembali sekolah) i. Tanpa pungutan di sekolah	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra 4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan. 6. Program Pembinaan Perpustakaan	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Pendidikan 3. Bappeda 4. Dinas Sosial
2.	Gerbang Sehat		
	a. Kesehatan Gratis melalui Cakupan Kepesertaan BPJS Kesehatan (UHC Prioritas). b. Status BLUD untuk 27 Puskesmas c. Rintisan Rumah Sakit	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Kesehatann 3. Bappeda 4. RSUD Luwuk 5. Dinas Sosial 6. P2KBP3A



No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
	Tipe C atau D di 4 wilayah prioritas. d. Pengembangan Sarana Prasarana dan Peningkatan kualitas layanan RSUD Luwuk sebagai Rumah Sakit Rujukan. e. Dukungan Makan Bergizi Gratis f. Peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan Tingkat Pertama. g. Penurunan kematian Ibu dan Bayi melalui penguatan pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, peningkatan cakupan dan kualitas antenatal care, kunjungan neonatal dan nifas sesuai standar, melalui pengembangan Inovasi Ambulance dering Ibu Hamil. h. Penurunan Stunting melalui penanggulangan KEK pada Ibu Hamil, Pemberian makanan tambahan (PMT), suplementasi gizi mikro, pemenuhan ASI eksklusif dan pendampingan pada keluarga beresiko stunting serta Pengembangan inovasi Stunting i. Pengembangan Olah Raga Masal untuk pola hidup sehat. j. Pemerataan Tenaga Kesehatan	Kesehatan 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 6. Program Pengendalian Penduduk	



No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
3.	Gerbang Produktif Sejahtera		
	a. Peningkatan pelatihan Vokasional/ pelatihan kerja di LLK Luwuk maupun melalui program kemitraan/ pemagangan. b. Pelatihan life skill di PKBM. c. UMKM Naik Kelas d. Pengembangan Industri Kreatif e. PI 10 % melalui BEU f. Fasilitasi Wirausaha Pemuda, Santri, Wirausaha Sosial dan Komunitas. g. Perlindungan sosial melalui pemberian modal usaha, perijinan dan pendampingan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin, kepala keluarga Perempuan miskin dan penyandang disabilitas. h. Pemenuhan dan pengendalian harga bahan pokok murah dan bahan penting lainnya i. Pemberdayaan Perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. j. Perwujudan Kabupaten Layak Anak, Sekolah Ramah Anak untuk pemenuhan Hak Anak. k. Kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha. l. Inovasi TUMIS IKAN TERI berbasis DTSEN m. UGD Kemiskinan n. Cakupan BPJS Ketenagakerjaan.	1. Perempuan. 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. 4. Program Pemenuhan Hak Anak. 5. Program Perlindungan Khusus Anak 6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	1. Sekretariat Daerah 2. Bappeda 3. Dinas Koperasi dan UMKM 4. Dinas Tenaga Kerja 5. Dinas Sosial 6. P2KBP3A 7. Dinas Perdagangan 8. Dinas PTSP 9. Seluruh PD Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah



No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
4.	Gerbang Berbudaya		
	a. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan BABASALAN (seni, adat istiadat, bahasa daerah, cagar budaya, museum daerah dan olah raga tradisional) b. Pengembangan 4 destinasi pariwisata prioritas (KM 5, Teluk Lalong, Salodik dan Pulo Dua). c. Pengembangan Kampung /Desa Wisata) d. Moderasi Beragama dan pengembangan wawasan kebangsaan	1. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 2. Program Pengelolaan Permuseuman 3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional. 4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra. 5. Program Pengembangan Kebudayaan 6. Program Pembinaan Sejarah 7. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 8. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 9. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 10. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. 11. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 12. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Pariwisata 3. Badan Kesbangpol 4. Dinas PMD



No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
		Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 13. Program Pemasaran Pariwisata 14. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
5.	Gerbang Desa		
	a. Satu BUMDes 500 Juta b. Dukungan Koperasi Merah Putih c. Desa Maju dan Mandiri d. Desa/Kampung Wisata dan Tematik Lainnya	1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat adat. 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa 3. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi 5. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 7. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Dinas PMD 2. Dinas Pariwisata
6.	Gerbang Pangan dan Pekarangan		
	a. Germas pemanfaatan pekarangan, pengembangan 1 Juta 1 Pekarangan. b. Banggai Sejuta Ternak	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Dinas TPHP 2. Dinas Peternakan 3. Dinas Perikanan 4. Dinas Ketahanan Pangan



No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
	c. Pengarusutamaan produk unggulan kelapa d. Bantuan Alat Tangkap dan Budidaya ikan. e. Banggai Smart Farming. f. Industrialisasi pangan untuk diversifikasi dan daya saing produk pangan.	3. Program Perizinan Usaha Pertanian 4. Program Penyuluhan Pertanian 5. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan. 6. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 7. Program Penanganan Kerawanan Pangan 8. Program Pengawasan Keamanan Pangan 9. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 10. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 11. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 12. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 13. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
7.	Gerbang Digital dan Terang		
	a. Bebas Gelap (Akses Rumah Tangga ke listrik PLN dan Lampu Jalan). b. Bebas Blank Spot c. KabupatenKota pintar dan Desa pintar. d. Banggai Comand Centre e. Penarapan open Data, Satu Data Banggai. f. Penguatan SDM Digital	1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik. 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. 3. Program Pengembangan Perumahan. 4. Program Kawasan Permukiman.	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Kominfo 3. Dinas Koperasi dan UMKM 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Perkimtan



No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
	g. Peningkatan Infrastruktur TIK h. Digitasilisasi Sektor ekonomi (koperasi Modern dan UMKM Go Digital) i. Pengembangan Platform Digital	5. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). 6. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 7. Program Perekonomian dan Pembangunan	
8.	Gerbang Layak, Bersih dan Lancar		
	a. Banggai Tanpa Kekumuhan. b. Rintisan penerapan Smart Water Grid Management (SWGM) atau PDAM pintar. c. Pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir menuju ekonomi sirkular d. Peningkatan kemantapan jalan Kabupaten. e. Penataan Luwuk Water Front City, Green and Clean City dan Luwuk Kota Gas f. Kawasan Perkantoran Halimun g. Penanganan Banjir Kota Luwuk	1. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional. 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah. 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5. Program Penanggulangan Bencana. 6. Program Penataan Bangunan Gedung 7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 8. Program Penyelenggaraan Jalan	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas PUPR 3. Dinas LH 4. Dinas Perkimtan



No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
		9. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). 10. Program Pengelolaan Pelayaran 11. Program Pengembangan Perumahan. 12. Program Kawasan Permukiman. 13. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh. 14. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
9.	Gerbang Amanah		
	a. Banggai RB dan SAKIP A. b. Digitalisasi pelayanan publik c. Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). d. Penguatan kembali Laboratorium Inovasi untuk mewujudkan Banggai Inovatif. e. Kolaborasi pelaku Pembangunan dengan pendekatan PENTAHHELIX. f. Perencanaan dan Penganggaran untuk APBD Sehat. g. Penerapan System merit dan manajemen talenta. h. Peningkatan Fiskal Daerah	1. Program Pelayanan Penanaman Modal. 2. Program Pendaftaran Penduduk 3. Program Pencatatan Sipil 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 6. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 7. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 8. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 9. Program Penataan Organisasi	1. Sekretariat Daerah 2. Bappeda 3. BPKAD 4. Bappenda 5. BRIDA 6. BKPSDM 7. Inspektorat 8. DPMPD 9. Seluruh PD 10. Kecamatan 11. Kelurahan



No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
		10. Program Kepegawaian Daerah 11. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 12. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 13. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 14. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 15. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 16. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 17. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 18. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 19. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 20. Program Penyelenggaraan Pengawasan 21. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 22. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	



No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
		23. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 24. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 25. Program Penataan Organisasi 26. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 27. Program Kesejahteraan Rakyat 28. Program Perekonomian dan Pembangunan 29. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 30. Program Pengelolaan Arsip 31. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 32. Program Perizinan Penggunaan Arsip 33. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. 34. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. 35. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 36. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. 37. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	



No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
		38. Program Administrasi Pemerintahan Desa. 39. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

Keseluruhan GERBANG di atas di laksanakan secara kolaboratif, melibatkan seluruh stakeholders Pembangunan secara PENTAHHELIX yaitu pemerintah, akademisi, media masa, swasta pelaku usaha dalam dan luar negeri dan organisasi Non pemerintah, dalam bentuk GERAK BERSAMA.

Selanjutnya untuk menjabarkan lebih lanjut tentang Gerakan Banggai (Gerbang) di atas, di rumuskan 9 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yaitu sebagai berikut:

1. **Kabupaten/Kota Pintar dan Desa Pintar.**
2. **Puskesmas BLUD dan Rumah Sakit tipe D**
3. **Tuntas Wajar 9 Tahun menuju Wajar 13 Tahun**
4. **Germas Pemanfaatan Pekarangan.**
5. **Kecamatan/Kelurahan/Desa Maju dan Mandiri**
6. **PI 10 % melalui BUMD Banggai Energi Utama**
7. **Luwuk Water Front City, Green and Clean City dan Luwuk Kota Gas.**
8. **Pusat Perkantoran Halimun**
9. **Perguruan Tinggi Maju dan Unggul**

9 (sembilan) Program Cepat NAWAITU tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:



**1****KABUPATEN/KOTA PINTAR DAN DESA PINTAR**

Konsep Smart City atau kota cerdas sejatinya berdasar pada hal-hal fundamental, yakni inovasi dan teknologi. Smart City adalah suatu konsep pengembangan kota

yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup warganya. Setidaknya ada enam dimensi yang harus diimplementasikan untuk menjadi kabupaten/Kota cerdas, antara lain; 1) Tata kelola pemerintahan cerdas; 2) Konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi; 3) Kehidupan yang cerdas menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat dalam satu kabupaten/kota; 4) Tata kelola lingkungan dalam pembangunan; 5) Inovasi dalam memasarkan daerahnya dengan memanfaatkan teknologi; dan 6) Mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan era informasi saat ini.

Program ini akan di lakukan melalui pemenuhan Peta Jalan Pembangunan Smart City Kabupaten Banggai, baik jangka pendek maupun jangka menengah, untuk mewujudkan *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society* dan *Smart Environment*.

Sedangkan Smart Village atau Desa Cerdas yaitu desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya melalui pemanfaatan teknologi dan layanan digital dalam berbagai aspek Pembangunan desa, sehingga menuju kemandirian Desa.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat yang responsif, terjangkau, merata, professional, transparan dan akuntabel, maka penerapan BLUD bagi Puskesmas adalah alternatif yang tepat. BLUD Puskesmas di

**2****PUSKESMAS BLUD DAN RUMAH SAKIT TIPE C**

harapkan dapat merespon kebutuhan pelayanan Kesehatan secara lebih cepat dan efektif. Selain itu puskesmas dapat lebih berkembang dan mandiri. Selanjutnya untuk mendukung keberadaan RSUD Luwuk sebagai Rumah sakit Tipe B, beberapa Puskesmas di Kabupaten Banggai dapat di tingkatkan kelasnya menjadi Tipe D, sedangkan Rumah Sakit Pratama Pagimana di percepat untuk menjadi RSUD tipe C.

**3****TUNTAS WAJAR 9 TAHUN MENUJU WAJAR 13 TAHUN**

Berdasarkan data tahun 2023, Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Banggai yaitu 8,63 Tahun. Oleh karena itu dalam Upaya percepatan penuntasan wajar Dikdas 9 Tahun,

sebagai fondasi menuju wajar 13 tahun dalam Banggai Emas 2045, penanganan anak putus sekolah dan dewasa tidak sekolah menjadi prioritas, dan akan di tangani secara multi sektor, di samping Upaya untuk membenahi sarana prasarana Pendidikan serta pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan.



Inovasi Satu Juta Satu Pekarangan yang telah kami laksanakan di Periode sebelumnya telah menunjukkan hasil yang menggembirakan yaitu antara lain dapat di klaim sebagai salah



4

GERMAS PEMANFAATAN PEKARANGAN

satu penyebab turunnya angka kemiskinan ekstrim menjadi 0 % dan mampu mengendalikan inflasi di daerah. Olehnya itu program pemanfaatan pekarangan ini akan di masifkan secara masal menjadi satu Gerakan Masyarakat (Germas), agar menyentuh seluruh Rumah Tangga di Kabupaten Banggai.



5

KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA MAJU DAN MANDIRI

Pelimpahan kewenangan kepada Camat di sertai anggaran yang memadai dan tambahan Dana Kelurahan agar setara dengan Dana Desa Terendah di Kabupaten Banggai akan di lanjutkan lebih efektif, efisien dan

transparan, untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan Pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan. Sedangkan Desa akan di percepat untuk mencapai kondisi/kategori Desa Maju dan Mandiri serta mengentaskan 2 desa terbelakang yang berada di pegunungan.



Partisipating Interest (PI) merupakan keikutsertaan badan usaha termasuk BUMD dalam pengelolaan Wilayah Kerja Migas melalui PI 10 %. Manfaat bagi daerah yaitu antara lain memberikan keuntungan/ Profit bagi BUMD yang akan menambah pendapatan

daerah. Selain itu memberikan pengetahuan, pengalaman BUMD dalam pengelolaan Blok Migas. Di Tahun 2023 Kabupaten Banggai telah membentuk BUMD Banggai Energi Utama, sebagai pengelola PI. Upaya Pemenuhan persyaratan dan Langkah-Langkah strategis untuk percepatan penrimaan PI telah di lakukan. Hal inilah yang menjadi prioritas dalam 5 tahun kedepan untuk terwujudnya PI 10 % di Kabupaten Banggai.



7 LUWUK WATER FRONT CITY, GREEN AND CLEAN CITY DAN LUWUK KOTA GAS

Sebagai pintu Gerbang Bagian Timur Sulawesi Tengah, Kota Luwuk dalam 5 tahun kedepan akan di tata dengan konsep kota tepian air (*Water Front City*). Akan di wujudkan sebagai kota hijau dan bersih (*green and clean city*), dan juga akan di wujudkan sebagai Kota Gas. Luwuk Kota Gas

di maksudkan adalah kondisi Kota luwuk yang telah tersedia jaringan gas kota sebagai pemenuhan kebutuhan gas untuk rumah tangga dan

pelanggan kecil dengan menggunakan infrastruktur pipa gas. Dalam 5 tahun kedepan hal ini di prioritaskan untuk terwujud.

Pemusatan perkantoran Pemerintah Kabupaten Banggai di Kawasan Bukit Halimun di maksudkan untuk mempermudah serta mempercepat koordinasi dan komunikasi di antara sesama perangkat daerah, karena berada dalam satu

**8****PUSAT PERKANTORAN
HALIMUN**

Kawasan. Hal ini di kecualikan untuk unit kerja pelayanan publik. Pemusatan perkantoran di bukit halimun juga merupakan bagian dari Upaya penataan kota Luwuk.

**9****PERGURUAN TINGGI MAJU
DAN UNGGUL**

Kabupaten Banggai memiliki Perguruan Tinggi yang telah berumur kurang lebih 25 Tahun, yaitu Universitas Tompotika Luwuk dan Universitas Muhamadiyah Luwuk, serta satu Pendidikan diploma AMIK Nural

Luwuk. Ketiga PT ini telah melahirkan ribuan sarjana yang tersebar di beberapa wilayah timur Sulawesi, termasuk dari kepulauan Sula. Hal ini merupakan potensi yang dapat di kembangkan oleh Pemda untuk menjadikan Kabupaten Banggai (kota Luwuk) sebagai pusat pelayanan Pendidikan tinggi di Timur Sulawesi Tengah, melalui dukungan sarana prasarana dan tenaga pengajar melalui Hibah.



Selanjutnya Program Unggulan Kreatif dan Inovatif juga di jabarkan kedalam 9 PROGRAM AKSI yang lebih konkrit sebagai berikut:

1. **TANPA PUNGUTAN**, dalam semua bentuk pelayanan Pendidikan, Kesehatan, perizinan, serta layanan pemerintahan dan layanan publik lainnya.
2. **TANPA MISKIN EKSTRIM**, di lakukan melalui inovasi TUMIS IKAN TERI (Tuntaskan Kemiskinan Melalui Kegiatan Terintegrasi), untuk menjaga tumbuhnya miskin ekstrim baru , maupun kemiskinan absolut lainnya.
3. **TANPA KEKUMUHAN**, yaitu mengentaskan Kawasan Kumuh menjadi Kawasan yang layak huni.
4. **TANPA SAMPAH**, sebagai program untuk mewujudkan Luwuk Green and Clean city.
5. **BEBAS GELAP**, sebagai kelanjutan dari BANGGAI Terang, untuk peningkatan akses Masyarakat terhadap Listrik rumah tangga dan penerangan jalan.
6. **TANPA PUTUS SEKOLAH**, sebagai kelanjutan inovasi Anak dan Dewasa Kembali ke sekolah.
7. **AMBULANCE DERING**, sebagai pengembangan dari Inovasi Ambulance Dering Ibu Hamil, yang di perluas kepada seluruh jenis pelayanan Kesehatan, dengan jangkauan yang di perluas.
8. **GERMAS PEMANFAATAN PEKARANGAN**, sebagai pengembangan dari Inovasi 1 Juta 1 Pekarangan, akan di masalkan kepada seluruh Rumah Tangga di perkotaan dan perdesaan menjadi Gerakan Masal/Masyarakat.
9. **UGD KEMISKINAN**, merupakan Unit Gawat Darurat yang bertugas melayani dan menyelesaikan masalah-masalah yang di alami Masyarakat miskin secara cepat, tepat dan responsif.



3.2.2.3 Upaya Transformatif Super Prioritas dalam RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045

Game Changer dapat di artikan sebagai sesuatu hal yang dapat menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap suatu Tindakan atau cara berfikir. Dengan demikian Upaya transformatif super prioritas kabupaten Banggai 2025-2045 dapat di maknai sebagai Tindakan, kegiatan atau transformasi pada bidang tertentu yang super prioritas untuk di laksanakan, karena akan berdampak besar terhadap perwujudan Banggai Emas 2045.

Gambar 3.12
Upaya Transformatif Super Prioritas (*game changers*)
Banggai Emas 2045



Upaya Transformatif super prioritas di maksud juga akan mulai di laksanakan dalam periode perencanaan RPJMD 2025-2029 sebagai tahapan pertama yakni sebagai berikut :

1. SDM Unggul dan Berdaya Saing melalui Transformasi Sosial:
 - a. Percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah)



- b. Perwujudan *Green Hospital* RSUD Luwuk dan Pembangunan Rumah Sakit Tipe C.
 - c. Penuntasan stunting
 - d. Penuntasan kemiskinan menjadi di bawah 5 %.
 - e. Perguruan Tinggi Daerah maju dan Unggul
2. Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif melalui Transformasi Ekonomi:
 - a. Perwujudan Smart Farming
 - b. Industrialisasi pangan untuk diversifikasi dan daya saing produk pangan
 - c. Banggai Sejuta Ternak
 - d. Percepatan realisasi PI 10 % melalui Banggai Energi Utama (BEU).
 - e. Transformasi Digital Sektor-sektor perekonomian.
 - f. Pengarusutamaan produk unggulan kelapa.
3. Transformasi Tata Kelola untuk Pemerintahan yang Baik dan Inovatif
 - a. Percepatan Digitalisasi pemerintahan
 - b. Transformasi perencanaan dan penganggaran
 - c. Banggai Diklat HUB.
4. Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi Sebagai Landasan Transformasi
 - a. Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah
 - b. Pelestarian budaya BABASALAN
5. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkedilan
 - a. Percepatan realisasi DOB baru, Provinsi dan kabupaten.
 - b. Perwujudan *Luwuk Waterfront City* gerbang Timur Sulawesi Tengah.
 - c. Percepatan desa mandiri berdasarkan Indeks Desa.





6. Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
 - a. Percepatan ketuntasan pemenuhan prasarana dasar (Banggai Tanpa Kekumuhan).
 - b. Pemerataan dan penuntasan infrastruktur konektivitas.
 - c. Penerapan *Smart Water Grid Management* di SPAM/PDAM Luwuk.

3.2.2.4 Dukungan Terhadap Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo Gibran

Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah dengan program prioritas Pembangunan nasional atau program prioritas presiden dan wakil presiden adalah hal penting, untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan antara pemerintah pusat, Provinsi, dan kabupaten. RPJMN sebagai pedoman pembangunan nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai acuan pembangunan regional, serta RPJMD Kabupaten Banggai sebagai dokumen pembangunan daerah harus terintegrasi agar pelaksanaan pembangunan berjalan selaras, efektif, dan berkesinambungan. Melalui keselarasan ini, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak hanya diarahkan untuk menjawab kebutuhan daerah, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan nasional secara sinergis.

Visi Presiden periode 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam 8 (Delapan) Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 Program Prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.





Sumber: Lampiran I, Perpres Nomor 12 Tahun 2025

Kabupaten Banggai memberikan dukungan terhadap pelaksanaan 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo Gibran melalui penyesuaian arah kebijakan dan program-program unggulan daerah (NAWAITU), baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai kewenangan dan lokalitas daerah.

Tabel 3.21
Dukungan NAWAITU terhadap 17 Program Prioritas
Prabowo Gibran

No.	17 Program Prioritas Prabowo Gibran	NAWAITU
1.	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	Program Kreatif Inovatif Gerbang Pangan dan Pekarangan ▪ Germas pemanfaatan pekarangan, ▪ Banggai Sejuta Ternak ▪ Bantuan Alat Tangkap dan Budidaya ikan. ▪ Banggai Smart Farming.



No.	17 Program Prioritas Prabowo Gibran	NAWAITU
		- Industrialisasi pangan untuk diversifikasi dan daya saing produk pangan. PHTC Banggai : - Germas Pemanfaatan Pekarangan Program Aksi : - Germas Pemanfaatan Pekarangan
2.	Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	Program Kreatif Inovatif Gerbang Amanah - Perencanaan dan Penganggaran untuk APBD Sehat - Peningkatan Fiskal Daerah
3.	Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi	Program Kreatif Inovatif Gerbang Amanah - Banggai RB dan SAKIP A. - Digitalisasi pelayanan publik - Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). - Penguatan kembali Laboratorium Inovasi untuk mewujudkan Banggai Inovatif. - Kolaborasi pelaku Pembangunan dengan pendekatan PENTAHELIX - Penerapan System merit dan manajemen talenta. PHTC Banggai : Pusat Perkantoran Halimun Program Aksi : Tanpa Pungutan
4.	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Program Kreatif Inovatif Gerbang Amanah - Banggai RB dan SAKIP A. - Digitalisasi pelayanan publik - Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). - Perencanaan dan Penganggaran untuk APBD Sehat - Peningkatan Fiskal Daerah - Penerapan System merit dan manajemen talenta.



No.	17 Program Prioritas Prabowo Gibran	NAWAITU
		Program Aksi : Tanpa Pungutan
5.	Pemberantasan Kemiskinan	Program Kreatif Inovatif 1. Gerbang Sehat ▪ Kesehatan Gratis melalui Cakupan Kepesertaan BPJS Kesehatan (UHC Prioritas). ▪ Penurunan kematian Ibu dan Bayi melalui penguatan pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, peningkatan cakupan dan kualitas antenatal care, kunjungan neonatal dan nifas sesuai standar, melalui pengembangan Inovasi Ambulance dering Ibu Hamil. ▪ Penurunan Stunting melalui penanggulangan KEK pada Ibu Hamil, Pemberian makanan tambahan (PMT), suplementasi gizi mikro, pemenuhan ASI eksklusif dan pendampingan pada keluarga beresiko stunting serta Pengembangan inovasi Stunting 2. Gerbang Cerdas ▪ Beasiswa Untuk Siswa dan Mahasiswa Miskin ▪ Gerakan kembali ke sekolah bagi anak putus sekolah dan dewasa tidak sekolah (ADE kembali sekolah) ▪ Tanpa pungutan di sekolah 3. Gerbang Produktif Sejahtera ▪ Perlindungan sosial melalui pemberian modal usaha, perijinan dan pendampingan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin, kepala keluarga Perempuan miskin dan penyandang disabilitas.



No.	17 Program Prioritas Prabowo Gibran	NAWAITU
		▪ Pemberdayaan Perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. ▪ Inovasi TUMIS IKAN TERI berbasis DTSEN ▪ UGD Kemiskinan ▪ Cakupan BPJS Ketenagakerjaan 4. Gerbang Desa ▪ Satu BUMDes 500 Juta ▪ Desa Maju dan Mandiri 5. Gerbang Digital dan Terang ▪ Bebas Gelap (Akses Rumah Tangga ke listrik PLN dan Lampu Jalan). ▪ Digitasilisasi Sektor ekonomi (koperasi Modern dan UMKM Go Digital) 6. Gerbang Layak, Bersih dan Lancar ▪ Banggai Tanpa Kekumuhan. ▪ Peningkatan kemantapan jalan Kabupaten PHTC Banggai : ▪ Tuntas Wajar 9 Tahun menuju Wajar 13 Tahun ▪ Germas Pemanfaatan Pekarangan ▪ Kecamatan/Kelurahan/Desa Maju dan Mandiri Program Aksi : ▪ Tanpa Kekumuhan ▪ Tanpa Miskin Ekstrim ▪ Bebas Gelap ▪ Tanpa Putus Sekolah ▪ Germas Pemanfaatan Pekarangan ▪ UGD Kemiskinan
6.	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	Program dan Kegiatan lintas sektor terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba
7.	Menjamin Tersediannya Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia; Peningkatan BPJS	Program Kreatif Inovatif Gerbang Sehat



No.	17 Program Prioritas Prabowo Gibran	NAWAITU
	Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk rakyat	Kesehatan Gratis melalui Cakupan Kepesertaan BPJS Kesehatan (UHC Prioritas). PHTC Banggai : Ambulance Dering
8.	Penguatan Pendidikan sains dan teknologi serta digitalisasi	Program Kreatif Inovatif Gerbang Cerdas - Dukungan pembelajaran berbasis digital - Pengembangan perpustakaan digital dan perpustakaan daerah - Pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana PAUD, SD dan SMP sesuai standar PHTC Banggai : - Kabupaten/Kota Pintar dan Desa Pintar - Perguruan Tinggi Maju dan Unggul
9.	Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10.	Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, anak serta Penyandang Disabilitas	Program Kreatif Inovatif Gerbang Produktif SEjahtera - Pemberdayaan Perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. - Perwujudan Kabupaten Layak Anak, Sekolah Ramah Anak untuk pemenuhan Hak Anak.
11.	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	Program Kreatif Inovatif Gerbang Layak, Bersih dan Lancar - Pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir menuju ekonomi sirkular - Penataan Luwuk Water Front City, Green and Clean City dan Luwuk Kota Gas PHTC Banggai : Luwuk Water Front City, Green and Clean City dan Luwuk Kota Gas Program Aksi : - Tanpa Kekumuhan



No.	17 Program Prioritas Prabowo Gibran	NAWAITU
		Tanpa Sampah
12.	Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih dan Pestisida langsung ke Petani	Program Kreatif Inovatif Gerbang Pangan dan Pekarangan - Germas Pemanfaatan Pekarangan - Banggai Sejuta Ternak - Pengarusutamaan Produk Unggulan Kelapa - Bantuan Alat Tangkap dan Budidaya ikan. - Banggai Smart Farming. - Industrialisasi pangan untuk diversifikasi dan daya saing produk pangan PHTC Banggai : Germas Pemanfaatan Pekarangan Program Aksi : Germas Pemanfaatan Pekarangan
13.	Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	Program Kreatif Inovatif Gerbang Layak, Bersih dan Lancar - Banggai Tanpa Kekumuhan Program Aksi : - Tanpa Kekumuhan - Tanpa Sampah
14.	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-mandiri lainnya	Program Kreatif Inovatif - Gerbang Produktif Sejahtera - UMKM Naik Kelas - Pengembangan Industri Kreatif - Fasilitasi Wirausaha Pemuda, Santri, Wirausaha Sosial dan Komunitas - Kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha - Gerbang Digital dan Terang - Digitasilisasi Sektor ekonomi (koperasi Modern dan UMKM Go Digital) - Pengembangan Platform Digital PHTC Banggai : - Kabupaten/Kota Pintar dan Desa Pintar



No.	17 Program Prioritas Prabowo Gibran	NAWAITU
		▪ Luwuk Water Front City, Green and Clean City dan Luwuk Kota Gas
15.	Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasikan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-luasnya dalam Mewujudkan Keadilan ekonomi	Program Kreatif Inovatif 1. Gerbang Produktif Sejahtera ▪ PI 10 % melalui BEU ▪ Kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha 2. Gerbang Pangan ▪ Pengarusutamaan produk unggulan kelapa ▪ Industrialisasi pangan untuk diversifikasi dan daya saing produk pangan. ▪ Smart Farming PHTC Banggai : ▪ PI 10 % melalui BUMD Banggai Energi Utama
16.	Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah	Program Kreatif Inovatif Gerbang Berbudaya ▪ Moderasi Beragama dan pengembangan wawasan kebangsaan
17.	Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan prestasi Olah Raga	Program Kreatif Inovatif 1. Gerbang Berbudaya ▪ Pemajuan dan pelestarian kebudayaan BABASALAN (seni, adat istiadat, bahasa daerah, cagar budaya, museum daerah dan olah raga tradisional) ▪ Pengembangan 4 destinasi pariwisata prioritas (KM 5, Teluk Lalong, Salodik dan Pulo Dua). 2. Gerbang Sehat ▪ Pengembangan Olah Raga Masal untuk pola hidup sehat 3. Gerbang Produktif Sejahtera ▪ Pengembangan Industri Kreatif



Dukungan **NAWAITU** terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo Gibran, sebagaimana tabel 3.22 berikut :

Tabel 3.22

Dukungan NAWAITU terhadap 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo Gibran

No.	8 Program PHTC Prabowo Gibran	NAWAITU
1.	Memberi Makan Siang dan Susu Gratis di Sekolah dan Pesantren, serta Bantuan Gizi untuk Anak Balita dan Ibu Hamil	Program Kreatif Inovatif Gerbang Sehat ▪ Penurunan Stunting melalui penanggulangan KEK pada Ibu Hamil, Pemberian makanan tambahan (PMT), suplementasi gizi mikro, pemenuhan ASI eksklusif dan pendampingan pada keluarga beresiko stunting serta Pengembangan inovasi Stunting ▪ Dukungan Makan Bergizi Gratis Program Aksi ▪ Tanpa Miskin Ekstrim ▪ Ambulance Dering ▪ Germas Pemanfaatan Pekarangan
2.	Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten	Program Kreatif Inovatif Gerbang Sehat ▪ Kesehatan Gratis melalui Cakupan Kepesertaan BPJS Kesehatan (UHC Prioritas). ▪ Status BLUD untuk 27 Puskesmas ▪ Rintisan Rumah Sakit Tipe C atau D di 4 wilayah prioritas. ▪ Pengembangan Sarana Prasarana dan Peningkatan kualitas layanan RSUD Luwuk sebagai Rumah Sakit Rujukan.



No.	8 Program PHTC Prabowo Gibran	NAWAITU
		▪ Peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan Tingkat Pertama. ▪ Pemerataan Tenaga Kesehatan PHTC Banggai : Puskesmas BLUD dan Rumah Sakit tipe D Program Aksi ▪ Ambulance Dering
3.	Mencetak dan meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan Nasional	Program Kreatif Inovatif Gerbang Pangan ▪ Germas pemanfaatan pekarangan, ▪ Pengarusutamaan produk unggulan kelapa ▪ Industrialisasi pangan untuk diversifikasi dan daya saing produk pangan. ▪ Smart Farming PHTC Banggai : Germas Pemanfaatan Pekarangan Program Aksi Germas Pemanfaatan Pekarangan
4.	Membangun Sekolah Unggul terintegrasi di setiap Kabupaten dan memperbaiki sekolah sekolah yang perlu renovasi	Program Kreatif Inovatif Gerbang Cerdas ▪ Pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana PAUD, SD dan SMP sesuai standar ▪ Dukungan pembelajaran berbasis digital ▪ Pengembangan perpustakaan digital dan perpustakaan daerah PHTC Banggai : Tuntas Wajar 9 Tahun menuju Wajar 13 Tahun Program Aksi ▪ Tanpa Putus Sekolah



No.	8 Program PHTC Prabowo Gibran	NAWAITU
		Tanpa Pungutan
5.	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	Program Kreatif Inovatif Gerbang Produktif Sejahtera - Peningkatan pelatihan Vokasional/ pelatihan kerja di LLK Luwuk maupun melalui program kemitraan/ pemagangan - Pelatihan life skill di PKBM. - Perlindungan sosial melalui pemberian modal usaha, perijinan dan pendampingan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin, kepala keluarga Perempuan miskin dan penyandang disabilitas. - Inovasi TUMIS IKAN TERI berbasis DTSEN - UGD Kemiskinan - Cakupan BPJS Ketenagakerjaan. Program Aksi - Tanpa Miskin Ekstrim - UGD Kemiskinan
6.	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan) TNI/POLRI dan pejabat negara	Menyesuaikan kewenangan Kabupaten
7.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur Desa, BLT dan menyediakan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan	Program Kreatif Inovatif - Gerbang Desa - Desa Maju dan Mandiri - Gerbang Produktif Sejahtera - Perlindungan sosial melalui pemberian modal usaha, perijinan dan pendampingan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin, kepala keluarga Perempuan miskin dan penyandang disabilitas.



No.	8 Program PHTC Prabowo Gibran	NAWAITU
		3. Gerbang Layak, Bersih dan Lancar ▪ Banggai Tanpa Kekumuhan. ▪ Pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir menuju ekonomi sirkular Program Aksi ▪ Tanpa Miskin Ekstrim ▪ Tanpa Kekumuhan ▪ Tanpa Sampah
8.	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan Meningkatkan Rasio Penerimaan Negara terhadap Produk Domestik (PDB) ke 23%	Menyesuaikan kewenangan Kabupaten

Sebagai langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama. Kegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini juga disusun dengan memerhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan stakeholders lainnya.

Kegiatan Prioritas Utama yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat juga memiliki lokus pelaksanaan di daerah hingga ke level provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama di suatu daerah pada dasarnya dapat didukung oleh program-program prioritas daerah yang serupa dan terkait. Dukungan program-program prioritas daerah akan meningkatkan daya ungkit dari Kegiatan Prioritas Utama terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.



Gambar 3.13
Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029 yang Perlu di
Dukung Program Prioritas Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2025-2029



Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR



Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut



Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Yang Berkualitas (PHTC)



Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan



Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir



Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya



Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)



Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU



Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan



Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja



Penurunan Kematian Ibu dan Anak



Konservasi Sumber Daya Air



Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya

Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati

Pengembangan Pangan Hewani



Pengembangan Hilirisasi Nikel

Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja

Pengembangan Hilirisasi Kelapa



Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut

Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan

Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau



Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut

Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut

Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS

Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029 di dukung dengan program prioritas daerah Kabupaten Banggai yang tertuang dalam NAWAITU yaitu 9 Program Kreatif dan Inovatif, 9 Program Hasil Terbaik Cepat (PTHC) dan 9 Program Aksi Bupati dan Wakil Bupati Banggai serta Program-Program Prioritas Daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2025-2029.

Selain Kegiatan Prioritas Utama di atas, di tetapkan juga Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai langkah konkrit teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama. Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang



memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk kogram Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan. Proyek Strategis Nasional antara lain Program Makan Bergizi Gratis, proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

Adapun dukungan NAWAITU terhadap Proyek Startegis Nasional (PSN) RPJMN 2025-2029 yaitu sebagaimana tabel 3.23 berikut :

Tabel 3.23
Dukungan NAWAITU RPJMD Kabupaten Banggai terhadap
Proyek Strategis Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

No.	Proyek Strategis Nasional (PSN)	NAWAITU
1.	Program Makan Bergizi Gratis	Program Kreatif Inovatif Gerbang Sehat ▪ Dukungan Program Makan Bergizi Gratis ▪ Rintisan Rumah Sakit Tipe C atau D di 4 wilayah prioritas. ▪ Pengembangan Sarana Prasarana dan Peningkatan kualitas layanan RSUD Luwuk sebagai Rumah Sakit Rujukan. ▪ Kesehatan Gratis melalui Cakupan Kepesertaan BPJS Kesehatan (UHC Prioritas). PHTC Banggai : ▪ Puskesmas BLUD dan Rumah Sakit tipe D/C ▪ Germas Pemanfaatan Pekarangan
2.	Pengembangan Rumah Sakit Lengkap di Kabupaten Kota	
3.	Program Penuntasan TBC	



No.	Proyek Strategis Nasional (PSN)	NAWAITU
		Program Aksi : - Ambulance Dering - Germas Pemanfaatan Pekarangan
4.	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Berkualitas (PHTC)	Program Kreatif Inovatif Gerbang Cerdas - Pengembangan perpustakaan digital dan perpustakaan daerah - Pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana PAUD, SD dan SMP sesuai standar PHTC Banggai : - Tuntas Wajar 9 Tahun menuju Wajar 13 Tahun Program Aksi : Tanpa Putus Sekolah
5.	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)	
6.	Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat	
7.	Layanan Irigasi pendukung lumbung pangan nasional	
8.	Peningkatan produksi daging sapi dan susu sapi	- Banggai Sejuta Ternak - Pengarusutamaan produk unggulan kelapa - Industrialisasi pangan untuk diversifikasi dan daya saing produk pangan
9.	Program Hilirisasi Nikel, Timah, Bauksit dan Tembaga	
10.	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Program Kreatif Inovatif Gerbang Digital dan Terang - Bebas Blank Spot - KabupatenKota pintar dan Desa pintar. - Banggai Comand Centre - Penarapan open Data, Satu Data Banggai. - Penguatan SDM Digital - Peningkatan Infrastruktur TIK - Pengembangan Platform Digital



No.	Proyek Strategis Nasional (PSN)	NAWAITU
		PHTC Banggai : Kabupaten/Kota Pintar dan Desa Pintar
11.	Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1 : 5.000) seluruh wilayah Indonesia	Berdasarkan program Perangkat Daerah sesuai kewenangan daerah
12.	Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Kreatif Inovatif Gerbang Layak, Bersih dan Lancar ▪ Banggai Tapa Kekumuhan PHTC Banggai : Kecamatan/Kelurahan/Desa Maju dan Mandiri Program Aksi : Tanpa Kekumuhan

Sedangkan untuk dukungan NAWAITU RPJMD Kabupaten Banggai terhadap program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24

Dukungan NAWAITU RPJMD Kabupaten Banggai terhadap Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sesuai RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

No.	Program BERANI RPJMD Sulteng 2025-2029	NAWAITU
1.	Berani Cerdas (Nambaso)	Program Kreatif Inovatif 1. Gerbang Cerdas ▪ Beasiswa Untuk Siswa dan Mahasiswa Miskin ▪ Bea Siswa untuk Guru. ▪ Hibah Pengembangan untuk Perguruan Tinggi Daerah ▪ Dukungan pembelajaran berbasis digital ▪ Pengembangan perpustakaan digital dan perpustakaan



No.	Program BERANI RPJMD Sulteng 2025-2029	NAWAITU
		daerah ▪ Pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana PAUD, SD dan SMP sesuai standar ▪ Gerakan kembali ke sekolah bagi anak putus sekolah dan dewasa tidak sekolah (ADE kembali sekolah) ▪ Tanpa pungutan di sekolah 2. Gerbang Produktif Sejahtera ▪ Peningkatan pelatihan Vokasional/ pelatihan kerja di LLK Luwuk maupun melalui program kemitraan/ pemagangan. ▪ Pelatihan life skill di PKBM. PHTC Banggai : Tuntas Wajar 9 Tahun menuju Wajar 13 Tahun Program Aksi Tanpa Pungutan
2.	Berani Sehat	Program Kreatif Inovatif Gerbang Sehat ▪ Kesehatan Gratis melalui Cakupan Kepesertaan BPJS Kesehatan (UHC Prioritas). ▪ Status BLUD untuk 27 Puskesmas ▪ Rintisan Rumah Sakit Tipe C atau D di 4 wilayah prioritas. ▪ Pengembangan Sarana Prasarana dan Peningkatan kualitas layanan RSUD Luwuk sebagai Rumah Sakit Rujukan. ▪ Peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan Tingkat Pertama. ▪ Penurunan kematian Ibu dan Bayi melalui penguatan pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, peningkatan cakupan dan kualitas antenatal care, kunjungan neonatal dan nifas



No.	Program BERANI RPJMD Sulteng 2025-2029	NAWAITU
		sesuai standar, melalui pengembangan Inovasi Ambulance dering Ibu Hamil. ▪ Penurunan Stunting melalui penanggulangan KEK pada Ibu Hamil, Pemberian makanan tambahan (PMT), suplementasi gizi mikro, pemenuhan ASI eksklusif dan pendampingan pada keluarga beresiko stunting serta Pengembangan inovasi Stunting ▪ Pemerataan Tenaga Kesehatan PHTC Banggai : Puskesmas BLUD dan Rumah Sakit tipe D Program Aksi ▪ Ambulance Dering
3.	Berani Sejahtera	Program Kreatif Inovatif 1. Gerbang Sehat ▪ Dukungan Makan Bergizi Gratis 2. Gerbang Produktif Sejahtera ▪ UMKM Naik Kelas ▪ Pengembangan Industri Kreatif ▪ Fasilitasi Wirausaha Pemuda, Santri, Wirausaha Sosial dan Komunitas. ▪ Perlindungan sosial melalui pemberian modal usaha, perijinan dan pendampingan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin, kepala keluarga Perempuan miskin dan penyandang disabilitas. ▪ Pemenuhan dan pengendalian harga bahan pokok murah dan bahan penting lainnya ▪ Inovasi TUMIS IKAN TERI berbasis DTSEN ▪ UGD Kemiskinan 3. Gerbang Layak Bersih dan Lancar



No.	Program BERANI RPJMD Sulteng 2025-2029	NAWAITU
		Banggai Tanpa Kekumuhan. Program Aksi Tanpa Kekumuhan
4.	Berani Lancar	Program Kreatif Inovatif Gerbang Layak Bersih dan Lancar - Banggai Tanpa Kekumuhan. - Rintisan penerapan Smart Water Grid Management (SWGGM) atau PDAM pintar - Peningkatan kemantapan jalan Kabupaten
5.	Berani Menyala	Program Kreatif Inovatif Gerbang Digital dan Terang - Bebas Gelap (Akses Rumah Tangga ke listrik PLN dan Lampu Jalan). - Bebas Blank Spot - Kabupaten/Kota pintar dan Desa pintar. PHTC Banggai : Kabupaten/Kota pintar dan Desa pintar.
6.	Berani Makmur	Program Kreatif Inovatif Gerbang Pangan dan Pekarangan - Germas pemanfaatan pekarangan. - Banggai Sejuta Ternak - Pengarusutamaan produk unggulan kelapa - Bantuan Alat Tangkap dan Budidaya ikan - Banggai Smart Farming. - Industrialisasi pangan untuk diversifikasi dan daya saing produk pangan. PHTC Banggai : Germas Pemanfaatan Pekarangan Program Aksi Germas Pemanfaatan Pekarangan



No.	Program BERANI RPJMD Sulteng 2025-2029	NAWAITU
7.	Berani Berkah	Program Kreatif Inovatif 4. Gerbang Desa ▪ Desa Maju dan Mandiri 5. Gerbang Produktif Sejahtera ▪ Perlindungan sosial melalui pemberian modal usaha, perijinan dan pendampingan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin, kepala keluarga Perempuan miskin dan penyandang disabilitas. 6. Gerbang Layak, Bersih dan Lancar ▪ Banggai Tanpa Kekumuhan. ▪ Pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir menuju ekonomi sirkular Program Aksi ▪ Tanpa Miskin Ekstrim ▪ Tanpa Kekumuhan ▪ Tanpa Sampah
8.	Berani Harmoni	Menyesuaikan Kegiatan Keagamaan di Bagian Kesra Setda Banggai
9.	Berani Berintegritas	Program Kreatif Inovatif Gerbang Amanah ▪ Banggai RB dan SAKIP A. ▪ Digitalisasi pelayanan publik ▪ Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). ▪ Penguatan kembali Laboratorium Inovasi untuk mewujudkan Banggai Inovatif. ▪ Kolaborasi pelaku Pembangunan dengan pendekatan PENTAHELIX. ▪ Perencanaan dan Penganggaran untuk APBD Sehat. ▪ Penerapan System merit dan manajemen talenta. ▪ Peningkatan Fiskal Daerah. Program Aksi Tanpa Pungutan



3.2.2.5 Program-Program Prioritas Daerah

Program-Program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 di rumuskan sebagaimana tabel 3.25 berikut :





Tabel 3.25
Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
1. SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	1.1 Peningkatan Kualitas dan daya Saing SDM Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera	1.1.1 Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup (UHH)		
				2. Privalensi Stunting (SSGI)		
				1. Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masarakat	Dinas Kesehatan
				2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita		
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan dan Makanan Minuman	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	
			Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masarakat Di Rumah Sakit	Angka Kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masarakat	RSUD
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		1.1.2 Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata		1. Hasil Pembelajaran Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi Membaca - Numerasi 2. Harapan Lama Sekolah 3. Rata – Rata Lama Sekolah		
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah (APS) Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus (APS)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan	Program Pengelolaan Kurikulum	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
				Kurikulum Muatan Lokal		
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Di Perbarui	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
			Terlestarikanya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	
		1.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui		1. Tingkat Kemiskinan 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
		Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatnya pemberdayaan sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial 2. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA 3. Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
				pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar		
				4. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial		
				5. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	1. Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	
				2. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani		



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 6. Indeks Kesejahateraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
				Penyangdang Disabilitas		
				7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia		
				8. Indeks Peranan Sosial		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
				2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi		
				3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan		
				4. Pendataan Data Fakir Miskin Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar		
				5. Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi		
				6. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial		



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
				yang Tergraduasi dari Kemiskinan		
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Program Penanganan Bencana	
				2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya		
				3. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial		
				4. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana		



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kabupaten/ Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalarn Negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Program Hubungan Industrial	
			Meningkatnya pelaksanaan transmigras	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	
			Meningkatnya kualitas pembangunan	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			kawasan transmigrasi			
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	
		1.1.4 Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Gender yang setara		1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga) 2. Indeks Ketimpangan Gender 3. Indeks Perlindungan Anak		
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (total Fertility Rate/TFR) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Pengendalian Penduduk	DP2KBP3A
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Pangan	Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
			Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan Pug dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
			Menurunnya kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif.	Program Perlindungan Perempuan	
			Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak			
			Meningkatnya pemanfaatan data Gender dan Anak	Tingkat pemanfaatan data Gender dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
			Meningkatnya pencegahan dan Penanganan tindak kekerasan eksploitasi ,penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak.	1. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Program Perlindungan Khusus Anak	
		1.1.5 Terwujudnya Kebudayaan Daerah yang Maju dan Masyarakat yang		1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
		Harmonis dan Toleran		3. Indeks Ketentraman dan Ketertiban umum		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan (urusan Kebudayaan)
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Pembinaan Sejarah	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Meningkatnya tata Kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum	Pengelolaan Permuseum	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			dan karakter kebangsaan			
			Meningkatkan etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang Aktif	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang di selesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
					Penanganan Konflik Sosial	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamomg Praja
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan Perlindungan Masyarakat		
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		
		1.1.6 Meningkatkan daya saing Pemuda dan prestasi olah raga		1. Indeks Pembangunan Pemuda		
				2. Indeks Pembangunan Olah Raga		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda Olahraga



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
Misi 2 : Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan	2.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah	2.1.1 Terwujudnya Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang inklusif secara berkelanjutan.	Meningkatnya Pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	
			Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
				Pendapatan Perkapita Pertumbuhan Ekonomi		
				1. Indeks Gini		
				2. Tingkat Inflasi		
				3. Pertumbuhan Ekonomi		
				4. Indeks Inklusi Keuangan		
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Promosi Penanaman Modal	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			pemasaran pariwisata			
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan UKM
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan	Persentase Koperasi Aktif	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
			Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Pertumbuhan Wirausaha	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Pengembangan UMKM	
			Meningkatnya Legalitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Penguatan Badan Hukum Koperasi	
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang	Pengembangan Ekspor	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negri	
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri	
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Berusaha	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Pengendalian Izin Usaha Industri	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
		2.1.2 Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Menuju Banggai Swasembada Pangan		1. Privalensi Ketidacukupan konsumsi Pangan		
				2. Indeks Ketahanan Pangan		
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Penyediaan dan Pengembangan Saran Pertania	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
				2. Peningkatan Produksi Holtikultura		
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Persentase Penanganan Bencanan Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian		
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Perizinan Usaha Pertanian	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan 2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Penyuluh Pertanian	
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Presentse Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian		
			Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Ditertibkan	Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	
				2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Kelautan
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati	Luasan Kawasan Konservasi	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian	Dinas Ketahanan Pangan
			Meningkatnya Disversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan	
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Pengawasan Keamanan Pangan	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
Misi 3 : Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan.	3.1 Peningkatan Penyediaan dan Pemenuhan Sarana Prasarana Dasar, Infrastuktur Wilayah, TIK dan Konektivitas yang Berkualitas dan Merata	3.1.1 Tersedianya dan Terpenuhiya Sarana dan Prasarana Dasar Infrastuktur Wilayah, TIK dan Konektifitas yang Berkualitas dan Merata.		Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur		
				1. Persentase pemenuhan akses layanan dasar (Air Bersih, Sanitasi Aman serta Hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan)		
				2. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten		
				3. Rasio Konektivitas		
				4. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		
			Terpenuhiya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
				2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Di Bawah 10 Ha	Persentase Kawasan Permukiman di luar Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha yang dilakukan pencegahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Meningkatnya Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Kemampuan Menengah			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Program Pengembangan Permukiman	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
				2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob		
				3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Penyelenggaraan Jalan	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Pengembangan Jasa Konstruksi	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas laut	Pengelolaan Pelayaran	
			Meningkatnya Pengendalian	Persentase Pengendalian KKOP	Pengelolaan Penerbangan	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Kawasan Keselamatan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)			
			Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	CaKupan Perlintasan Kereta Api yang ditangani	Pengelolaan Perkeretaapian	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Pengelolaan Aplikasi Informatika	
	3.2 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta kelestarian			Indeks Resiko Bencana (IRB)		
		3.2.1 Meningkatkan Ketahanan Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi	Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
	Lingkungan Hidup	dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	dan Edukasi Rawan Bencana		
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana		
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
		3.2.2 Terwujudnya Tata Ruang, lingkungan hidup yang berkualitas, lestari dan berkelanjutan		1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
				2. Persentasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		
				3. Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Ruang		



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Indeks Kualitas Udara		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
			Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan Yang diterbitkan	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	
			Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Mha Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
					Lingkunganhidup Untuk Masyarakat	
			Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
Misi 4 : Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	4.1 Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan			1. Realisasi Pemekaran Wilayah		
				2. Indeks Desa Membangun		
				3. Indeks Kota Layah Huni		
		4.1.1 Terwujudnya pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan pembentukan DOB Baru		Realisasi Pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan DOB sesuai design besar pemekaran di Kabupaten Banggai		
Meningkatnya kualitas kebijakan	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah			



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			pemerintahan dan otonomi daerah	2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan		
			Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan Pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervise terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah		
		4.1.2 Meningkatkan Kemnadirian Desa		Indeks Desa membangun (IDM)/Indeks Desa		
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Peningkatan Kerja Sama Desa	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya 2. Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Administrasi Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya kapasitas	1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Lembaga Kemsyarakatan Desa (LKD). 2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
		4.1.3 terwujudnya Kota Luwuk sebagai Kota Layak Huni		Indeks Kota Layak Huni untuk Kota Luwuk		
			Meningkatnya layanan persampahan regional	1. Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional 2. Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layanan dan aman)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUPR
			Terpenuhnya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkimtan



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			relokasi akibat program pemerintah	2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
			Meningkatnya tata Kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Pengelolaan Persampahan	DLH
Misi 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif	5.1 Penguatan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif			Indeks Reformasi Birokrasi		
		5.1.1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah		1. Indeks Pelayanan Publik		
				2. Indeks Inovasi Daerah		
			Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan catatan sipil
				2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Ditertibkan bagi yang melaporkan	Pencatatan Sipil	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
				2. Persentase Akta Kelahiran yang Ditertibkan bagi yang melaporkan		
				3. Persentase Akta Perkawinan yang Ditertibkan bagi yang melaporkan		
				4. Persentase Akta Perceraian yang Ditertibkan bagi yang melaporkan		
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Pengelolaan Profil Kependudukan	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Riset dan Inovasi Daerah	Badan Riset Inovasi Daerah
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam		



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah		
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah		
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervise terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah		
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
			Meningkatnya ketersediaan Lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Dinas Perkimtan
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangu nan	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			untuk pembangu nan			
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanan Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	
			Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanan Ulayat yang ditetapkan	Penetapan Tanah Ulayat	
			Meningkatnya pengelolaan tanah koson	persentase Tanah Kosong yaag dikelola	Pengelolaan Tanah Kosong	
			-	-	Pengelolaan Izin Membuka Tanah	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Penatagunaan Tanah	
			Meningkatnya kejelasan hak-hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat miskin	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya kejelasan hak milik atas tanah	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	Survei, Pengukuran dan Pemetaan	
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM bidang pertanahan	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang ditingkatkan Kompetensinya	Pengembangan dan Pembinaan Sdm dan Kelembagaan Pertanahan	
			Meningkatnya tata kelola pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau	Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Tertata	Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau	
			Meningkatnya tata kelola sistem informasi manajemen Pertanahan	Persentase Informasi Pertanahan yang Dimanfaatkan	Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	
			Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Cakupan Kegiatan yang Dilakukan Pemantauan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
		5.1.2 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel		1. Nilai SAKIP		
				2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		
				3. Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD MCPS)		
				4. Indeks SPBE/Indeks PEMDI		
				5. Indeks Kebijakan Publik		
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Perizinan Penggunaan Arsip	
			Meningkatnya kualitas	1. Ketepatan Penetapan Perda APBN Tahun N	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
						Sekretariat DPRD



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N		
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyempingan, yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
			Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi	1. Manuritas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
				2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
				3. Indeks Reformasi Hukum		
				4. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
			Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan di Wilayah Kecamatan	Presentase Peningkatan Lembaga Masyrakat Desa/ Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Musrenbang Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
			Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Kasus Gangguan Trantibum dan Pelanggaran Perda/ Perkada di Wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Cakupan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Terselenggara	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Penugasan Kepala Daerah			
			Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Desa Berkinerja Baik dan Akuntabel	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD 2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2. Persentase Penurunan SILPA		
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu		



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan		
			Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
				2. Persentase Keselarasan RPJMD Dengan Renstra PD		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dsengan Renja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Bidang Perekonomian Dan SDA		
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan sandardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DKISP
			Meningkatnya Kearifan Siber	Tingkat Keselapan Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	DKISP



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah		
		5.1.3 Meningkatnya Manajemen dan Tata Kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Prinsip Meritokrasi		Indeks Sistem Merit		
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya pengembangan kopetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kopetensinya		
			Meningkatnya tata Kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kopetensinya		
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	Pengembangan sumber daya manusia	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kopetensi dasar, manajerial dan fungsional		
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan,	Persentase realisasi pendidikan dan		



Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			perancangan, pengembangan dan evaluasi	pelatihan yang dilaksanakan		
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
				2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan		



BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB-IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka menengah daerah, serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, yang berlandaskan pada NAWAITU Bupati dan Wakil Bupati Banggai periode 2025 – 2030 yaitu 9 Program Kreatif dan Inovatif, 9 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan 9 Program Aksi.

Program Perangkat Daerah yang di susun di sertai dengan kerangka/alokasi pendanaan indikatif yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memastikan bahwa alokasi tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip penganggaran harus didasarkan pada transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pendekatan yang digunakan berfokus pada *money follow program* dan *program follow result*, di mana anggaran difokuskan pada program atau kegiatan yang langsung terkait dengan prioritas pembangunan daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan sesuai dengan tugas dan fungsi utama perangkat daerah.

Perumusan program pembangunan yang mencakup kerangka pendanaan dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah serta memenuhi layanan perangkat daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah. Program pembangunan yang sudah mencantumkan kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam



menyusun Renstra PD, termasuk merincinya ke dalam kegiatan atau sub-kegiatan.

Program Perangkat Daerah pada RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 memuat rencana program tahun 2025 hingga tahun 2030. Program perangkat daerah tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah dan untuk memastikan kesinambungan visi, misi, dan arah pembangunan serta pencapaian target Indikator Utama Pembangunan jangka Panjang daerah sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025 – 2045. Pendekatan ini sekaligus mencegah terjadinya diskontinuitas atau pemutusan arah pembangunan karena adanya perubahan kepemimpinan. Oleh karena itu, program tahun 2030 dalam dokumen RPJMD 2025–2029 dapat dipandang sebagai "jembatan strategis" yang menyatukan dua periode pemerintahan daerah, memastikan kesinambungan visi pembangunan, serta memperkuat legitimasi arah pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Banggai.

Tahun 2030 merupakan tahun transisi, oleh sebab itu Program Pembangunan Daerah tahun 2030 akan menjadi dasar dalam penyusunan RPKD Tahun 2030 dan akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah Periode 2030-2034. Karenanya, dalam kerangka pembangunan daerah yang berkesinambungan, Program Perangkat Daerah Tahun 2030 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025–2029 memegang peranan strategis sebagai fondasi awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Tahun 2030.

Adapun program perangkat daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 – 2030 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut :





Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					712.382.086.315,000		874.130.958.389,000		908.162.684.978,000		1.001.294.847.359,000		1.091.628.767.488,000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					487.382.086.315,000		626.630.958.389,000		635.912.684.978,000		701.819.847.359,000		762.206.267.488,000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					487.382.086.315,000		626.630.958.389,000		635.912.684.978,000		701.819.847.359,000		762.206.267.488,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					224.000.000.000,000		246.400.000.000,000		271.040.000.000,000		298.144.000.000,000		327.958.400.000,000	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase)	-	-	-	224.000.000.000,000	-	246.400.000.000,000	-	271.040.000.000,000	-	298.144.000.000,000	-	327.958.400.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	-	-	-		-		-		-		-		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					337.000.000,000		370.700.000,000		407.770.000,000		448.547.000,000		493.401.700,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	-	-	-	337.000.000,000	-	370.700.000,000	-	407.770.000,000	-	448.547.000,000	-	493.401.700,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					193.000.000,000		212.300.000,000		233.530.000,000		256.883.000,000		282.571.300,000	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	-	-	-	193.000.000,000	-	212.300.000,000	-	233.530.000,000	-	256.883.000,000	-	282.571.300,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	-	-	-		-		-		-		-		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					124.000.000,000		136.400.000,000		150.040.000,000		165.044.000,000		181.548.400,000	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	-	-	-	124.000.000,000	-	136.400.000,000	-	150.040.000,000	-	165.044.000,000	-	181.548.400,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					346.000.000,000		380.600.000,000		418.660.000,000		460.526.000,000		506.578.600,000	
Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	-	100	100	346.000.000,000	100	380.600.000,000	100	418.660.000,000	100	460.526.000,000	100	506.578.600,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					618.567.590.644,000		776.402.769.575,000		780.306.505.864,000		845.181.764.292,000		910.093.572.905,000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					447.314.963.957,000		496.643.772.378,000		530.460.415.619,000		573.367.302.802,000		621.502.992.956,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					447.314.963.957,000		496.643.772.378,000		530.460.415.619,000		573.367.302.802,000		621.502.992.956,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					152.633.705.349,000		197.166.956.527,000		176.304.467.058,000		189.528.089.654,000		203.952.009.697,000	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	-	140	130	152.633.705.349,000	120	197.166.956.527,000	110	176.304.467.058,000	100	189.528.089.654,000	90	203.952.009.697,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	-	24,1	20,1		18,1		16,3		14,2		14,0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					6.116.799.117,000		27.432.221.428,000		24.405.569.721,000		27.309.655.470,000		28.081.808.094,000	
Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	-	90	92	6.116.799.117,000	95	27.432.221.428,000	95	24.405.569.721,000	95	27.309.655.470,000	100	28.081.808.094,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINI IMAN					6.368.655.604,000		27.709.713.564,000		24.711.211.070,000		27.646.210.954,000		28.452.319.127,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	-	95	96	6.368.655.604,000	97	27.709.713.564,000	98	24.711.211.070,000	99	27.646.210.954,000	100	28.452.319.127,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					6.133.466.617,000		27.450.105.678,000		24.424.842.396,000		27.330.505.412,000		28.104.443.031,000	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-	90	92	6.133.466.617,000	93	27.450.105.678,000	94	24.424.842.396,000	95	27.330.505.412,000	95	28.104.443.031,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					261.049.279.646,000		419.862.636.008,000		399.163.991.172,000		431.942.662.134,000		455.906.061.802,000	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.154.048.048,000		50.167.694.983,000		52.594.592.729,000		58.064.609.803,000		62.980.564.905,000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					38.154.048.048,000		50.167.694.983,000		52.594.592.729,000		58.064.609.803,000		62.980.564.905,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					29.976.578.897,000		51.249.062.662,000		50.285.186.229,000		47.274.289.765,000		53.616.927.342,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	-	62,73	62,73	29.976.578.897,000	62,73	51.249.062.662,000	62,73	50.285.186.229,000	62,74	47.274.289.765,000	62,74	53.616.927.342,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	-	10,52	13,30		16,86		17,62		18,26		24,38		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	-	29,49	29,71		30,40		31,08		31,76		32,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					26.468.618.793,000		37.523.647.708,000		33.421.835.035,000		32.501.001.251,000		35.068.789.808,000	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	-	-	-	26.468.618.793,000	-	37.523.647.708,000	-	33.421.835.035,000	-	32.501.001.251,000	-	35.068.789.808,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					5.751.368.097,000		14.350.811.012,000		12.994.584.339,000		14.303.164.555,000		14.641.539.112,000	
Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	-	17,00	19,00	5.751.368.097,000	21,00	14.350.811.012,000	23,00	12.994.584.339,000	25,00	14.303.164.555,000	29,00	14.641.539.112,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					13.762.007.847,000		23.336.450.762,000		23.080.224.089,000		25.598.804.305,000		27.268.178.862,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	-	-	-	13.762.007.847,000	-	23.336.450.762,000	-	23.080.224.089,000	-	25.598.804.305,000	-	27.268.178.862,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					19.913.890.920,000		37.593.509.817,000		34.517.737.381,000		38.279.994.719,000		40.552.911.960,000	
Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	-	12,18	12,35	19.913.890.920,000	12,53	37.593.509.817,000	12,71	34.517.737.381,000	12,88	38.279.994.719,000	13,06	40.552.911.960,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	-	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					68.216.740.864,000		81.215.302.120,000		87.642.382.262,000		97.146.890.694,000		101.155.217.913,000	
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	-	66,00	66,50	68.216.740.864,000	67,00	81.215.302.120,000	67,50	87.642.382.262,000	68,00	97.146.890.694,000	68,50	101.155.217.913,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					4.762.007.847,000		14.336.450.762,000		13.280.224.089,000		14.788.804.305,000		15.427.178.862,000	
Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	-	15,47	15,65	4.762.007.847,000	16,28	14.336.450.762,000	16,91	13.280.224.089,000	17,53	14.788.804.305,000	18,16	15.427.178.862,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					40.030.965.294,000		78.087.798.004,000		61.458.506.219,000		70.934.922.842,000		70.947.487.865,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	-	40,99	48,99	40.030.965.294,000	58,56	78.087.798.004,000	69,99	61.458.506.219,000	83,66	70.934.922.842,000	100	70.947.487.865,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					4.976.045.192,000		13.765.457.416,000		12.478.494.711,000		13.986.375.590,000		14.440.086.311,000	
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	-	-	-	4.976.045.192,000	-	13.765.457.416,000	-	12.478.494.711,000	-	13.986.375.590,000	-	14.440.086.311,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					9.037.007.847,000		18.236.450.762,000		17.410.224.089,000		19.063.804.305,000		19.807.178.862,000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang					9.037.007.847,000		18.236.450.762,000		17.410.224.089,000		19.063.804.305,000		19.807.178.862,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					24.438.999.999,880		29.212.739.371,630		32.193.174.979,790		35.053.914.587,540		38.275.310.466,220	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.293.999.999,880		13.193.399.999,700		14.512.739.999,790		16.144.717.518,170		17.759.188.170,950	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					11.293.999.999,880		13.193.399.999,700		14.512.739.999,790		16.144.717.518,170		17.759.188.170,950	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					584.000.000,000		1.995.100.000,000		2.194.610.000,000		2.414.071.000,000		2.655.478.100,000	
Meningkatnya Pelaksanaan Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	-	100	100	584.000.000,000	100	1.995.100.000,000	100	2.194.610.000,000	100	2.414.071.000,000	100	2.655.478.100,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	-	-	-			-		-		-		-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					3.800.000.000,000		4.460.500.000,000		5.042.764.980,000		4.767.205.000,000		5.121.925.500,000	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	-	62,43	69,95	3.800.000.000,000	77,47	4.460.500.000,000	84,99	5.042.764.980,000	92,51	4.767.205.000,000	100	5.121.925.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.145.000.000,000		1.182.000.000,000		1.227.700.000,000		1.647.470.000,000		1.696.717.000,000	
Meningkatnya persentase kawasan pemukiman kumuh					1.145.000.000,000		1.182.000.000,000		1.227.700.000,000		1.647.470.000,000		1.696.717.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					7.616.000.000,000		8.381.739.371,930		9.215.360.000,000		10.080.451.069,370		11.042.001.695,270	
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	-	0	0	7.616.000.000,000	40	8.381.739.371,930	60	9.215.360.000,000	80	10.080.451.069,370	100	11.042.001.695,270	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilisas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	-	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					35.993.751.000,000		42.522.543.689,000		46.933.923.145,380		51.485.053.805,330		56.507.134.236,830	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.828.000.000,000		31.454.772.159,000		34.689.693.015,000		37.825.571.217,720		41.319.865.083,210	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					17.282.000.000,000		20.095.032.159,000		22.171.259.535,000		24.192.997.158,000		26.433.094.210,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					9.546.000.000,000		11.359.740.000,000		12.518.433.480,000		13.632.574.059,720		14.886.770.873,210	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.350.000.000,000		3.267.047.840,000		3.573.752.624,000		3.843.321.084,000		4.182.565.311,000	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	-	80	82	460.685.096,000	84	589.758.580,000	86	636.234.438,000	88	706.857.882,000	90	765.493.669,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	-	100	100	1.656.659.868,000	100	2.389.168.720,000	100	2.628.085.592,000	100	2.787.394.151,000	100	3.033.095.685,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	-	29,67	29,67	0,000	29,67	0,000	29,67	0,000	29,67	0,000	29,67	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	-	100	100	232.655.036,000	100	288.120.540,000	100	309.432.594,000	100	349.069.051,000	100	383.975.957,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.958.000.000,000		3.210.000.000,000		3.611.500.000,000		4.306.935.000,000		4.988.628.500,000	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	-	90	90	975.000.000,000	90	1.075.000.000,000	90	1.206.500.000,000	90	1.869.135.000,000	90	2.259.678.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	-	90	90	618.000.000,000	90	650.000.000,000	90	741.500.000,000	90	768.300.000,000	90	850.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	-	90	90	1.365.000.000,000	90	1.485.000.000,000	90	1.663.500.000,000	90	1.669.500.000,000	90	1.878.950.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					3.857.751.000,000		4.590.723.690,000		5.058.977.506,380		5.509.226.503,610		6.016.075.342,620	
Tingkat Waktu Tanggap (Respond Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	-	42	52	3.712.000.000,000	62	4.417.280.000,000	72	4.867.842.560,000	82	5.301.080.547,000	92	5.788.779.958,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Persentase Pembentukan Relawan Kebakaran di Setiap Kelurahan/Desa Dalam Kabupaten	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	-	30	40	145.751.000,000	50	173.443.690,000	60	191.134.946,380	70	208.145.956,610	80	227.295.384,620	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					65.968.086.318,000		163.075.558.392,000		150.531.744.982,000		167.900.813.361,000		174.895.330.092,000	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.618.618.998,000		70.746.288.609,000		65.304.466.103,000		72.839.605.866,000		75.874.003.566,000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					28.618.618.998,000		70.746.288.609,000		65.304.466.103,000		72.839.605.866,000		75.874.003.566,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					2.865.611.168,000		7.083.897.192,000		6.539.002.019,000		7.293.503.159,000		7.597.340.459,000	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	-	-	52,17	2.865.611.168,000	54,35	7.083.897.192,000	56,81	6.539.002.019,000	58,15	7.293.503.159,000	60,86	7.597.340.459,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	-	33,33	33,33		39,70		41,50		44,30		46,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)	-	-	35		41		43		46		51		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN					134.157.826,000		331.643.126,000		306.133.053,000		341.456.140,000		355.680.733,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KORBAN TINDAK KEKERASAN														
Meningkatnya zayanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	-	-	100	134.157.826,000	100	331.643.126,000	100	306.133.053,000	100	341.456.140,000	100	355.680.733,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					8.487.892.922,000		20.982.386.411,000		19.368.415.914,000		21.603.235.822,000		22.503.196.884,000	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	-	-	65	8.487.892.922,000	65	20.982.386.411,000	65	19.368.415.914,000	65	21.603.235.822,000	65	22.503.196.884,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	-	-	75		75		75		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	-	-	75		75		75		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)													
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					17.947.835.231,000		44.367.714.992,000		40.954.939.075,000		45.680.514.650,000		47.583.502.000,000	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	-	-	3,71	17.947.835.231,000	3,71	44.367.714.992,000	3,71	40.954.939.075,000	3,71	45.680.514.650,000	3,71	47.583.502.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	-	-	73,21		75,15		77,37		79,81		83,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					7.122.438.995,000		17.606.933.610,000		16.252.603.801,000		18.127.906.494,000		18.883.090.121,000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	-	100	100	7.122.438.995,000	100	17.606.933.610,000	100	16.252.603.801,000	100	18.127.906.494,000	100	18.883.090.121,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					791.531.178,000		1.956.694.452,000		1.806.185.017,000		2.014.591.230,000		2.098.516.329,000	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan					791.531.178,000		1.956.694.452,000		1.806.185.017,000		2.014.591.230,000		2.098.516.329,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					15.287.232.112,000		18.317.356.213,280		20.188.795.547,030		21.967.030.900,730		23.973.143.783,590	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.259.000.000,000		7.984.900.000,000		8.783.390.000,000		9.661.729.000,000		10.627.901.900,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					7.259.000.000,000		7.984.900.000,000		8.783.390.000,000		9.661.729.000,000		10.627.901.900,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					70.000.000,000		80.000.000,000		121.000.000,000		133.100.000,000		146.410.000,000	
TERKELOLANYA INFORMASI TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	0	0	0	70.000.000,000	3	80.000.000,000	3	121.000.000,000	3	133.100.000,000	3	146.410.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					480.000.000,000		716.000.000,000		881.000.000,000		1.011.000.000,000		1.121.000.000,000	
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	-	-	-	480.000.000,000	-	716.000.000,000	-	881.000.000,000	-	1.011.000.000,000	-	1.121.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					287.000.000,000		339.000.000,000		386.000.000,000		431.000.000,000		470.000.000,000	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	-	280	294	287.000.000,000	308	339.000.000,000	322	386.000.000,000	336	431.000.000,000	350	470.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					7.191.232.112,000		9.197.456.213,280		10.017.405.547,030		10.730.201.900,730		11.607.831.883,590	
Meningkatnya Pekerja Pada Perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	-	3.441	3.441	7.191.232.112,000	3.441	9.197.456.213,280	3.441	10.017.405.547,030	3.441	10.730.201.900,730	3.441	11.607.831.883,590	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN					12.605.663.000,000		13.866.229.300,000		15.252.852.230,000		16.778.137.453,000		18.455.951.198,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.201.000.000,000		13.421.100.000,000		14.763.210.000,000		16.239.531.000,000		17.863.484.100,000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					12.201.000.000,000		13.421.100.000,000		14.763.210.000,000		16.239.531.000,000		17.863.484.100,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					120.000.000,000		132.000.000,000		145.200.000,000		159.720.000,000		175.692.000,000	
Meningkatnya Kualitas Dan Efektifitas Penyelenggaraan Pug Dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	-	5,00	5,10	120.000.000,000	5,20	132.000.000,000	5,30	145.200.000,000	5,40	159.720.000,000	5,50	175.692.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	-	5,00	5,10		5,20		5,30		5,40		5,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					45.000.000,000		49.500.000,000		54.450.000,000		59.895.000,000		65.884.500,000	
Menurunya kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	-	56,50	56,92	45.000.000,000	57,85	49.500.000,000	58,37	54.450.000,000	59,10	59.895.000,000	59,82	65.884.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					45.000.000,000		49.500.000,000		54.450.000,000		59.895.000,000		65.884.500,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender , Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	-	50	50	45.000.000,000	50	49.500.000,000	50	54.450.000,000	50	59.895.000,000	50	65.884.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					100.000.000,000		110.000.000,000		121.000.000,000		133.100.000,000		146.410.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	-	1	1	100.000.000,000	1	110.000.000,000	1	121.000.000,000	1	133.100.000,000	1	146.410.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					9.663.000,000		10.629.300,000		11.692.230,000		12.861.453,000		14.147.598,000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	-	50	60	9.663.000,000	70	10.629.300,000	80	11.692.230,000	90	12.861.453,000	100	14.147.598,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					85.000.000,000		93.500.000,000		102.850.000,000		113.135.000,000		124.448.500,000	
Meningkatnya pencegahan dan Penanganan tindak kekerasan , eksploitasi ,penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	-	50	50	85.000.000,000	50	93.500.000,000	50	102.850.000,000	50	113.135.000,000	50	124.448.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	-	57,01	58,01		59,01		60,01		61,01		62,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					64.047.086.318,000		163.002.308.392,000		150.505.112.681,000		167.544.571.125,000		174.244.521.839,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.256.147.575,000		41.852.726.769,000		42.046.005.387,000		45.631.034.583,000		48.545.189.706,000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					24.256.147.575,000		41.852.726.769,000		42.046.005.387,000		45.631.034.583,000		48.545.189.706,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					9.476.064.673,000		32.698.910.494,000		37.612.823.333,000		33.223.503.590,000		38.190.554.667,000	
MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	-	20	30	9.476.064.673,000	40	32.698.910.494,000	50	37.612.823.333,000	60	33.223.503.590,000	70	38.190.554.667,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					14.598.750.670,000		40.377.588.063,000		32.878.856.457,000		41.131.816.241,000		45.514.029.821,000	
MENINGKATNYA PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	-	91,24	91,68	14.598.750.670,000	92,12	40.377.588.063,000	92,56	32.878.856.457,000	93	41.131.816.241,000	93,44	45.514.029.821,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					7.658.992.200,000		23.784.138.546,000		20.826.117.505,000		30.900.468.080,000		35.170.608.504,000	
MENINGKATNYA PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	-	3,2	3	7.658.992.200,000	2,97	23.784.138.546,000	2,7	20.826.117.505,000	2,5	30.900.468.080,000	2	35.170.608.504,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					8.057.131.200,000		24.288.944.520,000		17.141.309.999,000		16.657.748.631,000		6.824.139.141,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	-	60	64	8.057.131.200,000	66	24.288.944.520,000	70	17.141.309.999,000	72	16.657.748.631,000	90	6.824.139.141,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					418.845.083,000		368.096.277,000		404.905.905,000		445.396.495,000		489.936.145,000	
2.10.02 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
-					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					98.301.577,000		108.131.735,000		118.944.909,000		130.839.399,000		143.923.339,000	
MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	-	-	-	98.301.577,000	-	108.131.735,000	-	118.944.909,000	-	130.839.399,000	-	143.923.339,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					60.000.000,000		66.000.000,000		72.600.000,000		79.860.000,000		87.846.000,000	
Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan					60.000.000,000		66.000.000,000		72.600.000,000		79.860.000,000		87.846.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ARSENTEE					103.945.566,000		114.340.122,000		125.774.134,000		138.351.548,000		152.186.703,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	-	-	-	103.945.566,000	-	114.340.122,000	-	125.774.134,000	-	138.351.548,000	-	152.186.703,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
MENINGKATNYA TATA KELOLA TANAH ULAYAT	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	-	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					72.385.836,000		79.624.420,000		87.586.862,000		96.345.548,000		105.980.103,000	
MENINGKATNYA PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	-	-	-	72.385.836,000	-	79.624.420,000	-	87.586.862,000	-	96.345.548,000	-	105.980.103,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					84.212.104,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
MENINGKATNYA TERTIB PERTANAHAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	-	-	-	84.212.104,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					30.492.000.000,000		36.285.480.000,000		39.986.598.960,000		43.545.406.267,440		47.551.583.644,040	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.636.174.149,000		11.819.710.849,000		12.021.601.219,000		12.243.680.628,000		12.473.326.990,000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang					10.636.174.149,000		11.819.710.849,000		12.021.601.219,000		12.243.680.628,000		12.473.326.990,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD														
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					299.000.000,000		328.900.000,000		361.790.000,000		397.969.000,000		437.765.900,000	
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KAJIAN LINGKUNGAN UNTUK MEMITIGASI DAMPAK KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	-	20	35	299.000.000,000	45	328.900.000,000	65	361.790.000,000	85	397.969.000,000	100	437.765.900,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					2.536.412.540,000		2.664.999.744,000		2.706.445.668,000		2.752.036.185,000		2.802.185.754,000	
MENURUNNYA PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (Indeks)	-	70,30	70,40	2.536.412.540,000	70,50	2.664.999.744,000	70,60	2.706.445.668,000	70,70	2.752.036.185,000	70,80	2.802.185.754,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	-	93,34	93,44		93,54		93,64		93,74		93,84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					2.950.000.000,000		3.185.000.000,000		3.110.000.000,000		3.135.000.000,000		3.160.000.000,000	
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase RTH (Persentase)	-	0,034	0,034	2.950.000.000,000	0,034	3.185.000.000,000	0,034	3.110.000.000,000	0,034	3.135.000.000,000	0,034	3.160.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					282.000.000,000		310.200.000,000		341.220.000,000		375.342.000,000		412.876.200,000	
MENINGKATNYA PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) LIMBAH	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	-	100	100	282.000.000,000	100	310.200.000,000	100	341.220.000,000	100	375.342.000,000	100	412.876.200,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					288.000.000,000		316.800.000,000		348.480.000,000		383.328.000,000		421.660.800,000	
MENINGKATNYA KEPATUHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	-	55	60	288.000.000,000	65	316.800.000,000	69	348.480.000,000	72	383.328.000,000	75	421.660.800,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					271.000.000,000		298.100.000,000		327.910.000,000		360.701.000,000		396.771.100,000	
MENINGKATNYA KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	-	-	-	271.000.000,000	-	298.100.000,000	-	327.910.000,000	-	360.701.000,000	-	396.771.100,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTI IK MASYARAKAT					110.000.000,000		121.000.000,000		133.100.000,000		146.410.000,000		161.051.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	-	100	100	110.000.000,000	100	121.000.000,000	100	133.100.000,000	100	146.410.000,000	100	161.051.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	
MENINGKATNYA KINERJA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	-	10	15	100.000.000,000	20	100.000.000,000	25	100.000.000,000	30	100.000.000,000	35	100.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					21.000.000,000		23.100.000,000		25.410.000,000		27.951.000,000		30.746.100,000	
MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA/KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	-	100	100	21.000.000,000	100	23.100.000,000	100	25.410.000,000	100	27.951.000,000	100	30.746.100,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					12.998.413.311,000		17.117.669.407,000		20.510.642.073,000		23.622.988.454,440		27.155.199.800,040	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	-	59,90	61,16	12.998.413.311,000	61,98	17.117.669.407,000	62,85	20.510.642.073,000	63,79	23.622.988.454,440	63,38	27.155.199.800,040	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					12.967.000.000,000		15.430.730.000,000		17.004.664.460,000		18.518.079.596,940		20.221.742.919,860	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.954.000.000,000		12.324.210.000,000		13.581.310.460,000		14.790.879.596,940		16.151.640.519,860	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					10.954.000.000,000		12.324.210.000,000		13.581.310.460,000		14.790.879.596,940		16.151.640.519,860	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					1.205.000.000,000		1.355.000.000,000		1.493.210.000,000		1.626.000.000,000		1.775.592.000,000	
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	4,46	6	8	1.205.000.000,000	10	1.355.000.000,000	12	1.493.210.000,000	14	1.626.000.000,000	16	1.775.592.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan kartu identitas anak (%)	42,93	43	44		44		45		46		47		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					270.000.000,000		514.520.000,000		566.996.000,000		617.400.000,000		674.200.800,000	
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	87,29	91	92	270.000.000,000	93	514.520.000,000	94	566.996.000,000	95	617.400.000,000	96	674.200.800,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	89,53	91	92		93		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	90,73	91	92		93		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	90,48	91	92		93		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					390.000.000,000		1.032.000.000,000		1.137.238.000,000		1.237.800.000,000		1.351.677.600,000	
MENINGKATNYA INFORMASI PEMANFAATAN KEPENDUDUKAN	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan (%)	33,33	50	50	390.000.000,000	50	1.032.000.000,000	75	1.137.238.000,000	75	1.237.800.000,000	75	1.351.677.600,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					148.000.000,000		205.000.000,000		225.910.000,000		246.000.000,000		268.632.000,000	
MENINGKATNYA KUALITAS PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	99,60	99,61	99,62	148.000.000,000	99,63	205.000.000,000	99,64	225.910.000,000	99,65	246.000.000,000	99,66	268.632.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					14.399.000.000,000		15.838.900.000,000		17.422.790.000,000		19.165.069.000,000		21.081.575.900,000	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.462.000.000,000		9.308.200.000,000		10.239.020.000,000		11.262.922.000,000		12.389.214.200,000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					8.462.000.000,000		9.308.200.000,000		10.239.020.000,000		11.262.922.000,000		12.389.214.200,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					141.000.000,000		155.100.000,000		170.610.000,000		187.671.000,000		206.438.100,000	
MENINGKATNYA KUALITAS PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	-	17,18	34,36	141.000.000,000	51,55	155.100.000,000	68,73	170.610.000,000	85,91	187.671.000,000	100	206.438.100,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					85.000.000,000		93.500.000,000		102.850.000,000		113.135.000,000		124.448.500,000	
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	-	16,49	33,33	85.000.000,000	49,83	93.500.000,000	66,67	102.850.000,000	83,16	113.135.000,000	100	124.448.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3.886.000.000,000		4.274.600.000,000		4.702.060.000,000		5.172.266.000,000		5.689.492.600,000	
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	-	36,14	49,29	3.886.000.000,000	62,44	4.274.600.000,000	75,58	4.702.060.000,000	88,73	5.172.266.000,000	100	5.689.492.600,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.825.000.000,000		2.007.500.000,000		2.208.250.000,000		2.429.075.000,000		2.671.982.500,000	
MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	-	50,55	61,14	1.825.000.000,000	67,73	2.007.500.000,000	79,38	2.208.250.000,000	90,69	2.429.075.000,000	100	2.671.982.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	-	51,55	60,14		68,73		79,83		89,69		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN					12.701.000.000,000		13.971.100.000,000		15.368.210.000,000		16.905.031.000,000		18.595.534.100,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KELUARGA BERENCANA														
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					359.000.000,000		394.900.000,000		434.390.000,000		477.829.000,000		525.611.900,000	
TERKENDALINYA PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK					359.000.000,000		394.900.000,000		434.390.000,000		477.829.000,000		525.611.900,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					9.619.000.000,000		10.580.900.000,000		11.638.990.000,000		12.802.889.000,000		14.083.177.900,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)					9.619.000.000,000		10.580.900.000,000		11.638.990.000,000		12.802.889.000,000		14.083.177.900,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					2.723.000.000,000		2.995.300.000,000		3.294.830.000,000		3.624.313.000,000		3.986.744.300,000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	-	17,6	23,7	2.723.000.000,000	29,8	2.995.300.000,000	35,9	3.294.830.000,000	42,0	3.624.313.000,000	46,1	3.986.744.300,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					32.193.000.000,000		35.412.300.000,000		38.953.530.000,000		42.848.883.000,000		47.133.771.300,000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.026.000.000,000		17.628.600.000,000		19.391.460.000,000		21.330.606.000,000		23.463.666.600,000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegewaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja					16.026.000.000,000		17.628.600.000,000		19.391.460.000,000		21.330.606.000,000		23.463.666.600,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD														
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					14.367.000.000,000		15.803.700.000,000		17.384.070.000,000		19.122.477.000,000		21.034.724.700,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transfortasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	-	65	65	14.367.000.000,000	65	15.803.700.000,000	65	17.384.070.000,000	65	19.122.477.000,000	65	21.034.724.700,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					1.800.000.000,000		1.980.000.000,000		2.178.000.000,000		2.395.800.000,000		2.635.380.000,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transfortasi Laut	Konektivitas Laut (Unit)	-	-	-	1.800.000.000,000	-	1.980.000.000,000	-	2.178.000.000,000	-	2.395.800.000,000	-	2.635.380.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Persentase Pengendalian KKOP (Persentase)	-	100	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					19.063.156.848,000		19.937.450.765,000		20.814.639.290,000		22.423.361.248,000		24.793.073.886,000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.180.021.848,000		9.500.159.015,000		9.855.482.962,000		10.916.247.107,000		12.710.604.035,000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegewalian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja					9.180.021.848,000		9.500.159.015,000		9.855.482.962,000		10.916.247.107,000		12.710.604.035,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD														
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					958.243.500,000		1.066.155.675,000		1.119.463.454,000		1.175.436.625,000		1.234.208.459,000	
MENINGKATNYA JANGKAUAN DAN KUALITAS KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	-	-	68,54	958.243.500,000	78,09	1.066.155.675,000	80,00	1.119.463.454,000	86,09	1.175.436.625,000	90,40	1.234.208.459,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					8.924.891.500,000		9.371.136.075,000		9.839.692.874,000		10.331.677.516,000		10.848.261.392,000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika					8.924.891.500,000		9.371.136.075,000		9.839.692.874,000		10.331.677.516,000		10.848.261.392,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					18.967.000.000,000		22.570.730.000,000		24.872.944.460,000		27.086.636.516,940		29.578.607.076,500	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.497.473.745,000		13.805.227.947,000		16.609.934.059,000		18.364.270.299,940		19.466.240.859,500	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					11.497.473.745,000		13.805.227.947,000		16.609.934.059,000		18.364.270.299,940		19.466.240.859,500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					649.768.137,000		750.768.137,000		759.863.674,000		765.863.674,000		859.863.674,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYAN KUALITAS LAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	-	33,98	34,96	649.768.137,000	35,94	750.768.137,000	36,92	759.863.674,000	37,90	765.863.674,000	38,88	859.863.674,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					737.325.350,000		898.279.084,000		901.006.992,000		905.807.692,000		1.305.807.692,000	
MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	-	50,79	51,70	737.325.350,000	53,65	898.279.084,000	55,60	901.006.992,000	57,56	905.807.692,000	59,51	1.305.807.692,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					588.526.440,000		746.126.000,000		750.738.600,000		764.431.246,000		800.431.246,000	
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF (%)	-	75,14	78,83	588.526.440,000	78,83	746.126.000,000	78,83	750.738.600,000	78,83	764.431.246,000	78,83	800.431.246,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					726.686.800,000		897.355.480,000		905.291.028,000		948.607.519,000		1.158.607.519,000	
MENINGKATKAN KUALITAS SDM PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	-	23,39	36,58	726.686.800,000	48,78	897.355.480,000	60,97	905.291.028,000	73,17	948.607.519,000	85,36	1.158.607.519,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					1.446.000.330,000		1.950.544.834,000		1.372.438.738,000		1.404.617.579,000		1.604.617.579,000	
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	-	81,15	81,60	1.446.000.330,000	82,02	1.950.544.834,000	82,43	1.372.438.738,000	82,81	1.404.617.579,000	82,81	1.604.617.579,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					2.931.219.198,000		3.052.428.518,000		3.093.671.369,000		3.403.038.507,000		3.803.038.507,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA KAPASITAS UMKM YANG TANGGUH DAN MANDIRI	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	-	5,02	5,07	2.931.219.198,000	6,17	3.052.428.518,000	6,17	3.093.671.369,000	7,06	3.403.038.507,000	7,06	3.803.038.507,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	-	2,65	2,76		2,95		3,31		3,47		3,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					390.000.000,000		470.000.000,000		480.000.000,000		530.000.000,000		580.000.000,000	
MENINGKATNYA DAYA SAING UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	-	10	11	390.000.000,000	15	470.000.000,000	15	480.000.000,000	15	530.000.000,000	15	580.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					16.877.000.000,000		20.083.630.000,000		22.132.160.260,000		24.101.922.523,000		26.319.299.395,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.328.000.000,000		15.279.730.000,000		16.937.870.260,000		18.478.203.523,000		20.223.208.495,000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					13.328.000.000,000		15.279.730.000,000		16.937.870.260,000		18.478.203.523,000		20.223.208.495,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					780.000.000,000		1.058.000.000,000		1.143.800.000,000		1.238.180.000,000		1.341.998.000,000	
MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	-	185	93,66	780.000.000,000	129,06	1.058.000.000,000	164,47	1.143.800.000,000	199,87	1.238.180.000,000	235,28	1.341.998.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					763.000.000,000		1.039.300.000,000		1.123.230.000,000		1.215.553.000,000		1.317.108.300,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA JANGKUAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	-	100	100	763.000.000,000	100	1.039.300.000,000	100	1.123.230.000,000	100	1.215.553.000,000	100	1.317.108.300,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					1.015.000.000,000		1.316.500.000,000		1.428.150.000,000		1.550.965.000,000		1.686.061.500,000	
MENINGKATNYA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	-	100	100	1.015.000.000,000	100	1.316.500.000,000	100	1.428.150.000,000	100	1.550.965.000,000	100	1.686.061.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					843.000.000,000		1.127.300.000,000		1.220.030.000,000		1.322.033.000,000		1.434.236.300,000	
TERKENDALINYA PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	-	100	100	843.000.000,000	100	1.127.300.000,000	100	1.220.030.000,000	100	1.322.033.000,000	100	1.434.236.300,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					148.000.000,000		262.800.000,000		279.080.000,000		296.988.000,000		316.686.800,000	
MENINGKATNYA PEMANFAATAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	-	100	100	148.000.000,000	100	262.800.000,000	100	279.080.000,000	100	296.988.000,000	100	316.686.800,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					20.638.000.000,000		22.701.800.000,000		24.971.980.000,000		27.469.178.000,000		30.216.095.800,000	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.149.000.000,000		13.363.900.000,000		14.700.290.000,000		16.170.319.000,000		17.787.350.900,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					12.149.000.000,000		13.363.900.000,000		14.700.290.000,000		16.170.319.000,000		17.787.350.900,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.000.000.000,000		1.100.000.000,000		1.210.000.000,000		1.331.000.000,000		1.464.100.000,000	
MEENINGKATNYA DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	-	1,25	1,76	1.000.000.000,000	1,95	1.100.000.000,000	2,31	1.210.000.000,000	3,27	1.331.000.000,000	3,65	1.464.100.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					6.750.000.000,000		7.425.000.000,000		8.167.500.000,000		8.984.250.000,000		9.882.675.000,000	
MENINGKATNYA PEMBUDAYAAN DAN PRESTASI OLAHRAGA	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	-	10	13	6.750.000.000,000	15	7.425.000.000,000	16	8.167.500.000,000	17	8.984.250.000,000	17	9.882.675.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					739.000.000,000		812.900.000,000		894.190.000,000		983.609.000,000		1.081.969.900,000	
MENINGKATNYA KUALITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	-	30	38	739.000.000,000	42	812.900.000,000	50	894.190.000,000	52	983.609.000,000	55	1.081.969.900,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					303.403.160,000		318.573.318,000		334.501.983,000		351.227.082,000		368.788.435,000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					303.403.160,000		318.573.318,000		334.501.983,000		351.227.082,000		368.788.435,000	
TERCAPAINYA KOLABORASI,INTEGRASI, DAN STANDARNISASI DALAM PENYELENGGARAAN	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	-	2,65	2,70	303.403.160,000	2,80	318.573.318,000	2,90	334.501.983,000	3,00	351.227.082,000	3,50	368.788.435,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)														
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					242.997.500,000		255.147.375,000		267.904.742,000		281.299.980,000		295.364.978,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					242.997.500,000		255.147.375,000		267.904.742,000		281.299.980,000		295.364.978,000	
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI SERTA OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	-	27,43	33,53	242.997.500,000	46,13	255.147.375,000	58,73	267.904.742,000	71,33	281.299.980,000	89,93	295.364.978,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					3.973.000.000,000		4.370.300.000,000		4.807.330.000,000		5.288.063.000,000		5.816.869.300,000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.652.000.000,000		1.817.200.000,000		1.998.920.000,000		2.198.812.000,000		2.418.693.200,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	-	-	-	1.652.000.000,000	-	1.817.200.000,000	-	1.998.920.000,000	-	2.198.812.000,000	-	2.418.693.200,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					384.000.000,000		422.400.000,000		464.640.000,000		511.104.000,000		562.214.400,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	PERSENTASE KESENIAN TRADISIONAL YANG TELAH DIKEMBANGKAN (%)	-	-	-	384.000.000,000	-	422.400.000,000	-	464.640.000,000	-	511.104.000,000	-	562.214.400,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					554.000.000,000		609.400.000,000		670.340.000,000		737.374.000,000		811.111.400,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap	-	-	-	554.000.000,000	-	609.400.000,000	-	670.340.000,000	-	737.374.000,000	-	811.111.400,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)													
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					307.000.000,000		337.700.000,000		371.470.000,000		408.617.000,000		449.478.700,000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	-	62,05	68,25	307.000.000,000	75,08	337.700.000,000	82,58	371.470.000,000	90,84	408.617.000,000	99,93	449.478.700,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	-	-	-		-		-		-		-		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					1.076.000.000,000		1.183.600.000,000		1.301.960.000,000		1.432.156.000,000		1.575.371.600,000	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	-	45	65	1.076.000.000,000	75	1.183.600.000,000	95	1.301.960.000,000	98	1.432.156.000,000	100	1.575.371.600,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4.665.220.849,000		5.124.836.128,000		5.543.430.771,000		6.011.305.401,000		6.529.233.346,000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.105.220.849,000		3.407.336.128,000		3.659.680.771,000		3.915.680.401,000		4.175.204.846,000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					3.105.220.849,000		3.407.336.128,000		3.659.680.771,000		3.915.680.401,000		4.175.204.846,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.320.000.000,000		1.445.500.000,000		1.581.750.000,000		1.760.625.000,000		1.982.028.500,000	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	-	62,05	68,25	1.320.000.000,000	75,08	1.445.500.000,000	82,58	1.581.750.000,000	90,84	1.760.625.000,000	99,93	1.982.028.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					240.000.000,000		272.000.000,000		302.000.000,000		335.000.000,000		372.000.000,000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	-	45	65	240.000.000,000	75	272.000.000,000	95	302.000.000,000	98	335.000.000,000	100	372.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					682.500.000,000		820.000.000,000		891.450.000,000		960.685.005,000		1.038.114.500,000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					425.000.000,000		539.500.000,000		587.950.000,000		629.545.000,000		678.499.500,000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	-	25	35	425.000.000,000	55	539.500.000,000	75	587.950.000,000	85	629.545.000,000	100	678.499.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					197.500.000,000		217.500.000,000		238.500.000,000		261.140.005,000		286.615.000,000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	-	30	40	197.500.000,000	55	217.500.000,000	70	238.500.000,000	85	261.140.005,000	100	286.615.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					60.000.000,000		63.000.000,000		65.000.000,000		70.000.000,000		73.000.000,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	-	20	35	60.000.000,000	50	63.000.000,000	70	65.000.000,000	90	70.000.000,000	100	73.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					22.491.000.000,000		26.764.290.000,000		29.494.247.580,000		32.119.235.614,620		35.074.205.291,170	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.387.000.000,000		13.261.544.444,000		14.667.698.888,000		16.070.425.000,000		17.839.220.477,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					11.387.000.000,000		13.261.544.444,000		14.667.698.888,000		16.070.425.000,000		17.839.220.477,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					5.866.000.000,000		6.872.800.000,000		7.552.380.000,000		8.271.492.615,000		8.679.130.095,000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	27.864	28.421	28.990	5.866.000.000,000	29.569	6.872.800.000,000	30.161	7.552.380.000,000	30.764	8.271.492.615,000	31.379	8.679.130.095,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					4.169.000.000,000		5.050.045.556,000		5.575.278.692,000		5.947.538.999,620		6.629.662.394,170	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	6.578,44	6.572	6.704	4.169.000.000,000	6.838	5.050.045.556,000	6.974	5.575.278.692,000	7.114	5.947.538.999,620	7.256	6.629.662.394,170	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					80.000.000,000		92.000.000,000		102.200.000,000		113.420.000,000		125.566.920,000	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati					80.000.000,000		92.000.000,000		102.200.000,000		113.420.000,000		125.566.920,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					989.000.000,000		1.487.900.000,000		1.596.690.000,000		1.716.359.000,000		1.800.625.405,000	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	81,61	37,81	38,59	989.000.000,000	39,36	1.487.900.000,000	40,14	1.596.690.000,000	40,94	1.716.359.000,000	41,75	1.800.625.405,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					13.843.000.000,000		16.473.170.000,000		18.153.433.340,000		19.769.088.907,260		21.587.845.086,730	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.000.000.000,000		12.900.000.000,000		14.110.000.000,000		15.381.752.567,260		16.822.005.447,730	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					11.000.000.000,000		12.900.000.000,000		14.110.000.000,000		15.381.752.567,260		16.822.005.447,730	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					574.500.000,000		727.450.000,000		880.645.001,000		950.059.501,000		1.026.625.450,000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	-	-	-	574.500.000,000	-	727.450.000,000	-	880.645.001,000	-	950.059.501,000	-	1.026.625.450,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.453.500.000,000		1.798.850.000,000		1.958.735.000,000		2.134.608.500,000		2.328.069.350,000	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	-	23,75	23,75	1.453.500.000,000	23,75	1.798.850.000,000	23,75	1.958.735.000,000	23,75	2.134.608.500,000	23,75	2.328.069.350,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					477.000.000,000		624.700.000,000		727.170.000,000		784.887.000,000		848.375.700,000	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	-	9,1	18,2	477.000.000,000	31,8	624.700.000,000	50	727.170.000,000	72,7	784.887.000,000	100	848.375.700,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					338.000.000,000		422.170.000,000		476.883.339,000		517.781.339,000		562.769.139,000	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi	-	54,4	60	338.000.000,000	67,5	422.170.000,000	76,9	476.883.339,000	87,5	517.781.339,000	100	562.769.139,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)													
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					163.923.000.000,000		195.068.370.000,000		214.965.343.740,000		234.097.259.332,860		255.634.207.191,490	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					54.285.444.853,380		61.911.232.068,040		66.693.151.950,640		71.233.959.351,380		76.597.786.026,590	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					14.731.368.692,000		14.841.881.436,000		14.822.727.554,000		14.747.067.184,460		14.914.099.778,190	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					39.554.076.161,380		47.069.350.632,040		51.870.424.396,640		56.486.892.166,920		61.683.686.248,400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					59.318.300.935,990		70.763.535.352,070		80.417.053.060,520		89.746.167.149,910		100.007.442.761,900	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	-	17,21	3,50	38.800.818.310,990	3,44	46.172.973.790,070	10,12	50.882.617.116,520	20,78	55.411.170.040,910	19,62	60.508.997.683,900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	-	23,39	0,29		0,11		0,02		0,12		0,02		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	-	8,57	8,78	20.517.482.625,000	8,81	24.590.561.562,000	8,83	29.534.435.944,000	8,86	34.334.997.109,000	8,88	39.498.445.078,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					43.104.451.652,420		54.271.698.650,640		58.979.700.176,440		63.459.657.567,030		68.502.897.795,990	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	-	100	100	38.327.193.127,420	100	45.609.359.821,640	100	50.261.514.523,440	100	54.734.789.316,030	100	59.770.389.932,990	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	-	-	-	4.777.258.525,000	-	8.662.338.829,000	-	8.718.185.653,000	-	8.724.868.251,000	-	8.732.507.863,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					3.022.922.408,000		3.325.214.648,000		3.657.736.112,000		4.023.509.720,000		4.425.860.689,000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	-	5,56	5,56	3.022.922.408,000	5,56	3.325.214.648,000	5,56	3.657.736.112,000	5,56	4.023.509.720,000	5,56	4.425.860.689,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					1.725.393.651,100		2.053.218.444,810		2.262.646.726,180		2.464.022.284,810		2.690.712.335,010	
Meningkatnya Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	-	100	100	1.725.393.651,100	100	2.053.218.444,810	100	2.262.646.726,180	100	2.464.022.284,810	100	2.690.712.335,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					756.170.016,280		855.102.801,870		941.229.654,520		1.031.615.570,600		1.131.817.384,000	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	-	100	100	259.064.266,280	100	308.286.476,870	100	339.731.697,520	100	369.967.818,600	100	404.004.857,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	-	100	100	497.105.750,000	100	546.816.325,000	100	601.497.957,000	100	661.647.752,000	100	727.812.527,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.710.316.482,830		1.888.368.034,570		2.013.826.059,700		2.138.327.689,130		2.277.690.199,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	-	-	100	803.454.482,830	100	956.110.834,570	100	1.053.634.139,700	100	1.147.407.578,130	100	1.252.969.075,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	-	-	-	906.862.000,000	-	932.257.200,000	-	960.191.920,000	-	990.920.111,000	-	1.024.721.124,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	-	-	-		-		-		-		-		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN					25.888.000.000,000		30.559.970.000,000		33.271.946.940,000		35.850.615.218,000		39.098.351.818,000	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BIDANG PERDAGANGAN														
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.940.000.000,000		20.831.970.000,000		22.363.946.940,000		23.962.615.218,000		26.130.351.818,000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					17.940.000.000,000		20.831.970.000,000		22.363.946.940,000		23.962.615.218,000		26.130.351.818,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					1.110.000.000,000		1.220.000.000,000		1.330.000.000,000		1.440.000.000,000		1.550.000.000,000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	-	10	12	1.110.000.000,000	14	1.220.000.000,000	16	1.330.000.000,000	18	1.440.000.000,000	20	1.550.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					2.560.000.000,000		3.110.000.000,000		3.460.000.000,000		3.710.000.000,000		3.760.000.000,000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi Barang yang efisien	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	-	5	10	2.560.000.000,000	15	3.110.000.000,000	20	3.460.000.000,000	25	3.710.000.000,000	30	3.760.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					2.228.000.000,000		2.968.000.000,000		3.308.000.000,000		3.548.000.000,000		4.088.000.000,000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang Penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	-	10	15	2.228.000.000,000	20	2.968.000.000,000	25	3.308.000.000,000	30	3.548.000.000,000	35	4.088.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					760.000.000,000		890.000.000,000		1.020.000.000,000		1.150.000.000,000		1.280.000.000,000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	-	3	4	760.000.000,000	5	890.000.000,000	6	1.020.000.000,000	7	1.150.000.000,000	8	1.280.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					940.000.000,000		1.090.000.000,000		1.240.000.000,000		1.390.000.000,000		1.540.000.000,000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	-	4	6	940.000.000,000	8	1.090.000.000,000	10	1.240.000.000,000	12	1.390.000.000,000	14	1.540.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					350.000.000,000		450.000.000,000		550.000.000,000		650.000.000,000		750.000.000,000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	-	2	4	350.000.000,000	6	450.000.000,000	8	550.000.000,000	10	650.000.000,000	12	750.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					2.675.000.000,000		3.430.000.000,000		4.185.000.000,000		4.940.000.000,000		5.445.000.000,000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					2.095.000.000,000		2.730.000.000,000		3.365.000.000,000		4.000.000.000,000		4.435.000.000,000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	-	5	6	2.095.000.000,000	7	2.730.000.000,000	8	3.365.000.000,000	9	4.000.000.000,000	10	4.435.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					125.000.000,000		145.000.000,000		165.000.000,000		185.000.000,000		205.000.000,000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	-	3	4	125.000.000,000	5	145.000.000,000	6	165.000.000,000	7	185.000.000,000	8	205.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					455.000.000,000		555.000.000,000		655.000.000,000		755.000.000,000		805.000.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	-	2	5	455.000.000,000	7	555.000.000,000	9	655.000.000,000	11	755.000.000,000	13	805.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					1.395.000.000,000		1.534.500.000,000		1.687.950.000,000		1.856.745.000,000		2.042.419.500,000	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					140.000.000,000		154.000.000,000		169.400.000,000		186.340.000,000		204.974.000,000	
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	-	36,03	12	140.000.000,000	12	154.000.000,000	14	169.400.000,000	16	186.340.000,000	17	204.974.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					1.150.000.000,000		1.265.000.000,000		1.391.500.000,000		1.530.650.000,000		1.683.715.000,000	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	-	25	30	1.150.000.000,000	34	1.265.000.000,000	36	1.391.500.000,000	38	1.530.650.000,000	40	1.683.715.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					105.000.000,000		115.500.000,000		127.050.000,000		139.755.000,000		153.730.500,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	-	21	32	105.000.000,000	33	115.500.000,000	35	127.050.000,000	37	139.755.000,000	38	153.730.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					192.306.000.000,000		228.844.140.000,000		252.186.242.280,000		274.630.817.843,000		299.896.853.084,000	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					144.805.376.598,000		172.418.347.516,000		188.441.662.565,000		206.575.771.080,000		225.118.266.145,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					144.805.376.598,000		172.418.347.516,000		188.441.662.565,000		206.575.771.080,000		225.118.266.145,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					40.763.378.277,000		48.423.353.746,000		55.229.397.304,000		59.101.747.080,000		65.371.817.893,000	
Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesra yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) (Nilai)	Sedang	Sedang	Sedang	40.763.378.277,000	Sedang	48.423.353.746,000	Sedang	55.229.397.304,000	Tinggi	59.101.747.080,000	Tinggi	65.371.817.893,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					6.737.245.125,000		8.002.438.738,000		8.515.182.411,000		8.953.299.683,000		9.406.769.046,000	
Meningkatnya Sinkronisasi dan Integrasi Perencanaan Perekonomian dan Pembangunan Lintas Perangkat Daerah	Persentase Kebijakan/Agenda Pembangunan Daerah yang Terkoordinasi dan Selaras Antar Perangkat Daerah (%)	100	100	100	6.737.245.125,000	100	8.002.438.738,000	100	8.515.182.411,000	100	8.953.299.683,000	100	9.406.769.046,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					58.817.472.993,020		62.133.451.292,890		64.733.578.107,620		72.514.862.867,740		77.288.517.036,230	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.213.657.098,020		39.168.248.525,480		40.146.704.738,620		46.349.622.357,080		50.382.612.916,000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					38.213.657.098,020		39.168.248.525,480		40.146.704.738,620		46.349.622.357,080		50.382.612.916,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					20.603.815.895,000		22.965.202.767,410		24.586.873.369,000		26.165.240.510,660		26.905.904.120,230	
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	-	100	100	7.060.031.692,500	100	7.236.532.484,840	100	7.417.445.796,930	100	7.602.881.941,850	100	7.792.953.990,400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	-	90	91,82		93,64		95,38		96,43		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	-	90,83	91,67	13.543.784.202,500	92,86	15.728.670.282,570	93,33	17.169.427.572,070	97,50	18.562.358.568,810	100	19.112.950.129,830	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					25.636.000.000,000		30.506.840.000,000		33.618.537.681,000		36.610.587.533,580		39.978.761.586,590	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.389.000.000,000		21.882.910.000,000		24.114.966.820,000		26.261.198.867,020		28.677.229.162,740	
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Dukungan Administrasi, Pengelolaan Keuangan, serta Layanan Umum untuk Mendukung Pelaksanaan Urusan Bappeda	Jumlah Inovasi Bappeda yang Terdukung Evidence (Angka)	2	2	2	18.389.000.000,000	2	21.882.910.000,000	2	24.114.966.820,000	2	26.261.198.867,020	2	28.677.229.162,740	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Jumlah JFP Aktif sesuai Kebutuhan (Angka)	36	53	69		84		100		116		131		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Bappeda (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Tingkat keselarasan Renstra dan Renja Bappeda dengan RPJMD/RKPD (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI					2.928.000.000,000		3.484.320.000,000		3.839.720.641,000		4.181.455.776,970		4.566.149.708,450	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMBANGUNAN DAERAH														
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	-	100	100	2.928.000.000,000	100	3.484.320.000,000	100	3.839.720.641,000	100	4.181.455.776,970	100	4.566.149.708,450	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					4.319.000.000,000		5.139.610.000,000		5.663.850.220,000		6.167.932.889,590		6.735.382.715,400	
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	-	100	100	4.319.000.000,000	100	5.139.610.000,000	100	5.663.850.220,000	100	6.167.932.889,590	100	6.735.382.715,400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					539.432.719.096,000		595.379.178.885,000		656.619.518.008,000		722.414.451.070,000		796.622.403.158,000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					57.460.462.416,000		65.986.572.654,000		72.985.133.095,000		80.348.939.200,000		88.549.126.171,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					30.765.462.416,000		34.370.942.654,000		38.416.312.435,000		42.957.459.721,000		48.057.736.356,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					26.695.000.000,000		31.615.630.000,000		34.568.820.660,000		37.391.479.479,000		40.491.389.815,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					470.751.490.977,000		516.369.763.957,000		569.033.258.410,000		625.832.661.718,000		688.285.502.568,000	
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	-	7,5	7,5	2.459.616.040,000	7,5	1.705.566.460,000	7,5	2.976.135.410,000	7,5	3.273.748.947,000	7,5	3.601.123.845,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
MENINGKATNYA TATA KELOLA ANGGARAN	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	-	34,96	40	465.495.475.822,000	40	511.508.158.468,000	40	562.577.725.602,000	40	618.751.575.635,000	40	680.540.211.463,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	-	30	30		30		30		30		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
MENINGKATNYA TATA KELOLA ANGGARAN					302.000.000,000		412.200.000,000		465.420.000,000		491.962.000,000		502.158.200,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	-	100	100	2.494.399.115,000	100	2.743.839.029,000	100	3.013.977.398,000	100	3.315.375.136,000	100	3.642.009.060,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					4.760.765.703,000		5.236.842.274,000		5.760.526.503,000		6.336.590.152,000		8.605.888.419,000	
MENINGKATNYA TATA KELOLA ASET DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	-	8,6	8,6	4.760.765.703,000	8,6	5.236.842.274,000	8,6	5.760.526.503,000	8,6	6.336.590.152,000	8,6	8.605.888.419,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					6.460.000.000,000		7.786.000.000,000		8.840.600.000,000		9.896.260.000,000		11.181.886.000,000	
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	-	8,58	8,39	6.460.000.000,000	8,30	7.786.000.000,000	8,14	8.840.600.000,000	7,99	9.896.260.000,000	7,87	11.181.886.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					16.739.860.682,000		19.312.817.477,000		21.472.444.860,000		23.549.032.453,000		25.886.663.438,000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.407.056.957,000		12.548.733.379,000		14.013.952.354,000		15.326.690.695,000		16.732.025.191,000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					11.407.056.957,000		12.548.733.379,000		14.013.952.354,000		15.326.690.695,000		16.732.025.191,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					5.332.803.725,000		6.764.084.098,000		7.458.492.506,000		8.222.341.758,000		9.154.638.247,000	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	-	100	100	2.285.841.161,000	100	2.824.425.277,000	100	2.998.867.805,000	100	3.190.754.585,000	100	3.585.172.356,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan	-	50	50	1.591.000.000,000	50	2.340.100.000,000	50	2.702.110.000,000	50	3.100.321.000,000	50	3.447.073.100,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kompetensinya (Persentase)													
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	-	100	100	835.547.584,000	100	919.102.343,000	100	1.011.012.576,000	100	1.112.113.834,000	100	1.223.325.218,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	-	100	100	620.414.980,000	100	680.456.478,000	100	746.502.125,000	100	819.152.339,000	100	899.067.573,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.052.422.913,000		1.860.000.000,000		1.860.000.000,000		1.860.000.000,000		1.860.000.000,000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.052.422.913,000		1.860.000.000,000		1.860.000.000,000		1.860.000.000,000		1.860.000.000,000	
Meningkatnya Layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	100	100	100	812.422.913,000	100	1.620.000.000,000	100	1.620.000.000,000	100	1.620.000.000,000	100	1.620.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	60	70	70	240.000.000,000	70	240.000.000,000	70	240.000.000,000	70	240.000.000,000	70	240.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					19.214.000.000,000		22.864.660.000,000		25.196.855.320,000		27.439.375.443,480		29.963.797.984,280	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.021.000.000,000		9.927.360.000,000		10.921.855.320,000		11.835.375.443,480		12.958.767.984,280	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang					9.021.000.000,000		9.927.360.000,000		10.921.855.320,000		11.835.375.443,480		12.958.767.984,280	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD														
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					4.450.000.000,000		6.355.000.000,000		7.627.000.000,000		8.453.000.000,000		9.270.930.000,000	
Meningktanya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	-	100	100	650.000.000,000	100	1.240.000.000,000	100	1.508.000.000,000	100	1.660.000.000,000	100	1.837.630.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	-	100	100	1.600.000.000,000	100	1.860.000.000,000	100	2.320.000.000,000	100	2.573.000.000,000	100	2.830.300.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	-	100	100	1.400.000.000,000	100	1.755.000.000,000	100	2.049.000.000,000	100	2.230.000.000,000	100	2.453.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di	-	100	100	800.000.000,000	100	1.500.000.000,000	100	1.750.000.000,000	100	1.990.000.000,000	100	2.150.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Daerah (Persentase)													
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					5.743.000.000,000		6.582.300.000,000		6.648.000.000,000		7.151.000.000,000		7.734.100.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	-	100	100	4.133.000.000,000	100	4.811.300.000,000	100	4.615.000.000,000	100	4.881.000.000,000	100	5.304.100.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	-	100	100	355.000.000,000	100	390.500.000,000	100	443.000.000,000	100	535.000.000,000	100	572.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	-	100	100	355.000.000,000	100	390.500.000,000	100	443.000.000,000	100	535.000.000,000	100	572.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	-	100	100	900.000.000,000	100	990.000.000,000	100	1.147.000.000,000	100	1.200.000.000,000	100	1.285.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					28.411.000.000,000		31.252.100.000,000		34.377.310.000,000		37.815.041.000,000		41.596.545.100,000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.480.000.000,000		23.628.000.000,000		25.990.800.000,000		28.589.880.000,000		31.448.868.000,000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja					21.480.000.000,000		23.628.000.000,000		25.990.800.000,000		28.589.880.000,000		31.448.868.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD														
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					6.121.000.000,000		6.733.100.000,000		7.406.410.000,000		8.147.051.000,000		8.961.756.100,000	
MENURUNNYA TERJADINYA PENYELEWENGAN ATAU PENYIMPANGAN, BAIK YANG BERSIFAT ANGGARAN ATAUPUN PROSES DAN KEWENANGAN	Tindakanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	-	80,00	80,25	6.121.000.000,000	80,50	6.733.100.000,000	81,00	7.406.410.000,000	81,25	8.147.051.000,000	82,00	8.961.756.100,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					810.000.000,000		891.000.000,000		980.100.000,000		1.078.110.000,000		1.185.921.000,000	
MENINGKATNYA KUALITAS PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	810.000.000,000	Terintegrasi (Integrated)	891.000.000,000	Terintegrasi (Integrated)	980.100.000,000	Terintegrasi (Integrated)	1.078.110.000,000	Dikelola (Managed)	1.185.921.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terkelola dan Terukur		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					218.213.394.256,600		257.410.622.909,780		286.358.617.813,210		317.983.256.429,000		371.817.928.542,250	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					120.978.318.500,600		138.617.582.202,830		152.385.619.609,930		168.542.802.948,990		204.815.943.496,600	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang					120.978.318.500,600		138.617.582.202,830		152.385.619.609,930		168.542.802.948,990		204.815.943.496,600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD														
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					69.100.109.744,000		85.424.626.651,000		95.988.438.405,000		106.684.947.051,000		119.688.165.663,000	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan					69.100.109.744,000		85.424.626.651,000		95.988.438.405,000		106.684.947.051,000		119.688.165.663,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					24.980.696.176,000		29.901.453.826,950		34.025.256.135,280		38.166.636.137,010		42.502.000.695,650	
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Di Wilayah Kecamatan					24.980.696.176,000		29.901.453.826,950		34.025.256.135,280		38.166.636.137,010		42.502.000.695,650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					352.926.200,000		506.138.588,000		572.818.132,000		627.124.266,000		684.029.052,000	
Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan					352.926.200,000		506.138.588,000		572.818.132,000		627.124.266,000		684.029.052,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					2.641.290.636,000		2.727.802.214,000		3.076.802.531,000		3.597.895.026,000		3.752.803.835,000	
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					2.641.290.636,000		2.727.802.214,000		3.076.802.531,000		3.597.895.026,000		3.752.803.835,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					160.053.000,000		233.019.427,000		309.683.000,000		363.851.000,000		374.985.800,000	
Meningkatnya Kinerja Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan Dan Pengawasan					160.053.000,000		233.019.427,000		309.683.000,000		363.851.000,000		374.985.800,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					16.708.526.922,000		18.468.300.500,000		20.215.470.000,000		22.237.017.000,000		24.460.718.700,000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.200.000.000,000		9.020.000.000,000		9.922.000.000,000		10.914.200.000,000		12.005.620.000,000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD					8.200.000.000,000		9.020.000.000,000		9.922.000.000,000		10.914.200.000,000		12.005.620.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.901.526.922,000		2.180.600.500,000		2.299.000.000,000		2.528.900.000,000		2.781.790.000,000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	-	15	25	1.901.526.922,000	40	2.180.600.500,000	55	2.299.000.000,000	62	2.528.900.000,000	70	2.781.790.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					3.400.000.000,000		3.740.000.000,000		4.114.000.000,000		4.525.400.000,000		4.977.940.000,000	
Meningkatkan etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	-	10	20	3.400.000.000,000	35	3.740.000.000,000	45	4.114.000.000,000	50	4.525.400.000,000	65	4.977.940.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					660.000.000,000		726.000.000,000		798.600.000,000		878.460.000,000		966.306.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	-	52	52	660.000.000,000	52	726.000.000,000	52	798.600.000,000	52	878.460.000,000	52	966.306.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					707.000.000,000		777.700.000,000		855.470.000,000		941.017.000,000		1.035.118.700,000	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	-	15	30	707.000.000,000	45	777.700.000,000	65	855.470.000,000	65	941.017.000,000	80	1.035.118.700,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.840.000.000,000		2.024.000.000,000		2.226.400.000,000		2.449.040.000,000		2.693.944.000,000	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	-	100	100	1.840.000.000,000	100	2.024.000.000,000	100	2.226.400.000,000	100	2.449.040.000,000	100	2.693.944.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					3.345.669.295.655,500		4.255.744.584.257,580		4.435.412.322.080,030		4.860.237.724.845,460		5.292.263.602.052,780	



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan.

Perumusan indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025 - 2029 mengacu pada indikator tujuan (*impact indicators*) dan indikator sasaran (*outcome indicators*) yang telah ditetapkan. Penyusunan indikator tersebut didasarkan pada hasil analisis keterkaitan dan pengaruh antara satu atau lebih indikator kinerja program pembangunan daerah dengan capaian indikator kinerja daerah secara keseluruhan. Proses ini memastikan bahwa setiap indikator kinerja daerah memiliki keterukuran yang jelas, relevan, dan dapat dievaluasi secara periodik.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana indikator yang di sajikan merupakan indikator yang terseleksi. Sedangkan penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU dan IKD/IKK di susun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, di mana Tahun 2030 merupakan tahun transisi, sehingga pencapaian target IKU dan IKD Tahun 2030 menjadi tanggungjawab kepala daerah periode berikutnya.



Berikut Gambaran target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Banggai Tahun 2025 – 2030.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Indikator yang menunjukkan target keberhasilan pencapaian sasaran strategis RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banggai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 dimaksud sebagaimana tabel 4.2 berikut :





Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN						Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	73,44	73,95	74,51	75,04	75,56	76,09	
2. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,52	72,65	72,78	72,91	73,00	73,12	
3. Prevalensi Stunting (SGGI)	%	24,1	20,1	18,1	16,3	14,2	14,0	
4. Hasil Pembelajaran Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								
a. Literasi Membaca								
▪ SD	Kategori	53,81	56,31	58,81	61,31	63,81	66,31	
▪ SMP	Kategori	64,88	65,98	67,08	68,18	69,28	70,38	
b. Numerasi								
▪ SD	Kategori	48,84	51,74	54,64	57,54	60,44	63,34	
▪ SMP	Kategori	58,66	60,16	61,66	63,16	64,66	66,16	
5. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,43	13,66	13,82	13,98	14,13	14,28	
6. Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,94	9,10	9,25	9,39	9,53	9,67	
7. Tingkat Kemiskinan	%	6,23	5,94	5,61	5,28	4,95	4,65	
8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,07	2,74	2,59	2,43	2,28	2,12	
9. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	Angka	61,40	62,6	63,7	64,9	66,0	67,2	
10. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,444	0,432	0,419	0,397	0,394	0,391	
11. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	59,51	60,47	62,44	64,50	66,37	68,33	
12. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	29,72	32,27	34,82	37,37	39,92	42,47	



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN						Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	80,00	81,40	82,80	84,00	85,40	86,80	
14. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	40	42	44	46	48	50	
15. Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	65	67	69	72	75	78	
16. Indeks Pembangunan Olahraga	Angka	0,400	0,405	0,425	0,450	0,475	0,500	
17. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,14	4,28	4,43	4,60	4,78	4,90	
18. PDRB Perkapita	Juta Rp.	119,11	129,16	140,30	152,71	166,55	178,20	
19. Indeks Gini	Angka	0,300	0,290	0,280	0,270	0,260	0,250	
20. Tingkat Inflasi	%	3,13	3,03	2,94	2,86	2,78	2,65	
21. Indeks Akses Keuangan Daerah	%	3,50	3,53	3,56	3,60	3,63	3,63	
22. Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi Pangan	%	9,09	8,66	8,23	7,80	7,37	6,94	
23. Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,60	85,78	86,05	86,69	87,33	87,74	
24. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks/ predikat	N/A	75,83 (Kurang Baik)	76,61 (Baik)	77,39 (Baik)	78,17 (Baik)	78,95 (Baik)	
25. Persentase pemenuhan akses layanan dasar (Air Bersih, Sanitasi Aman serta Hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan)	%	N/A	89,34	91,50	93,20	95,00	96,70	
26. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	40,99	48,99	58,56	69,99	83,66	100	
27. Rasio Konektivitas	%	65	66	67	68	69	70	



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN						Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
28. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	5,90	6,00	6,10	6,20	6,30	6,40	
29. Indeks Resiko Bencana (IRB)	Angka	147,48	140,43	133,38	126,33	119,28	112,23	
30. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	81,88	82,05	82,73	83,14	83,63	84,02	
31. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,39	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54	
32. Persentasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	609.706,30						
33. Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Ruang	%	81	83	86	89	92	95	
34. Realisasi Pemekaran Wilayah	Angka	15	20	25	30	35	40	
35. Indeks Desa	Angka	0,773	0,795	0,817	0,839	0,861	0,884	
36. Indeks Kota Layak Huni								
37. Realisasi Pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan DOB Baru, sesuai Design besar pemekaran di Kabupaten Banggai	%	15	20	25	30	35	40	
38. Persentasi Desa Mandiri Berdasarkan IDM	%	20,96	24,40	29,55	36,43	45,02	55,33	
39. Persentasi BUMDes Sehat	%	50	56	63	69	75	80	
40. Indeks Kota Layak Huni untuk Kota Luwuk	Indeks							
41. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB	BB	BB	BB	A	A	



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN						Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
42. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	
43. Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	
44. Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	A	A	A	A	
45. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	3,50	3,53	3,56	3,60	3,63	3,64	
46. Indeks SPBE/PEMDI	Indeks	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
47. Indeks Kebijakan Publik	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
48. Indeks Sistem Merit	Indeks/ Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	



4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, di gunakan untuk menilai sejauhmana penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di laksanakan sesuai kewenangan dan perangkat daerah pengampunya. Indikator kinerja daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030 sebagaimana tabel 4.3 berikut :



Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	-	81,88	82,05	82,73	83,14	83,63	84,02	
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	-	147,48	140,43	133,38	126,33	119,28	112,23	
3	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	-	-	-	-	-	-	-	
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	-	39,78	44,03	48,28	52,53	56,77	56,77	
5	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	-	20,88	36,08	43,68	58,28	83,74	100	
6	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	-	-	-	-	-	-	-	
7	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Indeks	-	85,60	85,78	86,05	86,69	87,33	87,74	
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	-	1,01	0,97	0,95	0,91	0,88	0,85	
9	Rasio Penduduk	%	-	103,58	103,41	103,25	103,09	102,93	102,76	
10	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	-	0,39	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	-	0,104	0,180	0,218	0,219	0,418	0,500	
12	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	-	9,09	8,66	8,23	7,80	7,37	6,94	
13	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	-	40,71	41,20	41,68	42,16	42,64	42,64	
14	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	-	39,43	39,82	40,19	40,56	40,91	41,26	
15	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	
16	Persentase RTH	Persentase	-	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	-	2,74	2,59	2,43	2,28	2,12	2,00	
2	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	-	72,36	72,45	72,55	72,64	72,74	72,85	
3	Indeks Keluarga Sehat	Angka	-	23,46	23,65	23,97	24,20	24,60	24,80	
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	-	71,70	78,50	85,00	90,00	99,90	99,90	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-	4,14	4,28	4,43	4,60	4,78	4,90	
6	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	-	8,96	9,10	9,25	9,39	9,53	9,67	
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	-	13,51	13,66	13,82	13,98	14,13	14,28	
8	Angka Literasi/Numerasi	%	-	-	-	-	-	-	-	
9	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	-	64,50	65,50	66,50	67,50	68,50	69,50	
10	Rasio Gini	Indeks	-	0,300	0,290	0,280	0,270	0,260	0,250	
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	-	91,77	91,78	91,79	91,80	91,81	91,82	
12	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,86	73,43	73,95	74,51	75,04	75,56	76,09	
13	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	-	65	67	69	72	75	78	
14	PDRB per kapita	Juta Rupiah	-	119,11	129,16	140,30	152,71	166,55	178,20	
15	Prevalensi Stunting	%	-	10,20	9,80	9,50	9,20	8,50	8,20	
16	Indeks Literasi Digital	Angka	-	-	-	-	-	-	-	
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	-	79,3	82	83	84	85	86	
18	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	-	0,440	0,430	0,420	0,410	0,400	0,390	
19	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	-	77,28	79,26	80,25	82,28	85,30	95,30	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
20	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	-	33,00	33,00	34,00	35,00	36,00	36,50	
21	Tingkat Kemiskinan	%	-	6,27	5,94	5,61	5,28	4,95	4,65	
22	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	-	30	35	41	47	50	53	
23	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	-	60,00	63,00	65,00	68,00	70,00	72,00	
24	IKM Kecamatan	%	88	89	90	91	92	93	94	
25	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,450	0,444	0,432	0,419	0,397	0,394	0,391	
26	Persentase Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
27	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61.4:61.4	62.56:63.71	63.72:64.87	64.88:66.03	66.04:67.1	67.2:68.3	68.4:70	
28	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi SD	%	100	100	100	100	100	100	100	
29	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD	%	0	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
30	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi SMP	%	100	100	100	100	100	100	100	
31	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP	%	0	100	100	100	100	100	100	
32	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
33	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	29,00	29,72	32,27	34,82	37,37	39,92	42,47	
34	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	80	80,00	81,40	82,80	84,00	85,40	86,80	
35	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	





NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
36	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi SMP	%	100	100	100	100	100	100	100	
37	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
38	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
39	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD	%	100	100	100	100	100	100	100	
40	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP	%	100	100	100	100	100	100	100	
41	Prosentase Kesenian Tradisional yang	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	





NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Dilestarikan dan Dikembangkan									
42	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi SD	%	100	100	100	100	100	100	100	
43	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
44	Indeks Pemerataan Guru	Rasio	70	75	80	85	90	95	100	
45	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
46	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
47	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
48	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
49	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	-	24,1	20,1	18,1	16,3	14,2	14,0	
50	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	
51	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	-	140	130	120	110	100	90	
52	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	
53	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	7,10	8,58	8,39	8,30	8,14	7,99	7,87	
54	Cakupan pelayanan Kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	
55	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	80,3	81	82,2	83,7	84,8	85,9	86,6	
56	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	0	0	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
57	Penderita diare yang ditangani Semua Umur	per 100.000 penduduk	45,63	100	100	100	100	100	100	
58	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	
59	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	0	0	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	
60	Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	
61	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		60	65	67	69	72	75	78	
62	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persentase	0	0	75	75	75	75	75	
63	Cakupan pelayanan nifas	%	83	85,28	87,78	90	92	93	95	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
64	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	0	0	100	100	100	100	100	
65	Cakupan pelayanan anak balita	%	75	90,67	92,94	93	93,5	95	98	
66	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0	0	0	0	0	
67	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100	100	100	100	100	100	100	
68	Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
69	Konektivitas Darat	Persentase	65	65	65	65	65	65	65	
70	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persentase	80	85	86	87	88	90	95	
71	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	
72	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	36,67	37,28	47,28	57,28	67,28	77,28	87	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
73	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	80	82	82	83	84	85	86	
74	Cakupan kunjungan bayi	%	89	97,59	98,79	99	100	100	100	
75	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase	0	0	35	41	43	46	51	
76	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	83	85	88	90	93	95	95	
77	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kasus	0,18	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
78	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	3,98	3,5	3,2	2,8	2,5	2,2	2	
79	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	%	85	98,02	99	99	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
80	Persentase lanjut usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	0	0	100	100	100	100	100	
81	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,07	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
82	Konektivitas Laut	Unit	4	4	4	5	5	5	6	
83	Cakupan penjangkauan Kesehatan siswa SD dan setingkat	%	58	75	80	855	90	95	95	
84	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Infrastruktur	Angka	-	-	-	-	-	-	-	
2	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	-	72,78	74,07	75,26	76,31	77,24	78,28	
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	-	-	-	-	-	-	-	
4	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka	-	41,29	42,42	43,55	44,69	45,82	46,96	
5	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	-	-	-	-	-	-	-	
6	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	-	-	-	-	-	-	-	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase	-	85,35	84,52	83,7	85,53	85,36	86,21	
8	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	
9	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	
10	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	-	-	-	-	-	-	-	
11	Angka Ketergantungan	%	-	45,60	45,79	46,08	46,44	46,80	47,08	
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	-	72,05	72,31	72,58	72,84	73,10	73,35	
13	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	-	-	-	-	-	-	-	
14	Persentase Desa Mandiri	%	19,24	20,96	24,4	29,55	36,43	45,02	55,33	
15	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	-	0,45	0,55	0,65	0,75	0,90	0,95	
16	Tingkat Inflasi	%	-	3,13	3,03	2,94	2,86	2,78	2,65	
17	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	-	-	75,83	76,61	77,39	78,17	78,95	
18	Ekspor Barang dan Jasa	Milyar Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	
19	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persentase	84	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
20	Rasio Kewirausahaan	Persentase	0,68	1,25	1,76	1,95	2,31	3,27	3,65	
21	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	91,39	95	95	95	95	95	95	
22	Persentase Desa Mandiri	%	19,24	20,96	24,4	29,55	36,43	45,02	55,33	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Persentase Penegakan Perda	%	-	80	82	84	86	88	90	
2	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	89,53	91	92	93	94	95	96	
3	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	-	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	
4	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	-	89	90	91	92	95	97	
5	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	-	40	42	44	46	48	50	
6	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	-	-	-	-	-	-	-	
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	-	3,20	3,60	3,72	3,85	3,90	4,10	
8	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	4,46	6	8	10	12	14	16	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Indeks Integritas Nasional	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	
10	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	42,93	43	44	45	46	47	48	
11	Indeks Rasa Aman	Angka	-	-	-	-	-	-	-	
12	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	90,73	91	92	93	94	95	96	
13	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	33,33	50	50	50	75	75	75	
14	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	
15	Cakupan pengelolaan profil Kependudukan	%	99,60	99,61	99,62	99,63	99,64	99,65	99,66	
16	Persentase Capaian Aksi HAM	%	-	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	90,48	91	92	93	94	95	96	
18	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	87,29	91	92	93	94	95	96	
19	Persentase masyarakat yang puas terhadap	%	81	86	87	89	90	91	92	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pelayanan pemerintahan di kecamatan									
20	Nilai SAKIP	Predikat	70,01	BB	BB	A	A	A	A	
21	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	80	89	90	91	92	93	94	
22	IKM Kecamatan	%	90,0	91,0	91,1	91,2	91,3	91,4	91,5	
23	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	75,00	75,75	76,50	77,25	78,00	78,75	79,50	
24	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Nilai	76	79	82	85	88	91	94	
25	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Nilai	80	82	83	84	85	86	87	
26	Indeks Partisipasi Olahraga	Persentase	28	30	35	37	41	45	48	
27	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan pemerintahan di kecamatan	%	85	87	89	91	93	95	97	
28	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	81,25	81,75	82,5	82,55	82,75	83	
29	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	89	90	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
30	Persentase bangunan negara berfungsi baik	%	-	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00	68,50	
31	Perentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	34,29	40,99	48,99	58,56	69,99	83,66	100	
32	IKM Kecamatan	%	71,42	80	83	86	89	92	95	
33	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	%	-	71,42	72,45	74,32	75,51	76,61	77,63	
34	IKM Kecamatan	%	73,66	85	87	90	94	96	98	
35	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	%	87,58	40,71	41,20	41,68	42,16	42,64	46,67	
36	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	%	-	100	100	100	100	100	100	
37	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	97,00	97,10	97,20	97,30	97,40	97,50	97,60	
38	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Nilai	0	70	73	76	79	82	85	
39	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman	%	96,16	93,00	93,78	94,56	95,34	96,12	96,90	
40	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	5,63	8,36	8,39	8,42	8,44	8,47	8,53	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
41	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Nilai	52,21	67	70	73	76	79	85	
42	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	%	-	70,51	75,61	81,09	89,96	9,25	100	
43	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	97,82	71,42	75,45	74,32	75,51	76,61	77,63	
44	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	-	100	100	100	100	100	100	
45	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	-	100	100	100	100	100	100	
46	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	-	100	100	100	100	100	100	
47	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	-	20	30	40	50	60	70	
48	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	-	20	35	45	65	85	100	
49	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	-	90	91,82	93,64	95,38	96,43	100	
50	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	-	60	64	66	70	72	90	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
51	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	-	100	100	100	100	100	100	
52	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	-	10	15	20	25	30	35	
53	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	-	91,24	91,68	92,12	92,56	93	93,44	
54	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	
55	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	-	3,2	3	2,97	2,7	2,5	2	
56	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	-	59,90	61,16	61,98	62,85	63,79	63,38	
57	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	-	55	60	65	69	72	75	
58	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	87,29	91	92	93	94	95	96	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
59	Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	
60	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	4,46	9	20	30	40	50	60	
61	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	90,48	91	92	93	94	95	96	
62	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	%	42,93	60	55	60	65	70	75	
63	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
64	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase	85,60	88	89	90	91	92	93	
65	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	4	
66	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Persentase	0	0	0,06	0,43	2,46	7,24	89,81	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
67	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	90,73	91	92	93	94	95	96	
68	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	25	30	38	42	50	52	55	
69	Cakupan puskesmas	%	113,04	113,04	113,04	113,04	113,04	113,04	113,04	
70	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100	
71	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
72	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	33,33	50	50	50	75	75	75	
73	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
74	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persentase	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
75	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
76	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati	%	22,1	90	91	92	93	94	95	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dan sembuh dalam program DOTS									
77	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	89,53	91	92	93	94	95	96	
78	Indeks SPBE	Indeks	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
79	Tindakanlanjutan Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	78,58	80	80,25	80,50	81	81,25	82	
80	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	
81	Cakupan pembantu puskesmas	%	452,17	35,74	35,74	40	42	43	45	
82	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	94,17	90,83	91,67	92,86	93,33	97,50	100	
83	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	0	80	80	80	80	85	86	
84	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persentase	8	10	13	15	16	17	17	
85	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	3	4	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
86	Indeks Sistem Merit	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
87	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase	91,93	95	95	95	95	95	95	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak	Indeks	0,694	0,784	0,782	0,783	0,783	0,784	0,785	
2	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	55,27	62,43	69,95	77,47	84,99	92,51	100	
3	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	76,25	77,49	78,77	80,09	81,44	82,84	84,26	
AB	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	0	80	82	84	86	88	90	
3	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67	
4	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AC	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
AD	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	Persentase	-	1	1	1	1	1	1	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	-	5,00	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50	
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	-	56,50	56,92	57,85	58,37	59,10	59,82	
4	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	-	5,00	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50	
5	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	-	50	50	50	50	50	50	
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	-	50	60	70	80	90	100	
7	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang	Persentase	-	57,01	58,01	59,01	60,01	61,01	62,01	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Mendapatkan Layanan Komprehensif									
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	-	50	50	50	50	50	50	
AE	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Skor pola pangan harapan	Angka	90,8	91,24	91,68	92,12	92,56	93	93,44	
2	Persentase daerah rentan Rawan pangan	%	5,15	3,2	3	2,97	2,7	2,5	2	
3	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	53,2	60	64	66	70	72	90	
4	Persentase jumlah cadangan pangan	%	-	20	30	40	50	60	70	
AF	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	-	93,34	93,44	93,54	93,64	93,74	93,84	
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	-	70,30	70,40	70,50	70,60	70,70	70,80	
AG	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal	Persentase	64,53	65	65,50	66	66,50	67	67,50	
2	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	%	42,93	60	55	60	65	70	75	
3	Persentase penduduk yang memiliki akta	Persentase	60,93	62	63	64	65	66	67	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	perkawinan bagi penduduk yang menikah									
4	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Persentase	84,66	85	90	92,50	95	99	99,50	
5	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	%	33,33	50	50	50	75	75	75	
6	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	Persentase	4,46	9	20	30	40	50	60	
7	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	Persentase	61,69	62	63	64	65	66	67	
AH	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persentase	-	17,18	34,36	51,55	68,73	85,91	100	
2	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	-	50,55	61,14	67,73	79,38	90,69	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	-	51,55	60,14	68,73	79,83	89,69	100	
4	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	-	36,14	49,29	62,44	75,58	88,73	100	
5	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persentase	-	16,49	33,33	49,83	66,67	83,16	100	
6	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persentase	-	100	100	100	100	100	100	
AI	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	-	17,6	23,7	29,8	35,9	42,0	46,1	
AJ	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	0	0	0	0	0	0	0	
2	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	80,96	75,14	78,83	78,83	78,83	78,83	78,83	
3	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	50,00	50,79	51,70	53,65	55,60	57,56	59,51	
4	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	Persentase	0	0	0	0	0	0	0	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase	20	20	20	20	20	20	20	
6	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	33	33,98	34,96	35,94	36,92	37,90	38,88	
7	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persentase	15,84	23,39	36,58	48,78	60,97	73,17	85,36	
8	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	80,96	81,15	81,60	82,02	82,43	82,81	82,81	
9	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	1,62	2,65	2,76	2,95	3,31	3,47	3,65	
AK	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (IUP/SIUP PUSAT PERBELANJAAN DAN IUTM/IUTS/SIUP TOKO SWALAYAN)	%	-	80	81,5	83	84,5	86	87,5	
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	-	80	81,5	83,5	84,5	86	87,5	
3	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	-	80	81,5	83	84,5	86	87,5	
4	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	-	1.700.000.00 0.000	1.870.000.00 0.000	2.057.000.00 0.000	2.262.700.00 0.000	2.488.970.00 0.000	2.737.867.00 0.000	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Kebijakan atau Regulasi daerah yang disederhanakan untuk mempermudah investasi	%	-	80	81,5	83	84,5	86	87,5	
AL	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	81,61	37,81	38,59	39,36	40,14	40,94	41,75	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	6.578,44	6.572	6.704	6.838	6.974	7.114	7.256	
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	27.864	28.421	28.990	29.569	30.161	30.764	31.379	
AM	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	%	32,08	20	25	30	35	40	45	
2	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	0	10	10	10	10	10	10	
3	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	50,6	54,4	60	67,5	76,9	87,9	100	
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	4,5	9,1	18,2	31,8	50	72,7	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
AN	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	23,39	23,39	0,29	0,11	0,02	0,12	0,02	
3	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	17,21	17,21	3,50	3,44	10,12	20,78	19,62	
4	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AO	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Persentase	-	2	4	6	8	10	12	
2	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	-	10	15	20	25	30	35	
3	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	-	5	10	15	20	25	30	
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	-	4	6	8	10	12	14	
5	Nilai Ekspor Barang	Nilai	-	3	4	5	6	7	8	
6	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	-	10	12	14	16	18	20	
AP	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase	-	5	6	7	8	9	10	
2	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	-	2	5	7	9	11	13	
3	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	-	3	4	5	6	7	8	
AQ	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	26,26	26,27	30,00	30,50	30,90	40,50	50,50	
2	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	
3	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase	90	93	94	96	97	99	99,95	
AR	5.01 - PERENCANAAN									
1	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	-	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	-	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	-	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	-	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	-	100	100	100	100	100	100	
AS	5.02 - KEUANGAN									



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	7,10	8,58	8,39	8,30	8,14	7,99	7,87	
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Rancangan Penetapan APBD dan Rancangan Perubahan APBD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Barang Milik Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Serapan Anggaran Sampai Akhir Tahun Anggaran	Persentase	91,17	91,92	92,67	93,62	94,17	94,92	95,67	
7	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kategori	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	
8	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	8	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	
9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	92,22	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	35,04	40	40	40	40	40	40	
11	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	27,54	30	30	30	30	30	30	
12	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	21,55	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
AT	5.03 - KEPEGAWAIAN									
1	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	16,44	16,5	16,8	17	17,2	17,8	18	
2	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	72,15	73	73,5	74	74,5	75	76	
3	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	83	100	100	100	100	100	100	
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	46,09	47	48	50	51	52	53	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	60	50	50	50	50	50	50	
6	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	73	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AU	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persentase	65	70	75	80	85	90	95	
3	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase	60	70	70	70	70	70	70	
4	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Persentase	40	60	60	60	60	60	60	
AV	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	





NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AW	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	%	78,58	80,00	80,25	80,50	81,00	81,25	82,00	
2	Peningkatan Kebabılıtasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	3	3	3	3	3	4	
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3	3	3	3	3	4	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
AX	7.01 - KECAMATAN									
1	IKM Kecamatan	%	85	89	90	91	93	94	95	
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	IKM Kecamatan	%	85	86	87	88	89	90	90	
4	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan pemerintahan di kecamatan	%	84	90	92	93	94	96	98	
5	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Nilai	76	77	78	79	80	81	82	
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	87	88	89	90	91	92	
7	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Nilai	76	77	78	79	80	81	82	
8	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Nilai	76	77	78	79	80	81	82	
9	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Nilai	75	76	77	78	79	80	81	
10	IKM Kecamatan	%	88	89	90	90	90	90	90	
11	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kategori	B	B	A	A	A	A	A	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kategori	B	B	A	A	A	A	A	





NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	85	95	100	100	100	100	
14	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80	70	90	90	90	90	90	
15	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80	80	90	90	90	90	90	
16	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan pemerintahan di kecamatan	%	89	90	91	92	93	94	95	
17	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kategori	B	B	A	A	A	A	A	
18	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80	80	90	90	90	90	90	
19	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kategori	B	B	A	A	A	A	A	
20	Indeks Pelayanan Publik	%	76	85	88	92	93	95	97	
21	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80	80	90	90	90	90	90	
AY	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	0	52	52	52	52	52	52	
2	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	0	15	25	40	55	62	70	
3	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	0	15	30	45	65	65	80	
5	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	0	10	20	35	45	50	65	



BerAKHLAK **#** bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB-V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2025–2029 merupakan pedoman strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan visi Kepala Daerah terpilih, yaitu “**Bergerak Bersama Berkelanjutan Menuju Gerbang Timur Sulawesi Tengah (GERakan BANGgai Terdepan, Inovatif, MajU dan sejahteRa)**” serta diselaraskan dengan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045.

RPJMD ini memuat arah kebijakan pembangunan yang diarahkan pada penguatan ekonomi lokal berbasis pertanian dan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata, serta penguatan tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital. Program dan kegiatan dari seluruh perangkat daerah telah dirancang secara terukur dan terintegrasi untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tersebut. Keberhasilan implementasi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025–2029 sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan program oleh seluruh perangkat daerah, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, sektor swasta, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga akan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan RPJMD berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan semangat kolaborasi dan kerja bersama, Pemerintah Kabupaten Banggai berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Semoga dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 ini menjadi panduan



yang kuat dalam menjawab tantangan pembangunan dan membawa Kabupaten Banggai menuju masa depan yang lebih baik.

RPJMD merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Banggai serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target dalam RPJMD 2025-2029. Dalam rangka implementasi RPJMD Tahun 2025-2029 kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Bupati berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
- b. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahun;
- d. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah;
- e. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD



Kabupaten Banggai 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahun;

- f. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 maka perlu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Banggai.
- g. RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 memungkinkan untuk diubah dengan ketentuan:
 - 1) Berdasarkan hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang pada saat monitoring dan evaluasi dilaksanakan,
 - 2) Hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat dilaksanakan Monitoring dan evaluasi; dan
 - 3) Terjadi perubahan mendasar (bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau terjadi kebijakan nasional).
- h. Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun;
- i. RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Banggai setiap tahun mulai dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2029.
- j. Bila terjadi hal-hal yang berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten Banggai yang diperkirakan akan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banggai dan/atau terjadi



perubahan yang mendasar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sehubungan dengan dilaksanakannya Pemilihan Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2029, maka strategi, arah kebijakan, dan program yang ada dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Banggai untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya;

- k. Bila dalam pelaksanaannya dinilai perlu untuk melakukan perubahan sasaran pada tahun-tahun tertentu tetapi tidak mengubah sasaran akhir RPJMD untuk program yang bersangkutan, maka atas persetujuan Bupati, penetapan perubahan sasaran tersebut dimuat dalam RKPD tahun yang bersangkutan.

Dengan penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029, diharapkan visi **“Bergerak Bersama Berkelanjutan Menuju Gerbang Timur Sulawesi Tengah (GERakan BANGgai Terdepan, Inovatif, MajU dan sejahteRa)”** dapat diwujudkan.